BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI BALI

November 2017

BANK INDONESIA

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

PROVINSI BALI



NOVEMBER 2017

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan

Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular No. 4

Denpasar – Bali, 80234

Tel. (0361) 248982

Fax. (0361) 222988

Pos-el :

t_setiadi@bi.go.id

umran_u@bi.go.id

wilda_tf@bi.go.id

putriana_n@bi.go.id

michael_c.pcpm@bi.go.id

trio_pa@bi.go.id

VISI BANK INDONESIA

"Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar stabil"

MISI BANK INDONESIA

"Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas"

NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

"Kepercayaan dan Integritas - Profesionalisme - Keunggulan - Kepentingan Publik - Koordinasi dan Kerjasama Tim"

VISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

"Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional"

MISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

"Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan"

…Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian yang akurat…

(Salah satu dari lima tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia)


BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA
NUSA PENIDA
KAJIAN EKONOMI
DAN KEUANGAN REGIONAL
PROVINSI BALI
November 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Bali November 2017. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*s internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai informasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Bali.

Bank Indonesia berpandangan bahwa perekonomian daerah khususnya Bali mempunyai posisi dan peran yang strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dalam upaya menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini didasari oleh fakta pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah dan semakin meningkatnya proporsi inflasi daerah dalam menyumbang inflasi nasional. Oleh sebab itu Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah guna mencapai target inflasi nasional.

Salah satu wujud dari kepedulian Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian daerah adalah melakukan berbagai kajian dan diseminasi hasil-hasil kajian kepada *stakeholders*

Salah satunya melalui KEKR yang berisikan kajian dan informasi mengenai perekonomian daerah dan dipahami secara luas oleh seluruh pihak terkait. Selanjutnya, *stakeholders* dapat memanfaatkan informasi dari KEKR ini sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam upaya perbaikan kinerja ekonomi Bali di masa depan. Kami juga berharap akan muncul ide-ide konstruktif yang dapat memberikan nilai tambah serta menjadi stimulus upaya-upaya pengembangan ekonomi daerah melalui kebijakan maupun kajian – kajian lanjutan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam KEKR masih belum sepenuhnya sempurna, sehingga saran, kritik dan dukungan informasi/ data dari Bapak/Ibu sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari kajian tersebut.

Akhir kata, kami berharap semoga KEKR ini bermanfaat bagi para pembaca.

Denpasar, 22 November 2017

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BALI

TTD

Causa Iman Karana
Kepala Perwakilan

Daftar Isi

Kata Pengantar	**5**
Ringkasan Eksekutif	**16**
Tabel Indikator Ekonomi Provinsi Bali	**20**
Bab I Perkembangan Ekonomi Makro Daerah	**25**
1.1. KONDISI UMUM KINERJA EKONOMI BALI TRIWULAN III 2017	27
1.1.1. Kinerja Perekonomian Bali Triwulan III	27
1.1.2. *Tracking* Kinerja Ekonomi Bali Triwulan IV 2017	29
1.2. PDRB SISI PERMINTAAN	30
1.2.1. Konsumsi	31
1.2.2. Investasi	37
1.2.3. Ekspor - Impor	41
1.3. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI TRIWULAN III 2017 SISI PENAWARAN	47
1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49
1.3.2. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	51
1.3.3. Lapangan Usaha Konstruksi	53
1.3.4. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	55
1.3.5. Lapangan Usaha Industri Pengolahan	57
1.3.6. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	59
Bab II Keuangan Pemerintah	**67**
2.1. GAMBARAN UMUM	69
2.2. REALISASI APBD PROVINSI BALI	73
2.2.1. Penyerapan Pendapatan APBD Provinsi Bali	74
2.2.2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali	77
2.3. REALISASI APBD KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI	79
2.3.1. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali	79
2.3.2. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali	81
2.4. REALISASI APBN PROVINSI BALI	84
2.4.1. Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali	84
Bab III Perkembangan Inflasi Daerah	**87**

3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI	89
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI	90
3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa	90
3.2.2. Inflasi Menurut Kota	93
3.3. DISAGREGASI INFLASI	96
a) *Volatile Food*	97
b) *Administered Prices*	97
c) *Core Inflation*	98
3.4. INFLASI PERDESAAN	98
3.5. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI	99
Bab IV Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	**103**
4.1. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA	105
4.2. ASESMEN SEKTOR KORPORASI	114
4.3. ASESMEN INSTITUSI KEUANGAN (PERBANKAN)	119
4.4. AKSES KEUANGAN	121
Bab V Penyelenggaraan Sistem Pembayaraan dan Pengelolaan Uang Rupiah	**129**
5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI BALI	131
5.2. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN	134
Bab VI Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan	**145**
6.1. KETENAGAKERJAAN	147
6.2. KESEJAHTERAAN	153
6.3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	156
Bab VII Prospek Perekonomian Daerah	**161**
7.1. MAKRO EKONOMI REGIONAL	163
7.2. INFLASI BALI TRIWULAN I 2018 DAN TAHUN 2018	167
Daftar Singkatan	169

Daftar Grafik

Grafik 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional Triwulanan	27
Grafik 1. 2 Pertumbuhan Konsumsi Kelompok Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	31
Grafik 1. 3 Pertumbuhan Konsumsi Kelompok Restoran dan Hotel	31
Grafik 1. 4 Pertumbuhan Konsumsi Kelompok Kesehatan dan Pendidikan	32
Grafik 1. 5 Perkembangan Indeks Tendensi Konsumen dan Indeks Pendapatan	32
Grafik 1. 6 Perkembangan Penjualan Kendaraan Baru	32
Grafik 1. 7 Pertumbuhan Penjualan Eceran Kelompok Makanan, Minuman, Tembakau, Suku Cadang Bahan dan Energi	32
Grafik 1. 8 Perkembangan Kredit Konsumsi, KPR dan KKB	33
Grafik 1. 9 Perkembangan Suku Bunga Kredit Konsumsi dan Suku Bunga Kredit Rata-rata Tertimbang	33
Grafik 1. 10 Perkembangan Konsumsi Listrik RT	33
Grafik 1. 11 Perkembangan Hasil Survei Konsumen	33
Grafik 1. 12 Perkembangan Belanja APBD Provinsi Bali	35
Grafik 1. 13 Perkembangan Realisasi Belanja Modal	35
Grafik 1. 14 Perkembangan Penjualan Sepeda Motor	36
Grafik 1. 15 Perkembangan Penjualan Mobil	36
Grafik 1. 16 Perkembangan Realisasi Belanja APBN di Bali	36
Grafik 1. 17 Realisasi Belanja Modal APBD Prov. Bali	38
Grafik 1. 18 Realisasi Belanja Modal APBN	38
Grafik 1. 19 Realisasi Pengadaan Semen di Bali	38
Grafik 1. 20 Perkembangan SK Bunga Kredit Investasi	38
Grafik 1. 21 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN	39
Grafik 1. 22 Perkembangan Realisasi Investasi PMA	40
Grafik 1. 23 *Likert* Investasi, *Liaison*	40
Grafik 1. 24 Perkembangan SBT Investasi SKDU	40
Grafik 1. 25 Perkembangan Nilai Impor *Capital Goods*	40
Grafik 1. 26 Nilai Ekspor (Barang) Luar Negeri Bali	42
Grafik 1. 27 Volume Ekspor (Barang) Luar Negeri Bali	42
Grafik 1. 28 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama	43
Grafik 1. 29 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama	43
Grafik 1. 30 Pangsa Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama	43
Grafik 1. 31 Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Utama	44
Grafik 1. 32 Kunjungan Wisman ke Bali	45
Grafik 1. 33 Jumlah Kedatangan Penumpang ke Bali pada *Gate International* Bandara	45
Grafik 1. 34 *Share* Wisman Berdasarkan Negara Asal	45

Grafik 1. 35 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali	46
Grafik 1. 36 Perkembangan Pangsa Nilai Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC	47
Grafik 1. 37 Perkembangan Kinerja Komoditas Utama Nilai Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC	47
Grafik 1. 38 Perkembangan Volume Kargo International di Bandara I Gusti Ngurah Rai	47
Grafik 1. 39 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan III 2017	48
Grafik 1. 40 Perkembangan Kinerja Dunia Usaha Triwulan IV 2017	48
Grafik 1. 41 Rata-Rata Lama Menginap Hotel Bintang dan Non Bintang	50
Grafik 1. 42 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan	50
Grafik 1. 43 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara	51
Grafik 1. 44 Perkembangan Kedatangan Penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai	51
Grafik 1. 45 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara	52
Grafik 1. 46 Perkembangan arus Penumpang di Pelabuhan Benoa	52
Grafik 1. 47 Perkembangan Keberangkatan Kargo di Bandara Ngurah Rai	52
Grafik 1. 48 Perkembangan Belanja Modal Provinsi Bali	54
Grafik 1. 49 Perkembangan Kredit Pemilikan Rumah	54
Grafik 1. 50 Perkembangan Pengadaan Semen	54
Grafik 1. 51 Prakiraan Perkembangan Produksi Ikan di Bali TW III Tahun 2017	56
Grafik 1. 52 Perkembangan Produksi Padi Triwulan III 2017	56
Grafik 1. 53 Prakiraan Perkembangan Produksi Padi di Bali Tahun 2017	56
Grafik 1. 54 Perkembangan Nilai SBT (Sektor Pertanian)	56
Grafik 1. 55 Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)	58
Grafik 1. 56 Kredit Kategori Industri	58
Grafik 1. 57 Perkembangan Komoditas Utama Ekspor Bali	59
Grafik 1. 58 Perkembangan Total Penjualan	59
Grafik 1. 59 Perkembangan Penjualan Kelompok Komoditas	60
Grafik 1. 60 Perkembangan suku bunga kredit konsumsi	60
Grafik 1. 61 Perkembangan Kredit Konsumsi	60
Grafik 2. 1 Pangsa Realisasi Anggaran Komponen Pendapatan Daerah	75
Grafik 2. 2 Struktur Realisasi PAD	75
Grafik 3. 1 Inflasi Kota di Bali (% yoy)	89
Grafik 3. 2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy)	89
Grafik 3. 3 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali (%, yoy)	91
Grafik 3. 4 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras (Rp/kg) di Provinsi Bali	91
Grafik 3. 5 Perkembangan Harga Bawang Merah (Rp/kg) di Provinsi Bali	91
Grafik 3. 6 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali	92
Grafik 3. 7 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali	92
Grafik 3. 8 Inflasi Tahunan Kelompok Sandang kelompok di Prov. Bali	92
Grafik 3. 9 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali	93
Grafik 3. 10 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali	93

Grafik 3. 11 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali 93
Grafik 3. 12 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar 94
Grafik 3. 13 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja 94
Grafik 3. 14 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% yoy) 96
Grafik 3. 15 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% mtm) 96
Grafik 3. 16 Interaksi Permintaan dan Penawaran 98
Grafik 3. 17 Ekspektasi Konsumen 98
Grafik 3. 18 Perkembangan Inflasi Perdesaan (mtm) dan Nilai Tukar Petani (NTP) 99
Grafik 3. 19 Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd) 99
Grafik 4. 1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Bali 105
Grafik 4. 2 Persepsi Rumah Tangga Bali Terhadap Ekonomi Saat Ini 106
Grafik 4. 3 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Bali 106
Grafik 4. 4 Komposisi DPK Perbankan Bali (% total DPK Bali) 108
Grafik 4. 5 Komposisi Perbankan DPK Bali berdasarkan Jenis Simpanan (% total DPK Bali) 108
Grafik 4. 6 Pertumbuhan DPK Perbankan Bali (%) 108
Grafik 4. 7 Pertumbuhan DPK Perseorangan (%) 108
Grafik 4. 8 Komposisi Penyaluran Kredit Perbankan 109
Grafik 4. 9 Komposisi Kredit Perseorangan 109
Grafik 4. 10 Komposisi Kredit Konsumsi Perseorangan 109
Grafik 4. 11 Pertumbuhan Kredit Konsumsi Perseorangan 110
Grafik 4. 12 NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga & Kredit Konsumsi di Bali 110
Grafik 4. 13 Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga (%) 110
Grafik 4. 14 Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi di Bali 115
Grafik 4. 15 Perkembangan *Likert* Biaya Bahan Baku 115
Grafik 4. 16 Kredit Korporasi Akomodasi Makan dan Minum 117
Grafik 4. 17 Kredit Korporasi Pada Sektor Pertanian 117
Grafik 4. 18 Kredit Korporasi Sektor Konstruksi 117
Grafik 4. 19 Kredit Korporasi Pada Sektor Industri Pengolahan 118
Grafik 4. 20 Komposisi Penggunaan Kredit Korporasi 118
Grafik 4. 21 Pertumbuhan Kredit Korporasi 118
Grafik 4. 22 NPL Kredit Korporasi 118
Grafik 4. 23 Pangsa Nominal Kredit UMKM 122
Grafik 4. 24 Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Kota/Kabupaten 122
Grafik 4. 25 NPL Kredit UMKM Berdasar Kab/Kota 123
Grafik 4. 26 Realisasi Kredit UMKM Berdasar Sektor Ekonomi 123
Grafik 4. 27 Pertumbuhan Kredit UMKM 123
Grafik 4. 28 Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit 123
Grafik 4. 29 Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja 124
Grafik 4. 30 Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja 124

Grafik 5. 1 Pergerakan *Inflow, Outflow, Netflow,* Inflasi dan PDRB	132
Grafik 5. 2 Rasio UTLE terhadap *Inflow* di Provinsi Bali	132
Grafik 5. 3 Perkembangan Nominal dan Volume Kliring di Bali	133
Grafik 5. 4 Perkembangan Cek dan Bilyet Giro Kosong di Bali	134
Grafik 5. 5 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling di Bali	135
Grafik 5. 6 Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali	136
Grafik 5. 7 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman di Provinsi Bali	136
Grafik 5. 8 Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali	136
Grafik 5. 9 Jumlah Kartu Elektronik yang Terjual di Bali	141
Grafik 6. 1 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali	148
Grafik 6. 2 Jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan	149
Grafik 6. 3 Komposisi tenaga kerja berdasarkan tingkat Pendidikan	149
Grafik 6. 4 Jumlah tenaga kerja sektor utama	150
Grafik 6. 5 Komposisi tenaga kerja sektor utama	150
Grafik 6. 6 Penyerapan tenaga kerja formal & informal	151
Grafik 6. 7 Komposisi tenaga kerja formal & informal	151
Grafik 6. 8 Hasil SKDU Triwulan III 2017	152
Grafik 6. 9 Hasil SK Triwulan III 2017	152
Grafik 6. 10 Indikator Ekspektasi Survei Konsumen	153
Grafik 6. 11 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali	153
Grafik 6. 12 Indikator dan Keterkaitan Kemiskinan di Provinsi Bali	154
Grafik 6. 13 Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Bali	155
Grafik 6. 14 NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB)	156
Grafik 6. 15 Perbandingan NTP Bali dan Nasional	156
Grafik 6. 16 Perkembangan IPM Provinsi Bali	156
Grafik 6. 17 Perbandingan IPM Bali dan Nasional	156
Grafik 7. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulanan	163
Grafik 7. 2 Indeks Ekspektasi Penghasilan	164
Grafik 7. 3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahunan	167
Grafik 7. 4 Proyeksi Inflasi Bali	168

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Bali di Sisi Permintaan (%, yoy) 28
Tabel 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Bali di Sisi Penawaran (%, yoy) 28
Tabel 1. 3 Perkembangan Produksi Daging dan Telur 56
Tabel 1. 4 Pertumbuhan Produksi Daging dan Telur 56
Tabel 2. 1 Pagu Anggaran Belanja Pemerintah di Bali (2015-2017) 69
Tabel 2. 2 Pagu Anggaran Pendapatan Pemerintah di Bali (2015-2017) 69
Tabel 2. 3 Realisasi Belanja Pemerintah di Bali Pada Triwulan III (2015-2017) 71
Tabel 2. 4 Persentase Realisasi Belanja Pemerintah di Bali Pada Triwulan III (2016-2017) 72
Tabel 2. 5 Realisasi Pendapatan Pemerintah di Bali Pada Triwulan III (2015-2017) 72
Tabel 2. 6 Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah di Bali Pada Triwulan III (2016-2017) 73
Tabel 2. 7 Perkembangan APBD Bali Pada Triwulan III (2016-2017) 73
Tabel 2. 8 Pagu dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Triwulan III (2016-2017) 74
Tabel 2. 9 Pagu dan Realisasi APBD Provinsi Bali Triwulan III (2016-2017) 77
Tabel 2. 10 Pagu APBD Untuk Sembilan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali Tahun 2016-2017 79
Tabel 2. 11 Realisasi Pendapatan 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali Triwulan III (2016-2017) 80
Tabel 2. 12 Persentase Realisasi Pendapatan 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali Triwulan III (2016-2017) 81
Tabel 2. 13 Pagu Anggaran Belanja APBD 9 Kabupten/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Tahun 2016-2017 82
Tabel 2. 14 Realisasi Belanja APBD untuk 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Triwulan III (2016-2017) 82
Tabel 2. 15 Persentase Realisasi Belanja 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali Triwulan III (2016-2017) 83
Tabel 2. 16 Pagu dan Realisasi APBN Provinsi Bali Triwulan III (2016-2017) 84
Tabel 3. 1 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran 94
Tabel 3. 2 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Denpasar Tw III 2017 95
Tabel 3. 3 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran 96
Tabel 3. 4 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Singaraja Tw III 2017 96
Tabel 3. 5 Kegiatan TPID Triwulan III 2017 100
Tabel 4. 1 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Pengeluarannya Per Bulan 106
Tabel 4. 2 Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan 107
Tabel 4. 3 Dana Rumah Tangga Untuk Menabung dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan 107
Tabel 4. 4 Komposisi Jumlah Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali 109
Tabel 4. 5 Penyaluran Kredit Perseorangan Secara Spasial Posisi Triwulan III 2017 111
Tabel 4. 6 Pertumbuhan dan NPL KPR di Bali 112

Tabel 4. 7 Pertumbuhan dan NPL KKB di Bali 112
Tabel 4. 8 Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan III 2017 113
Tabel 4. 9 NPL Kredit Multiguna 113
Tabel 4. 10 Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Bank di Bali 119
Tabel 4. 11 Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Bank Umum di Bali 120
Tabel 4. 12 Perkembangan Indikator BPR di Bali 121
Tabel 4. 13 NPL kredit UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi 123
Tabel 5. 1 Perkembangan *Inflow – Outflow* Provinsi Bali (Miliar Rupiah) 131
Tabel 5. 2 Perkembangan Indikator SKNBI di Bali 133
Tabel 5. 3 Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 100.000 Penduduk 139
Tabel 5. 4 Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 1000 KM^2 139
Tabel 5. 5 Indikator *Banking Penetration* 140
Tabel 5. 6 Jumlah Gardu Tol Bali Mandara 141
Tabel 6. 1 TPT menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 147
Tabel 6. 2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribu Orang) 148
Tabel 6. 3 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 148
Tabel 6. 4 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja 149
Tabel 6. 5 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha 150
Tabel 6. 6 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 151
Tabel 6. 7 Jumlah Penduduk Miskin 154
Tabel 7. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali 166

Daftar Boks

BOKS A AGROWISATA SEBAGAI SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU DI BALI 61
BOKS B KONSUMEN RUMAH TANGGA BALI MASIH MENUNJUKKAN DAYA BELI YANG KUAT 125
BOKS C BALI BERKONTRIBUSI DALAM MENDORONG SURPLUS TRANSAKSI BERJALAN NASIONAL 158

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

INFOGR DAN PR

PERTUMBUHAN EKONOMI

Tw II 2017
6,01
%(yoy)

Tw III 2017
6,22
%(yoy)



Perekonomian Bali pada triwulan III 2017 menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan triwulan II 2017. Ekonomi Bali tercatat tumbuh sebesar 6,22% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,01% (yoy), dengan output riil mencapai Rp.37,19 triliun.

PERKEMBANGAN INFLASI

Tw II 2017
4,02
%(yoy)

Tw III 2017
2,69
%(yoy)

KEUANGAN

PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN

APBD Provinsi Bali	**71,31%**	**71,94%**
APBD 9 Kab/Kota	**67,16%**	**67,98%**



PERKEMBANGAN

TUNAI

Inflow **3,87**	(Rp Triliun)	Inflow **4,93**
Outflow **5,82**	(Rp Triliun)	Outflow **3,60**
Net Outflow **1,95**	(Rp Miliar)	Net Inflow **1,33**



PROSPEK PEREKONOMIAN BALI

PERTUMBUHAN EKONOMI

Tw IV 2017	Tahun 2017	Tw I 2018	Tahun 2018
5,40-5,80 %(yoy)	5,70-6,10 %(yoy)	5,80-6,20 %(yoy)	6,00-6,40 %(yoy)

PERKEMBANGAN INFLASI

Tw IV 2017	Tahun 2017	Tw I 2018	Tahun 2018
2,10-2,30 %(yoy)	2,10-2,30 %(yoy)	0,60-1,00 %(yoy)	2,60-3,00 %(yoy)

AFIS PEREKONOMIAN BALI TRIWULAN III 2017
OSPEK PEREKONOMIAN BALI 2017 - 2018

PEMERINTAH

PERSENTASE REALISASI BELANJA

	Tw III 2016	Tw III 2017
APBN Wilayah Bali	60,03%	61,48%
APBD Provinsi Bali	55,89%	56,25%
APBD 9 Kab/Kota	49,52%	50,04%



■ Tw III 2016 ■ Tw III 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH

PERTUMBUHAN KREDIT RUMAH TANGGA

8,78 %(yoy) — 7,93 %(yoy)

PERTUMBUHAN KREDIT RUMAH TANGGA

2,29 %(yoy) — 0,04 %(yoy)

PERTUMBUHAN KREDIT UMKM

11,18 %(yoy) — 8,43 %(yoy)



■ Tw II 2017 ■ Tw III 2017

SISTEM PEMBAYARAN

NON TUNAI

	Tw II 2017	Tw III 2017
Nominal Kliring	13,37 Rp Triliun	15,8 Rp Triliun
Volume Kliring	540 Ribu Lembar	609 Ribu Lembar



■ Tw II 2017 ■ Tw III 2017

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

ANGKATAN KERJA

(*Juta Orang)

Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017
2,47	2,47	2,43

PENGANGGURAN TERBUKA

Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017
1,89%	1,28%	1,48%

KEMISKINAN

Maret 2016	September 2016	Maret 2017
4,25%	4,15%	4,25%

Ringkasan Eksekutif

Perekonomian Bali triwulan II 2017 tumbuh 6,22% (yoy)

Kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2017 menunjukkan peningkatan dengan tumbuh sebesar 6,22% (yoy) pada triwulan III 2017, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 sebesar 6,01% (yoy) dengan output riil mencapai 37,19 triliun. Kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2017 juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, yang tercatat tumbuh sebesar 5,06%. Dari sisi permintaan, peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi serta masih kuatnya pertumbuhan kinerja ekspor luar negeri merupakan pendorong peningkatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2017. Dari sisi penawaran, peningkatan kinerja ekonomi didorong peningkatan kinerja lapangan usaha utama di Bali yang meliputi akomodasi makan minum (akmamin), perdagangan, transportasi, konstruksi dan industri pengolahan.

Perekonomian Bali triwulan IV 2017 diperkirakan mengalami perlambatan pada kisaran 5,40% - 5,80% (yoy) dan tahun 2017 melambat menjadi 5,70%-6,10% (yoy)

Dari berbagai *prompt indicator*, hasil survei dan *liaison*, terdapat indikasi tendensi perlambatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan IV 2017, yang diprakirakan pada kisaran 5,40%-5,80% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan utamanya bersumber dari melambatnya konsumsi rumah tangga yang disebabkan tidak adanya lagi pembayaran gaji ke-13 dan 14 serta THR seperti pada dua triwulan sebelumnya. Sedangkan dari sisi penawaran, tertahannya kinerja ekspor jasa dan lapangan usaha akomodasi, makanan, dan minuman (akmamin) akibat peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung, serta perkiraan peningkatan frekuensi musim hujan dan angin kencang berpotensi menyebabkan penurunan kinerja pertanian dapat menahan laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian pada triwulan IV 2017. Sementara itu, kinerja ekonomi Bali pada tahun 2017 diprakirakan akan berada dalam kisaran 5,70%-6,10% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan tahun 2016. Perlambatan ini dari sisi permintaan disebabkan oleh melambatnya kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor luar negeri. Sementara itu dari sisi penawaran disebabkan oleh melambatnya kinerja industri pengolahan dan transportasi.

Realisasi Belanja Pemerintah (APBN & APBD) di Bali pada triwulan III meningkat 14,99% yoy

Realisasi belanja pemerintah (APBN dan APBD) pada triwulan III 2017 di Bali tercatat sebesar Rp 20,26 triliun, atau tumbuh sebesar 14,99% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi belanja pemerintah pada triwulan III 2016, yang tumbuh sebesar 13,68% (yoy), dengan total nominal realisasi tercatat sebesar Rp. 17,62 triliun. Realisasi belanja tersebut telah mencapai 54,40% dari pagu fiskal tahun 2017. Realisasi belanja pemerintah Kab/Kota pada Triwulan III 2017, tercatat sebesar Rp. 10 triliun, meningkat sebesar 10,25% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 yang tumbuh sebesar 14,27% (yoy). Sementara itu, realisasi belanja pemerintah Provinsi Bali pada triwulan III 2017, tercatat sebesar Rp. 3,79 triliun atau tumbuh sebesar 16,70% (yoy), lebih rendah bila dibandingkan

Realisasi Pendapatan Pemerintah (APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Bali pada triwulan III meningkat 12,94% yoy

dengan pertumbuhan periode yang sama tahun 2016 yang sebesar 23,19% (yoy). Pada sisi yang lain, realisasi belanja yang menggunakan dana APBN di Provinsi Bali pada Triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp6,47 triliun atau meningkat sebesar 22,03% (yoy), tumbuh jauh lebih tinggi bila dibandingkan periode yang sama 2016, yang sebesar 7,64% (yoy). Sementara itu, realisasi pendapatan pemerintah pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp16,64 triliun, tumbuh sebesar 12,94% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2016 yang tumbuh sebesar 9,47% (yoy). Realisasi pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan untuk Provinsi Bali sebesar Rp. 4,48 triliun dan realisasi pendapatan untuk sembilan kabupaten/kota yang tercatat sebesar Rp. 12,16 triliun.

Inflasi Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 2,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (4,02%) dan inflasi nasional 3,72% (yoy).

Inflasi Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 2,69% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi triwulan sebelumnya yang mencapai 4,02% (yoy). Pencapaian ini juga lebih rendah dibanding inflasi nasional triwulan III 2017 yang berada pada angka 3,72% (yoy). Penurunan inflasi pada triwulan III 2017 terjadi di seluruh komponen baik *administered prices*, *volatile food*, maupun *core inflation*. Inflasi IHK Bali sampai dengan triwulan III 2017 sedikit berada dibawah kisaran sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar 4±1% (yoy). Penurunan tekanan inflasi Bali pada periode laporan terjadi pada semua kelompok pengeluaran, terutama kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, serta kelompok transportasi, komunikasi dan keuangan. Sedangkan menurut kota pembentuknya, penurunan inflasi terutama terjadi di Kota Singaraja yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,91% (yoy), relatif jauh di bawah inflasi nasional dan Kota Denpasar yang sebesar 2,86% (yoy). Berdasarkan realisasi inflasi sampai dengan Oktober 2017, inflasi Provinsi Bali triwulan IV 2017 diprakirakan turun pada *range* 2,00%-2,40% (yoy) seiring dengan terjaganya ketersediaan komoditas pangan pada akhir triwulan IV 2017.

Tingkat konsumsi masyarakat yang masih cukup tinggi, perilaku berutang yang masih normal, dan risiko kredit yang masih terjaga, berdampak minmal pada kerentanan sistem keuangan

Pada triwulan III 2017, stabilitas sistem keuangan Bali masih cukup terjaga, terutama dari ketahanan sektor rumah tangga. Tingkat konsumsi masyarakat yang masih cukup tinggi, perilaku berutang yang masih normal, dan risiko kredit yang masih terjaga, berdampak minimal pada kerentanan sistem keuangan. Dari sisi sektor korporasi, meskipun eksposur kredit perbankan pada sektor ini hanya sebesar 30,87% dari total kredit di Bali, kerentanan yang terjadi pada sektor korporasi tetap perlu diwaspadai. Hal tersebut mengingat nilai NPL korporasi (4,88%) yang tipis mendekati *threshold* 5% walaupun telah mengalami perbaikan dibanding triwulan sebelumnya (5,27%). Dalam hal ini kekuatan ekonomi domestik masih mendukung ketahanan stabilitas keuangan di Bali meskipun perkembangan penyaluran kredit UMKM kembali menunjukkan perlambatan dari semula tumbuh sebesar 11,18% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 8,43% (yoy) di periode laporan. Penurunan laju penyaluran kredit UMKM terutama terjadi pada keuangan dan jasa perusahaan yang semula -0,8%

(yoy) menjadi -6,4% (yoy) pada triwulan III 2017, diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, PHR (perdagangan, hotel dan restoran) serta LGA (listrik, gas dan air). Sementara itu, sektor PHR yang merupakan sektor dengan pangsa kredit terbesar (69,63%) turut mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan dari sebelumnya 11,6% pada triwulan II 2017 menjadi 7,6%. Namun demikian, walaupun pertumbuhan kredit UMKM mengalami perlambatan, kualitas kredit UMKM pada triwulan berjalan mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari rasio NPL kredit UMKM yang menurun dari 4,01% menjadi sebesar 3,03% pada triwulan III 2017.

Dari sisi sektor korporasi, meskipun eksposur kredit perbankan pada sektor ini relatif rendah, kerentanan yang terjadi pada sektor korporasi tetap perlu diwaspadai.

Seiring selesainya periode perayaan keagamaan pada triwulan II 2017 (Ramadhan dan Idul Fitri) serta awal liburan sekolah, menyebabkan terjadinya pembalikan aliran dana tunai dari masyarakat melalui perbankan kembali masuk ke Bank Indonesia (*net inflow*) sebesar Rp1,3 triliun pada triwulan III 2017. Terjadinya *net inflow* pada periode triwulan III 2017 tersebut sejalan dengan pola historisnya. Pada triwulan III 2017, transaksi SKNBI meningkat dibandingkan triwulan sebelummnya, baik secara nominal maupun volume. Perputaran kliring secara nominal pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp15,8 triliun (meningkat sebesar 18,2% (qtq)). Sedangkan volume transaksi kliring juga menunjukkan peningkatan pada triwulan III 2017 sebesar 608.542 lembar (meningkat 12,79% (qtq)) dibanding triwulan II. Nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali pada triwulan III 2017 juga menunjukkan peningkatan 23,92% (yoy). Nominal transaksi jual-beli valas pada triwulan laporan mencapai Rp10,58 triliun Peningkatan transaksi KUPVA pada triwulan III 2017 sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali yang pada triwulan laporan yang merupakan periode *peak season* pariwisata di Bali.

Sistem pembayaran nontunai tercatat mengalami net inflow pada triwulan III 2017.

Perkembangan transaksi jual-beli valas di Provinsi Bali mengalami peningkatan pada triwulan III tahun 2017.

Secara umum sektor ketenagakerjaan Provinsi Bali pada Agustus 2017 menunjukkan kinerja yang masih kuat. Tercatat ada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun dari 1,89% pada Agustus 2016 menjadi 1,48% pada Agustus 2017. Sementara itu, jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 2,43 juta orang atau menurun 1,16% (yoy) dibandingkan periode Agustus 2016. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode Agustus 2017 tercatat sebesar 75,24%, lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2016 yang sebesar 77,24%. Prospek ketenagakerjaan pada triwulan depan diprediksi akan membaik, terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan hasil Survei Konsumen (SK) di periode triwulan III 2017.

Jumlah angkatan kerja Bali di Agustus 2017, tercatat sebesar 2,43juta orang atau menurun 1,16% yoy dibandingkan Agustus 2016

Tingkat kemiskinan Bali pada Maret 2017 tercatat sebesar 4,25% atau terdapat 180,13 ribu orang di Bali yang masuk dalam kategori penduduk miskin yang terdiri dari wilayah perkotaan sebanyak 96,89 ribu orang (3,58%) dan wilayah pedesaan sebanyak 83,23 ribu orang (5,45%). Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan September 2016

Jumlah penduduk miskin di Bali, tercatat sebesar 180,13 ribu orang atau 4,25% pada Maret 2017, meningkat dibandingkan September 2016 yang tercatat sebesar 174,9 ribu orang atau 4,15%.

yang tercatat masing-masing sebesar 93,74 ribu orang (3,53%) dan 81,2 ribu orang (5,21%). Penurunan tingkat kesejahteraan petani dan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar di Maret 2017 (dibandingkan dengan September 2016). Berbagai indeks pengukur kesejahteraan (P1, P2, rasio gini) juga menunjukkan kinerja yang menurun. Seiring dengan itu, Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali yang menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani menunjukkan penurunan pada triwulan III 2017 (104,28) dibandingkan dengan dengan triwulan II 2017 (104,68) dan triwulan III 2016 (106,92). Kondisi ini mengindikasikan kesejahteraaan masyarakat, khususnya pada tingkat pedesaan, sedikit menurun.

Pertumbuhan ekonomi Bali Tw1 2018 diprakirakan berada dalam kisaran 5,80%-6,20% (yoy), sedangkan untuk tahun 2018 dalam kisaran 6,00%-6,40% (yoy)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2018, diprakirakan akan mengalami peningkatan dalam kisaran 5,80%-6,20% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan kinerja tersebut terutama didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan peningkatan kinerja ekspor khususnya jasa serta Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT). Dari sisi penawaran, peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan I 2018 didorong oleh peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, penyediaan akomodasi makan dan minum, industri pengolahan, perdagangan dan transportasi. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2018 diprakirakan akan berada dalam kisaran 6,00%-6,40% (yoy), mendekati batas tengah. Dari sisi permintaan, prakiraan peningkatan didorong oleh menigkatnya kinerja sebagian besar komponen permintaan yaitu konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah serta ekspor. Dari sisi penawaran, prakiraan peningkatan kinerja ekonomi Bali bersumber oleh peningkatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, akomodasi makan dan minum, perdagangan serta informasi dan komunikasi. Faktor pendorong peningkatan kinerja ekonomi Bali tahun 2018 adalah pelaksanaan kegiatan *IMF-World Bank Annual Meeting 2018* yang akan diikuti oleh 15.000 peserta dari 189 negara pada bulan Oktober.

Inflasi Bali Tw1 2018 diprakirakan berada dalam kisaran 0,60%-1,00% (yoy), sedangkan tahun 2018 dalam kisaran 2,60%-3,00% (yoy)

Inflasi Bali triwulan I 2018 diperkirakan melandai pada kisaran 0,60%-1,00% (yoy). Optimisme terjaganya inflasi pada periode tersebut seiring dengan terjaganya pasokan komoditas pangan yang telah di antisipasi oleh TPID se-Provinsi Bali. Selain itu, sesuai dengan pola musimannya, konsumsi di awal tahun cenderung menurun terutama konsumsi pemerintah sehingga tekanan inflasi cenderung minim. Meskipun demikian, masih terdapat potensi tekanan inflasi antara lain tendensi kenaikan curah hujan yang menghambat kinerja produksi komoditas pangan hortikultura serta rencana kenaikan beberapa kelompok *administered prices* salah satunya cukai rokok. Meskipun demikian, secara keseluruhan inflasi Bali tahun 2018 diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam kisaran 2,60%-3,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan perkiraan inflasi Bali tahun 2017 yang sebesar 2,10%-3,00% (yoy). Perkiraan tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya target inflasi nasional yang sebesar 3,5±1% (yoy) sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi.

Tabel Indikator

PDRB DAN INFLASI

INDIKATOR	2015				2015	2016				2016	2017		
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III
EKONOMI MAKRO REGIONAL													
Produk Domestik Regional Bruto (%)													
Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	5.94	5.86	6.21	6.10	**6.03**	6.38	6.54	6.61	5.47	**6.24**	5.75	6.01	6.22
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.59	4.40	1.45	2.45	**2.72**	2.03	0.34	6.23	3.78	**3.10**	5.73	5.92	4.74
- Pertambangan dan Penggalian	-4.19	-6.53	-9.81	-6.57	**-6.83**	5.01	6.31	5.71	0.35	**4.28**	2.54	0.39	1.91
- Industri Pengolahan	6.73	8.57	6.88	6.34	**7.13**	4.68	2.15	3.30	2.99	**3.26**	3.72	-0.09	0.50
- Pengadaan Listrik dan Gas	8.58	-2.50	-0.57	1.48	**1.59**	10.58	15.68	9.90	-1.63	**8.31**	0.40	-0.16	8.40
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.93	1.10	0.76	5.12	**1.99**	9.64	6.82	6.14	3.05	**6.34**	1.82	4.86	3.05
- Konstruksi	2.67	3.61	6.06	7.59	**5.01**	7.62	8.07	6.98	6.43	**7.26**	6.41	7.29	8.02
- Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.92	6.85	9.12	7.86	**7.94**	8.57	6.49	5.22	6.31	**6.61**	7.71	8.12	9.64
- Transportasi dan Pergudangan	4.02	3.82	5.11	5.15	**4.54**	6.89	8.18	10.22	5.55	**7.72**	5.28	6.05	6.07
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.42	6.18	5.73	5.19	**6.11**	6.15	6.78	7.48	6.31	**6.69**	7.78	9.26	10.71
- Informasi dan Komunikasi	9.79	9.05	10.77	10.12	**9.94**	8.23	8.91	8.06	9.15	**8.59**	7.71	8.36	7.58
- Jasa Keuangan dan Asuransi	6.49	4.03	10.36	5.78	**6.66**	8.45	7.67	7.05	9.08	**8.06**	5.06	6.34	0.71
- Real Estate	5.86	4.95	4.92	5.09	**5.20**	5.79	5.53	4.52	2.77	**4.63**	2.69	3.42	4.03
- Jasa Perusahaan	5.23	6.91	7.15	8.54	**6.99**	10.14	6.39	6.27	4.87	**6.85**	6.02	7.11	5.90
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.28	7.92	9.40	8.31	**8.27**	5.48	15.19	2.32	0.05	**5.44**	-3.89	-5.06	-1.34
- Jasa Pendidikan	8.75	8.85	8.24	9.91	**8.94**	9.50	9.37	8.72	8.15	**8.91**	7.30	8.11	5.24
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.06	7.90	9.77	9.26	**8.76**	9.96	9.50	8.57	8.06	**9.00**	7.58	7.92	7.76
- Jasa lainnya	8.96	7.41	7.60	8.01	**7.99**	7.70	8.34	9.09	8.92	**8.52**	8.53	8.26	7.52
- Berdasarkan Pengeluaran:	5.94	5.86	6.21	6.10	**6.03**	6.38	6.54	6.61	5.47	**6.24**	5.74	5.87	5.74
- 1. Pengeluaran Konsumsi	7.81	6.44	6.13	8.56	**7.24**	7.58	8.49	4.46	0.19	**4.99**	4.32	2.30	4.72
- 1.a. Konsumsi Rumah Tangga	8.42	7.33	6.60	7.55	**7.46**	7.88	8.22	6.11	4.70	**6.69**	4.80	3.77	4.43
- 1.b. Konsumsi LNPRT	-1.90	-1.31	1.30	14.80	**3.17**	6.72	12.17	11.76	4.07	**8.58**	5.85	0.12	0.14
- 1.c. Konsumsi Pemerintah	4.43	2.86	4.42	12.20	**6.56**	4.91	9.49	-4.46	-18.27	**-4.47**	-0.60	-5.17	6.89
- 2. Investasi	5.32	4.91	4.17	5.62	**5.00**	9.66	9.51	9.14	7.22	**8.86**	3.08	3.89	6.00
- 2.a. PMTB	7.43	7.61	6.09	5.76	**6.69**	9.52	9.49	9.00	7.21	**8.78**	3.04	3.82	6.04
- 2.b. Perubahan Inventori	-83.08	-85.16	-80.77	-17.02	**-77.76**	45.99	16.15	44.21	10.03	**27.45**	9.50	19.74	-1.84
- 3. Neraca Perdagangan Bersih	-5.17	3.97	32.42	-122.32	**-5.34**	-18.14	-56.05	23.92	-1241.19	**5.18**	37.19	221.13	32.26
- 3. a. Ekspor Luar Negeri	12.97	17.54	-3.58	0.50	**6.02**	13.16	12.75	16.39	16.78	**14.80**	16.65	14.67	12.95
- 3.b. Impor Luar Negeri	-19.84	13.26	-14.29	-15.94	**-10.89**	23.02	12.82	21.57	31.82	**22.49**	15.80	34.32	22.87
- 3.c. Net Ekspor Antar Daerah	42.82	20.95	-3.81	11.40	**14.06**	20.86	22.16	13.93	2.10	**13.94**	12.02	-0.50	7.15
- Ekspor													
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	137.56	122.35	107.74	128.22	**495.87**	121.61	128.39	106.53	125.96	**482.49**	128.49	121.79	124.75
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)	27.80	29.05	25.81	93.17	**175.84**	87.68	30.00	21.23	25.95	**164.87**	21.46	20.76	21.11
Impor													
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	32.14	30.69	21.55	25.49	**109.87**	46.13	25.53	22.54	39.16	**133.35**	18.31	33.80	41.90
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	30.87	2.00	3.10	7.99	**43.97**	17.94	1.65	1.70	2.16	**23.44**	1.58	2.15	1.42
Laju Inflasi Provinsi Bali (% yoy)	6.42	6.97	6.56	2.75	**2.75**	3.59	2.96	3.18	3.23	**3.23**	4.40	4.02	2.69

KREDIT RUMAH TANGGA (BANK UMUM - LOKASI PROYEK)

INDIKATOR	2014				2015				2016				2017		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Kredit RT (Rp triliun)	41.10	42.77	44.57	46.02	46.89	48.36	49.68	51.28	52.13	54.30	55.43	56.80	57.52	59.07	59.83
Modal Kerja (Rp triliun)	12.93	13.61	13.99	14.32	14.48	14.97	15.31	15.76	16.31	17.41	17.87	18.44	18.46	19.20	19,20
Investasi (Rp triliun)	6.02	6.31	6.76	6.93	7.12	7.41	7.55	8.04	7.95	8.45	8.60	8.74	9.04	9.09	9,30
Konsumsi (Rp triliun)	22.15	22.85	23.82	24.77	25.29	25.97	26.82	27.48	27.87	28.44	28.97	29.62	30.03	30.79	31,33
NPL Total (Gross,%)	0.67	1.65	0.80	0.69	0.86	0.91	1.04	1.70	2.10	2.15	2.28	2.01	2.56	2.96	3.12

INDIKATOR	2014				2015				2016				2017		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Kredit RT. Total (Rp triliun)	20.02	21.10	21.88	23.01	23.54	24.18	24.92	25.45	25.81	26.26	26.51	26.94	27.33	27.93	28.34
KPR (Rp triliun)	10.07	10.53	10.75	11.08	11.22	11.32	11.55	11.74	11.75	11.69	11.00	10.97	10.92	9.07	9.30
RT. KPR sd 21	3.14	3.24	3.25	3.26	3.20	3.18	3.18	3.13	3.09	3.01	2.62	2.45	2.26	0.59	0.61
RT. KPR sd 70	3.28	3.42	3.51	3.60	3.64	3.71	3.80	3.95	3.99	3.96	3.80	3.90	3.99	4.04	4.24
RT. KPR 70+	3.66	3.86	3.99	4.22	4.38	4.43	4.57	4.67	4.67	4.72	4.58	4.63	4.67	4.45	4.46
KPA (Rp triliun)	0.65	0.80	0.68	0.71	0.71	0.73	0.72	0.74	0.73	0.76	0.78	0.77	0.76	0.80	0.79
RT. KPA sd 21	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.037	0.04	0.03
RT. KPA sd 70	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.106	0.10	0.10
RT. KPA 70+	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.041	0.04	0.04
RT. Ruko	0.38	0.53	0.43	0.47	0.47	0.50	0.50	0.51	0.51	0.55	0.59	0.58	0.579	0.61	0.61
KKB (Rp triliun)	1.89	2.03	2.16	2.28	2.40	2.48	2.59	2.31	2.29	2.28	2.32	2.30	2.28	2.28	2.32
RT. KKB Roda 4	1.70	1.82	1.94	2.06	2.18	2.26	2.39	2.12	2.11	2.10	2.14	2.13	2.12	2.14	2.19
RT. KKB Roda 2	0.10	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.12	0.10	0.09
RT. KKB Roda 6	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.05	0.03	0.05	0.04	0.02	0.03	0.02
RT. KKB Lainnya	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
RT. Multiguna (triliun)	7.41	7.75	8.29	8.94	9.22	9.64	10.06	10.66	11.03	11.53	12.41	12.90	13.37	15.78	15.93
NPL (Gross %)	0.53	0.52	0.55	0.63	0.63	0.70	0.74	0.76	1.09	1.13	1.18	1.03	1.34	1.65	1.74

KREDIT KORPORASI (BANK UMUM - LOKASI PROYEK)

INDIKATOR	2014				2015				2016				2017		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Kredit Korporasi (Rp triliun)	18.65	20.35	21.71	23.77	24.08	24.84	25.75	26.64	27.46	27.53	28.05	28.13	28.21	28.16	28.06
Modal Kerja (Rp triliun)	7.38	8.56	9.21	10.01	9.97	10.14	10.42	10.58	11.09	11.58	11.44	10.55	10.65	10.53	10.33
Investasi (Rp triliun)	11.19	11.70	12.41	13.67	14.02	14.61	15.24	15.98	16.29	15.87	16.53	17.50	17.47	17.55	17.67
NPL (Gross,%)	2.46	2.24	2.47	2.55	1.64	3.37	3.46	3.97	4.85	5.29	5.85	4.93	6.26	5.27	4.88

PERBANKAN – BANK UMUM (LOKASI BANK)

Indikator	2014				2015				2016				2017		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Total *Asset* (Rp Triliun)	75.05	79.50	83.83	85.78	85.39	88.52	92.29	92.84	91.47	94.38	98.11	100.13	95.92	98.06	103.43
DPK (Rp Triliun)- Bank Pelapor	63.90	66.50	70.54	70.51	72.02	73.58	76.54	75.51	75.57	77.61	79.39	79.53	81.57	83.21	87.61
Giro (Rp Triliun)	12.23	13.83	14.11	11.97	12.86	13.71	15.00	13.06	13.90	14.00	14.92	13.16	14.41	15.18	16.38
Tabungan (Rp Triliun)	31.17	30.96	32.90	33.82	32.46	32.36	34.10	35.90	33.85	35.57	36.30	38.29	36.83	38.11	40.58
Deposito (Rp Triliun)	20.49	21.71	23.53	24.72	26.69	27.51	27.44	26.54	27.82	28.04	28.17	28.07	30.33	29.92	30.65
Kredit (Rp Triliun) - Lokasi Bank	50.33	52.83	55.09	57.20	57.97	59.78	60.97	62.85	63.07	65.60	67.04	68.92	69.60	71.27	71.88
Modal Kerja	19.99	21.29	22.26	22.75	22.94	23.76	24.01	24.50	24.42	25.85	26.29	26.86	26.85	27.73	27.52
Investasi	11.35	11.90	12.55	13.40	13.63	13.88	14.14	14.59	14.44	15.04	15.54	16.18	16.32	16.25	16.52
Konsumsi	18.99	19.64	20.28	21.05	21.40	22.14	22.82	23.76	24.21	24.71	25.21	25.88	26.43	27.29	27.83
Loan to Deposit Ratio (%)	78.77	79.44	78.10	81.12	80.50	81.25	79.65	83.24	83.46	84.53	84.44	86.66	85.32	85.65	82.05
NPL gross (%)	0.7	1.66	0.95	0.91	1.34	1.91	1.89	2.06	2.38	2.35	2.67	2.09	2.73	2.96	3.16

INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA - BANK UMUM

Triliun Rp

Kabupaten/Kota	Indikator	2014				2015				2016				2017		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Jembrana	Kredit (Rp Miliar)	1.32	1.39	1.45	1.52	1.57	1.66	1.73	1.84	1.90	2.04	2.09	2.18	2.26	2.35	2.10
	DPK (Rp Miliar)	882	967	1.05	1.04	1.07	1.06	1.12	1.19	1.17	1.19	1.26	1.20	1.24	1.31	1.37
Tabanan	Kredit (Rp Miliar)	2.62	2.75	2.82	2.88	2.94	3.03	3.12	3.27	3.46	3.63	3.71	3.81	3.38	3.95	3.68
	DPK (Rp Miliar)	1.80	1.87	1.91	1.87	1.99	2.01	2.15	2.12	2.22	2.22	2.29	2.24	2.24	2.37	2.52
Badung	Kredit (Rp Miliar)	4.71	4.91	5.11	6.87	7.16	7.36	7.53	7.78	7.68	8.04	8.44	8.76	8.79	9.03	9.20
	DPK (Rp Miliar)	7.83	8.29	8.51	11.31	11.72	11.83	12.61	12.06	12.10	12.73	13.22	13.10	13.12	14.05	15.07
Gianyar	Kredit (Rp Miliar)	2.22	2.37	2.47	2.58	2.63	2.75	2.86	3.00	3.15	3.34	3.44	3.51	3.56	3.64	3.13
	DPK (Rp Miliar)	2.22	2.23	2.39	2.34	2.40	2.49	2.72	2.64	2.68	2.77	2.97	2.79	2.83	3.04	3.18
Klungkung	Kredit (Rp Miliar)	1.11	1.16	1.21	1.26	1.28	1.32	1.37	1.40	1.45	1.52	1.57	1.59	1.63	1.68	1.71
	DPK (Rp Miliar)	843	935	975	959	1.04	1.10	1.16	1.08	1.11	1.22	1.23	1.12	1.18	1.26	1.35
Bangli	Kredit (Rp Miliar)	1.11	1.16	1.20	1.24	1.29	1.35	1.39	1.44	1.49	1.55	1.57	1.61	1.65	1.68	1.70
	DPK (Rp Miliar)	699	742	837	829	827	853	915	867	859	926	1.02	854	859	979	1.10
Karangasem	Kredit (Rp Miliar)	1.64	1.75	1.84	1.90	1.99	2.10	2.21	2.31	2.43	2.58	2.68	2.75	2.80	2.85	3.10
	DPK (Rp Miliar)	1.21	1.30	1.46	1.47	1.50	1.49	1.57	1.56	1.66	1.66	1.65	1.60	1.62	1.68	1.80
Buleleng	Kredit (Rp Miliar)	3.06	3.28	3.39	3.47	3.54	3.75	3.93	4.11	4.24	4.59	4.79	4.96	5.05	5.23	5.90
	DPK (Rp Miliar)	2.82	2.91	3.10	3.04	3.04	3.04	3.27	3.38	3.42	3.65	3.54	3.49	3.33	3.54	3.90
Denpasar	Kredit (Rp Miliar)	32.54	34.06	35.60	35.50	35.56	36.45	36.83	37.71	37.28	38.31	38.74	39.73	39.99	40.84	41.35
	DPK (Rp Miliar)	45.60	47.26	50.32	47.66	48.43	49.72	51.04	50.61	50.35	51.41	52.21	53.14	55.16	54.98	57.32

KREDIT UMKM (LOKASI PROYEK)

Kredit UMKM	2014				2015				2016				2017		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Kredit UMKM (Rp Triliun)	20.86	22.26	22.92	23.80	24.83	25.80	26.44	27.36	27.88	29.80	30.69	31.83	31.84	33.13	33.27
g Kredit UMKM (%,yoy)	24.74	20.28	18.09	17.52	19.07	15.89	15.35	14.97	12.27	15.49	16.06	16.31	14.20	11.18	8.43
Mikro (Triliun)	3.03	3.35	3.35	3.45	3.58	3.72	3.90	4.40	4.94	5.35	5.48	5.67	5.56	5.83	6.12
Kecil (Triliun)	7.50	7.78	8.23	8.64	8.84	9.30	9.57	10.02	10.18	11.03	11.55	11.96	12.17	12.64	12.78
Menengah (Triliun)	10.33	11.13	11.34	11.71	12.42	12.77	12.97	12.94	12.76	13.42	13.65	14.20	14.11	14.67	14.37
NPL (%)	0.97	1.14	1.28	1.08	1.28	1.27	1.42	1.31	2.01	1.92	2.11	2.11	2.38	4.01	3.03

SISTEM PEMBAYARAN

INDIKATOR	2014				2015				2016				2017		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
SISTEM PEMBAYARAN															
Transaksi Tunai															
Inflow (Rp Triliun)	3.33	2.6	3.26	2.39	4.08	2.81	3.66	2.5	5.07	3.39	5.28	4.15	4.5	3.9	4.9
Outflow (Rp Triliun)	2.38	2.66	4.42	3.63	2.08	3.46	4.89	4.01	2.93	5.1	5.12	4.96	3.9	5.8	3.6
Kliring :															
Nom. Kliring (Rp triliun)	12.85	12.83	13.75	14.5	13.54	10.09	14	18.37	19.86	21.42	18	18.22	16.27	13,37	15.80
Vol. Kliring (ribu lembar)	543	540	553	574	551	408	562	614	633	678	637	671	622	540	609
Nom. Tolakan Cek/BG Kosong (Rp miliar)	321	314	522	640	356	354	343	1,323	430	422	268	269	423	202	187
Vol Tolakan Cek/BG Kosong (ribu lembar)	8.06	9.09	8.56	7.6	8.05	7.95	8.4	7.8	8.3	7.9	7.3	7.4	7.9	7.5	6.1

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL



Kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2017 menunjukkan peningkatan dengan tumbuh sebesar 6,22% yoy pada triwulan III 2017, lebih tinggi dari triwulan III 2016 sebesar 6,01% yoy dengan output riil mencapai 37,19 triliun.

*Foto oleh: Nicko Jefta
(Angel's Billabong Beach - Nusa Penida)





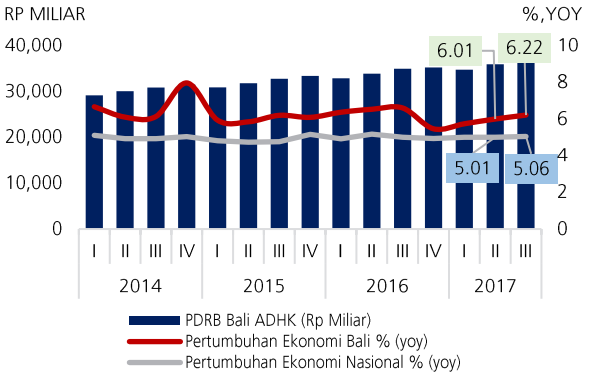
1.1. KONDISI UMUM KINERJA EKONOMI BALI TRIWULAN III 2017

1.1.1. Kinerja Perekonomian Bali Triwulan III 2017

Perekonomian Bali pada triwulan III 2017 menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan triwulan II-2017, namun cenderung melambat bila dibandingkan triwulan III-2016. Ekonomi Bali tercatat tumbuh sebesar 6,22% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,01% (yoy), dengan *output riil* mencapai Rp.37,19 triliun. Kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2017 juga lebih tinggi bila dibanding pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, yang tumbuh sebesar 5,06% (yoy). Capaian kinerja ekonomi Bali yang meningkat pada triwulan laporan ini, sejalan dengan proyeksi Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Pangsa ekonomi Bali terhadap Kawasan Timur Indonesia pada triwulan III 2017 meningkat menjadi 7,89% dibandingkan triwulan sebelumnya (7,87%). Sejalan dengan itu, pangsa ekonomi Bali terhadap nasional pada periode yang sama, pangsa ekonomi Bali menunjukkan sedikit peningkatan yaitu dari 1,55% pada triwulan II 2017 menjadi 1,57% pada triwulan III 2017. Secara umum, dengan capaian kinerja ekonomi yang tumbuh lebih tinggi pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya, perkembangan dan propsek ekonomi Bali menunjukkan kondisi ke arah yang lebih baik.

Di sisi permintaan, peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi serta masih kuatnya pertumbuhan kinerja ekspor luar negeri merupakan pendorong peningkatan kinerja



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional Triwulanan

ekonomi Bali pada triwulan III 2017. Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh adanya periode liburan sekolah, tahun ajaran baru sekolah, pembayaran gaji ke-13 PNS dan perayaan hari keagamaan[1] serta terkendalinya tingkat inflasi[2] mendorong peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga. Sementara peningkatan kinerja konsumsi pemerintah, setelah 4 (empat) triwulan sebelumnya selalu terkontraksi didorong oleh pembayaran gaji ke-13, peningkatan realisasi pendapatan daerah[3], telah dilakukannya penyesuaian personil dan akun anggaran setelah penataan OPD[4] serta percepatan tahapan pengadaan belanja barang dan jasa (untuk anggaran APBN) mendorong peningkatan kinerja komponen konsumsi pemerintah.

Peningkatan kinerja investasi pada triwulan laporan didorong oleh meningkatnya realisasi investasi sejalan dengan realisasi pengerjaan infrastruktur pemerintah dan investasi swasta khususnya investasi bangunan termasuk dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan *IMF-World Bank Annual Meeting 2018*[5]. Sementara itu, kinerja ekspor luar negeri didorong

1 Perayaan hari keagamaan pada triwulan III 2017 meliputi: Saraswati, Pagar Wesi dan Idul Adha

2 Inflasi Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 2,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan II 2017 (4,02%, yoy)

3 Realisasi Pendapatan Daerah di Bali (APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota) tercatat sebesar Rp16,64 triliun, meningkat 12,94% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2016 yang sebesar Rp14,73 triliun, terutama didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4 Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan pada awal tahuu 2017 di Bali didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Thun 2016 tentang Perangkat Daerah

5 Pelaksanaan kegiatan *IMF-WBG Annual Meetings* 2018 akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 di Bali, yang akan diikuti oleh 15.000 peserta dari 189 negara

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Bali di Sisi Permintaan (%, yoy)

Komponen	2015				2015	2016				2016	2017		
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III
Konsumsi	7,81	6,44	6,13	8,56	7,24	7,58	8,49	4,46	0,19	4,99	4,32	2,30	4,72
Kons.RT	8,42	7,33	6,60	7,55	7,46	7,88	8,22	6,11	4,70	6,69	4,80	3,77	4,43
Kons.LNPRT	-1,90	-1,31	1,30	14,80	3,17	6,72	12,17	11,76	4,07	8,58	5,85	0,12	0,14
Kons. Pemerintah	4,43	2,86	4,42	12,20	6,56	4,91	9,49	-4,46	-18,27	-4,47	-0,60	-5,17	6,89
Investasi	5,32	4,91	4,17	5,62	5,00	9,66	9,51	9,14	7,22	8,86	3,08	3,89	6,00
PMTB	7,43	7,61	6,09	5,76	6,69	9,52	9,49	9,00	7,21	8,78	3,04	3,82	6,04
Perubahan Inventori	-83,08	-85,16	-80,77	-17,02	-77,76	45,99	16,15	44,21	10,03	27,45	9,50	19,74	-1,84
Ekspor LN	12,97	17,54	-3,58	0,50	6,02	13,16	12,75	16,39	16,78	14,80	16,65	14,67	12,95
Impor LN	-19,84	13,26	-14,29	-15,94	-10,89	23,02	12,82	21,57	31,82	22,49	15,80	34,32	22,87
Net Ekspor antar daerah	42,82	20,95	-3,81	11,40	14,06	20,86	22,16	13,93	2,10	13,94	12,02	-0,50	7,15
PDRB	5,94	5,86	6,21	6,10	6,03	6,38	6,54	6,61	5,47	6,24	5,75	6,01	6,22

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

oleh perbaikan kinerja ekspor barang sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi global dan Amerika Serikat[6] selaku mitra negara dagang utama Bali. Sementara kinerja ekspor jasa, meskipun sedikit melambat, namun tetap dapat tumbuh tinggi sejalan dengan masuknya periode *peak season* pariwisata Bali di triwulan laporan.

Dari sisi penawaran, meningkatnya kinerja lapangan usaha utama di Bali yang meliputi akomodasi makan minum (akmamin), perdagangan, transportasi, konstruksi dan industri pengolahan mendorong peningkatan kinerja ekonomi Bali. Masuknya periode *peak season* pariwisata dan liburan sekolah, terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara (wisman)[7] serta peningkatan aktivitas kegiatan *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE) mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha akmamin, transportasi dan perdagangan. Meningkatnya kinerja perdagangan juga didorong oleh adanya pembayaran gaji ke-13 PNS dan tahun ajaran baru serta perayaan keagamaan pada triwulan laporan.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Bali di Sisi Penawaran (%, yoy)

Lapangan Usaha	2015				2015	2016				2016	2017		
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.59	4.4	1.5	2.45	2.72	2.03	0.34	6.23	3.78	3.10	5,73	5,92	4,74
Pertambangan dan Penggalian	(4.19)	(6.5)	(9.8)	(6.57)	(6.83)	5.01	6.31	5.71	0.35	4.28	2,54	0,39	1,91
Industri Pengolahan	6.73	8.6	6.9	6.34	7.13	4.68	2.15	3.30	2.99	3.26	3,72	-0,09	0,50
Pengadaan Listrik, Gas	8.58	(2.5)	(0.6)	1.48	1.59	10.58	15.68	9.90	(1.63)	8.31	0,40	-0,16	8,40
Pengadaan Air	0.93	1.1	0.8	5.12	1.99	9.64	6.82	6.14	3.05	6.34	1,82	4,86	3,05
Konstruksi	2.67	3.6	6.1	7.59	5.01	7.62	8.07	6.98	6.43	7.26	6,41	7,29	8,02
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.92	6.8	9.1	7.86	7.94	8.57	6.49	5.22	6.31	6.61	7,71	8,12	9,64
Transportasi dan Pergudangan	4.02	3.8	5.1	5.15	4.54	6.89	8.18	10.22	5.55	7.72	5,28	6,05	6,07
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.42	6.2	5.7	5.19	6.11	6.15	6.78	7.48	6.31	6.69	7,78	9,26	10,71
Informasi dan Komunikasi	9.79	9.0	10.8	10.12	9.94	8.23	8.91	8.06	9.15	8.59	7,71	8,36	7,58
Jasa Keuangan	6.49	4.0	10.4	5.78	6.66	8.45	7.67	7.05	9.08	8.06	5,06	6,34	0,71
Real Estate	5.86	4.9	4.9	5.09	5.20	5.79	5.53	4.52	2.77	4.63	2,69	3,42	4,03
Jasa Perusahaan	5.23	6.9	7.2	8.54	6.99	10.14	6.39	6.27	4.87	6.85	6,02	7,11	5,90
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.28	7.9	9.4	8.31	8.27	5.48	15.19	2.32	0.05	5.44	-3,89	-5,06	-1,34
Jasa Pendidikan	8.75	8.8	8.2	9.91	8.94	9.50	9.37	8.72	8.15	8.91	7,30	8,11	5,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.06	7.9	9.8	9.26	8.76	9.96	9.50	8.57	8.06	9.00	7,58	7,92	7,76
Jasa lainnya	8.96	7.4	7.6	8.01	7.99	7.70	8.34	9.09	8.92	8.52	8,53	8,26	7,52
PDRB	5.94	5.86	6.21	6.10	6.03	6.38	6.54	6.61	5.47	6.24	5,75	6,01	6,22

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

6 Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) IMF pada periode Oktober 2017 pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017 diprakirakan tumbuh 3,7% (yoy) dan AS sebesar 2,3% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi 2016 yang masing-masing tumbuh sebesar 3,2% (yoy) dan 1,5% (yoy)

7 Jumlah kunjungan wisman pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 1,74 juta orang atau meningkat 27,51% (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulan II 2017 yang tumbuh sebesar 24,54% (yoy) atau dengan jumlah sebesar 1,47 juta orang.

Sementara itu peningkatan kinerja konstruksi, sejalan dengan peningkatan persentase realisasi pembangunan proyek infrastruktur pemerintah dan peningkatan kapasitas industri perhotelan termasuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan *IMF-World Bank Annual Meeting 2018* (IMF-WB AM 2018). Membaiknya kinerja ekonomi dunia dan negara mitra dagang utama Bali yaitu Amerika Serikat serta peningkatan permintaan produk *handicraft* dan olahan kayu menyambut natal dan tahun baru mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan.

1.1.2. *Tracking* Kinerja Ekonomi Bali Triwulan Iv 2017 dan Tahun 2017

Kinerja ekonomi Bali pada triwulan IV 2017 mendatang diprakirakan akan mengalami perlambatan. Ekonomi yang melambat, dari sisi permintaan bersumber dari potensi perlambatan komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri. Sejalan dengan itu, dari sisi penawaran perlambatan bersumber dari beberapa lapangan usaha utama meliputi lapangan usaha pertanian, akmamin, perdagangan dan transportasi.

Perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga dan lapangan usaha perdagangan seiring dengan tidak adanya lagi stimulus fiskal berupa pembayaran gaji ke 13 & 14 serta THR seperti 2 triwulan sebelumnya. sejalan dengan itu, melambatnya kinerja ekspor luar negeri khususnya ekspor jasa dan lapangan usaha akmamin serta transportasi disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas vulkanis gunung Agung.

Berdasarkan perkembangan terakhir, beberapa negara mengeluarkan *travel advisory*[8] sehingga akan berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisman bahkan telah terkonfirmasi dari beberapa hotel dan villa sejumlah lebih dari 11.031[9] *room night* dibatalkan untuk dipergunakan sepanjang triwulan IV 2017 akibat kondisi tersebut baik oleh wisatawan domestik (wisdom) maupun oleh wisatawan mancanegara (wisman). Dengan perkembangan terkini yaitu mulai terjadinya erupsi Gunung Agung pada tanggal 21 November 2017, maka diprakirakan akan menjadi faktor penahan kinerja ekonomi Bali pada triwulan IV 2017, terutama terkait dengan lapangan usaha maupun komponen permintaan yang terkait secara langsung dengan industri pariwisata Bali.

Sementara itu, prakiraan peningkatan frekuensi musim hujan dan angin kencang berpotensi menyebabkan penurunan produksi komoditas hortikultura dan perikanan sehingga akan menahan laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian pada triwulan IV 2017. Dari berbagai *prompt indicator* ekonomi regional Bali, hasil survei dan *liaison*, terindikasi tendensi perlambatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan IV 2017, yang diprakirakan akan berada pada kisaran 5,40% - 5,80% (yoy).

Kinerja ekonomi Bali secara keseluruhan pada tahun 2017 diprakirakan akan tumbuh dalam kisaran 5,70%-6,10% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan kinerja tersebut dari sisi permintaan disebabkan oleh melambatnya konsumsi pemerintah yang disebabkan oleh adanya penyesuaian organisasi pemeritah daerah (OPD) pada awal tahun 2017. Perlambatan ekonomi Bali pada tahun 2017 juga disebabkan oleh melambatnya konsumsi rumah tangga, yang disebabkan oleh kecenderungan

8 *Travel advisory* dikeluarkan oleh USA, Inggris, Singapura, Malaysia, Australia, New Zeland dan Korea Selatan kepada warga negaranya yang akan berkunjung ke Bali

9 Berdasarkan data yanng dihimpun secara sampling bekerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Bali, berhasil dihimpun data dari 44 hotel dan villa dengan jumlah pembatalan sebesar 11.031 *room night* sepanjang triwulan IV 2017, dengan prakiraan jumlah wisman yang batal berkunjung adalah 2.535 orang wisatawan mancanegara (wisman) dan 2.085 wisatawan domestik (wisdom).

konsumen untuk menahan laju belanja untuk berjaga-jaga. Melambatnya kinerja ekspor luar negeri yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung dan masih melambatnya laju ekspor barang ikut menahan laju kinerja ekonomi Bali pada tahun 2017. Sementara itu dari sisi penawaran, perlambatan kinerja ekonomi Bali pada tahun 2017 disebabkan oleh melambatnya kinerja industri pengolahan sejalan dengan melambatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor. Selain itu, perlambatan kinerja transportasi yang disebabkan oleh kapasitas operasional Bandara yang mendekati optimum dan potensi terganggunya operasional bandara I Gusti Ngurah Rai akibat peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung menjadi penahan kinerja lapangan usaha ini.

1.2. PDRB SISI PERMINTAAN

Kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2017 yang meningkat, didorong oleh peningkatan kinerja konsums rumah tangga dan konsumsi pemerintah serta investasi, sementara ekspor luar negeri meskipun melambat namun tetap tumbuh tinggi pada triwulan laporan.

Secara keseluruhan, perekonomian Bali sepanjang triwulan III tahun 2017 dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong peningkatan kinerja meliputi:

1. Telah dilakukannya penyesuaian personil dan akun anggaran terkait dengan perubahan struktur organisasi pemerintah daerah (OPD) pada awal tahun 2017 yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali. Hal ini mendorong peningkatan laju konsumsi pemerintah;
2. Periode liburan sekolah, tahun ajaran baru sekolah dan pembayaran gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) serta tidak adanya kenaikan tarif tenaga listrik[10], mendorong peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga; lapangan usaha perdagangan dan komponen konsumsi pemerintah;
3. Peningkatan kinerja komponen ekspor, lapangan usaha akomodasi makan minum dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran didorong oleh:
   - Masuknya periode peak season pariwisata pada triwulan III 2017;
   - Pertumbuhan signifikan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), khususnya dari Tiongkok;
   - Penambahan penerbangan direct flight baru dari dan ke Bali dengan beberapa negara asal wisman;
   - Peningkatan aktivitas MICE khususnya oleh pihak swasta maupun institusi pemerintah.
4. Adanya faktor musiman, berupa perayaan hari keagamaan, mendorong peningkatan kinerja komponen konsumsi rumah tangga dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran;
5. Peningkatan realisasi pencairan dana desa dan berlanjutnya persiapan beberapa pelaku usaha perhotelan untuk pelaksanaan kegiatan IMF-World Bank Annual Meeting 2018, melalui peningkatan kapasitas usaha dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, mendorong peningkatan kinerja kom-ponen investasi dan lapangan usaha konstruksi serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran;
6. Peningkatan produksi pada beberapa komoditas hortikultura semusim (bawang merah) dan

10 Tarif Tenaga Listrik pada triwulan II 2017 (bulan Mei) mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.352 per Kwh dari sebelumnya Rp1.034 per Kwh untuk pelanggan 900 watt

11 Pada triwulan III 2017, ada penambahan frekuensi penerbangan, yaitu maskapai Batik Air (Chennai-Denpasar) dan *Air Asia Xtra* (Kalkota-Denpasar)

horti-kultura tahunan (jeruk dan salak) serta peternakan, mendorong peningkatan nilai tambah lapangan usaha pertanian;

7. Adanya penambahan rute penerbangan[11] sepanjang triwulan III 2017 mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi, akomodasi makan minum dan komponen ekspor (jasa);

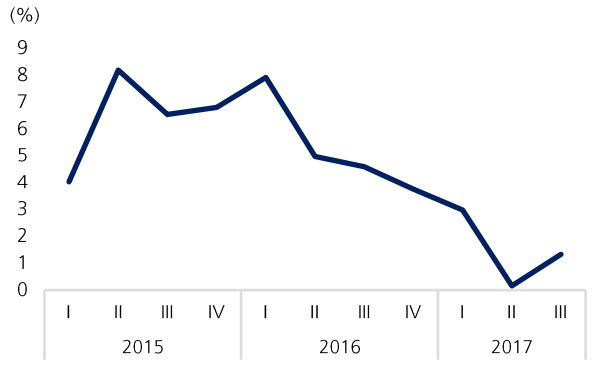
Selain faktor domestik tersebut, faktor global berupa perbaikan kinerja ekonomi dunia dan Amerika Serikat (sebagai mitra dagang utama Bali) juga ikut mendorong peningkatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan laporan.

1.2.1. Konsumsi

Kinerja konsumsi pada periode triwulan tumbuh sebesar 4,72% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 2,30% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh peningkatan kinerja seluruh komponen konsumsi pada triwulan laporan.

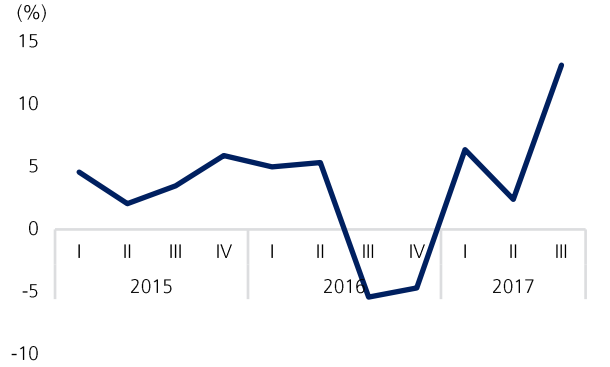
Konsumsi Swasta: Rumah Tangga & Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT)

Kinerja konsumsi swasta pada periode ini didorong oleh peningkatan kinerja komponen konsumsi rumah tangga dan LNPRT. Konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 4,43% (yoy), meningkat dibandingkan kinerja komponen ini pada triwulan II 2017 yang tercatat tumbuh sebesar 3,77% (yoy), sejalan dengan itu kinerja LNPRT tumbuh sebesar 0,14% pada periode ini, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (0,14%, yoy). Berdasarkan kelompok sub komponennya, meningkatnya kinerja konsumsi swasta, khususnya rumah tangga ditopang oleh peningkatan kinerja konsumsi kelompok perumahan dan perlengkapan rumah tangga[12] sejalan dengan adanya pembayaran gaji ke-13 PNS. Selain itu, juga didorong oleh peningkatan konsumsi kelompok restoran dan hotel[13] seiring dengan masuknya periode liburan sekolah pada periode ini dan membaiknya kinerja konsumsi kelompok kesehatan dan pendidikan[14] didorong oleh masuknya periode tahun ajaran baru pada triwulan laporan.



Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 1.2 Pertumbuhan Konsumsi Kelompok Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga



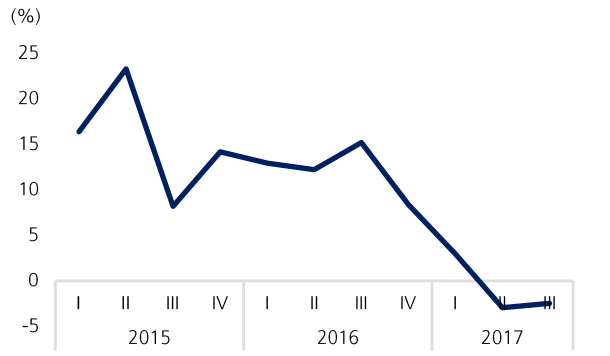
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Grafik 1.3 Pertumbuhan Konsumsi Kelompok Restoran dan Hotel

12 Konsumsi kelompok perumahan dan perlengkapan rumah tangga tumbuh sebesar 1,33% (yoy) pada triwulan III 2017, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 yang tercatat sebesar 0,16% (yoy)

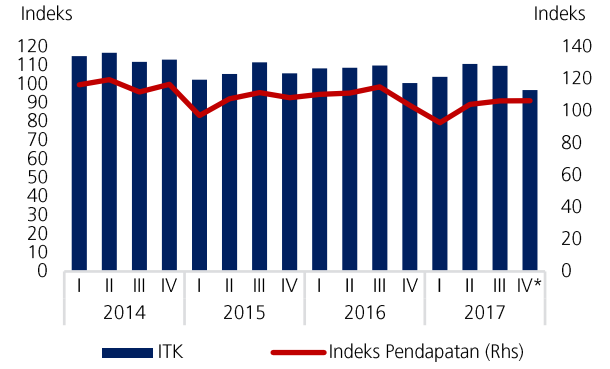
13 Konsumsi kelompok restoran dan hotel tumbuh sebesar 13,14% (yoy) pada triwulan III 2017, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 yang tercatat sebesar 2,40% (yoy)

14 Konsumsi kelompok pendidikan dan kesehatan terkontraksi sebesar 2,47% (yoy) pada triwulan III 2017, tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan II 2017 yang terkontraksi sebesar 2,94% (yoy)



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Bali

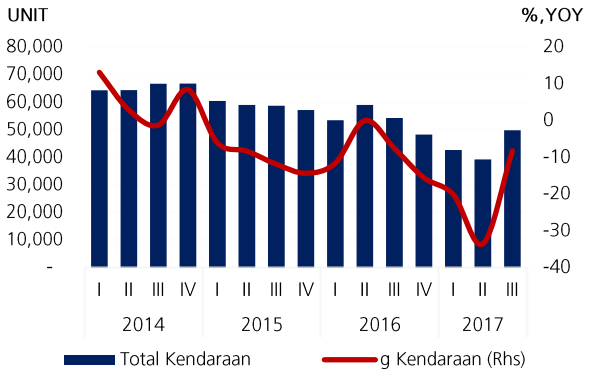
Grafik 1.4 Pertumbuhan Konsumsi Kelompok Kesehatan dan Pendidikan



Sumber : Bank Indonesia

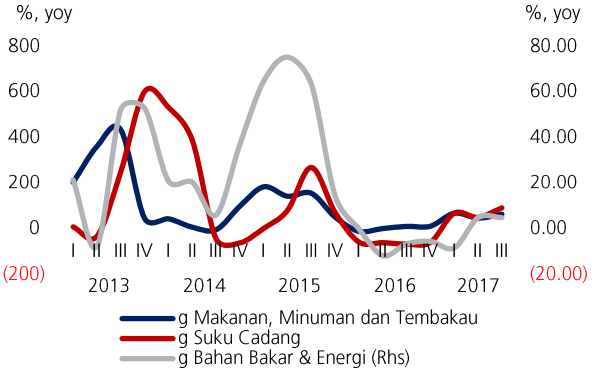
Grafik 1.5 Perkembangan Indeks Tendensi Konsumen dan Indeks Pendapatan

Peningkatan kinerja komponen konsumsi swasta, khususnya rumah tangga pada periode ini juga ditopang oleh terkendalinya laju inflasi, seiring dengan ketiadaan kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat. Konsumsi swasta yang tumbuh membaik juga tidak terlepas oleh adanya kebijakan stimulus fiskal berupa pembayaran gaji ke-13 untuk PNS sehingga berdampak pada ekspektasi konsumen yang masih terjaga dalam level yang tinggi. Hal ini terkonfirmasi dari relatif tingginya indeks tendensi konsumen[15] pada triwulan III 2017 yang terutama didorong oleh peningkatan indeks pendapatan. Meningkatnya kinerja konsumsi swasta juga terkonfirmasi dari hasil survei penjualan eceran yang menunjukkan peningkatan penjualan pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, suku cadang dan bahan bakar serta energi[16].



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Bali

Grafik 1.6 Perkembangan Penjualan Kendaraan Baru



Sumber : Survei Penjualan Eceran

Grafik 1.7 Pertumbuhan Penjualan Eceran Kelompok Makanan, Minuman, Tembakau; Suku Cadang Bahan dan Energi

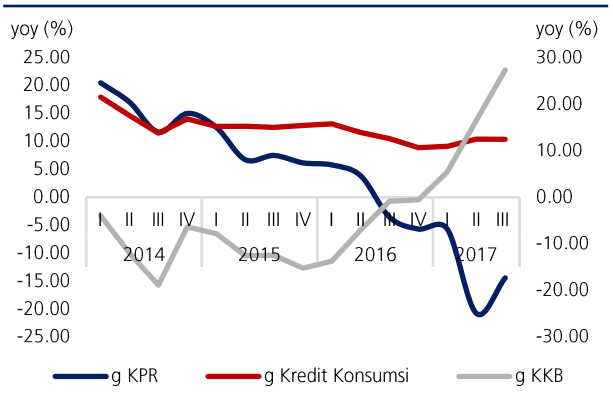
Akselerasi kinerja konsumsi swasta pada triwulan III 2017, juga didorong oleh membaiknya perkembangan penjualan kendaraan baru[17] pada triwulan laporan, seiring dengan masuknya tahun ajaran baru yang

15 Indeks Tendensi Konsumen (ITK) pada triwulan III 2017 masih tetap tinggi yaitu sebesar 109,83, terutama didorong oleh adanya peningkatan indeks pendapatan yaitu sebesar 106,23 lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 yang sebesar 104,05

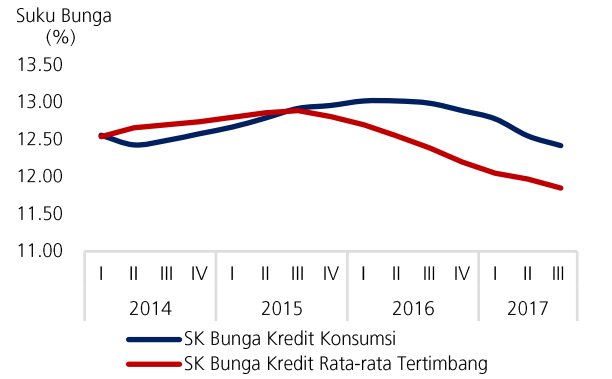
16 Berdasarkan SPE dari KPw BI Bali, terdapat peningkatan pertumbuhan penjualan eceran pada kelompok makanan, minuman dan tembakau dari 45,89% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi 62,46% (yoy), kelompok suku cadang tumbuh menjadi 90,64% (yoy) dari 48,84% (yoy) triwulan II 2017 dan kelompok bahan bakar dan energi tumbuh sebesar 5,56% (yoy) pada periode ini dari sebelumnya 4,76% (yoy).

17 Berdasarkan data penjualan kendaraan baru di Bali, pada triwulan III 2017 jumlah kendaraan baru yang terjual tercatat sebesar 49.771 unit (motor dan mobil) atau tumbuh sebesar -8,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -33,56% (yoy) atau 39.196 unit

biasanya menjadi faktor pendorong peningkatan penjualan kendaraan baru di Bali setiap tahun.



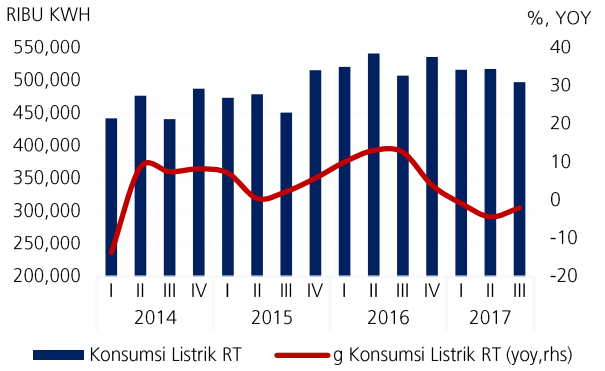
Grafik 1.8 Perkembangan Kredit Konsumsi, KPR dan KKB



Grafik 1.9 Perkembangan Suku Bunga Kredit Konsumsi dan Suku Bunga Kredit Rata-rata Tertimbang

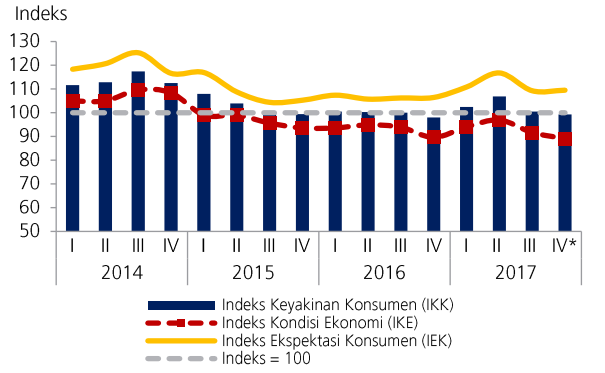
Meningkatnya konsumsi swasta pada triwulan laporan juga terkonfirmasi oleh meningkatnya pertumbuhan kredit konsumsi, kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB)[18]. Kondisi ini menunjukkan masih kuatnya tingkat permintaan dan optimisme konsumen di Bali pada periode ini. Kondisi tersebut juga didukung oleh terus belanjutnya penurunan tingkat suku bunga kredit, termasuk penurunan suku bunga kredit konsumsi[19]. Masih kuatnya optimisme konsumen juga terkonfirmasi dari nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang tercatat 100,47 (masih diatas 100, optimis).

Perkembangan kinerja konsumsi swasta yang lebih baik pada periode ini, juga terkonfirmasi oleh meningkatnya pertumbuhan konsumsi listrik rumah tangga pada periode ini[20]. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan kinerja konsumsi perumahan dan perlengkapan rumah tangga yang tumbuh lebih tinggi pada triwulan ini dibandingkan triwulan sebelumnya.



Sumber : PLN Wilayah Bali

Grafik 1.10 Perkembangan Konsumsi Listrik RT



Sumber : Survei Konsumen

Grafik 1.11 Perkembangan Hasil Survei Konsumen

18 Kredit konsumsi pada periode ini tumbuh sebesar 10,40% (yoy) sedikit lebih rendah dibandingkan 10,44% (yoy) pada triwulan II 2017. Masih tumbuh tingginya pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan KPR yang tumbuh -14,42% (yoy) lebih tinggi dari -20,77% (yoy) dan pertumbuhan KKB yang meningkat dari 27,35% (yoy) pada periode ini dari sebelumnya 16,53% (yoy).

19 Suku bunga kredit konsumsi tercatat sebesar 12,42% pa pada periode ini, lebih rendah dibandingkan 12,55% pa pada triwulan II 2017.

20 Konsumsi listrik rumah tangga tercatat sebesar 497.190 Kwh atau tumbuh sebesar -2,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan -4,38% (yoy) atau sebesar 517,460 Kwh.

Tracking Kinerja Triwulan IV 2017

Kinerja komponen konsumsi swasta pada triwulan IV 2017, berdasarkan perkembangan terakhir, diprakirakan menunjukkan pertumbuhan positif namun dengan tendensi perlambatan. Hal ini disebabkan oleh perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga. Sedangkan kinerja LNPRT tumbuh lebih tinggi sejalan dengan peningkatan aktivitas kegiatan politik menghadapi pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada Langsung) tahun 2018. Beberapa faktor menjadi penyebab melambatnya kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2017, meliputi: i) ketiadaan stimulus fiskal berupa pembayaran gaji ke 13 dan 14 seperti dua triwulan sebelumnya; ii) alokasi anggaran belanja konsumen yang telah terserap kegiatan liburan dan tahun ajaran baru pada triwulan sebelumnya, sehingga berpotensi membatasi kemampuan konsumsi pada periode triwulan IV 2017. Prakiraan perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2017, juga terkonfirmasi oleh hasil survei konsumen[21] dan prakiraan indeks tendensi konsumen yang menurun[22] pada triwulan IV 2017 meskipun konsumen masih optimis akan terjadi peningkatan pendapatan. Dengan perkembangan terkini, yaitu mulai terjadinya Erupsi Gunung Agung pada 21 November 2017, diprakirakan akan menahan kinerja konsumsi rumah tangga, khususnya di beberapa wilayah sekitar Gunung Agung, yang tentunya akan mempengaruhi kinerja konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Namun demikian masih terdapat potensi peningkatan antara lain didorong oleh adanya perayaan hari keagamaan[23] dan laju inflasi yang tetap terkendali.

Konsumsi Pemerintah

Pada triwulan III 2017, kinerja konsumsi pemerintah menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 6,89% (yoy) pada periode ini, akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 5,17% (yoy). Peningkatan kinerja komponen ini terutama didorong oleh akselerasi kinerja sub komponen konsumsi kolektif pemerintah dan sub komponen konsumsi individu pemerintah[24]. Peningkatan kinerja komponen konsumsi pemerintah pada periode ini, didorong oleh peningkatan realisasi belanja kementerian dan lembaga vertikal yang menggunakan APBN maupun pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (APBD)[25]. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong peningkatan kinerja keuangan daerah pada triwulan laporan, meliputi:

1. Adanya upaya percepatan (akselerasi) realisasi belanja barang dan jasa yang dilakukan pada tahun 2017 (APBN), setelah pada periode tahun 2016, terdapat beberapa Kementerian dan Lembaga yang melakukan penundaan realisasi belanja untuk beberapa proyek dan program, antara lain melalui percepatan tahapan pengadaan barang dan jasa, termasuk pelelangan.
2. Telah selesainya penyesuaian personil dan akun anggaran akibat penataan organisasi OPD yang dilakukan pada awal tahun 2017;
3. Peningkatan pendapatan daerah terutama didorong oleh peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)[26], sejalan dengan meningkatnya kinerja ekonomi pada periode ini, termasuk

21 Hasil survei konsumen pada triwulan IV 2017 (sd Nopember) menunjukkan terjadinya penurunan seluruh indeks konsumen yaitu IKK turun dari 100,47 (optimis) pada periode ini menjadi 99,3 (TW IV 2017), IKE menjadi 89,1 (TW IV 2017) dari 91,67.

22 Indeks Tendensi Konsumen pada triwulan IV 2017 diprakirakan sebesar 96,85, lebih rendah dibandingkan 109,83 pada TW III 2017

23 Pada triwulan IV 2017 terdapat perayaan keagamaan berupa: Galungan, Kuningan, Natal dan Tahun Baru

24 Berdasarkan data BPS, Konsumsi Kolektif Peemerintah dan Konsumsi individu Pemerintah pada triwulan III 2017 tercatat masing-masing tumbuh sebesar 10,57% (yoy) dan 1,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2017 yang masing-masing sebesar 0,05% (yoy) dan -13,05% (yoy)

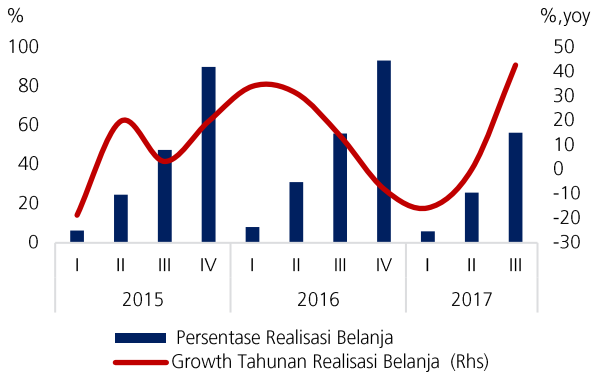
25 Pada triwulan III 2017, persentase realisasi belanja APBD Bali, gabungan APBD 9 kabupaten/kota dan APBN tercatat masing-masing sebesar 56,25%, 50,04% dan 61,48% lebih tinggi dibanding triwulan III 2016 yang sebesar 55,89% APBD Bali, 49,52% APBD Kabupaten/kota dan 60,03% APBN.

26 Pada triwulan III 2017, persentase realisasi pendapatan untuk APBD Provinsi Bali dan 9 Kabupaten/kota masing-masing tercatat sebesar 71,94% dan 67,98% lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2016 yang masing-masing sebesar 71,31% dan 67,16%.

perbaikan pertumbuhan penjualan kendaraan sehingga mendorong peningkatan pajak daerah

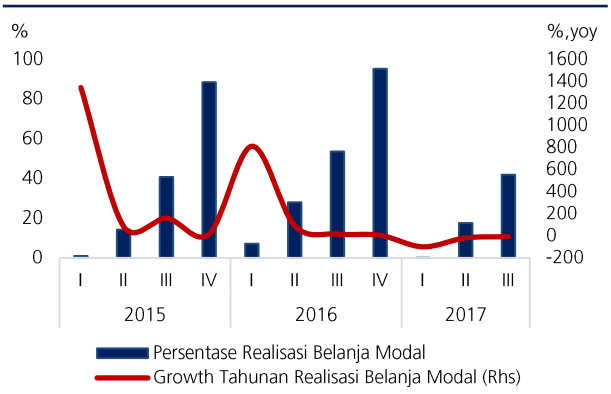
4. Upaya untuk mendorong akselerasi belanja daerah, melalui pelaksanaan kegiatan rapat evaluasi dan monitoring serta pemantauan secara berkala realisasi anggaran belanja pada setiap OPD.
5. Adanya perubahan kewenangan pengelolaan gaji guru SMU dan sederajat dari kabupaten/kota (2016), menjadi kewenangan provinsi (2017), sehingga mendorong peningkatan realisasi pada triwulan laporan
6. Pembayaran gaji ke-13 PNS mendorong peningkatan realisasi belanja pegawai pada periode ini.

Akselerasi kinerja konsumsi pemerintah, didorong antara lain oleh meningkatnya realisasi belanja pemerintah Provinsi Bali baik secara persentase maupun nominal di periode ini[27]. Peningkatan ini terutama dikontribusikan oleh peningkatan realisasi belanja transfer yang tumbuh signifikan baik secara nominal maupun persentase[28] pada periode ini. Sementara itu, belanja operasional dan belanja modal menunjukkan tendensi perlambatan disebabkan dampak lanjutan penataan OPD pada awal tahun 2017, meskipun demikian realisasi pada periode ini telah menujukkan akselerasi[29] seiring dengan upaya percepatan realisasi fiskal melalui evaluasi dan monitoring secara berkala serta telah selesainya penataan personil dan penyesuaian akun anggaran terkait penataan OPD.



Sumber : BPKAD Prov. Bali

Grafik 1.12 Perkembangan Belanja APBD Provinsi Bali



Sumber : BPKAD Prov. Bali

Grafik 1.13 Perkembangan Realisasi Belanja Modal

Akselerasi peningkatan konsumsi pemerintah juga didorong oleh meningkatnya realisasi belanja gabungan APBD 9 kabupaten/kota, baik secara persentase maupun secara nominal[30]. Keadaaan ini didorong oleh upaya pemerintah di 9 kabupaten/kota yang melakukan percepatan realisasi belanja baik operasional, transfer maupun belanja modal[31] melalui kegiatan evaluasi dan monitoring secara berkala dan

27 Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp3,79 triliun atau meningkat sebesar 16,70% (yoy) dibandingkan triwulan III 2016 yang sebesar Rp3,25 triliun.

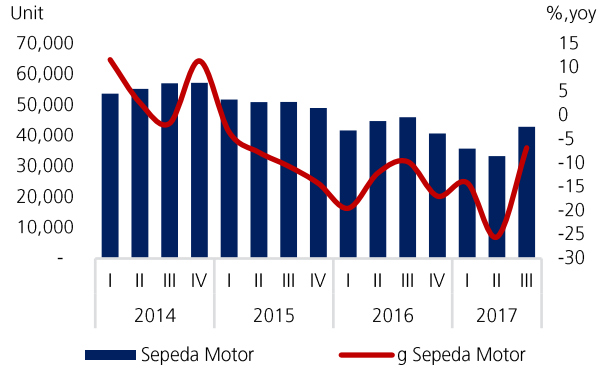
28 Realisasi belanja transfer pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp 976 miliar atau tumbuh sebesar 4,87% (yoy) dari Rp 930 miliar di triwulan III 2016. Persentase realisasi di triwulan III 2017 mencapai 51,59%, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2016 yang sebesar 47,44%

29 Persentase realisasi belanja operasi dan belanja modal pada triwulan III 2017 yaitu masing-masing sebesar 61,08% dan 41,88% meningkat signiifkan dibandingkan triwulan II 2017 yang masing-masing masih mencapai 32,14% dan 17,58%.

30 Realisasi belanja gabungan 9 APBD kabupaten/kota pada triwulan III 2017tercatat sebesar Rp 10 triliun atau meningkat sebesar 10,25% (yoy) dibandingkan triwulan III 2016 yang sebesar Rp 9,07 triliun. Persentase realisasi belanja pada triwulan III 2017 mencapai 50,04% dari pagu, lebih tinggi dibaandingkan triwulan III 2016 yang sebesar 49,52%.

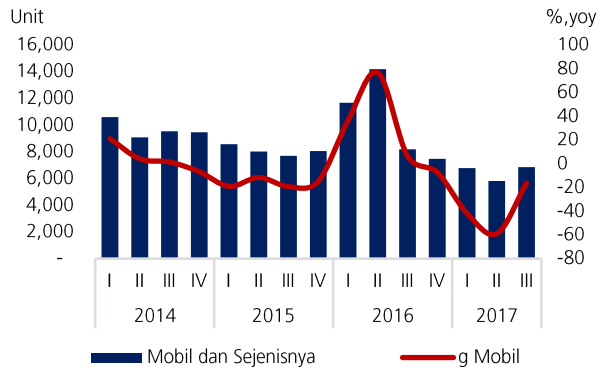
31 Pada triwulan III 2017, realisasi belanja operasional tercatat meningkat 8,85% (yoy), yaitu dari Rp 6,77 triliun menjadi Rp7,36 triliun; realisasi belanja transfer meningkat 23,65% (yoy), yaitu dari Rp1,31 triliun menjadi Rp1,62 triliun dan realisasi belanja modal meningkat 2,24% (yoy), yaitu dari Rp999 miliar menjadi Rp1,02 triliun

upaya mempercepat proses tahapan pengadaan. Strategi ini mendorong capaian realisasi persentase belanja pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah melampui realisasi persentase rata-rata nasional[32].



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Prov. Bali

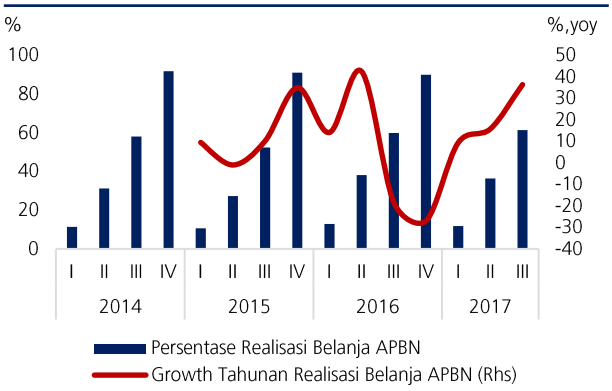
Grafik 1.14 Perkembangan Penjualan Sepeda Motor



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Prov. Bali

Grafik 1.15 Perkembangan Penjualan Mobil

Peningkatan kinerja komponen konsumsi pemerintah, juga didorong oleh meningkatnya realisasi pendapatan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, didorong oleh peningkatan PAD. Meningkatnya kinerja ekonomi pada triwulan III 2017, yang antara lain didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat yang berkontribusi pada membaiknya penjualan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor[33]. Kondisi ini mendorong peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah sehingga memberikan kontribusi pada peningkatan PAD di periode ini.



Sumber: DJPBN Wilayah Bali

Grafik 1.16 Perkembangan Realisasi Belanja APBN di Bali

Peningkatan kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan laporan, juga dikontribusikan oleh peningkatan kinerja realisasi belanja oleh kementerian dan lembaga vertikal pengguna APBN baik secara persentase maupun nominal[34] di Bali. Percepatan tahapan pengadaan termasuk tahapan tender mendorong percepatan realisasi pengerjaan, sehingga berimbas pada peningkatan persentase realisasi fisik dan keuangan dari APBN. Percepatan realisasi belanja APBN juga didorong oleh adanya rencana pemangkasan anggaran, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2017 sebesar Rp16 triliun secara nasional, sehingga mendorong beberapa satuan kerja lembaga vertikal mempercepat realisasi belanjanya agar tidak mengalami pemangkasan anggaran.

32 Persentase realisasi rata-rata nasional pada triwulan III 2017 untuk belanja di tingkat provinsi mencapai 56% (Bali: 56,25%) dan tingkat kabupaten/kota 49,5% (gabungan 9 kabupaten/kota di Bali: 50,04%)

33 Realisasi penjualan motor dan mobil pada triwulan III 2017 masing-masing tumbuh sebesar -6,80% (yoy) dan -16,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 yang tumbuh masing-masing sebesar -25,50% (yoy) dan -59,03% (yoy).

34 Pada periode ini, realisasi belanja APBN tercatat sebesar Rp6,47 triliun atau meningkat sebesar 22,03% (yoy) dibandingkan periode triwulan III 2016 yang sebesar Rp5,30 triliun. Sementara itu persentase realisasi tercatat sebesar 61,48% pada periode Triwulan III 2017, lebih tinggi dibandingkan 60,03% pada triwulan III 2016

Tracking Kinerja Triwulan IV 2017

Kinerja komponen Konsumsi Pemerintah pada triwulan IV 2017 diprakirakan akan meningkat dibanding-kan dengan triwulan III 2017. Peningkatan tersebut, dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik pada tingkat provinsi maupun gabungan 9 kabupaten/kota, didorong oleh upaya percepatan realisasi belanja barang dan jasa dalam rangka mengejar keterlambatan realisasi pada semester I 2017 sejalan dengan adanya penataan organisasi pemerintahan daerah (OPD). Selain itu, telah selesainya penyesuaian struktur birokrasi dan nomenklatur anggaran akibat perubahan struktur OPD diprakirakan menjadi salah satu faktor pendorong percepatan kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2017. Sejalan dengan hal tersebut, prakiraan peningkatan juga didorong oleh upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah sejalan dengan membaiknya penjualan kendaraan pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, dari sisi APBN, peningkatan kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2017 diprakirakan akan didorong oleh peningkatan persentase pengerjaan proyek infrastruktur dan upaya akselerasi percepatan realisasi belanja oleh Kementerian dan Lembaga Vertikal untuk mencapai target realisasi belanja yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Bersamaan dengan itu, mulai terealisasinya pengerjaan proyek pemerintah yang menggunakan dana APBN dan APND[35] dalam rangka persiapan *IMF-World Bank Annual Meeting 2018*, juga ikut menjadi pendorong akselerasi kinerja komponen konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2017.

Meskipun demikian, komponen konsumsi pemerintah triwulan berjalan masih menghadapi risiko perlambatan, terutama risiko pemangkasan anggaran akibat potensi tidak tercapainya target pendapatan pemerintah pusat yang berpotensi akan berimbas ke Bali, khususnya terkait dengan dana perimbangan (dana transfer) seperti yang terjadi pada akhir tahun 2016 lalu. Resiko lain yang berpotensi membatasi kinerja komponen ini adalah peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung sejak akhir triwulan IV 2017, yang berpotensi menyebabkan tidak optimalnya realisasi belanja pemerintah di Kabupaten Karangasem (lokasi Gunung Agung berada) dan beberapa kabupaten sekitarnya karena fokus menangani dampak lanjutan dari kondisi ini termasuk penanganan pengungsi. Dengan perkembangan terakhir diketahui bahwa telah mulai terjadi erupsi Gunung Agung pada tanggal 21 November 2017, diprakirakan akan semakin berpotensi menahan laju kinerja komponen konsumsi pemerintah.

1.2.2. Investasi

Kinerja investasi pada triwulan III 2017 menunjukkan akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama didorong oleh peningkatan kinerja investasi bangunan.

Komponen investasi[36] pada triwulan III 2017 yang mencatat pertumbuhan sebesar 6% (yoy), menujukkan akselerasi dibanding triwulan II 2017 yang tumbuh sebesar 3,89% (yoy). Peningkatan tersebut, terutama didorong oleh peningkatan kinerja investasi bangunan[37]. Sementara investasi non bangunan tumbuh terbatas[38] meskipun masih tetap positif pada periode ini. Meningkatnya kinerja investasi bangunan, berdasarkan survei dan *liaison* terutama didorong oleh peningkatan kinerja investasi bangunan dari pihak swasta, sejalan dengan upaya

35 Proyek pembangunan *underpass* Tugu Ngurah Rai, proyek bersumber dari dana APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp 326 miliar (sebesar Rp 200 miliar diantaranya merupakan biaya untuk konstruksi fisik). Pembebasan tanah untuk proyek ini menjadi tanggung jawab Pemkab. Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 85 miliar. Pembangunan proyek ini telah mulai dilaksanakan pada triwulan IV 2017.

36 Investasi dalam PDRB merupakan gabungan dari Perubahan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan persediaan.

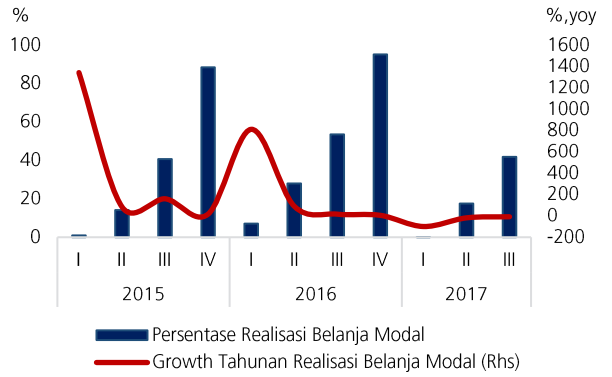
37 Investasi bangunan pada triwulan III 2017 tumbuh sebesar 7,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 yang sebesar 2,84% (yoy)

38 Investasi non bangunan pada triwulan III 2017 tumbuh sebesar 3,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2017 yang sebesar 5,55% (yoy)

untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pelayanan terutama pada industri hotel, termasuk dalam rangka persiapan IMF-WB AM 2018.

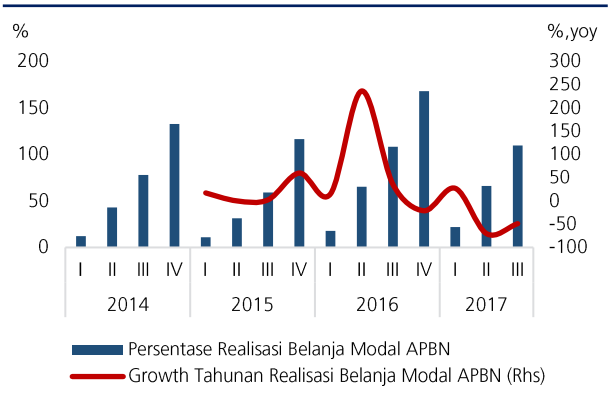
Peningkatan kinerja investasi bangunan tercemin oleh naiknya realisasi pengadaan semen[39] di Bali pada triwulan III 2017. Peningkatan realisasi pengadaan semen pada triwulan laporan, menjadi salah satu pendorong peningkatan kinerja investasi khususnya bangunan dan menunjukkan masih besarnya optimisme pelaku usaha terhadap perkembangan ekonomi ke depan. Optimisme tersebut, didukung oleh terus berlanjutnya penurunan suku bunga kredit perbankan, termasuk suku bunga kredit investasi sebagai respon dari penurunan *BI 7 days Reverse Repo Rate* menjadi 4,25%, relaksasi ketentuan LTV, membaiknya kinerja ekonomi global dan terus meningkatnya kinerja industri pariwisata Bali seiring dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman.

Akselerasi kinerja investasi diperiode ini juga didorong oleh peningkatan realisasi nominal belanja modal (APBD)[40] Provinsi Bali. Sejalan dengan itu, peningkatan realisasi belanja modal (APBN)[41] juga menjadi faktor pendorong peningkatan kinerja komponen investasi pada triwulan laporan.



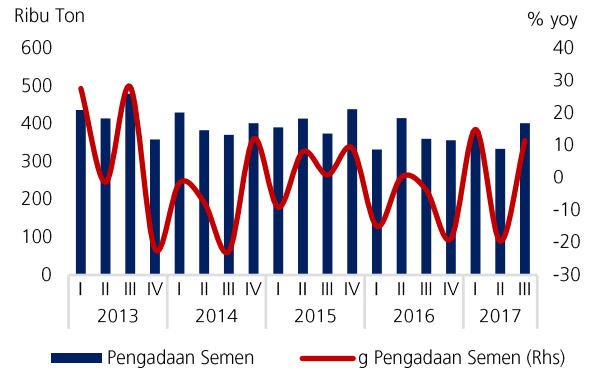
Sumber: BPKAD Prov. Bali

Grafik 1.17 Realisasi Belanja Modal APBD Prov. Bali



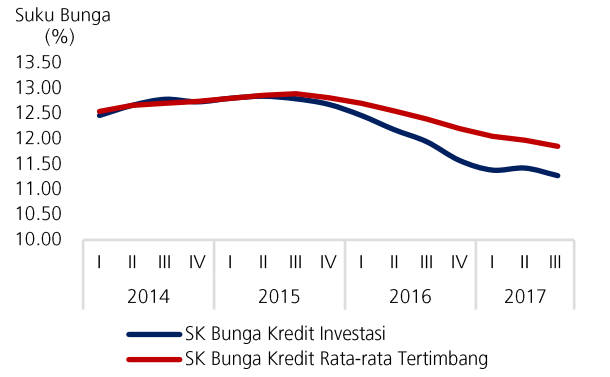
Sumber : DJPBN Wilayah Bali

Grafik 1.18 Realisasi Belanja Modal APBN



Sumber: Asosiasi Semen

Grafik 1.19 Realisasi Pengadaan Semen di Bali



Grafik 1.20 Perkembangan SK Bunga Kredit Investasi

39 Realiasasi pengadaan semen di Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 402 ribu ton atau meningkat sebesar 11,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2017 yang sebesar -19,56% (yoy) atau tercatat sebesar 334 ribu ton.

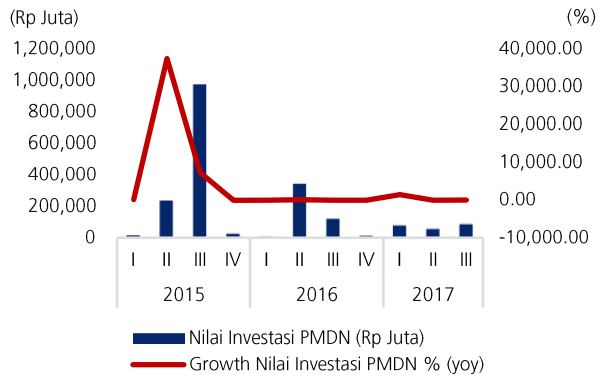
40 Pada riwulan III 2017 realisasi belanja modal APBD Bali terkontraksi sebesar -7,81% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode triwulan sebe-lumnya yang terkontraksi sebesar -18,48% (yoy).

41 Pada riwulan III 2017 realisasi belanja modal APBN di Bali terkontraksi sebesar -48,76% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -70,24% (yoy).

Meningkatnya kinerja komponen investasi pada triwulan III 2017 juga didorong oleh peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA)[42] yang tetap tumbuh meskipun cenderung melambat. Sejalan dengan itu, perbaikan kinerja investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)[43] juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja investasi. Bila dilihat secara sektoral, baik pada PMDN maupun PMA, investasi terbesar pada periode ini terutama dilakukan oleh sektor tersier, yaitu sektor hotel dan restoran[44]. Hal ini terutama dalam rangka peningkatan kapasitas usaha dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan *IMF-WB Annual Meeting 2018* dan juga dalam rangka peningkatan nilai tambah serta daya saing perusahaan, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan tarif kamar dan pendapatan usaha di tengah kompetisi yang semakin ketat.

Meningkatnya kinerja investasi juga terkonfirmasi oleh peningkatan nilai *likert liaison* investasi[45] pada periode ini, terutama didorong oleh konfirmasi dari beberapa responden baik pada lapangan usaha akmamin (hotel), pertanian (perikanan), dan jasa pendidikan yang melakukan peningkatan realisasi investasi pada periode laporan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan.

Sementara itu, kinerja investasi non bangunan yang tumbuh terbatas pada periode ini, berdasarkan hasil survei dan *liaison* disebabkan oleh terbatasnya aktivitas pelaku usaha khususnya pada industri perhotelan maupun industri pengolahan untuk melakukan penambahan investasi berupa pembelian mesin-mesin dan peralatan pada periode ini, karena telah dilakukan pada beberapa periode triwulan sebelumnya. Hal ini terkonfirmasi dari peningkatan investasi non bangunan yang selalu tumbuh tinggi pada beberapa periode triwulan sebelumnya. Perlambatan kinerja investasi non bangunan juga terkonfirmasi dari menurunnya nilai impor *capital goods* (barang modal)[46] yang tumbuh lebih rendah dan mengalami kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya. Melambatnya investasi non bangunan juga terkonfirmasi dari hasil survei SKDU pada triwulan III 2017, yang menunjukkan penurunan nilai SBT investasi[47], terutama dikontribusikan oleh penurunan nilai SBT pada sektor utama di Bali yaitu PHR, pertanian dan transportasi.



Sumber: BKPM, diolah

Grafik 1.21 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN

42 Realisasi PMA pada triwulan III 2017 tercatat sebesar $114, 89 juta atau meningkat sebesar 135,65% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2017 yang sebesar 315,83% (yoy) dengan nominal sebesar $467,63 juta.

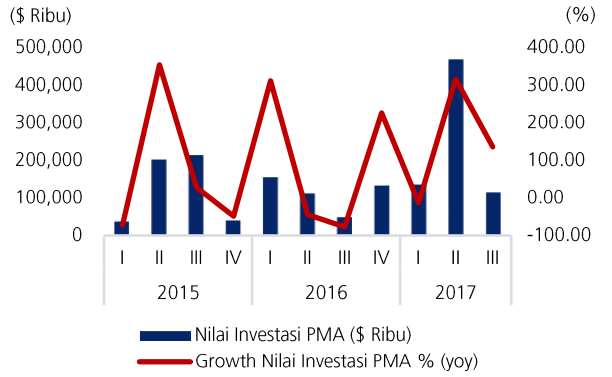
43 Realisasi PMDN pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp86,53 miliar atau tumbuh sebesar -27,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2017 yang sebesar -84,06% (yoy) atau dengan nominal sebesar Rp54,82 miliar.

44 Nilai investasi hotel dan restauran untuk PMA pada triwulan III 2017 tercatat sebesar $57,06 juta, sektor dengan nilai terbesar investasi untuk PMA pada periode ini. Nilai realisasi investasi sektor ini lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang sebesar $222,94 juta. Nilai investasi sektor hotel dan restauran untuk PMDN pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp72,36 miliar, sektor dengan nilai terbesar investasi untuk PMA pada periode ini. Nilai realisasi sektor ini lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang sebesar Rp15,18 miliar.

45 Nilai *likert* investasi (*liaison*) pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 1,12 poin, lebih tinggi dibandingkan nilai *likert* investasi pada triwulan II 2017 yang sebesar 0,88 poin.

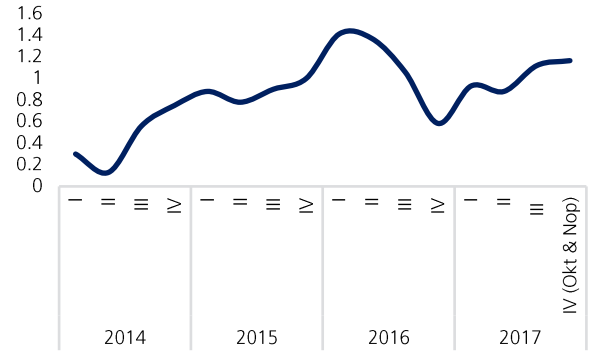
46 Nilai impor barang modal pada triwulan III 2017 tercatat sebesar $2,42 juta, atau mengalami kontraksi sebesar 22,86% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2017 yang tumbuh sebesar 80,55% (yoy) atau dengan nilai sebesar $5,27 juta.

47 Pada triwulan III 2017, SBT Investasi (SKDU) tercatat sebesar 12,18, lebih rendah dibandingkan 18,89 pada triwulan Ii 2017



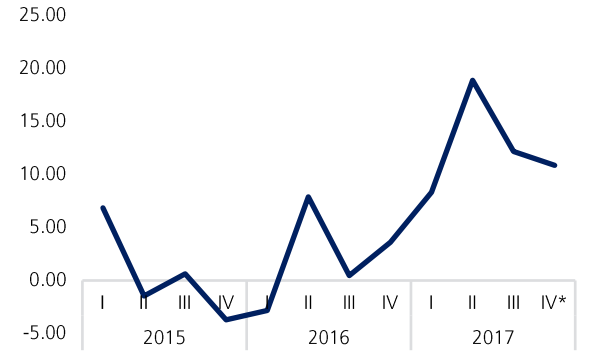
Sumber: BKPM, diolah

Grafik 1.22 Perkembangan Realisasi Investasi PMA



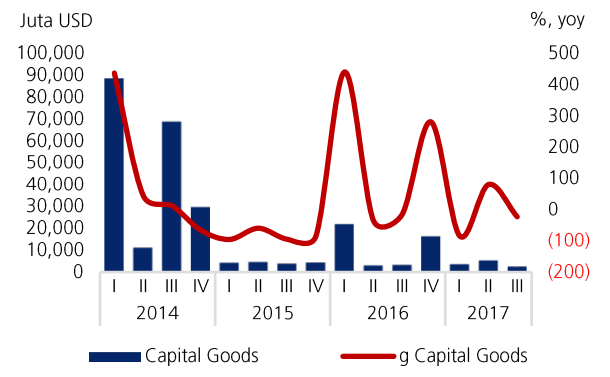
Sumber: Liaison

Grafik 1.23 *Likert* Investasi, *Liaison*



Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha

Grafik 1.24 Perkembangan SBT Investasi SKDU



Sumber : Bea dan Cukai

Grafik 1.25 Perkembangan Nilai Impor *Capital Goods*

Tracking Kinerja Triwulan IV 2017

Perkembangan kinerja investasi pada triwulan IV 2017, diprakirakan akan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan upaya akselerasi percepatan belanja modal untuk APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota, setelah mengalami perlambatan pada semester I 2017 (akibat adanya penataan OPD) dalam rangka mengejar target pagu anggaran belanja modal yang telah ditetapkan.

Prakiraan peningkatan kinerja komponen investasi juga diprakirakan didorong oleh percepatan pengerjaan proyek infrastruktur dan percepatan realisasi belanja modal APBN, termasuk mulai dilakukkan pengerjaan beberapa proyek infrastruktur menghadapi IMF-WB AM 2018 yaitu *underpass* tugu Ngurah Rai yang mulai dikerjakan pada triwulan IV 2017.

Sementara itu, dari sisi investasi swasta, peningkatan kinerja didorong oleh peningkatan optimisme pelaku usaha terhadap membaiknya kinerja ekonomi dan terus berlanjutnya penurunan tingkat suku bunga kredit perbankan serta kondisi ekonomi global yang mendukung sejalan dengan membaiknya ekonomi negara mitra dagang Bali sebagai tujuan Ekspor (Amerika Serikat). Peningkatan kinerja investasi swasta, juga terkonfirmasi dari peningkatan nilai *likert* investasi *liaison*[48] pada triwulan IV 2017 (Oktober dan November). Selain itu, mulai dilakukannya pengerjaan

48 Nilai *likert* investasi (*liaison*) pada triwulan IV 2017 (Oktober & Nopember) tercatat sebesar 1,17 poin, lebih tinggi dari 1,12 poin pada triwulan III 2017

beberapa proyek swasta[49] dalam rangka persiapan *IMF-World Bank Annual Meeting* tahun 2018, juga menjadi faktor pendorong peningkatan kinerja komponen investasi ini pada triwulan IV 2017.

Meskipun terdapat potensi kuat terjadinya peningkatan kinerja investasi pada triwulan IV 2017, namun masih terdapat potensi kinerja komponen ini mengalami perlambatan, yang antara lain terkonfirmasi oleh hasil SKDU yang menunjukkan indikator[50] yang cenderung menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, peningkatan akitivitas vulkanis Gunung Agung pada akhir triwulan III 2017, berpotensi menyebabkan tidak optimalnya realisasi belanja modal dari Kabupaten Karangasem (lokasi Gunung Agung) dan beberapa kabupaten disekitarnya, karena terfokus untuk menangani dampak yang ditimbukan dari peningkatan aktivitas vulkanis tersebut, termasuk pengungsi. Dengan perkembangan terkini, yaitu terjadinya erupsi Gunung Agung pada 21 November 2017 berpotensi kuat menahan laju kinerja investasi pada periode triwulan IV 2017.

1.2.3. Ekspor - Impor

Kinerja ekspor-impor Provinsi Bali masih menunjukkan kinerja yang baik pada triwulan III 2017. Hal ini tercermin oleh tetap tumbuh signifikannya pertumbuhan ekspor meskipun sedikit melambat, sementara kinerja impor mengalami perlambatan yang dalam. Sejalan dengan itu, net ekspor dalam negeri tetap tumbuh signifikan. Sementara itu, neraca perdagangan Provinsi Bali pada triwulan III 2017 mencatat peningkatan yang diindikasikan oleh peningkatan nilai surplus perdagangan[51]. Peningkatan nilai surplus tersebut, didorong oleh peningkatan nilai net ekspor perdagangan luar negeri[52] terutama dikontribusikan oleh membaiknya kinerja ekspor barang. Sementara ekspor jasa tetap tumbuh kuat meskipun sedikit melambat. Pada sisi yang lain, net perdagangan antar daerah mencatatkan penurunan nilai[53], disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor antar daerah, sementara impor antar daerah menunjukkan peningkatan kinerja.

Ekspor-Impor Antardaerah

Komponen Net Ekspor Antar Daerah pada triwulan III 2017 mengalami peningkatan kinerja, dengan tumbuh sebesar 7,15% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan kinerja triwulan II 2017 yang terkontraksi sebesar 0,50% (yoy). Peningkatan kinerja komponen ini, terutama didorong oleh kinerja ekspor antar daerah yang cenderung tumbuh stabil meskipun masih terkontraksi[54], di mana kinerja impor antar daerah menunjukkan peningkatan[55]. Kondisi tersebut antara lain didorong oleh masuknya periode *peak season* pariwisata dan liburan sekolah pada periode ini, sehingga mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan adanya perayaan keagaamaan (Saraswati dan Pagar Wesi). Kondisi ini memberikan kontribusi pada terjadinya peningkatan permintaan beberapa komoditas strategis yang dipenuhi antara lain dari luar Wilayah Bali.

---

49 Beberapa proyek investasi swasta yang sedang dalam pengerjaan dalam rangka persiapan *IMF-World Bank Annual Meeting* tahun 2018 adalah Pembangunan *The Benoa Tourism Port* di Dermaga Timur Terminal Internasional Pelabunan Benoa yang telah dilakukan Sandbreaking pada tanggal 18 September 2017 oleh Kemenko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan dan PT. Pelindo III selaku pengelola. Biaya pembangunan mencapai Rp 1,7 triliun, yang terdiri atas Rp 500 miliar untuk infrastruktur terminal dan Rp 1,2 triliun untuk pengerjaan kolam dermaga dan alur pelayaran. Penyelesaian pembangunan patung GWK dan taman budaya yang sedang dalam pengerjaan, dengan nilai investasi mencapai Rp450 miliar.

50 Nilai SBT SKDU investasi pada triwulan IV 2017 diprakirakan sebesar 10,86 lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan III 2017 yang sebesar 12,18, terutama disebabkan penurunan nilai SBT investasi pada sektor PHR dan Keuangan.

51 Nilai surplus perdagangan Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp1,83 triliun (ADHK 2010), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 yang tercatat sebesar Rp1,59 triliun.

52 Nilai net ekspor perdagangan luar negeri Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp11,83 triliun (ADHK 2010), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 yang tercatat sebesar Rp11,56 triliun

53 Nilai net perdagangan antar daerah pada triwulan III 2017 tercatat sebesar – Rp 10 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2017 aygn tercatat sebesar –Rp9,97 triliun

54 Kinerja ekspor antar daerah pada triwulan III 2017 tumbuh sebesar -10% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II 2017 yang tumbuh sebesar -9,34% (yoy)

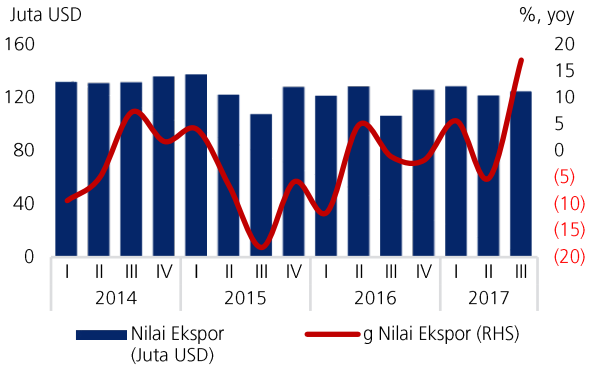
55 Kinerja impor antar daerah pada triwulan III 2017 tumbuh sebesar -2,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II 2017 yang tumbuh sebesar -5,89% (yoy)

Tracking Kinerja Triwulan IV 2017

Pada triwulan IV 2017, kinerja komponen ekspor antar daerah diprakirakan akan tumbuh lebih tinggi, seiring dengan meningkatnya kebutuhan barang dari luar Bali didorong oleh adanya faktor musiman yaitu perayaan hari keagamaan Galungan dan Kuningan pada awal triwulan dan Natal serta Tahun Baru pada akhir periode triwulan IV 2017.

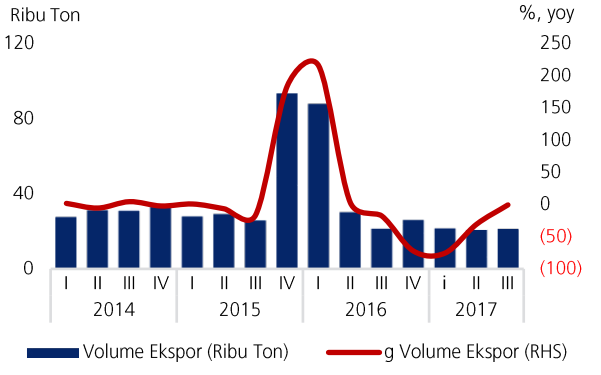
Ekspor-Impor Luar Negeri

Kinerja ekspor luar negeri (barang dan jasa) Bali pada periode ini tercatat tetap tumbuh tinggi sebesar 12,95% (yoy), meskipun cenderung melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 14,67% (yoy). Kinerja ekspor luar negeri yang tetap tumbuh tinggi tersebut, didorong oleh membaiknya kinerja ekspor barang yang tumbuh tinggi pada periode ini[56]. Sementara itu kinerja ekspor jasa meskipun tetap tumbuh tinggi, namun cenderung melambat[57].



Sumber: Bea dan Cukai

Grafik 1.26 Nilai Ekspor (Barang) Luar Negeri Bali



Sumber: Bea dan Cukai

Grafik 1.27 Volume Ekspor (Barang) Luar Negeri Bali

Akselerasi kinerja ekspor barang luar negeri Bali pada periode ini, terutama didorong oleh meningkatnya kinerja nilai ekspor luar negeri maupun volume ekspor luar negeri[58]. Membaiknya kinerja ekspor luar negeri tersebut didorong oleh peningkatan kinerja ekonomi global dan membaiknya kinerja ekonomi negara yang menjadi mitra dagang utama Bali, yaitu Amerika Serikat. Selain itu, dalam rangka persiapan natal dan tahun baru permintaan beberapa komoditas produk olahan kayu, *handicraft* dan olahan kain juga menunjukkan peningkatan, yang pengiriman barangnya dilakukan pada periode triwulan laporan.

Berdasarkan hasil liaison pada triwulan III 2017, peningkatan kinerja ekspor barang luar negeri didorong oleh kondisi perbaikan kinerja ekonomi global, upaya perluasan pasar ekspor luar negeri dengan mengembangkan pasar baru dan meningkatnya hasil produksi seiring dengan peningkatan kapasitas usaha yang dilakukan khususnya di sub kategori lapangan usaha perikanan.

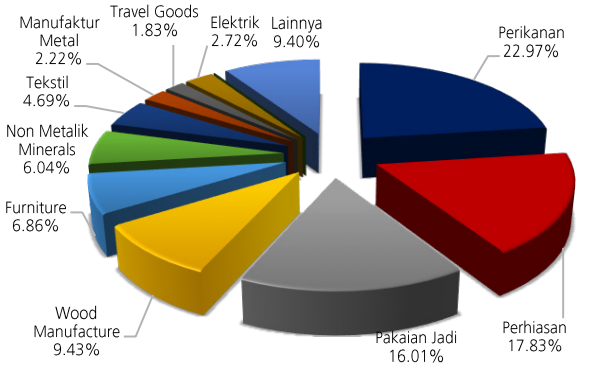
Bila dikaji lebih lanjut, komoditas yang menjadi andalan utama ekspor barang luar negeri Bali (dari nilai ekspor) pada periode ini adalah komoditas perikanan dengan pangsa mencapai 22,97% terhadap total nilai ekspor Bali. Komoditas berikutnya yang memiliki pangsa yang besar adalah perhiasan (17,83%), kamudian pakaian

56 Kinerja ekspor luar negeri Bali untuk barang pada triwulan III 2017 tercatat tumbuh sebesar 9,30% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 yang tercatat terkontraksi sebesar 2,80% (yoy).

57 Kinerja ekspor jasa Bali pada triwulan III 2017 tumbuh sebesar 13,26% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II 2017 yang sebesar 16,47% (yoy)

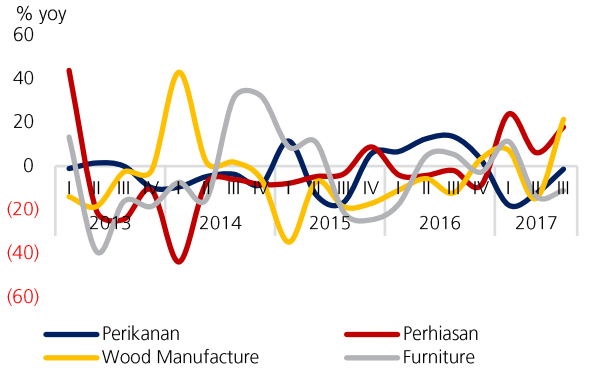
58 Nilai ekspor luar negeri (barang) Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar $124,75 juta, atau tumbuh sebesar 17,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2017 yang terkontraksi sebesar 5,15% (yoy) atau dengan nilai sebesar $121,79 juta. Sementara itu, volume ekspor (barang) luar negeri Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 21,11 ribu ton atau tumbuh sebesar -0,56% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2017 yang sebesar -30,82% (yoy) atau sebesar 20,76 ribu ton.

jadi dengan pangsa 16,01% dan produk olahan kayu dengan pangsa (9,43%). Peningkatan kinerja ekspor luar negeri untuk seluruh komoditas utama[59] tersebut juga ikut mendorong peningkatan kinerja ekspor luar negeri Bali pada triwulan laporan. Peningkatan nilai ekspor tertinggi terjadi pada komoditas pakaian jadi dan produk olahan kayu, sejalan dengan peningkatan permintaan menjelang perayaan natal dan tahun baru dengan pengiriman barang dilakukan pada triwulan laporan.



Sumber: Bea dan Cukai, diolah

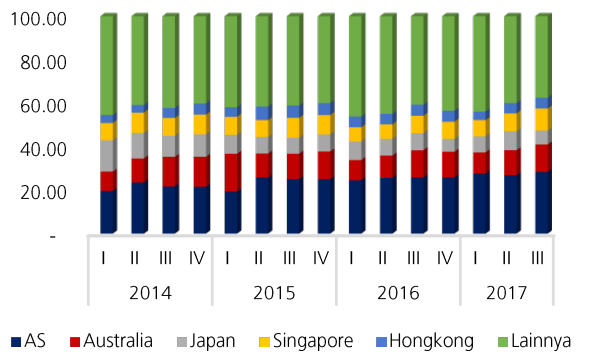
Grafik 1.28 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama



Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.29 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama

Ditengah kondisi ekonomi dunia yang mulai menunjukkan perbaikan kinerja, beberapa negara yang menjadi mitra dagang utama Bali yaitu Amerika Serikat dan Australia[60] juga menunjukkan peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan laporan. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya pangsa nilai ekspor komoditas unggulan utama Bali ke negara-negara tersebut, yang juga diikuti peningkatan pangsa negara utama lainnya[61] (kecuali Jepang yang menurun). Sejalan dengan kondisi tersebut, kinerja nilai ekspor produk Bali ke negara-negara tersebut juga menunjukkan peningkatan pada periode ini (kecuali Jepang)[62], terutama didorong oleh peningkatan permintaan menjelang perayaan natal dan tahun baru, terutama untuk komoditas produk olahan kayu, pakaian jadi dan perhiasan.



Sumber: Bea dan Cukai

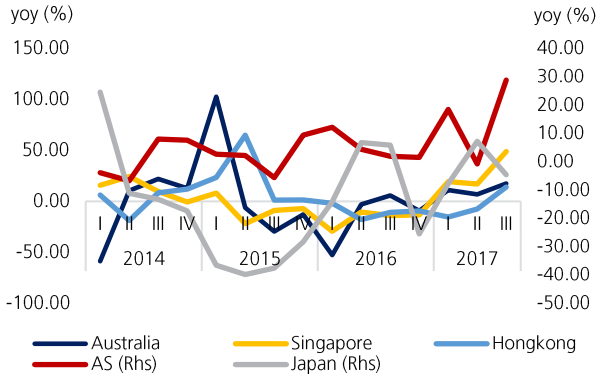
Grafik 1.30 Pangsa Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama

59 Kinerja 4 komoditas utama ekspor Bali mengalami peningkatan pada periode triwulan III 2017 dibandingkan triwulan sebelumnya meliputi: Perikanan (-1,38% yoy dari -12,57% yoy); Perhiasan (17,90% yoy dari 6,19% yoy); Pakaian Jadi (22,32% yoy dari 8,56% yoy) dan Olahan Kayu (21,45% yoy dari -14,79% yoy).

60 Kinerja ekonomi Amerika Serikat pada triwulan III 2017 tumbuh sebesar 2,3% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,1% (yoy). Kinerja ekonomi Australia pada triwulan II 2017 tumbuh sebesar 1,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,7% (yoy).

61 Pangsa nilai ekspor Bali ke beberapa negara utama pada triwulan III 2017 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya meliputi: AS (28,38% dari 26,84%); Australia (12,63% dari 11,54%); Jepang (6,42% dari 8,74%); Singapura (10,14% dari 8,19%) dan Hongkong (4,97% dari 4,73%)

62 Pertumbuhan nilai ekspor Bali ke beberapa negara utama tujuan ekspor pada triwulan III 2017 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, meliputi AS (28,88% yoy dari -0,79% yoy); Australia (17,59% yoy dari 6,91% yoy); Jepang (-4,62% yoy dari 7,23% yoy); Singapura (48,95% yoy dari



Sumber: Bea dan Cukai

Grafik 1.31 Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Utama

Perkembangan kinerja ekspor jasa luar negeri pada triwulan laporan juga masih menunjukkan pertumbuhan yang kuat sejalan dengan masuknya periode *peak season* pariwisata dan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman termasuk dari Tiongkok yang terus tumbuh signifikan. Jumlah kunjungan wisman yang pada periode ini tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya[63], masih menjadi faktor pendorong tetap kuatnya pertumbuhan ekspor jasa. Masih tumbuh kuatnya ekspor jasa pada periode ini, juga didorong oleh adanya penambahan *direct flight*[64] pada akhir triwulan II 2017 dan sepanjang triwulan III 2017 sehingga berkontribusi pada peningkatan jumlah kunjungan wisman dan ekspor jasa.

Kinerja ekspor jasa yang tetap tumbuh tinggi, meskipun cenderung melambat, sejalan dengan jumlah kedatangan penumpang pada *gate international* Bandara I Gusti Ngurah Rai pada periode triwulan ini[64] yang juga masih menujukkan peningkatan yang signifikan, meskipun mengalami sedikit penurunan dibanding-kan triwulan sebelumnya. Perlambatan kinerja ekspor jasa yang melambat, merupakan faktor utama melambatnya kinerja ekspor secara keseluruhan. Perlambatan kinerja ekspor jasa juga sejalan dengan penurunan rata-rata pengeluaran wisman berdasarkan hasil survei perilaku wisatawan mancanegara periode Agustus 2017.

Berdasarkan hasil survei dan *liaison*, masih kuatnya peningkatan ekspor jasa sejalan dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), seiring dengan membaiknya ekonomi asal wisman (antara lain Tiongkok) dan pengembangan produk wisata dan pasar alternatif (India, Inggris dan Jerman), penerapan strategi pemasaran baru, perbaikan pelayanan kepada tamu dan peningkatan promosi melalui keikutsertaan dalam pameran internasional merupakan beberapa upaya yang dilakukan oleh pelaku industri pariwisata baik hotel maupun *travel agent*.

Bila ditinjau lebih lanjut berdasarkan asal negaranya, wisman yang berkunjung ke Bali pada triwulan III 2017 masih didominasi oleh Tiongkok, kemudian diikuti oleh Australia selanjutnya Jepang kemudian Inggris dan India serta Jerman[66]. Sejalan dengan upaya pengembangan pasar alternatif wisman dan pengembangan produk *Bali and beyond*, telah mendorong mulai berubahnya struktur negara asal wisman, ditandai dengan munculnya India dan Jerman sebagai nergara dengan jumlah wisman yang cukup besar *share*-nya pada periode ini.

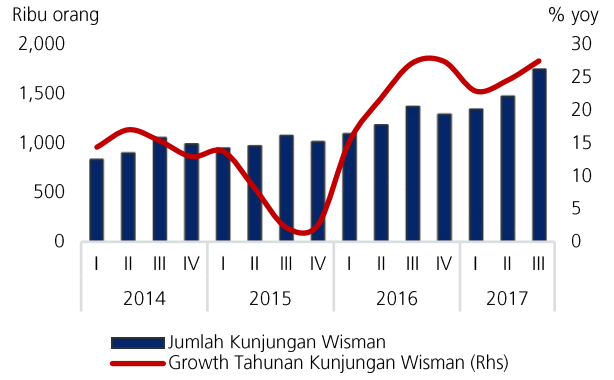
17,09% yoy) dan Hongkong (7,82% yoy dari 15,55% yoy).

63 Jumlah kunjungan wisman Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 1,74 juta orang atau meningkat sebesar 27,51% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2017 yang tumbuh sebesar 24,54% (yoy) atau sebesar 1,47 juta orang

64 Batik Air Denpasar - Kuala Lumpur dan Denpasar - Perth; Citilink Denpasar - Dili; Air Asia X Denpasar – Narita pada triwulan II 2017 dan rute Chennai-Denpasar oleh Batik Air dan Kalkota-Denpasar oleh *Air Asia Xtra* pada trriwulan III 2017

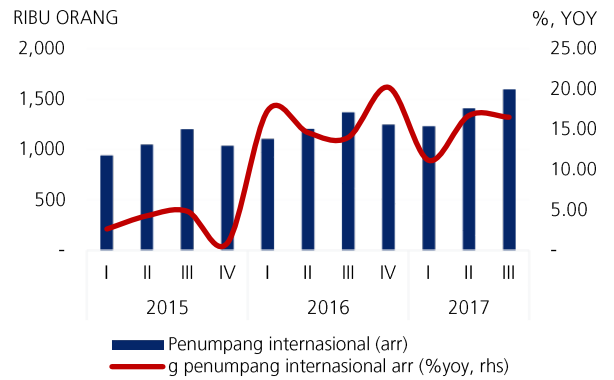
65 JHasil survei perilaku wisawatan mancanegara (Superwisman) mengkonfirmasi rata-rata pengeluaran wisman pada Agustus 2017 tercatat sebesar Rp 1,3 juta per orang per hari, lebih rendah dibandingkan Agustus 2016 yang sebesar Rp 1,5 juta per orang per hari

66 Pangsa negara-negara yang menjadi asal wisman yang berkunjung ke Bali pada sepanjang triwulan III 2017 meliputi: Tiongkok (25,28%); Australia (17,84%); Jepang (5,17%); Inggris (4,53%); India (4,16%) dan Jerman (3,81%)



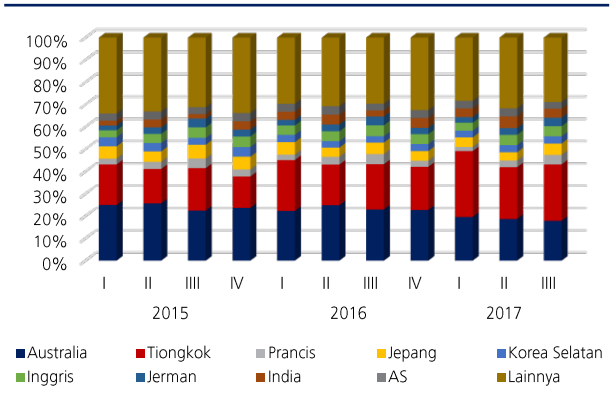
Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.32 Kunjungan Wisman ke Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.33 Jumlah Kedatangan Penumpang ke Bali pada *Gate International* Bandara



Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.34 *Share* Wisman Berdasarkan Negara Asal

Tracking Kinerja Triwulan IV 2017

Kinerja ekspor luar negeri Bali pada triwulan IV 2017 diprakirakan akan mengalami perlambatan, terutama disebabkan oleh perlambatan kinerja ekspor jasa. Perlambatan ini disebabkan oleh adanya beberapa negara yang mengeluarkan *travel advisory* kepada warga negaranya untuk berkunjung ke Bali yaitu AS, Inggris, Singapura, Malaysia, Australia, Selandia Baru dan Korea Selatan akibat peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung. Kondisi tersebut akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan jumlah kunjungan wisman, sehingga akan menyebabkan terjadinya perlambatan kinerja ekspor jasa. Berdasarkan data terakhir (Oktober 2017), pertumbuhan tahunan kedatangan penumpang pada gate internasional bandara I Gusti Ngurah Rai menunjukkan perlambatan yang sangat dalam[67]. Tertahannya kinerja ekspor jasa juga disebabkan oleh telah lewatnya periode *peak season* pariwisata (triwulan III 2017). Dengan perkembangan terkini, yaitu telah mulai terjadinya erupsi Gunung Agung pada tanggal 21 November 2017 berpotensi semakin memperdalam perlambatan kinerja ekspor jasa pada periode triwulan IV 2017, sehingga akan berkontribusi pada tertahannya laju kinerja ekspor secara keseluruhan.

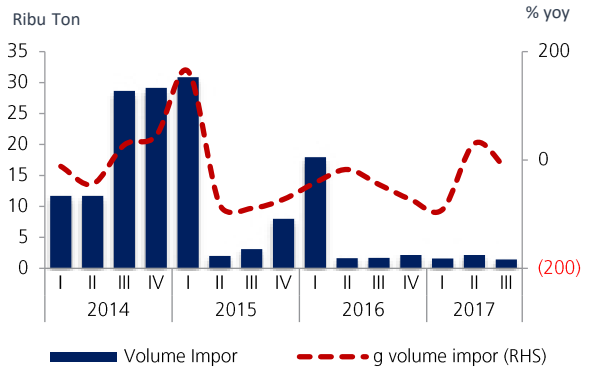
Sementara itu, perkembangan kinerja ekspor barang luar negeri pada triwulan IV 2017 diprakirakan akan melanjutkan peningkatan seperti pada triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan terus membaiknya kinerja ekonomi negara yang menjadi mitra dagang utama Bali, yaitu Amerika Serikat dan Australia. Peningkatan ini juga diprakirakan didorong oleh upaya pengembangan pasar alternatif dan pengembangan produk yang dilakukan oleh pelaku usaha ekspor. Kondisi tersebut diprakirakan dapat menahan dalamnya perlambatan kinerja ekspor luar negeri secara keseluruhan pada triwulan IV 2017.

67 Pertumbuhan kedatangan penumpang pada *gate* international pada Oktober 2017 hanya tumbuh sebesar 0,28% (yoy). Jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata pertumbuhan bulanan Jan-Sep 2017 yang sebesar 14,81% (yoy) dan pertumbuhan Oktober 2016 yang sebesar 11,91% (yoy).

Impor Luar Negeri

Kinerja impor luar negeri Bali pada triwulan III 2017 tercatat tumbuh sebesar 22,87% (yoy), melambat dibanding triwulan II 2017 yang sebesar 34,32% (yoy). Perlambatan kinerja impor ini sejalan dengan melambatnya kinerja ekspor di periode yang sama. Kinerja impor yang melambat tersebut, juga disebabkan oleh melambatnya kinerja impor barang yang diiringi oleh perlambatan kinerja impor jasa pada periode ini[68].

Perlambatan kinerja impor juga terkonfirmasi dari penurunan kinerja volume impor yang pada periode ini mengalami kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif[69]. Berdasarkan hasil survei dan *liaison*, perlambatan kinerja impor barang antara lain disebabkan oleh upaya beberapa pelaku usaha termasuk dari industri perhotelan yang berusaha menekan biaya bahan baku dan resiko nilai tukar rupiah, melalui pemenuhan bahan baku yang diprioritaskan dari dalam negeri tanpa mengurangi kualitas produk dan pelayanan.



Sumber: Bea dan Cukai

Grafik 1.35 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali

Sementara itu, bila dianalisis lebih lanjut berdasarkan kelompok utama impor barang, nilai utama impor barang pada periode laporan berdasarkan nilai didominasi oleh impor *consumption goods* (barang konsumsi), kondisi ini sejalan dengan masuknya periode *peak season* pariwisata dan liburan sekolah pada periode ini, sehingga mendorong peningkatan permintaan atas kelompok barang tersebut. Sejalan dengan itu, peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga pada periode ini, juga ikut mengkontribusi peningkatan nilai impor barang konsumsi. Sementara itu, kelompok komoditas yang memiliki *share* terbesar kedua adalah *raw material* atau bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan. Kelompok capital goods (barang modal), menempati *share* terbesar ketiga yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya[70]. Bila dilihat dari sisi pertumbuhan nilai impor untuk ketiga kelompok barang tersebut, hanya kelompok barang konsumsi yang menunjukkan peningkatan nilai impor pada periode ini, sementara dua kelompok lainnya mengalami penurunan bahkan terkontraksi[71], dengan penurunan terdalam dialami oleh kelompok barang modal. Kondisi ini yang menjadi penyebab melambatnya kinerja impor pada periode ini, namun dapat tertahan dengan tumbuh tingginya nilai impor barang konsumsi. Penurunan kinerja impor pada periode ini juga terkonfirmasi oleh melambatnya pertumbuhan volume kargo internasional yang masuk ke Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai pada periode ini[72].

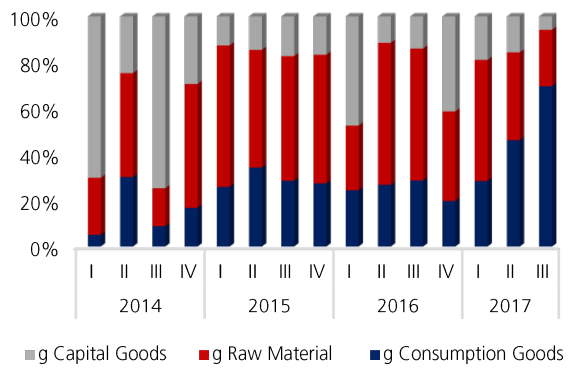
68 Pada triwulan III 2017, kinerja sub komponen impor barang tumbuh sebesar 1,70% (yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan impor barang triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 47,77% (yoy). Sementara itu, impor jasa tercatat tumbuh sebesar 25,62% (yoy) pada triwulan III 2017, lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II 2017 yang sebesar 32,68% (yoy)

69 Volume impor Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 1,42 juta Kg, atau tumbuh sebesar -16,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 30,45% (yoy) atau dengan volume sebesar 2,15 juta kg.

70 Share nilai impor Bali untuk barang modal, bahan baku dan barang konsumsi terhadap total nilai impor barang luar negeri pada triwulan III 2017 masing-masing tercatat sebesar 5,78%; 24,55% dan 69,67% sementara pada triwulan II 2017 masing-masing sebesar 15,59%; 38,15% dan 46,25%.

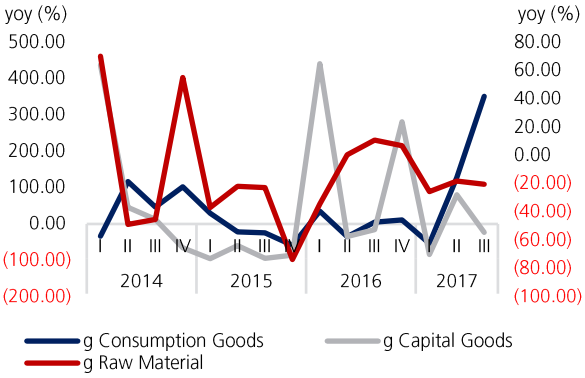
71 Nilai impor Bali untuk barang modal, bahan baku dan barang konsumsi pada triwulan III 2017 tercatat masing-masing sebesar $2,42 juta; $10,29 juta; $29,19 juta atau tumbuh masing-masing sebesar -22,86% (yoy); -20,42% (yoy) dan 351,28% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan pada triwulan II 2017 tercatat masing-masing sebesar 80,55% (yoy); -18,20% (yoy) dan 128,35% (yoy).

72 Volume kargo yang masuk ke Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 3,41 juta kg atau meningkat sebesar 1,47% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2017 yang tumbuh sebesar 2,88% (yoy) atau tercatat sebesar 5,16 juta Kg.



Sumber: Bea dan Cukai

Grafik 1.36 Perkembangan Pangsa Nilai Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC



Sumber: Bea dan Cukai

Grafik 1.37 Perkembangan Kinerja Komoditas Utama Nilai Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC



Sumber: PT. Angkasa Pura I

Grafik 1.38 Perkembangan Volume Kargo Internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai

Tracking Kinerja Triwulan IV 2017

Kinerja impor Bali pada triwulan IV 2017 diprakirakan akan mengalami perlambatan sejalan dengan perlambatan kinerja ekspor. Perlambatan diprakirakan terjadi jenis kelompok barang konsumsi (sebagai kelompok barang dengan pangsa nilai impor terbesar). Prakiraan tertahannya kinerja komponen konsumsi rumah tangga dan perdagangan pada triwulan IV 2017, diprakirakan akan menjadi faktor penahan laju kinerja impor barang konsumsi, sehingga secara keseluruhan akan berdampak pada menurunnya kinerja impor di periode tersebut. Dengan perkembangan terkini yaitu terjadinya erupsi Gunung Agung pada November 2017, diprakirakan akan berdampak pada semakin melambatnya kinerja impor barang konsumsi. Sementara itu, kinerja impor barang modal dan bahan baku, diprakirakan akan meningkat sejalan peningkatan kinerja industri pengolahan pada triwulan IV 2017 seiring dengan membaiknya kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Bali yaitu Amerika Serikat dan Australia dan meningkatnya kinerja konstruksi sekaligus dengan persiapan *IMF-World Bank Annual Meeting 2018*.

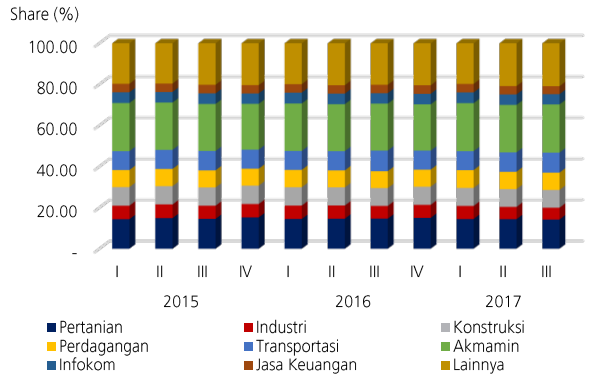
1.3. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI TRIWULAN III 2017 SISI PENAWARAN

Sebagai respon peningkatan kinerja ekonomi pada sisi permintaan, lapangan usaha utama di Bali secara umum juga mengalami peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2017 dari sisi penawaran ditopang oleh peningkatan pada lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, transportasi dan pergudangan dan industri pengolahan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong peningkatan lapangan usaha utama di Bali, meliputi: i) pertumbuhan signifikan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), khususnya dari Tiongkok dan masuknya periode *peak season* pariwisata pada triwulan laporan mendorong peningkatan kinerja akmamin dan transportasi; ii) adanya faktor musiman,

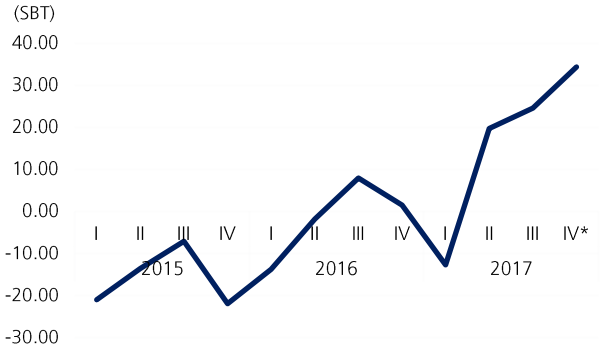
berupa perayaan hari keagamaan meliputi pagar wesi, saraswati; Idul Adha dan iii) adanya momentum liburan sekolah dan tahun ajaran baru serta iv) pembayaran gaji ke 13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) mendorong peningkatan kinerja perdagangan; v) kondisi anomali cuaca yaitu cendrung basah, sehingga berdampak penurunan produktivitas tanaman perkebunan sehingga menahan laju kinerja pertanian; vi) adanya penambahan penerbangan *direct flight* baru dari dan ke Bali dengan beberapa negara asal wisman mendorong kinerja transportasi dan akmamin; vii) mulai dilakukannya persiapan oleh beberapa pelaku usaha perhotelan untuk pelaksanaan kegiatan IMF-WB AM 2018, melalui peningkatan kapasitas usaha dan peningkatan kualitas mendorong peningkatan kinerja konstruksi; viii) mulai meningkatnya aktivitas *Meeting, Incentive, Convention* dan *Exhibition* (MICE) khususnya oleh pihak swasta, institusi pemerintah maupun kegiatan partai politik mendorong kinerja akmamin.

Bila dianalisis lebih lanjut, perkembangan struktur ekonomi Bali pada triwulan III 2017 masih didominasi oleh 5 komponen lapangan usaha utama yaitu: (1) penyediaan akomodasi makan dan minum (23,43%), (2) pertanian, kehutanan dan perikanan (14,25%), (3) transportasi dan pergudangan (9,76%), (4) konstruksi (8,61%), dan (5) perdagangan besar dan eceran (8,43%). Kondisi ini, cenderung tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan kondisi triwulan sebelumnya. Dominasi lapangan usaha yang terkait dengan industri pariwisata, terlihat dari total pangsa yang mencapai 33,19% (akomodasi makan minum dan transportasi dan pergudangan).



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1.39 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan III 2017



Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha

Grafik 1.40 Perkembangan Kinerja Dunia Usaha Triwulan IV 2017

Tracking Kinerja Triwulan IV 2017

Memasuki triwulan IV 2017, sebagian besar lapangan usaha diprakirakan akan mengalami perlambatan, khususnya lapangan usaha yang terkait langsung dengan industri pariwisata (akomodasi makan-minum dan transportasi serta perdagangan besar dan eceran) sejalan dengan telah selesainya periode peak season pariwisata dan peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung, menyebabkan dikeluarkannya travel advisory oleh beberapa negara kepada warga negaranya untuk berkunjung ke Bali yaitu AS, Inggris, Singapura, Malaysia, Australia, Selandia Baru dan Korea Selatan. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pembatalan kedatangan wisatawan untuk berkunjung ke Bali, termasuk wisman sepanjang triwulan IV 2017. Kondisi

ini terkonfirmasi dari data yang dihimpun dari 44 hotel dan villa. Berdasarkan data terakhir (Oktober 2017), pertumbuhan tahunan kedatangan penumpang di bandara I Gusti Ngurah Rai menunjukkan penurunan yang sangat dalam[73], sehingga dengan kondisi ini akan semakin memperkuat terjadinya penurunan kinerja ekonomi Bali pada triwulan IV 2017. Kondisi ini juga ditambah dengan perkembangan terkini yaitu mulai terjadinya erupsi Gunung Agung pada tanggal 21 November 2017, sehingga akan memperdalam perlambatan kinerja ekonomi pada triwulan IV 2017.

Meskipun demikian, masih terdapat potensi yang dapat mendorong peningkatan kinerja ekonomi, sejalan dengan adanya faktor musiman yaitu liburan tahun baru, adanya faktor musiman yaitu perayaan hari keagamaan berpotensi mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan dan membaiknya kinerja ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Bali yaitu Amerika Serikat dan Australia berpotensi mendorong peningkatan kinerja industri pengolahan.

1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada triwulan III 2017, lapangan usaha akomodasi makan dan minum mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Akmamin pada periode ini, tercatat tumbuh sebesar 10,71% (yoy), tumbuh signifikan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 9,26% (yoy).

Akselerasi kinerja lapangan usaha ini didorong oleh terus meningkatnya kunjungan wisman pada periode ini, khususnya asal Tiongkok. Selain itu, momentum masuknya periode *peak season* pariwisata dan liburan sekolah serta penambahan *direct flight* dari dan ke negara asal wisman juga ikut menopang peningkatan kinerja lapangan usaha akmamin.

Berdasarkan hasil survei dan *liaison* dengan beberapa pelaku usaha industri pariwisata, diketahui bahawa peningkatan kinerja lapangan usaha akomodasi makan dan minum pada periode laporan didorong oleh:

- Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan akses pasar, melalui pengembangan pasar alternatif, termasuk dengan menjalin kerja sama dengan travel agent lain;
- Pengembangan produk dan strategi pemasaran serta upaya perbaikan pelayanan yang terus dilakukan;
- Faktor musiman yaitu liburan sekolah dan mulai masuknya liburan musim panas di luar negeri, mendorong peningkatan kunjungan wisdom dan wisman
- Mulai berkembangnya beberapa segmen pasar baru untuk pariwisata Bali, yaitu Timur Tengah, India, Inggris dan Jerman
- Upaya promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik konsumen domestik dan asing, selain itu upaya pelaku usaha untuk selalu mengikuti *event* promosi pariwisata di luar negeri di antaranya melalui kegiatan *Travel Market* dan *Trade Fair* (London), Internationale Tourismus Borse (ITB) Berlin dan Asia Travel Fair di Singapura;
- Strategi untuk terus mengelola kerja sama dengan *business partner* melalui program *membership*;
- Adanya beberapa kegiatan *Meeting, Incentive, Convention* dan *Exhibition* (MICE) sepanjang periode triwulan laporan, juga ikut menopang peningkatan kinerja lapangan usaha ini.

Peningkatan kinerja lapangan usaha akmamin, juga terkonfirmasi oleh hasil SKDU yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada triwulan III 2017, yang menunjukkan peningkatan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT)[74]. Peningkatan

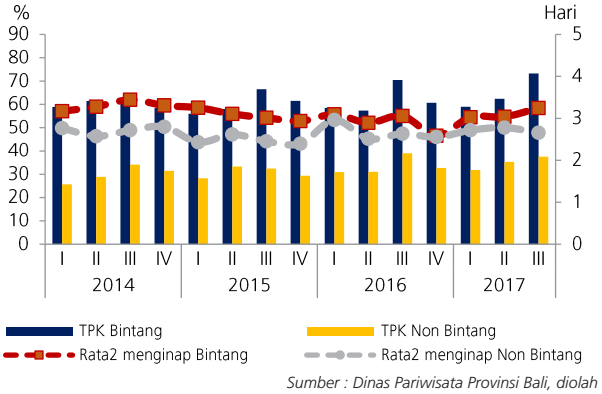
73 Pada periode Oktober 2017, jumlah kedatangan penumpang di Bandara Ngurah Rai tercatat sebesar 821 ribu orang atau tumbuh sebesar -2,53% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata bulanan Januari-September 2017) yang tumbuh sebesar 8,23% (yoy) dan pertumbuhan bulan oktober 2016 yang sebesar 7,69% (yoy).

74 Nilai SBT SKDU pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 34,37 lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 yang sebesar 24,59, terutama didorong oleh peningkatan SBT untuk sektor kontruksi, pertanian, perdagangan hotel dan restoran dan transportasi.

ini terutama didorong oleh peningkatan SBT untuk sektor kontruksi, pertanian, perdagangan hotel dan restoran dan transportasi. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan masing-masing lapangan usaha dalam PDRB pada periode ini.

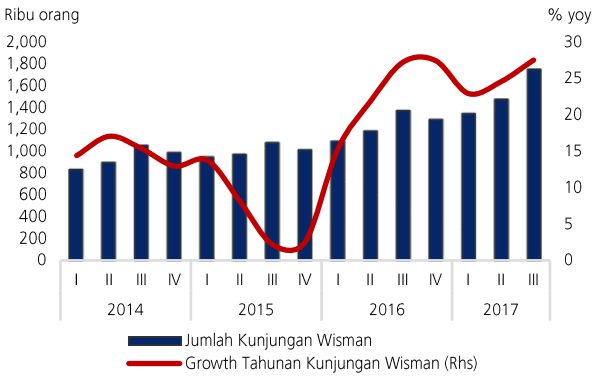
Akselerasi kinerja lapangan usaha akmamin pada triwulan III 2017 juga ditopang oleh peningkatan signifikan kunjungan wisman[75], terutama didorong oleh terus meningkatnya kunjungan wisman Tiongkok, India dan Inggris. Pertumbuhan jumlah wisman pada triwulan III 2017, merupakan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir pada periode yang sama (triwulan III)[76].

Peningkatan rata-rata lama menginap di hotel berbintang dan nonbintang pada periode ini yang diiringi oleh peningkatan Tingkat Penghunian Kamar (TPK), baik untuk hotel berbintang maupun non bintang, juga menjadi penopang akselerasi kinerja lapangan usaha akmamin, sejalan dengan masuknya periode *peak season* pariwisata pada periode ini.



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.41 Rata-Rata Lama Menginap Hotel Bintang dan Non Bintang



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.42 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan

Meningkatnya kinerja ekonomi lapangan usaha akomodasi makan minum pada periode ini, juga didorong oleh tumbuh tingginya kunjungan wisman dari beberapa negara utama yang memiliki pangsa besar terhadap total wisman yang berkunjung ke Bali. Beberapa negara tersebut meliputi Tiongkok, Jepang dan India[77], kondisi ini menjadi penopang akselerasi kinerja akmamin pada periode laporan. Tumbuh signifikannya kunjungan wisman beberapa negara tersebut, juga dikontribusikan oleh upaya promosi dan pengembangan pasar alternatif yang dilakukan oleh pelaku usaha industri pariwisata di Bali, termasuk melalui pengembangan produk *Bali and Beyond*.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisman khususnya Tiongkok pada periode triwulan laporan, mengikuti berlanjutnya tren *outbound tourist* dan didukung dengan gencarnya penawaran paket wisata oleh pelaku usaha travel di Bali. Peningkatan jumlah kunjungan wisman pada beberapa negara utama asal wisman, juga ditopang oleh adanya penambahan direct flight baru pada akhir triwulan II & III 2017[78].

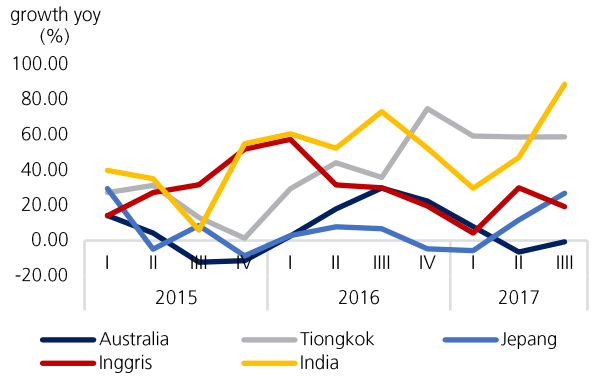
75 Kunjungan wisman pada periode triwulan III 2017 tumbuh sebesar 27,51% (yoy), lebih dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 24,54% (yoy).

76 Rata-rata pertumbuhan kunjungan wisman pada triwulan III sepanjang 10 tahun (2008-2017) tercatat sebesar 14,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2017 yang sebesar 27,51% (yoy).

77 Pertumbuhan kunjungan wisman Tiongkok, Jepang dan India ke Bali pada triwulan III 2017 masing-masing tercatat sebesar 58,50% (yoy); 26,85% (yoy) dan 88,68% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 yang sebesar 58,69% (yoy); 11,67% (yoy) dan 47,11% (yoy).

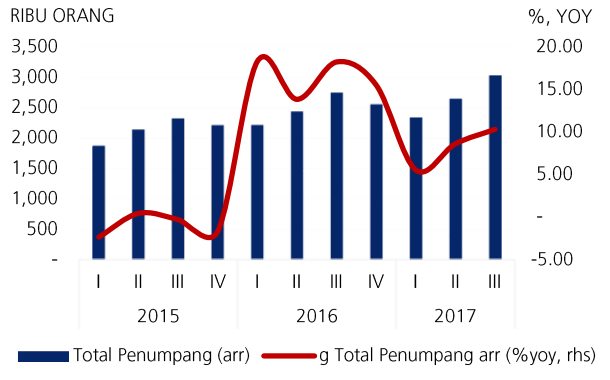
78 Batik Air Denpasar - Kuala Lumpur dan Denpasar - Perth; Citilink Denpasar - Dili; Air Asia X Denpasar – Narita pada triwulan II 2017 dan rute Chennai-Denpasar oleh Batik Air dan Kalkota-Denpasar oleh Air Asia Xtra pada trriwulan III 2017.

Meningkatnya kinerja akomodasi makan dan minum, juga didorong oleh meningkatnya kedatangan penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai[79], baik pada *gate* domestik maupun internasional. Kondisi ini sejalan dengan momentum liburan sekolah dan periode *peak season* pariwisata pada periode ini.



Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.43 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara



Sumber : Angkasa Pura 1, diolah

Grafik 1.44 Perkembangan Kedatangan Penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai

Tracking Kinerja Triwulan IV 2017

Memasuki triwulan IV 2017, lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum diprakirakan akan mengalami perlambatan kinerja. Kondisi ini selain disebabkan oleh telah berlalunya momentum *peak season* pariwisata dan liburan sekolah pada triwulan sebelumnya, juga sejalan dengan peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung yang terjadi sejak akhir triwulan III 2017. Keadaan ini menyebabkan beberapa negara mengeluarkan *travel advisory*[80] kepada warganya untuk berkunjung ke Bali, sehingga berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisman. Bahkan telah terkonfirmasi dari beberapa hotel dan villa sejumlah lebih dari 11.031[81] *room night* batal dipergunakan sepanjang triwulan IV 2017, akibat kondisi ini baik oleh wisdom maupun oleh wisman. Dengan perkembangan terkini yaitu mulai terjadinya erupsi Gunung Agung pada tanggal 21 November 2017, diprakirakan akan semakin memperdalam perlambatan kinerja lapangan usaha ini, yang pada gilirannya akan berdampak pada perlambatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan IV 2017.

1.3.2. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

Kinerja lapangan usaha ini meningkat didorong oleh peningkatan arus penumpang dan barang di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Membaiknya kinerja arus penumpang di pelabuhan Benoa, juga ikut mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha ini.

Kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada triwulan III 2017 tumbuh sebesar 6,07% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,05% (yoy). Dari komponen transportasi, peningkatan tersebut tercermin oleh kenaikan arus keberangkatan penumpang dan barang di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dari sektor pergudangan, peningkatan kinerja tercermin oleh peningkatan kinerja net ekspor antar daerah pada periode ini.

79 Kedatangan penumpang di Bandara Ngurah Rai pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 3,01 juta penumpang atau tumbuh sebesar 10,30% (yoy), dibandingkan triwulan II 2017 yang tumbuh sebesar 8,60% (yoy) atau dengan penumpang sejumlah 2,63 juta orang.

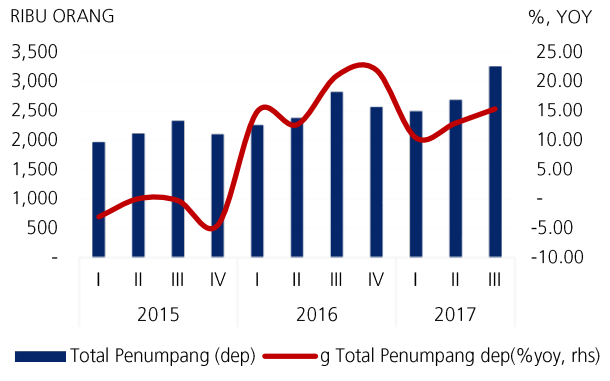
80 *Travel advisory* dikeluarkan oleh USA, Inggris, Singapura, Malaysia, Australia, New Zeland dan Korea Selatan kepada warga negaranya yang akan berkunjung ke Bali.

81 Berdasarkan data yanng dihimpun secara sampling bekerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Bali, berhasil dihimpun data dari 44 hotel dan villa dengan jumlah pembatalan sebesar 11.031 *room night* sepanjang triwulan IV 2017, dengan prakiraan jumlah wisman yang batal berkunjung adalah 2.535 orang wisatawan mancanegara (wisman) dan 2.085 wisatawan domestik (wisdom).

Pada triwulan III 2017, jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai tercatat sebesar 3,25 juta orang (naik 15,34%, yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 12,91% (yoy). Sementara itu, perlambatan pertumbuhan pengiriman kargo dari Bandara I Gusti Ngurah Rai pada periode laporan[82] menyebabkan tertahannya lapangan usaha ini untuk terakselerasi lebih tinggi.

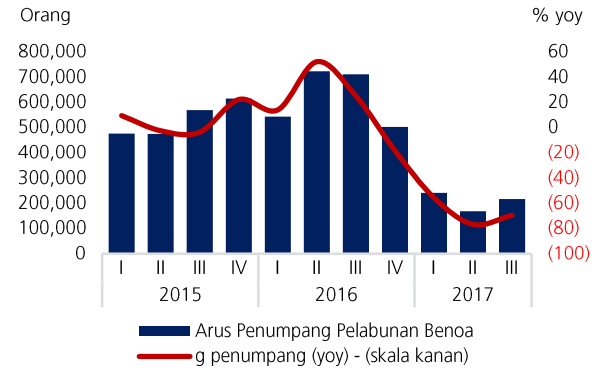
Peningkatan arus penumpang yang berangkat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, sejalan dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Bali pada periode ini, tercermin dari peningkatan jumlah penumpang dan barang yang datang ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai[83]. Peningkatan lapangan usaha transportasi juga didorong oleh momentum *peak season* pariwisata dan liburan sekolah.

Meningkatnya kinerja transportasi, sejalan dengan peningkatan pertumbuhan kunjungan wisman pada periode triwulan III 2017 yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kunjungan wisman Tiongkok yang tumbuh signifikan pada triwulan laporan (diatas 50%, yoy), menjadi pendorong peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan secara keseluruhan.



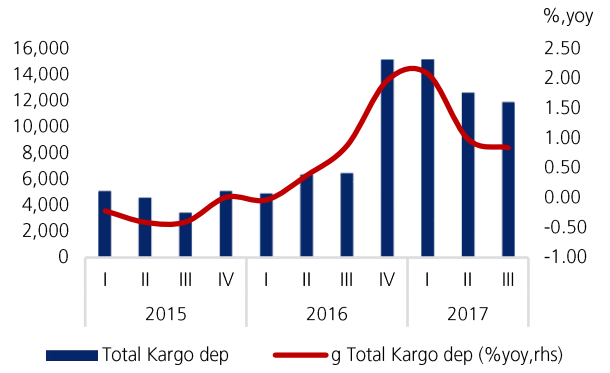
Sumber : Angkasa Pura, diolah

Grafik 1.45 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara



Sumber : PT. Pelindo III, diolah

Grafik 1.46 Perkembangan arus Penumpang di Pelabuhan Benoa



Sumber : Angkasa Pura, diolah

Grafik 1.47 Perkembangan Keberangkatan Kargo di Bandara Ngurah Rai

Meningkatnya kinerja lapangan usaha transportasi, juga dikontribusikan oleh membaiknya arus penumpang pada transportasi laut. Pada periode ini arus penumpang di Pelabuhan Benoa tercatat sebesar 216 ribu orang atau tumbuh sebesar -69,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -76,70% (yoy). Peningkatan arus penumpang di pelabuhan ini, sejalan dengan peningkatan jumlah penumpang *cruise* yang berlabuh di pelabuhan Benoa pada periode ini. Sementara itu adanya perayaan kegamaan berupa Saraswati, Pagar Wesi dan Idul Adha juga ikut mendorong peningkatan lapangan usaha ini, terutama terkait dengan peningkatan transportasi darat, karena mendorong meningkatnya

82 Volume total kargo yang terkirim dari Bandara I Gusti Ngurah Rai pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 11,90 ribu ton atau tumbuh sebesar 0,84% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,99% (yoy).

83 Jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 3,25 juta orang atau tumbuh 15,34% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,91% (yoy).

aktivitas masyarakat untuk bepergian ke luar daerah atau keluar wilayah Provinsi Bali, maupun sebaliknya.

Tracking Kinerja Triwulan IV 2017

Kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada triwulan IV 2017, diprakirakan akan mengalami perlambatan, baik untuk angkutan udara maupun angkutan laut. Perlambatan kinerja lapangan usaha ini, diprakirakan disebabkan oleh terjadinya peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung sejak akhir triwulan III 2017, sehingga menyebabkan dikeluarkannya travel advisory oleh beberapa negara asal wisman yang berdampak pada terjadinya pembatalan kedatangan sejumlah wisman ke Bali. Selain itu, minimnya acara MICE yang dilaksanakan oleh Institusi Pemerintah maupun swasta di Bali juga ikut menahan kinerja lapangan usaha ini pada periode laporan. Berdasarkan data terakhir (Oktober 2017), pertumbuhan tahunan keberangkatan penumpang dari bandara I Gusti Ngurah Rai menunjukkan perlambatan yang sangat dalam . Kondisi ini semakin memperkuat prakiraan akan melambatnya kinerja usaha ini. Perlambatan ini terjadi baik pada gate internasional, maupun domestik.

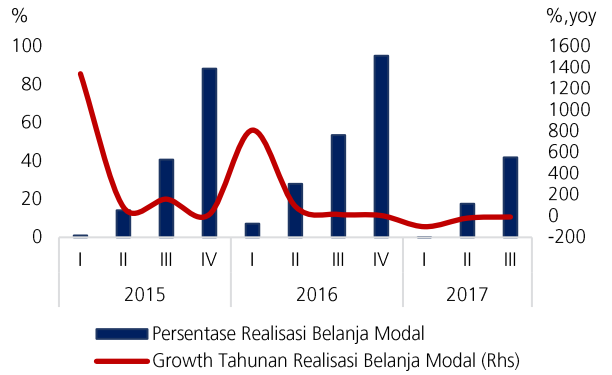
Sejalan dengan pelambatan arus penumpang, pengiriman kargo dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, juga menunjukkan penurunan yang dalam (Oktober 2017)[84], baik internasional maupun domestik. Kondisi tersebut berpotensi semakin menahan kinerja lapangan usaha ini, ditambah dengan perkembangan terakhir yaitu aktivitas vulkanik Gunung Agung, yang meningkat yang dapat menyebabkan semakin tertekannya kinerja lapangan usaha transportasi.

1.3.3. Lapangan Usaha Konstruksi

Kinerja lapangan usaha konstruksi meningkat, terutama didorong oleh peningkatan kapasitas usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha swasta (industri perhotelan) dan peningkatan realisasi persentase pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah, termasuk dalam rangka persiapan IMF-WB AM 2018. Lapangan usaha konstruksi pada triwulan III 2017 tercatat tumbuh sebesar 8,02% (yoy), mengalami akselerasi dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2017 yang sebesar 7,29% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ini, diindikasikan oleh naiknya investasi swasta khususnya pada industri perhotelan antara lain dalam rangka persiapan *IMF-World Bank Annual Meeting 2018*. Selain itu, peningkatan kinerja lapangan usaha ini, juga didorong oleh pertumbuhan realisasi nominal belanja modal yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya[85]. Peningkatan belanja modal pemerintah didorong oleh peningkatan persentase pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah, termasuk dalam rangka persiapan IMF-WB AM 2018. Selanjutnya, peningkatan yang terjadi pada lapangan usaha ini berdasarkan hasil survei dan *liaison*, juga didorong oleh upaya untuk mengantisipasi peningkatan penjualan sejalan dengan meningkatnya upaya promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Meningkatnya investasi juga didorong oleh meningkatnya optimisme pelaku usaha seiring dengan kondisi ekonomi yang kondusif dan berlanjutnya penurunan suku bunga kredit perbankan, serta ekspektasi terhadap implementasi lima belas paket kebijakan deregulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.

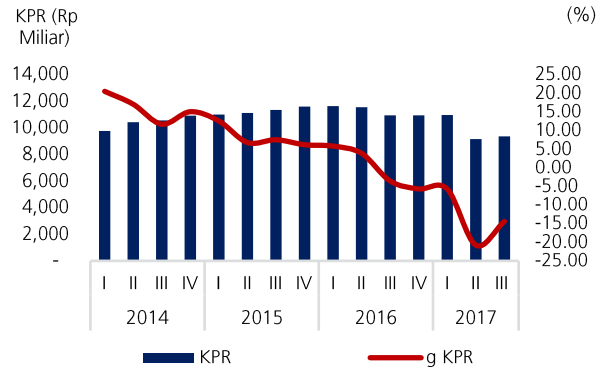
84 Pertumbuhan keberangkatan penumpang di Bandara Bali pada Oktober 2017 hanya tumbuh sebesar 2,43% (yoy). Jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata pertumbuhan bulanan Jan-Sep 2017 yang sebesar 12,93% (yoy) dan pertumbuhan Oktober 2016 yang sebesar 15,73% (yoy).

85 Pertumbuhan pengiriman kargo dari Bandara I Gusti Ngurah Rai tumbuh sebesar -28,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata bulan Jan-Sep 2017 yang tumbuh sebesar 127,98% (yoy) dan juga lebih rendah dibandingkan periode Oktober 2017 yang sebesar 199,47% (yoy).



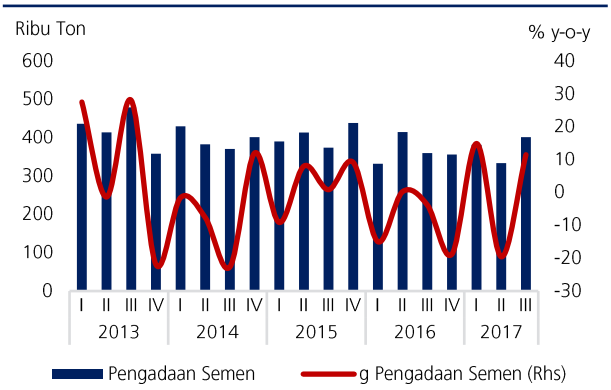
Sumber: BPKAD Prov. Bali

Grafik 1.48 Perkembangan Belanja Modal Provinsi Bali



Grafik 1.49 Perkembangan Kredit Pemilikan Rumah

Akselerasi peningkatan kinerja lapangan usaha ini juga tercermin oleh peningkatan kinerja Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang pada triwulan laporan tumbuh sebesar -14,42% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -20,77% (yoy). Relaksasi ketentuan LTV untuk KPR dan penurunan suku bunga KPR, mampu mendorong peningkatan pertumbuhan KPR pada triwulan III 2017, sejalan dengan mulai meningkatnya tendensi permintaan pembelian rumah. Program *tax amnesty* dan paket kebijakan Pemerintah XIII, juga memberi dampak positif terhadap peningkatan permintaan rumah tinggal. Akselerasi peningkatan kinerja konstruksi juga tercermin oleh peningkatan pengadaan semen di Bali pada triwulan III 2017 yang tumbuh sebesar 11,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -19,56% (yoy).



Sumber : Asosiasi Semen Indonesia

Grafik 1.50 Perkembangan Pengadaan Semen

Tracking Kinerja Triwulan IV 2017

Memasuki triwulan IV 2017, lapangan usaha konstruksi diprakirakan akan terus menunjukkan tendensi peningkatan, sejalan dengan telah selesainya penyesuaian birokrasi terkait dengan perubahan struktur organisasi pemerintah daerah (OPD) di Provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, terdapat upaya akselerasi maupun percepatan untuk proses pengadaan dan pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah, setelah tertunda pada semester I 2017. Hal tersebut diprakirakan akan mendo-rong peningkatan realisasi belanja modal yang selanjutnya berdampak positif terhadap upaya peningkatan kinerja konstruksi. Peningkatan kinerja konstruksi pada triwulan IV 2017, juga diprakirakan

akan didorong oleh peningkatan optimisme pelaku usaha sejalan dengan terus berlanjutnya penurunan tingkat suku bunga kredit perbankan, yang pada gilirannya akan mendorong upaya ekspansi usaha dan permintaan kredit konstruksi.

Mulai dilakukannya pengerjaan beberapa proyek infrastruktur dalam rangka persiapan IMF-WB AM 2018 baik oleh pihak swasta maupun pemerintah antara lain penyelesaian patung GWK dan taman budaya, *Underpass* Tugu Ngurah Rai dan pembangunan *The Benoa Tourism Port* yang mulai dikerjakan pada triwulan IV 2017, menjadi salah satu penopang kinerja lapangan usaha ini.

1.3.4. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sejalan dengan kondisi terjadinya anomali cuaca dan peningkatan serangan hama penyakit tanaman (HPT) pada periode ini, menyebabkan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan.

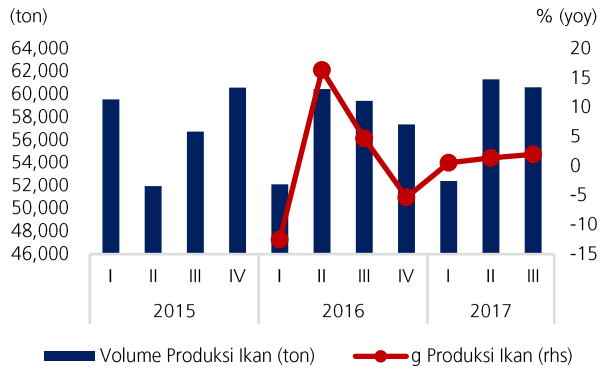
Kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada triwulan laporan tumbuh sebesar 4,74% (yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan 5,92% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perlambatan kinerja lapangan usaha ini, terutama didorong oleh menurunnya produksi sub lapangan usaha tanaman bahan makanan khususnya padi, seiring dengan tingginya serangan hama dan penyakit tanaman akibat kondisi anomali cuaca.

Perlambatan kinerja lapangan usaha pertanian juga disebabkan oleh menurunnya produksi komoditas perkebunan akibat kondisi cuaca basah, sehingga produktivitas tanaman perkebunan mengalami penurunan yang signifikan.

Meskipun demikian, beberapa upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi dapat menahan penurunan laju produksi. Upaya tersebut meliputi: penanaman awal, penambahan luasan areal tanam dan panen serta upaya intensifikasi pertanian yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian melalui program gerakan pengelolaan penerapan tanaman terpadu (GPPTT). Upaya menahan laju penurunan produksi padi, juga didorong oleh perbaikan irigasi primer, sekunder dan tersier yang telah dilakukan sebelumnya, mendorong untuk ketersediaan air yang cukup sepanjang periode tanam.

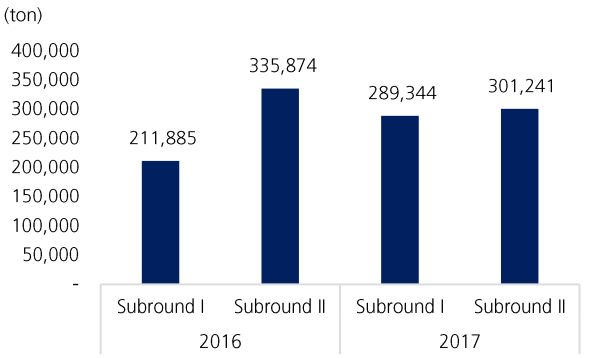
Meskipun demikian, berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, produksi padi pada triwulan III 2017.

Meskipun demikian, beberapa komoditas pangan, perikanan dan ternak masih menunjukkan perbaikan produksi. Peningkatan kinerja produksi ternak pada triwulan laporan tersebut, didorong oleh beberapa faktor meliputi: 1) peningkatan permintaan karena adanya beberapa hari raya keagamaan yaitu galungan, kuningan, ramadhan dan idul fitri; 2) adanya program peningkatan produksi daging sapi antara lain untuk meningkatkan pasokan ke Jakarta, didorong melalui peningkatan populasi sapi khususnya jantan melalui program inseminasi buatan (bersertifikasi) dan peningkatan persediaan semen beku; 3) adanya program sapi induk wajib bunting (SIWAB) melalui pemberian inseminasi buatan secara gratis di tahun 2017 untuk 128.204 ekor sapi betina; 4) Peningkatan produksi telur, untuk meningkatkan pasokan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai antisipasi lonjakan permintaan, 5) Pembentukan dan pengawasan organisasi pelaku usaha peternakan seperti Pinsar (perhimpunan insan perunggasan rakyat indonesia), Aksa Bali (Asosiasi Peternak Sapi Bali), PPAB (perhimpunan peternak ayam broiler), dan Gabungan Usaha Peternak Babi.



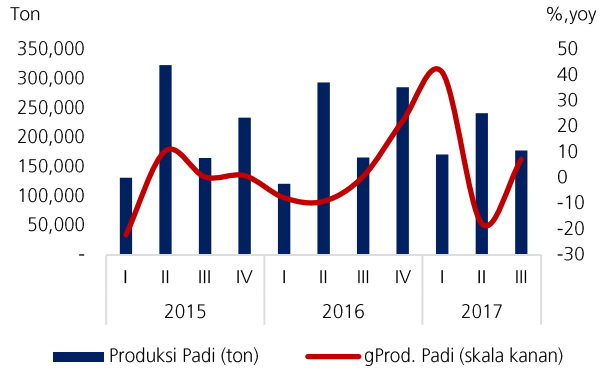
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Grafik 1.51 Prakiraan Perkembangan Produksi Ikan di Bali TW III Tahun 2017



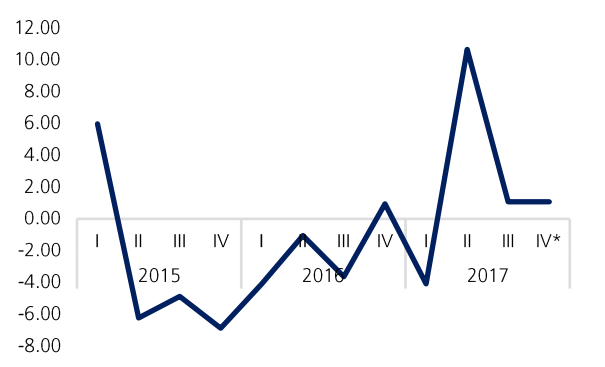
Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali

Grafik 1.53 Prakiraan Perkembangan Produksi Padi di Bali Tahun 2017



Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali

Grafik 1.52 Perkembangan Produksi Padi Triwulan III 2017



Sumber : SKDU

Grafik 1.54 Perkembangan Nilai SBT (Sektor Pertanian)

Tabel 1.3 Perkembangan Produksi Daging dan Telur

Jenis Produksi Ternak	2016					2017				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	TW I	TW II	TW III	TW IV*)	Total
Ayam Ras (ton)	12.218	12.493	13.921	13.813	52.445	12.652	12.998	14.103	14.786	54.540
Sapi (ton)	1.851	2.185	1.940	1.835	7.811	2.298	2.438	2.254	2.337	9.328
Babi (ton)	31.540	30.076	29.650	29.850	121.116	28.702	30.727	32.727	33.968	126.125
Telur (ton)	12.038	12.152	12.452	12.362	49.004	10.358	12.012	13.033	13.676	49.080
Total Produksi Daging (ton)	45.609	44.754	45.511	45.498	181.373	43.652	46.164	49.084	51.092	239.072

Sumber: Nilai Prakiraan Produksi

Tabel 1.4 Pertumbuhan Produksi Daging dan Telur

Jenis Produksi Ternak	2016					2017				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	TW I	TW II	TW III	TW IV*)	Total*)
Ayam Ras % (yoy)	31,68	30,61	44,79	45,64	38,22	3,55	4,04	1,31	7,04	3,99
Sapi % (yoy)	25,74	40,77	15,61	21,89	25,82	24,19	11,62	16,16	27,35	19,42
Babi % (yoy)	6,63	-0,71	-3,15	-1,43	0,29	-9,00	2,17	10,38	13,80	4,14
Telur % (yoy)	18,69	18,60	19,96	21,00	19,56	-13,96	-1,15	4,67	10,63	0,15
Total Produksi Daging % (yoy	13,09	8,08	8,60	10,24	9,98	-4,29	3,15	7,85	12,29	31,81

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali

Masih kuatnya kinerja pertanian pada triwulan laporan meskipun tumbuh terbatas, juga didorong oleh peningkatan kinerja sublapangan usaha perikanan yang pada periode triwulan III 2017, yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja perikanan, terkonfirmasi oleh meningkatnya volume produksi ikan (tangkap dan budi daya), yang tumbuh mencapai 2% (yoy) pada periode ini atau dengan produksi tercatat sebesar 60 ribu ton, lebih tinggi bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,40% (yoy). Meningkatnya produksi perikanan pada triwulan III 2017, terjadi baik untuk perikanan tangkap maupun untuk perikanan budidaya. Peningkatan produksi perikanan tangkap merupakan dampak lanjutan dari kebijakan larangan *illegal fishing* dan larangan penggunaan kapal eks asing serta relaksasi ketentuan *transhipment*, sehingga menyebabkan daerah *fishing ground* lebih terjangkau oleh nelayan. Sementara itu, peningkatan produksi ikan budidaya didorong oleh berbagai upaya intensifikasi produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Tracking Kinerja Triwulan IV 2017

Memasuki triwulan IV 2017, kinerja lapangan usaha pertanian menunjukkan tendensi perlam-batan, yang terutama disebabkan oleh peningkatan curah hujan diperiode ini dan kondisi anomali cuaca serta penurunan luasan tanam komoditas pangan khususnya padi.

Peningkatan curah hujan dan potensi anomali cuaca berpotensi menahan laju pertumbuhan produksi komoditas tabama, hortikultura dan perkebunan akibat potensi serangan hama dan penyakit tanaman. Selain itu, terjadinya penurunan luasan tanam untuk padi sebesar 12,51% (yoy) yaitu dari 19.167 hektar pada triwulan IV 2016 menjadi 25.518 hektar pada periode triwulan IV 2017, berpotensi menjadi penahan laju peningkatan produksi pangan, yang pada gilirannya akan memperdalam perlambatan kinerja lapangan usaha pertanian. Perlambatan kinerja pertanian juga akan tertahan oleh penurunan produksi perikanan, sejalan dengan masuknya musim hujan dan angin kencang sehingga akan menurunkan jumlah tangkapan ikan laut. Kondisi ini akan berdampak pada volume produksi ikan yang diprakirakan mengalami penurunan pada periode triwulan IV 2017.

Meskipun demikian masih terdapat potensi peningkatan kinerja lapangan usaha ini, didorong oleh upaya peningkatan intensifikasi pertanian dan perbaikan irigasi. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali memprakirakan, tingkat produksi padi pada periode subround II 2017 (Triwulan III & IV), diprakirakan akan mencapai 301 ribu ton GKG, lebih tinggi dibandingkan periode sub round sebelumnya yang sebesar 289 ribu GKG.

Sejalan dengan potensi peningkatan produksi padi, komoditas peternakan pada triwulan IV 2017, juga diprakirakan akan menunjukkan peningkatan produksi sejalan dengan meningkatnya permintaan didorong oleh adanya perayaan hari keagamaan yaitu galungan, kuningan, natal dan tahun baru. Peningkatan produksi, juga diprakirakan didorong oleh membaiknya harga telur, seiring dengan permintaan yang akan meningkat di triwulan IV 2017, sehingga akan meningkatkan gairah peternak untuk meningkatkan produksi. Kondisi ini merupakan beberapa faktor yang berpotensi akan mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha ini pada triwulan depan. Sementara itu, potensi melambatnya kinerja lapangan usaha pertanian di triwulan IV 2017, terkonfirmasi dari hasil survei kegiatan dunia usaha yang menunjukkan nilai SBT yang cenderung stagnan dibandingkan triwulan III 2017.

1.3.5. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Pada triwulan III 2017, kinerja lapangan industri pengolahan tercatat tumbuh sebesar 0,50% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar -0,09%(yoy).

Peningkatan kinerja industri pengolahan tersebut, sejalan dengan peningkatan kinerja ekspor barang diperiode triwulan laporan, karena produk ekspor barang Bali, sebagian besar merupakan hasil produksi industri pengolahan.

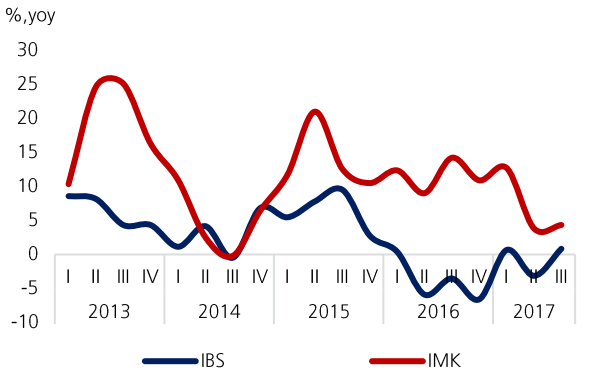
Meningkatnya kinerja industri pengolahan, ditopang oleh perbaikan kinerja ekonomi global terutama ekonomi AS sebagai negara mitra dagang utama untuk produk ekspor barang Bali. Lebih lanjut lagi nilai ekspor luar negeri untuk barang Bali, sejumlah 29% pada periode ini ditujukan untuk pasar AS.

Meningkatnya kinerja lapangan usaha ini, juga terkonfirmasi oleh peningkatan kinerja ekspor beberapa komoditas yang dihasilkan oleh industri pengolahan meliputi perhiasan, olahan kayu, pakaian jadi dan furnitur yang merupakan komoditas utama ekspor Bali.

Peningkatan kinerja lapangan usaha ini, juga ditopang oleh meningkatnya permintaan beberapa komoditas seperti produk pakaian jadi, olahan kayu dan perhiasan seiring menjelang perayaan natal dan tahun baru, yang umumnya pengiriman barang untuk ekspor akan dilakukan pada 1 triwulan sebelumnya (pada periode ini). Selain itu, kekhawatiran terhadap kebijakan proteksionisme presiden terpilih AS ternyata telah berangsur-angsur dapat terkurangi, sehingga pelaku importir di AS dapat segera mengambil kebijakan strategis terkait dengan usahanya, termasuk meningkatkan nilai impornya, termasuk dari Bali.

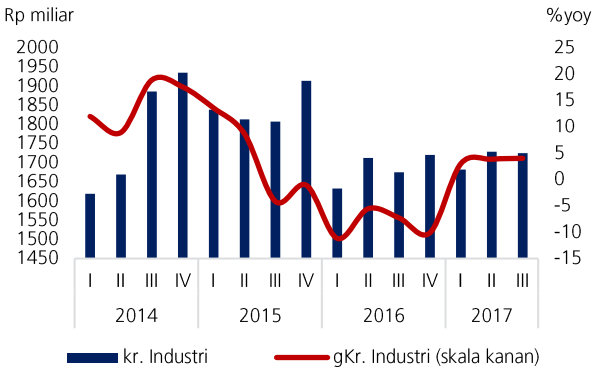
Peningkatan kinerja industri pengolahan terkonfirmasi oleh peningkatan pertumbuhan Indeks Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Indeks Manufaktur Mikro Kecil dan Menengah (IMK). IBS mengalami peningkatan dari sebesar -3,13% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi 0,84%(yoy). Sejalan dengan kondisi tersebut, IMK juga mengalami peningkatan dari sebesar 3,82% (yoy) pada triwulan II 2017, menjadi sebesar 4,33% (yoy) pada triwulan III 2017.

Akselerasi peningkatan industri pengolahan juga ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan kredit industri pengolahan. Kredit industri pengolahan meningkat dari 3,84% (yoy) pada triwulan II 2017, menjadi 4,02% (yoy) pada triwulan III 2017. Kondisi ini menunjukkan optimisme pelaku usahadalam melakukan ekspansi, sejalan dengan prakiraan akan semakin membaiknya ekonomi global dan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Bali (AS dan Australia), serta kondisi ekonomi nasional serta regional yang juga diprakirakan akan menunjukkan peningkatan kinerja di triwulan III dan IV 2017.

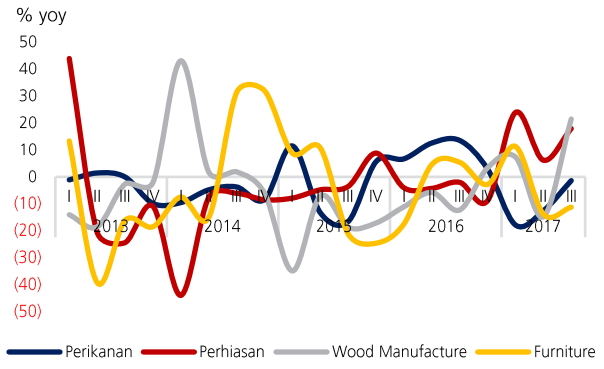


Sumber : BPS Provinsi Bali

Grafik 1.55 Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)



Grafik 1.56 Kredit Kategori Industri



Sumber : Bea dan Cukai

Grafik 1.57 Perkembangan Komoditas Utama Ekspor Bali

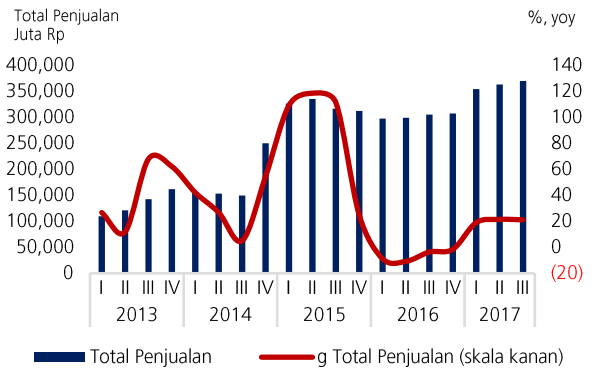
Tracking Kinerja Triwulan IV 2017

Memasuki triwulan IV 2017, kinerja industri pengolahan diprakirakan akan terus melanjutkan peningkatan seperti pada triwulan sebelumnya. Prakiraan akan kuatnya perbaikan ekonomi global dan potensi terus membaiknya kinerja ekonomi negara mitra dagang utama bali serta terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman dan adanya faktor musiman berupa perayaan hari keagamaan (natal dan tahun baru), akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan lapangan usaha ini pada triwulan IV 2017. Meskipun demikian, semakin meningkatnya tingkat persaingan dengan negara-negara eksportir dari produk industri olahan yang sejenis dengan Bali, seperti Thailand, Vietnam, Kamboja dan Bangladesh serta Tiongkok, diprakirakan akan berpotensi menahan laju pertumbuhan lapangan usaha ini. Selain itu, potensi implementasi kebijakan proteksionisme AS berpotensi akan menahan laju kinerja lapangan usaha industri pengolahan.

1.3.6. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

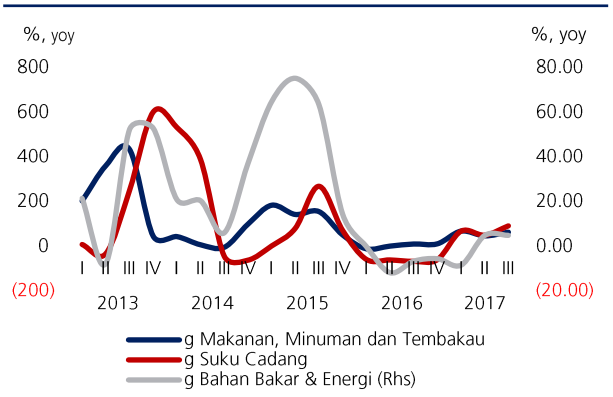
Kinerja usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada triwulan III 2017, mengalami peningkatan, yaitu tumbuh dari sebesar 8,12% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi 9,64% (yoy) pada periode ini. Pertumbuhan tersebut, terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang menunjukkan peningkatan pada triwulan III 2017 dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai penjualan ecara pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp 370 miliar atau tumbuh sebesar 21,19% (yoy) tumbuh stabil dibandingkan triwulan II 2017 yang sebesar 21,45% (yoy). Berdasarkan hasil SPE, peningkatan penjualan di triwulan laporan terjadi untuk beberapa kelompok komoditas yang meliputi: suku cadang kendaraan, makanan dan minuman serta bahan bakar dan energi. Peningkatan kinerja lapangan usaha ini, sejalan dengan adanya peningkatan permintaan domestik didorong oleh adanya faktor musiman, berupa perayaan hari keagamaan di triwulan laporan (saraswati, pagar wesi dan idul adha).

Selain itu, peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan, juga didorong oleh adanya pembayaran gaji ke 13 PNS, tahun ajaran baru dan liburan sekolah, sehingga mendorong peningkatan daya beli konsumen di periode ini. Akeselrasi lapangan usaha ini, juga didorong tumbuh signifikannya jumlah kunjungan wisman sebesar 27,51% (yoy) pada periode ini lebih tinggi dibandingkan 24,54% (yoy) di triwulan sebelumnya, sehingga mendorong peningkatan transaksi perdagangan di wilayah Bali.



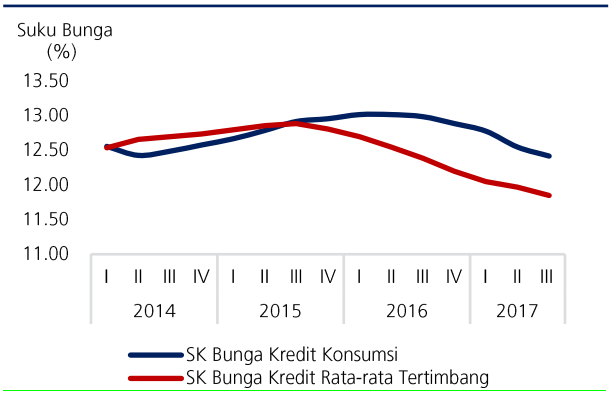
Sumber : Survei Penjualan Eceran

Grafik 1.58 Perkembangan Total Penjualan



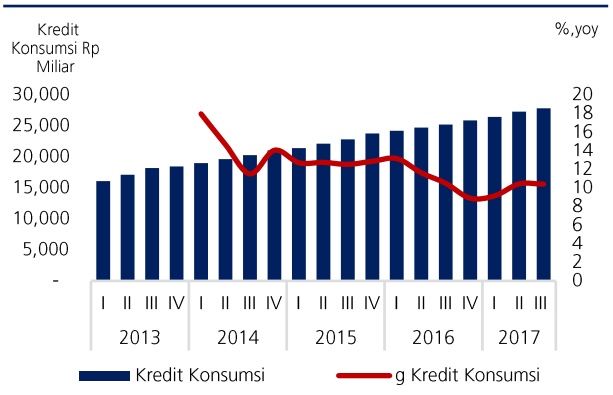
Sumber : Survei Penjualan Eceran

Grafik 1.59 Perkembangan Penjualan Kelompok Komoditas



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.60 Perkembangan suku bunga kredit konsumsi



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.61 Perkembangan Kredit Konsumsi

Peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan pada triwulan laporan, juga terkonfirmasi oleh stabilnya pertumbuhan kredit konsumsi yang tumbuh sebesar 10,40% (yoy) pada periode ini, relatif stabil dibandingkan triwulan II 2017 yang sebesar 10,43% (yoy). Stabilnya pertumbuhan kredit konsumsi, sejalan dengan berlanjutnya penurunan tingkat suku bunga kredit perbankan, termasuk suku bunga kredit konsumsi.

Tracking Kinerja Triwulan IV 2017

Memasuki triwulan IV 2017, kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran pada diprakirakan akan mengalami tendensi perlambatan, sejalan dengan prakiraan perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga pada periode tersebut.

Perlambatan kinerja lapangan usaha ini, diprakirakan tertahan oleh beberapa faktor meliputi: 1) tidak adanya stimulus fiskal berupa pembayaran pembayaran gaji ke-13 dan ke 14 PNS seperti 2 (dua) triwulan sebelumnya; 2) alokasi anggaran konsumen yang telah terserap untuk liburan dan tahun ajaran baru sekolah; 3) telah berakhirnya periode *peak season* pariwisata, sehingga akan menahan pening-katan jumlah kunjungan wisman. Selain itu peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung, berpotensi menahan laju kinerja lapangan usaha ini, khususnya disekitar wilayah daerah terdampak. Dari perkembangan terakhir yang telah mulai terjadi erupsi, berpotensi semakin menahan laju kinerja lapangan usaha ini.

Meksipun demikian upaya akselerasi/percepatan realisasi belanja daerah pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diprakirakan akan menajdi faktor pendorong kinerja perdagangan. Peningkatan lapangan usaha perdagangan, juga terkonfirmasi hasil SKDU untuk PHR, yang menunjukkan prakiraan peningkatan dengan nilai SBT di triwulan IV 2017 sebesar 10,15, lebih tinggi bila dibandingkan triwulan III 2017 yang tercatat 5,42. Terus berlanjutnya penurunan tingkat suku bunga perbankan, juga diprakirakan akan mendorong peningkatan kredit konsumsi, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan di triwulan IV 2017.

BOKS A

AGROWISATA SEBAGAI SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU DI BALI

Tren perlambatan perekonomian dunia pada 5 tahun terakhir berdampak pada perkembangan perekonomian Bali, khususnya kinerja ekspor barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi Bali secara umum lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, selama 5 tahun terakhir (2012-2016) pertumbuhan ekonomi Bali cenderung stagnan yaitu rata-rata tumbuh sebesar 6,5% (yoy) pertahun. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Bali sesuai dengan target dalam Nawacita yaitu sebesar 7% per tahun, perlu dilakukan identifikasi terkait dengan industri potensial yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia pada tahun 2017 menyusun penelitian *Growth* Strategi dalam rangka mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di Bali. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis tiga industri potensial kompetitif daerah (IPKD) utama yang mampu menjadi sumber perekonomian baru di Bali. Dalam menentukan IPKD terpilih, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu *export product dynamic* (EPD), ekspor potensial daerah, *export diagnostic* dan asesmen terhadap beberapa faktor pendukung lainnya. Namun terkait dengan peran sebagai destinasi wisata dunia, maka dalam pembahasan ini difokuskan pada penjelasan mengenai peran dan perkembangan industri agrowisata di Bali, sebagai salah satu IPKD yang terpilih dalam penelitian *growth* strategi ini.

Penentuan IPKD Pilihan Provinsi

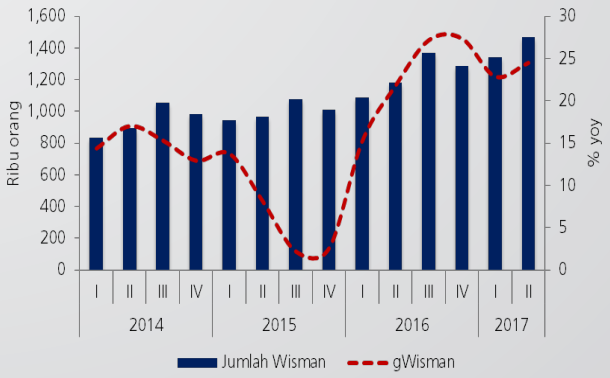
Dalam penelitian ini pemilihan IKPD berdasarkan asesmen EPD, Ekspor Potensial Daerah, *Export Diagnostic* dan asesmen dengan faktor pendukung lainnya. Berdasarkan hasil asesmen dari metode peneltian yang dipergunakan, diperoleh tiga IPKD terpilih, yaitu industri pengolahan kopi dan teh, industri kreatif, dan jasa pariwisata (agrowisata). Pemilihan 3 IPKD ini terutama didasarkan pada nilai gap ekspor yang besar antara realisasi dengan potensialnya.

Industri pariwisata dalam hal ini agrowisata sebagai salah satu IKPD terpilih, memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di Bali karena memiliki potensi pasar besar, ketersediaan SDM, budaya yang kuat dan kondisi alam yang indah. Potensi agrowisata di Bali cukup besar karena kentalnya budaya dan adat istiadat dalam aktivitas pertanian di Bali serta didukung dengan kondisi alam yang indah. Hal ini juga didukung oleh adanya tren peningkatan jumlah wisatawan mancanegara. Pengembangan agrowisata ini juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah. Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Provinsi Bali memiliki kebijakan dalam rangka mengembangkan desa wisata dan agrowisata di Bali sebagai destinasi wisata baru.

Perkembangan Agrowisata

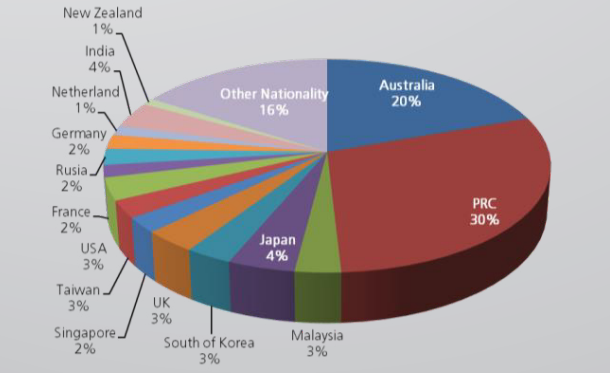
Kunjungan wisman di Bali pada semester I 2017 sebesar 3,4 juta orang atau tumbuh sebesar 23% (yoy) dibanding dengan semester I 2016 (2,75 juta orang). Peningkatan wisatawan mancanegara ini didorong oleh adanya kebijakan bebas visa, penambahan frekuensi *flight*, penambahan *direct flight* dan *charter flight* dari dan ke beberapa negara asal wisman (Tiongkok, Jepang, Timor Timur, India),

meningkatnya upaya promosi yang dilakukan pelaku industri pariwisata, pengembangan pasar alternatif wisman (India dan Timur Tengah), serta semakin berkembang dan beragamnya destinasi wisata serta paket wisata (*Bali and Beyond*). Dengan peningkatan jumlah wisman pada semester I 2017, pemerintah cukup yakin target 5 juta wisman dapat tercapai di tahun 2017. Dilihat dari asal negaranya, wisatawan asal Tiongkok mendominasi dengan pangsa sebesar 30%, diikuti oleh wisman asal Australia dan Jepang.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1 Perkembangan Jumlah Wisman Bali



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2 Negara Asal Wisman Semester I 2017

Perkembangan pariwisata Bali yang pesat didukung ketersediaan infrastruktur dan destinasi wisata yang baik. oleh tersedianya beragam destinasi wisata (laut, gunung, pertanian, budaya, *sport*, *culinary*, MICE, spiritual) & keindahan alam, infrastruktur yang mendukung (kondisi jalan yang baik, bandar udara internasional, pelabuhan laut untuk Cruise dan pelabuhan penyeberangan), keunikan budaya dan keramahan masyarakat Bali. Namun demikian, pariwisata Bali tengah dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain penurunan kualitas wisatawan yang tercermin pada penurunan pengeluaran wisman rata-rata dari USD143,92/hari pada 2015 menjadi USD143,45/hari pada tahun 2016. Penurunan kualitas juga tercermin pada penurunan rata-rata lama menginap di hotel bintang, dari sebelumnya rata-rata 3,08 hari pada tahun 2015 menjadi 2,91 hari pada tahun 2016. Permasalahan lainnya adalah perkembangan wisata yang terkonsentrasi di Bali Selatan sehingga menimbulkan kesenjangan dengan wilayah Bali Utara. Selain itu, menyebabkan kemacetan dan penumpukan sampah.

Dalam Surat Keputusan Bersama Menparpostel dan Menteri Pertanian No. KM.47/PW.004/MPPT/89 dan No. 204/KPTS/HK050/4/1989, agrowisata didefinisikan sebagai suatu kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai obyek wisata untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha dibidang agro. Elemen dari agrowisata meliputi *what to see, what to do, what to learn, what to eat, what to get & carry* dan *what to buy*. Agrowisata memiliki *multiplier effect* yang besar. Beberapa manfaat dari pengembangan Agrowisata antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan petani
2. Meningkatkan kualitas alam dan budaya
3. Mendidik masyarakat bahwa bertani adalah pekerjaan mulia
4. Mengurangi urbanisasi

• *Brand image* "Bali" yang kuat *(Bali The Island of God)* • Kekayaan alam, keberagaman budaya, objek wisata yang khas dan cita rasa makanan (sawah terasering, kebun anggur, dll) • Budaya pertanian yang kental berasaskan prinsip Trihita Karana (keseimbangan Tuhan, Manusia dan Alam) dan sistem subak • Banyaknya paket wisata dan jumlah *event* pendukung • Harga yang kompetitif bagi wisman (produk dan transportasi) • Banyaknya pilihan rute dengan tarif angkutan udara yang semakin terjangkau • Ketersediaan listrik, air bersih, dan komunikasi memadai • Tingkat keamanan tinggi	S	W • Fasilitas umum, kesehatan dan kebersihan yang belum memadai • Petunjuk jalan dan arah ke objek wisata belum memadai • Moda transportasi menuju objek wisata kurang (Bali Utara) • Penggunaan teknologi untuk promosi belum maksimal • Frekuensi penyelenggaraan travel fair belum memadai • Terbatasnya jumlah tenaga kerja terlatih/ *high skilled* sedikit • Pendidikan/training pegawai kurang sesuai dengan kebutuhan • Terbatasnya akses fasilitas pembiayaan • Tingkat suku bunga saat ini relatif belum mendukung perkembangan usaha
• Tingginya potensi pasar lokal dan global • Berkembangnya pola hidup "*back to nature*" • *Consumption shifting* wisata menjadi kebutuhan pokok • Berkembangnya industri pendukung • Pengembangan wisata minat khusus • Target Pemerintah Provinsi Bali membina 100 desa wisata • Kebijakan bebas visa dan bertambahnya *direct flight* • Kondisi perekonomian domestik mendukung iklim pariwisata • Depresiasi (pelemahan) nilai tukar meningkatkan kunjungan wisatawan asing • Adanya insentif terhadap investasi asing dan domestik	O	T • Menurunnya lama tinggal wisatawan (3,08 hari -> 2,91 hari) • Perlambatan perekonomian global • Adanya kemiripan wisata antar daerah dan negara ASEAN • Maraknya promosi wisata negara asing • Maraknya tenaga kerja asing di sektor pariwisata • Persaingan harga dengan pariwisata luar negeri (bagi wisdom) • *Tourist Information Centre* tidak berfungsi optimal • *Mass tourism* yang cenderung merusak lingkungan • Ancaman bencana (Gunung Agung) • Tingginya arus alih fungsi lahan pertanian (350 ha/tahun) • Rendahnya investasi di bidang pertanian

5. Media promosi produk lokal ke pasar internasional
6. Memberikan pengalaman perjalanan wisata yang unik

Untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai IPKD agrowisata, telah dilakukan FGD bersama Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan akademisi dalam menyusun matriks SWOT analisis.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi dan ancaman yang telah digali melalui FGD bersama *stakeholder*, selanjutnya dilakukan identifikasi strategi dengan dimensi kekuatan-peluang, kekuatan-ancaman, kelemahan-peluang, dan kelemahan-ancaman. Strategi dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:

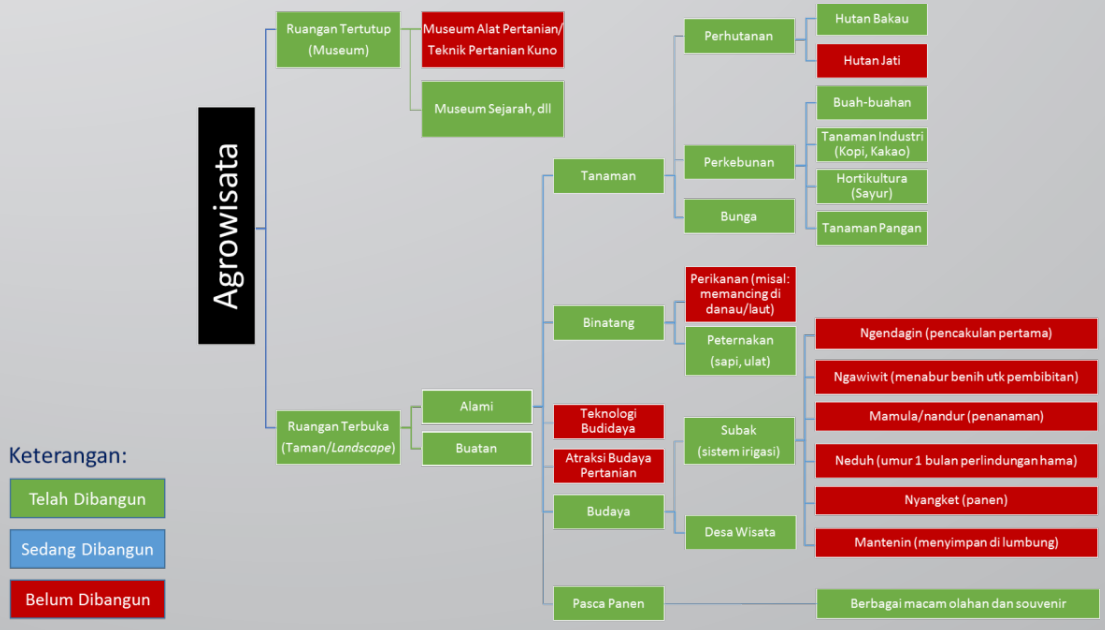
	STRENGTH	**WEAKNESS**
OPPORTUNITY	S1.O2 Menambah jumlah destinasi wisata khususnya di Bali Utara S2.O5 Diversifikasi event pendukung untuk menunjang wisata minat khusus S4.O1 Mengadakan event2 khas yang bersifat tahunan S5.O7 Pengembangan paket wisata dengan biaya ekonomis S3.O6 Pemberdayaan warga lokal untuk mengelola DTW	W1,2.O4 Pembangunan fasilitas umum di DTW W3.O2 Pembangunan infrastruktur transportasi ke DTW W4.O9 Promosi ke Negara lain yang baru W5.O3 Meningkatkan jumlah travel fair dengan segmentasi dan strategi pemasaran yang tepat W8.O8 Meningkatkan akses pembiayaan dengan didukung kondisi perekonomian yang membaik W8,9.O10 Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman lunak dan insentif investasi asing dan domestik di bidang pertanian
THREAT	S7.T7 Revitalisasi peran Tourist Information Centre dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan S4.T3,4,6 Meningkatkan promosi event ke dalam negeri dengan harga yang kompetitif S3.T8 Mengalokasikan dana pemeliharaan lingkungan dari pemasukan pariwisata sesuai budaya Trihita Karana S8.T9 Memperkuat sosialisasi bahwa Bali masih aman untuk dikunjungi	W6. T1 Peningkatan kompetensi SDM Agrowisata terkait pelayanan dan *hospitality* W7.T5 Mengembangkan program magang dan penerapan jenjang karir dalam industri Agrowisata W1.T10 Menerapkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dalam pengembangan DTW

Berdasarkan 4 dimensi strategi tersebut, diperoleh beberapa rumusan strategi dengan mengkombinasikan ke-4 dimensi strategi, antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong promosi Daerah Tujuan Wisata di Bali Utara yang ditunjang dengan infrastruktur dan promosi yang memadai serta peningkatan pelayanan kepada wisatawan
2. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata yang merata melalui penyusunan *roadmap* dengan didukung perijinan dan birokrasi yang mudah dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan
3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata sesuai dengan potensinya (daerah sentra) dengan didukung pemasaran dan peran TIC serta ketersediaan *direct flight* untuk menyasar wisatawan yang lebih fokus
4. Mendorong peningkatan event pariwisata d.r. meningkatkan jumlah wisatawan dengan didukung perbaikan fasilitas Daerah Tujuan Wisata melalui dana pemeliharaan lingkungan dan peningkatan keamanan
5. Mendorong pengembangan eco-tourism dengan biaya terjangkau yang didukung dengan promosi yang gencar baik ke Negara eksisting maupun baru

Pengembangan agrowisata telah diimplementasikan di Bali, namun dinilai masih belum optimal dalam menarik pengunjung. Berdasarkan hasil *fields study* dan *survey* kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan akademisi, beberapa kendala kritikal yang menghambat perkembangan agrowisata antara lain:

1. Fasilitas umum yang terbatas
2. Tingkat kebersihan yang masih rendah
3. Kualitas infrastruktur jalan yang rendah
4. Pemasaran wisata yang kurang gencar
5. Keterampilan tenaga kerja rendah
6. Pengembangan wisata di Bali masih terkonsentasi di Bali Selatan, sehingga berdampak pada kemacetan dan penumpukan sampah di Bali Selatan



Dalam rangka mengatasi kendala kritikal dengan menggunakan strategi yang telah dirumuskan di atas, selanjutnya disusun *roadmap* pengembangan agrowisata Bali yang terbagi atas sasaran jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (3-5 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun) sesuai dengan poin permasalahan yang akan diatasi. Selain itu juga akan dijelaskan juga peranan pemerintah (pusat dan daerah) serta peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan agrowisata.

Tabel 1 *Roadmap* Pengembangan Agrowisata (Faktor SDM)

Poin Permasalahan	Sasaran Jangka Pendek (1-2 tahun)	Sasaran Jangka Menengah (3-5 tahun)	Sasaran Jangka Panjang (> 5 tahun)	Peranan Pemerintah (Pusat-Daerah)	Peranan Swasta & Masyarakat
Faktor SDM					
Minat/motivasi SDM yang rendah	**Promosi ke sekolah-sekolah** terkait prospek pertanian dan pariwisata	• **Insentif** untuk pelajar/mahasiswa di sekolah vokasi bidang pertanian dan pariwisata • Terdapat **program kerjasama** antara universitas dengan pelaku usaha (**lulus langsung bekerja**)	Peningkatan jumlah tenaga kerja profesional bidang pertanian dan pariwisata	Pembinaan ke sekolah vokasi antara lain **penyediaan tenaga pengajar ahli,** pelatihan, workshop, dll	Dukungan untuk memberikan insentif (**beasiswa**) kepada pelajar/mahasiswa
Kurikulum pendidikan yang tidak sejalan	**Menyusun kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan**	Kurikulum telah terimplementasi dengan baik	Tersedia SDM dengan kualitas sesuai dengan kebutuhan	• Kebijakan dalam menetapkan model kurikulum • Memberikan masukan dalam penyusunan kurikulum	Sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan
Skill SDM yang masih lemah	Meningkatkan pelatihan baik soft skill, standar pelayanan dan product knowledge	**Menetapkan standar pelayanan pariwisata dan sertifikasi**	Standar pelayanan telah diimplementasikan dengan baik	Mengadakan **kompetisi bagi DTW dan petani unggulan** Menyediakan sumber daya pengembangan SDM dan fasilitasi	
Faktor Kerjasama Lintas Instansi					
Kurangnya kerjasama lintas instansi	**Pembentukan Bali Incorporated**	Program kerja terlaksana dengan baik	Kerjasama lintas instansi terbangun dengan baik	• Memberikan dukungan dan partisipasi • Memberikan rekomendasi program kerja	
Faktor Pemasaran					
Pemasaran wisata kurang gencar	• Terbangun **promosi online** (media sosial) yang terpusat dan termaintain dengan baik • Menyusun **kalender event** terkait kegiatan di Agrowisata	Terbangun satu **website khusus untuk memasarkan Agrowisata Bali**	Tersedia **Galeri Produk khas Bali di Bandara Internasional dan Domestik serta Hotel dan Pesawat**	Fasilitasi dalam hal penyediaan promosi baik online maupun offline serta baik pameran dalam negeri maupun luar negeri	Penyediaan space promosi di hotel dan pesawat

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali

Tabel 2 *Roadmap* Pengembangan Agrowisata (Faktor Infrastruktur)

Poin Permasalahan	Sasaran Jangka Pendek (1-2 tahun)	Sasaran Jangka Menengah (3-5 tahun)	Sasaran Jangka Panjang (> 5 tahun)	Peranan Pemerintah (Pusat-Daerah)	Peranan Swasta & Masyarakat
Faktor Infrastruktur					
Kesenjangan Bali Utara dan Selatan	• Pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani yang merata • Pembangunan **under pass** untuk mengurangi kemacetan di Bali Selatan	• Pembangunan **jalan short cut dari bandara ke wilayah Bali Utara** • Menyediakan **linking (konektivitas) menuju Nusa Penida** menggunakan speed boat yang tersedia setiap jam	• Pembangunan **bandara di Bali Utara** • Pembangunan **infrastruktur (khususnya air dan jalan) di Nusa Penida, Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan**	• Mengarahkan investasi ke Bali Utara • Mendorong kebijakan pengembangan infrastruktur di Nusa Penida, Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan • Menguatkan konsep "one island management"	Pembangunan **hotel dan restoran di Bali Utara**
Pengembangan Agrowisata belum terbangun/terintegrasi dari hulu hingga hilir	• **Pemetaan dan segmentasi** - Jenis wisata apa saja - Spot foto instagramable • Pengembangan **hilirisasi** produk Agrowisata • **Optimalisasi potensi masyarakat** (pemberdayaan) dalam pengembangan Agrowisata (sentuhan budaya, atraksi)	• Tercipta produk hilir dengan branding yang kuat (disertai latar belakang budaya) • **Pilot project 20 DTW** yang menjadi rujukan di tingkat Nasional	• **Terbangun 100 DTW** yang yang telah mengimplementasikan pengembangan terintegrasi dari hulu hingga hilir	• Aktivasi Desa Wisata secara menyeluruh (tidak hanya sekedar SK) • Kebijakan dalam penggunaan produk lokal Bali • Memberikan **reward studi banding ke LN**	• Melalui **CSR, swasta memiliki minimal 1 Agrowisata binaan** • **Fasilitasi kerjasama paket wisata**

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

KEUANGAN PEMERINTAH



Realisasi belanja pemerintah (APBN dan APBD) pada triwulan III 2017 di Bali tercatat sebesar Rp 20,26 triliun, atau tumbuh sebesar 14,99% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi belanja pemerintah pada triwulan III 2016, yang tumbuh sebesar 13,68% (yoy).

Realisasi pendapatan pemerintah pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp16,64 triliun, tumbuh sebesar 12,94% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2016 yang tumbuh sebesar 9,47% (yoy).

*Foto oleh: Nicko Jefta
(Klingking Beach - Nusa Penida)





2.1. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD secara garis besar terdiri atas pendapatan daerah dan belanja-transfer daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sementara belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dengan demikian, APBD menggambarkan arah dan skala prioritas serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Dalam penyusunan APBD, diharapkan setiap daerah dapat melakukan sinergi dengan kebijakan penganggaran maupun dengan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat.

Anggaran keuangan pemerintah daerah di Bali terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) dan keuangan pemerintah pusat di daerah (APBN di Bali), dengan *share* terbesar adalah anggaran APBD Kabupaten/Kota. Adapun Pagu anggaran belanja keuangan pemerintah (pusat dan daerah) perubahan di Bali pada tahun 2017 meningkat dibandingkan anggaran belanja keuangan pemerintah perubahan tahun 2016. Peningkatan anggaran belanja pemerintah perubahan tercatat sebesar 13,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan peningkatan anggaran belanja perubahan tahun 2016 yang meningkat sebesar 7,12% (yoy). Meningkat signifikannya pagu anggaran perubahan belanja pemerintah pada 2017, terutama didorong oleh peningkatan signifikan untuk pagu anggaran APBN dan APBD Provinsi.

Total pagu anggaran belanja perubahan pemerintah di Bali pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp37,252 triliun, terdiri atas APBD Provinsi dengan pangsa 18,11%, APBD kabupaten/kota sebesar 53,64% dan APBN di Bali sebesar 28,25%. Struktur pagu anggaran

Tabel 2.1 Pagu Anggaran Belanja Pemerintah di Bali (2015-2017)

URAIAN	PAGU BELANJA APBD P & APBN P 2015 (Rp Miliar)	PANGSA	PAGU BELANJA APBD P & APBN P 2016 (Rp Miliar)	PANGSA	Growth (%) 2015-2016 (yoy)	PAGU BELANJA APBD & APBN) 2017 (Rp Miliar)	PANGSA	PAGU BELANJA APBD P & APBN P 2017 (Rp Miliar)	PANGSA	Growth (%) 2016-2017 (yoy)
APBN	9.370	30,45%	8.832	26,79%	-5,75	9.942	28,03%	10.524	28,25%	19,16
APBD Provinsi Bali	5.561	18,07%	5.816	17,64%	4,59	6.654	18,76%	6.745	18,11%	15,97
APBD Kab/Kota	15.840	51,48%	18.315	55,56%	15,62	18.869	53,20%	19.983	53,64%	9,11
TOTAL	30.771		32.963		7,12	35.465		37.252		13,01

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali
Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

Tabel 2.2 Pagu Anggaran Pendapatan Pemerintah di Bali (2015-2017)

URAIAN	PAGU PENDAPATAN APBD P 2015 (Rp Miliar)	PANGSA	PAGU PENDAPATAN APBD P 2016 (Rp Miliar)	PANGSA	Growth (%) 2015-2016 (yoy)	PAGU PENDAPATAN APBD 2017 (Rp Miliar)	PANGSA	PAGU PENDAPATAN APBD P 2017 (Rp Miliar)	PANGSA	Growth (%) 2016-2017 (yoy)
APBD Provinsi Bali	4.901	25,53%	5.218	24,14%	6,47	6.223	26,76%	6.225	25,81%	19,30
APBD Kab/Kota	14.294	74,47%	16.397	75,86%	14,71	17.030	73,24%	17.891	74,19%	9,11
TOTAL	19.195		21.615		12,61	23.253		24.116		11,57

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali

pemerintah di Bali tahun 2017, relatif tidak berbeda dengan pagu anggaran perubahan pada tahun 2016. Sementara itu, bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja tahun 2017, pagu anggaran belanja perubahan 2017 mengalami peningkatan nominal sebesar Rp1,79 triliun atau meningkat sebesar 5,04%, terutama di dorong oleh peningkatan pagu anggaran belanja perubahan kabupaten/kota yang secara nominal meningkat sebesar Rp1,11 triliun, pagu anggaran belanja APBN P yang meningkat sebesar Rp582 miliar dan peningkatan pagu anggaran belanja APBD P Provinsi Bali dengan nominal peningkatan sebesar Rp91 miliar.

Sementara itu, pagu anggaran pendapatan perubahan daerah pada 2017 juga mengalami peningkatan sebesar 11,57% (yoy), yaitu dari Rp 21,62 triliun (anggaran perubahan 2016), menjadi Rp 24,12 triliun pada tahun 2017 (anggaran perubahan). Peningkatan ini, lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan pagu anggaran pendapatan perubahan tahun 2016 yang meningkat sebesar 12,61% (yoy). Peningkatan pagu anggaran pendapatan perubahan tahun 2017, terutama didorong oleh peningkatan signifikan pagu anggaran pendapatan provinsi yang tumbuh sebesar 19,30% (yoy), sedangkan pagu anggaran pendapatan kabupaten/kota hanya tumbuh sebesar 9,11% (yoy). Sementara itu, struktur pagu anggaran pendapatan perubahan terbagi atas APBD P Provinsi Bali (26,76%) dan APBD P untuk sembilan Kabupaten/Kota sebesar (73,24%). Bila dibandingkan dengan anggaran pendapatan tahun 2017, pagu anggaran pendapatan perubahan pada APBD P tahun 2017 meningkat sebesar 3,71% (yoy) atau secara nominal sebesar Rp 846 miliar, terutama didorong peningkatan pagu anggaran kabupaten/kota yang tumbuh sebesar 5,06% (yoy) atau dengan nilai nominal sebesar Rp861 miliar.

Perkembangan realisasi belanja pemerintah pada Triwulan III 2017 menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan periode yang sama tahun 2016, baik dari sisi persentase maupun nominal. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah pada PDRB triwulan III 2017 yang tercatat tumbuh lebih tinggi sebesar 6,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 5,17% (yoy) maupun periode triwulan III 2016 yang juga terkontraksi sebesar 4,46% (yoy). Secara total, realisasi belanja pemerintah (APBN dan APBD) pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp20,26 triliun, atau tumbuh sebesar 14,99% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi belanja pemerintah pada triwulan III 2016, yang tumbuh sebesar 13,68% (yoy), dengan total nominal realisasi tercatat sebesar Rp17,62 triliun. Peningkatan realisasi belanja pemerintah pada triwulan III 2017, terutama didorong oleh akselarasi realisasi belanja untuk anggaran yang menggunakan APBN. Hal ini terkonfirmasi dari tumbuh lebih tingginya realisasi belanja pemerintah yang menggunakan anggaran APBN sebesar 22,03% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2016 yang hanya tumbuh sebesar 7,64% (yoy).

Berdasarkan strukturnya, porsi terbesar realisasi belanja pemerintah pada triwulan III 2017 tidak berbeda dengan periode sebelumnya, yaitu porsi terbesar dikontribusikan oleh belanja pemerintah di tingkat Kab/Kota, Kemudian diikuti belanja pemerintah yang menggunakan dana APBN dan kontribusi terakhir disumbangkan oleh realisasi belanja pemerintah pada tingkat Provinsi.

Realisasi belanja pemerintah Kab/Kota pada triwulan III 2017, tercatat sebesar Rp10 triliun atau sebesar 49,35% dari total realisasi belanja Pemerintah di Provinsi Bali (Rp20,26 triliun), meningkat sebesar 10,25% (yoy). Pertumbuhan realisasi belanja pemerintah Kab/kota pada triwulan III 2017 tersebut tumbuh melambat dibandingkan dengan periode

yang sama tahun 2016 yang tumbuh sebesar 14,27% (yoy). Sementara itu, realisasi belanja pemerintah Provinsi Bali pada triwulan III 2017, tercatat sebesar Rp3,79 triliun atau tumbuh sebesar 16,70% (yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama tahun 2016 yang sebesar 23,19% (yoy). Pada sisi yang lain, realisasi belanja yang menggunakan dana APBN di Provinsi Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp6,47 triliun atau meningkat sebesar 22,03% (yoy), tumbuh jauh lebih tinggi bila dibandingkan periode yang sama 2016, yang sebesar 7,64% (yoy). Meningkatnya realisasi belanja pemerintah khususnya yang menggunakan anggaran APBN di Bali secara nominal pada triwulan III 2017, didorong oleh beberapa faktor meliputi:

1. Adanya upaya percepatan (akselerasi) realisasi belanja barang dan jasa yang dilakukan pada tahun 2017, setelah apda periode tahun 2016, terdapat beberapa Kementerian dan Lembaga yang melakukan penundaan realisasi belanja untuk beberapa proyek dan program, antara lain melalui percepatan tahapan pengadaan barang dan jasa, termasuk pelelangan.
2. Adanya rencana pemangkasan anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2017 sebesar Rp16 triliun secara nasional, karena belum jelasnya jenis anggaran yang akan dipangkas menyebabkan beberapa satuan kerja lembaga vertikal mempercepat realisasi belanja agar tidak mengalami pemangkasan anggaran.
3. Adanya peningkatan pagu anggaran dalam pagu anggaran perubahan APBN P tahun 2017 sebesar Rp581 miliar yang disetujui pada triwulan III 2017, sehingga mendorong peningkatan realisasi anggaran pada triwulan laporan.

Secara persentase realisasi, anggaran belanja menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016. Realisasi belanja pemerintah secara keseluruhan (APBD & APBN) di Provinsi Bali pada triwulan III 2017 mencapai 54,40%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2016 yang sebesar 53,46%. Apabila dirinci lebih lanjut, persentase realisasi anggaran belanja pemerintah mengalami peningkatan pada semua jenis level/kategori, baik dengan anggaran APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota. Persentase realisasi belanja di tingkat kabupaten/kota telah mencapai 50,04% pada triwulan III 2017, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2016 (49,52%). Sejalan dengan itu, persentase realisasi belanja APBN triwulan III 2017 telah mencapai 61,48%, lebih tinggi dibandingkan 60,03% pada triwulan III 2016 dan persentase realisasi belanja APBD Provinsi Bali di triwulan laporan mencapai 56,25%, juga lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2016 yang sebesar 55,89%.

Tabel 2.3 Realisasi Belanja Pemerintah di Bali Pada Triwulan III (2015-2017)

URAIAN	REALISASI BELANJA TW III 2015 (Rp Miliar)	PANGSA	REALISASI BELANJA TW III 2016 (Rp Miliar)	PANGSA	Growth 2015-2016 (yoy)	REALISASI BELANJA TW III 2017 (Rp Miliar)*)	PANGSA	Growth 2016-2017 (yoy)
APBN	4.926	31,78%	5.302	30,09%	7,64%	6.470	31,93%	22,03%
APBD Provinsi Bali	2.639	17,02%	3.251	18,45%	23,19%	3.794	18,72%	16,70%
APBD Kab/Kota	7.937	51,20%	9.070	51,47%	14,27%	10.000	49,35%	10,25%
TOTAL	15.502		17.623		13,68%	20.264		14,99%

**) angka sementara, belum audit*

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali

Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

Tabel 2.4 Persentase Realisasi Belanja Pemerintah di Bali Pada Triwulan III (2016-2017)

URAIAN	PERSENTASE REALISASI BELANJA TW III 2016 TERHADAP PAGU APBD P & APBN P 2016 (%)	PERSENTASE REALISASI BELANJA TW III 2017 TERHADAP PAGU APBD P & APBN P 2017 (%)
APBN	60,03	61,48
APBD Provinsi Bali	55,89	56,25
APBD Kab/Kota	49,52	50,04
TOTAL	53,46	54,40

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali
Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan Pemerintah di Bali Pada Triwulan III (2015-2017)

URAIAN	REALISASI PENDAPATAN TW III 2015 (Rp Miliar)	PANGSA	REALISASI PENDAPATAN TW III 2016 (Rp Miliar)	PANGSA	Growth 2015-2016 (yoy)	REALISASI PENDAPATAN TW III 2017 (Rp Miliar)*)	PANGSA	Growth 2016-2017 (yoy)
APBD Provinsi Bali	3.569	26,52%	3.721	25,25%	4,26%	4.478	26,91%	20,34%
APBD Kab/Kota	9.890	73,48%	11.013	74,75%	11,35%	12.163	73,09%	10,44%
TOTAL	13.459		14.734		9,47%	16.641		12,94%

**) angka sementara, belum audit*
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali

Sejalan dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah baik nominal maupun persentase serta peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan III 2017 yang tumbuh sebesar 6,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 yang sebesar 6,01% (yoy), kinerja pendapatan daerah juga menunjukkan peningkatan di triwulan laporan. Peningkatan ini, terutama didorong oleh peningkatan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada triwulan III 2017 tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kondisi ini didorong oleh mulai membaiknya perkembangan penjualan kendaraan bermotor sehingga mempengaruhi mendorong peningkatan kinerja PAD. Selain itu, telah selesainya program pemutihan atau penghapusan denda atau bunga atas pajak kendaraan bermotor juga menjadi salah satu faktor yang mendorong realisasi PAD pada triwulan III 2017. Sejalan dengan itu, terus meningkatnya perkembangan jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisman yang pada triwulan III 2017 tumbuh sebesar 27,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 (24,54%, yoy) dan triwulan III 2016 (27,22%,yoy), sehingga mendorong peningkatan kinerja industri pariwisata sehingga mendorong peningkatan kinerja PAD khusunya terkait dengan pajak daerah.

Realisasi pendapatan pemerintah pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp16,64 triliun, tumbuh sebesar 12,94% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2016 yang tumbuh sebesar 9,47% (yoy). Realisasi pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan untuk Provinsi Bali sebesar Rp4,48 triliun dan realisasi pendapatan untuk sembilan kabupaten/kota yang tercatat sebesar Rp12,16 triliun. Secara nominal, realisasi pendapatan pemerintah pada triwulan laporan meningkat signifikan yaitu dari Rp14,73 triliun pada triwulan III 2016 menjadi Rp16,64 triliun atau tumbuh sebesar 12,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2016 (9,47%, yoy). Peningkatan realisasi pendapatan pemerintah

Tabel 2.6 Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah di Bali Pada Triwulan III (2016-2017)

URAIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN TW III TERHADAP PAGU PENDAPATAN APBD P 2016	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN TW III TERHADAP PAGU PENDAPATAN APBD P 2017
APBD Provinsi Bali	71,31%	71,94%
APBD Kab/Kota	67,16%	67,98%
Total	68,17%	69,00%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali

di Bali, terutama didorong oleh peningkatan realisasi pendapatan pada tingkat provinsi yang tumbuh sebesar 20,34% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang sebesar 4,26% (yoy). Sementara realisasi pendapatan di tingkat kabupaten/kota tumbuh sedikit melambat.

Sejalan dengan peningkatan realisasi nominal pendapatan tersebut, persentase realisasi pendapatan pada triwulan III 2017 juga mengalami peningkatan mencapai 69%, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2016 yang sebesar 68,17%. Meningkatnya capaian tersebut, terutama didorong oleh meningkatnya persentase realisasi pendapatan baik pada level kabupaten/kota (67,98%) maupun di level provinsi (71,94%) dibandingkan 67,16% (kabupaten/kota) dan 71,31% (provinsi) pada triwulan III 2016.

2.2 Realisasi APBD Provinsi Bali

Nominal realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp 4,48 triliun atau tumbuh sebesar 20,34% (yoy), pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2016 yang sebesar 4,27% (yoy). Sementara itu, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Bali tercatat sebesar Rp3,79 triliun pada triwulan III 2017 atau tumbuh sebesar 16,73% (yoy), lebih tinggi dibanding kontraksi 2,06% (yoy) pada triwulan III 2016.

Dengan realisasi nominal pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja, mendorong realisasi anggaran pemerintah Provinsi Bali pada triwulan III 2017 tercatat mengalami surplus, yaitu sebesar Rp 684 miliar. Kondisi yang mencatatkan surplus ini, serupa dengan pola belanja pemerintah

Tabel 2.7 Perkambangan APBD Bali Pada Triwulan III (2016-2017)

URAIAN	PAGU APBD P 2016 (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW III 2016 (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI (%)	GROWTH REALISASI 2015-2016 (yoy, %)	PAGU APBD P 2017 (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW III 2017*) (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI (%)	GROWTH REALISASI 2016-2017 (yoy, %)
PENDAPATAN DAERAH	**5.218**	**3.721**	**71,32**	**4,27**	**6.225**	**4.478**	**71,94**	**20,34**
PEND. ASLI DAERAH (PAD)	3.172	2.166	68,28	-0,84	3.541	2.479	70,00	14,46
PENDAPATAN TRANSFER	1.752	1.367	78,03	64,45	2.636	1.988	75,41	45,40
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	294	188	64,03	-65,97	47	11	24,06	-93,98
BELANJA DAERAH DAN TRANSFER	**5.816**	**3.251**	**55,89**	**-2,06**	**6.745**	**3.794**	**56,26**	**16,73**
BELANJA DAERAH	3.856	2.320	60,18	-12,08	4.854	2.819	58,08	21,48
BELANJA OPERASI	3.083	1.909	61,92	12,25	4.104	2.507	61,08	31,32
BELANJA MODAL	768	411	53,55	58,92	745	312	41,88	-24,17
BELANJA TAK TERDUGA	4	0	0		5	0	1,68	
TRANSFER	1.961	930	47,44	36,88	1.891	976	51,59	4,87

**) angka sementara, belum audit*

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

di periode triwulan III 2016, yang juga mengalami surplus. Nilai nominal surplus pada triwulan III 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang tercatat sebesar Rp 471 miliar. Peningkatan nominal surplus tersebut, didorong oleh peningkatan pendapatan daerah khususnya pendapatan transfer dan PAD.

2.2.1 Penyerapan Pendapatan APBD Provinsi Bali

Realisasi pendapatan Provinsi Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp4,48 triliun. Capaian ini secara nominal lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan pada triwulan III 2016 sebesar Rp3,72 triliun atau tumbuh sebesar 20,34% (yoy). Peningkatan realisasi pendapatan daerah, terutama didorong oleh peningkatan realisasi pendapatan dari komponen dana transfer (dana perimbangan) yang meningkat 45,40% (yoy). Peningkatan realisasi pendapatan juga didorong oleh meningkatnya realisasi komponen PAD (tumbuh 14,46%, yoy), khususnya terkait dengan peningkatan pajak daerah sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2017 yang tumbuh sebesar 6,22% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 yang sebesar 6,01% (yoy) dan juga didorong oleh terus meningkatnya kinerja industri pariwisata sejalan dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan termasuk wisman. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan yang sah justru mengalami penurunan yang signifikan antara lain disebabkan oleh turunnya pendapatan bunga dari penempatan dana di perbankan sejalan dengan penurunan suku bunga DPK bank.

Secara persentase, realisasi pendapatan pada triwulan III 2017 tersebut tercatat mencapai 71,94%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi Triwulan III 2016 (71,32%). Tingginya persentase realisasi pendapatan, terutama didorong oleh

Tabel 2.8 Pagu dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Triwulan III (2016-2017)

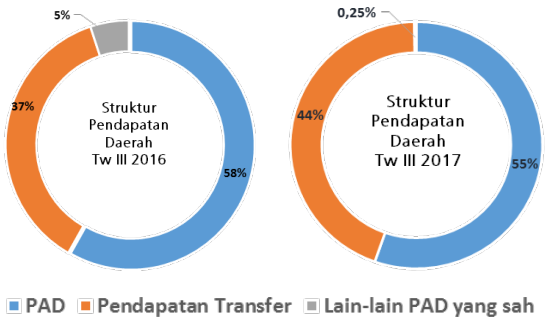
URAIAN	PAGU APBD P 2016 (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW III 2016 (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI (%)	PAGU APBD P 2017 (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW III 2017*) (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI (%)	GROWTH REALISASI 2016-2017 (yoy, %)
PENDAPATAN DAERAH	5.218	3.721	71,32	6.225	4.478	71,94	20,34
PEND. ASLI DAERAH (PAD)	3.172	2.166	68,28	3.541	2.479	70,00	14,46
- Pendapatan Pajak Daerah	2.712	1.818	67,04	3.021	2.056	68,07	13,08
- Retribusi Daerah	50	43	85,26	49	26	52,37	-40,38
- Hsl Pengelolaan. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	173	172	99,69	188	188	99,96	8,94
- Lain-Lain PAD yg Sah	236	132	56,00	284	210	73,83	58,43
PENDAPATAN TRANSFER	1.752	1.367	78,03	2.636	1.988	75,41	45,40
-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	198	130	65,78	204	153	74,81	17,32
- Dana Alokasi Umum (DAU)	696	631	90,70	1.261	1.029	81,62	62,97
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	858	606	70,58	1.171	806	68,82	33,11
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	294	188	64,03	47	11	24,06	-93,98

*) angka sementara, belum audit

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

peningkatan persentase realisasi penerimaan PAD. Meskipun demikian, persentase realisasi pendapatan tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata persentase pendapatan lima tahun terakhir (75,67%). Peningkatan persentase realisasi PAD pada triwulan III 2017 terutama didorong oleh meningkatnya persentase realisasi penerimaan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan persentase PAD tidak terlepas dari perkembangan kondisi ekonomi Bali yang pada triwulan laporan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, sehingga mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.

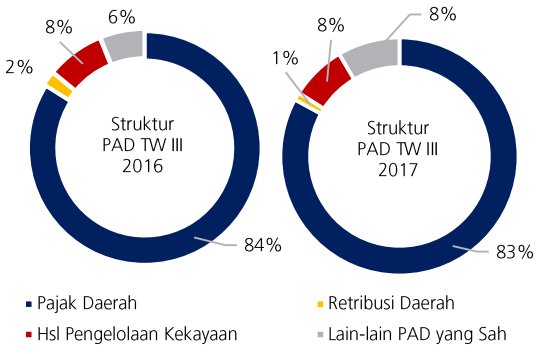
Secara nominal, realisasi pendapatan Provinsi Bali pada triwulan III 2017 tumbuh sebesar 20,34% (yoy), didorong oleh peningkatan penerimaan untuk komponen pendapatan transfer dan komponen PAD, sementara komponen lain-lain pendapatan yang sah justru mengalami penurunan. Penerimaan komponen dana transfer tumbuh sebesar 45,40% (yoy) pada triwulan III 2017, terutama didorong oleh peningkatan yang signifikan pada realisasi penerimaan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan realisasi DAU terutama didorong oleh meningkatnya pagu anggaran DAU dalam rangka pengelolaan gaji guru SMU dan sederajat yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi, setelah tahun sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sejalan dengan itu, realisasi nominal PAD tercatat tumbuh sebesar 14,46% (yoy), juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan realisasi pendapatan pemerintah pada triwulan laporan. Peningkatan komponen PAD tersebut, terutama didorong oleh peningkatan subkomponen pajak daerah yang tumbuh sebesar 13,08% (yoy) dan peningkatan subkomponen hasil pengelolaan kekeyaan daerah yang dipisahkan yang tumbuh sebesar 8,94% (yoy) serta subkomponen lain-lain PAD yang sah (58,43%, yoy).



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

Grafik 2.1 Pangsa Realisasi Anggaran Komponen Pendapatan Daerah

Berdasarkan struktur komponen pendapatan daerah pada triwulan III 2017, komponen dengan pangsa terbesar adalah PAD (55,36%), kemudian diikuti oleh komponen pendapatan transfer (44,39%) dan terakhir adalah komponen lain-lain pendapatan yang sah (0,25%). Struktur pendapatan daerah relatif hampir sama dengan periode yang sama 2016, yang juga masih didominasi oleh komponen PAD, meskipun dengan persentase yang lebih besar yaitu 58,20%, sementara pendapatan transfer merupakan terbesar kedua (36,74%). Meningkatnya pangsa pendapatan transfer pada Triwulan III 2017, terutama didorong adanya perubahan kewenangan pengelolaan gaji guru SMU dan sederajat yang sebelumnya (2016) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, beralih menjadi kewenangan provinsi pada tahun 2017, yang masuk dalam komponen DAU.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

Grafik 2.2 Struktur Realisasi PAD

PAD sebagai komponen dengan pangsa terbesar terhadap total pendapatan daerah, pada Triwulan III 2017 memiliki struktur sebagai berikut: subkomponen dengan pangsa terbesar adalah pajak daerah dengan pangsa sebesar 83%, kemudian diikuti oleh subkomponen hasil pengelolaan kekayaan dengan pangsa sebesar 8% dan lain-lain PAD yang sah dengan pangsa sebesar 8%, sedangkan retribusi daerah memilki pangsa 1%. Pada triwulan III 2017, realisasi nominal penerimaan pajak daerah tercatat tumbuh signifikan sebesar 13,08% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibanding -4,90% (yoy) pada triwulan III 2016. Membaiknya kinerja PAD pada triwulan III 2017, khususnya sub komponen pajak daerah didorong oleh beberapa faktor meliputi meliputi:

1. Peningkatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2017 (tumbuh 6,22%,yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya (6,01%, yoy);
2. Terus meningkatnya kinerja industri pariwisata, sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang terus berlanjut, termasuk wisman yang tumbuh 27,51% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwuan II 2017 yang sebesar 24,54% (yoy) dan triwulan III 2016 (27,22%, yoy);
3. Membaiknya kinerja penjualan kendaraan bermotor roda dua, yang meskipun masih mengalami kontraksi namun masih tumbuh lebih baik pada triwulan laporan yaitu sebesar 6,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan kontraksi pada triwulan II 2017 yang sebesar 25,50% (yoy) dan triwulan III 2016 yang terkontraksi sebesar 9,71% (yoy). Penjualan kendaraan roda dua merupakan salah sumber penerimaan untuk pajak daerah (PAD). Membaiknya penjualan kendaraan bermotor roda dua didorong oleh:
    a. Mulai membaiknya daya beli masyarakat, tercemin dari pertumbuhan komponen konsumsi masyarakat yang tumbuh sebesar 4,43% (yoy) pada triwulan III 2017 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 3,77% (yoy);
    b. Terus berlanjutnya penurunan tingkat suku bunga kredit perbankan termasuk kredit konsumsi;
    c. Program promo dan diskon dari pihak dealer dan telah dirilisnya berbagai varian motor baru, menjadi pendorong peningkatan penjualan kendaraan bermotor.
    d. Masuknya tahun ajaran baru pada awal triwulan III 2017, yang secara historis akan mendorong peningkatan penjualan kendaraan bermotor khususnya roda dua.

Selain itu, telah berakhirnya program pembebasan denda untuk PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang berlaku sejak 20 Juni 2016, menjadi pendorong peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah. Meskipun demikian, peningkatan pajak daerah ini, tidak diikuti oleh komponen PAD lainnya yang justru mengalami penurunan yaitu subkomponen retribusi daerah.

Komponen Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan daerah. Pada triwulan III 2017 tercatat memiliki pangsa sebesar 44,39% terhadap total pendapatan. Struktur komponen ini, terutama didominasi oleh pendapatan dana alokasi umum (DAU) dengan pangsa yang tercatat sebesar 51,79% terhadap total pendapatan transfer. Persentase realisasi penyerapan subkomponen ini di triwulan laporan tercatat sebesar 81,62% terhadap pagu anggaran atau dengan nominal sebesar Rp1,03 triliun. Realisasi pencapaian ini meningkat sebesar 62,97% (yoy), dibandingkan dengan realisasi triwulan III 2016, yang tercatat sebesar Rp631 miliar. Peningkatan realisasi komponen ini didorong oleh adanya kebijakan penyesuaian pengelolaan gaji guru SMU dan sederajat dari sebelumnya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi pemerintah provinsi sejak tahun 2017. Peningkatan realisasi penerimaan dana transfer juga didorong oleh peningkatan realisasi penerimaan pada

sub komponen DAK yang sebesar Rp806 miliar atau tumbuh sebesar 33,11% (yoy), dengan persentase pencapaian terhadap pagu anggaran sebesar 68,82%.

Realisasi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, secara nominal tercatat engalami penurunan yang signifikan. Pada Triwulan III 2017, realisasi penerimaan komponen ini tercatat sebesar Rp11 miliar atau dengan persentase realisasi terhadap pagu sebesar 24,06%. Sejalan itu, realisasi penerimaan untuk komponen ini juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 93,98% (yoy). Penurunan ini, terutama disebabkan oleh belum diterimanya penerimaan untuk sub komponen bantuan keuangan hingga triwulan laporan.

2.2.2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali

Realisasi belanja Provinsi Bali pada triwulan III 2017 menunjukkan peningkatan, baik secara persentase maupun nominal dibandingkan triwulan III 2016. Realisasi belanja tercatat sebesar Rp3,79 triliun atau dengan persentase 56,26% dari pagu APBD P 2017. Apabila dibandingkan dengan nominal realisasi triwulan III 2016, nominal realisasi belanja tersebut tercatat tumbuh sebesar 16,73% (yoy), terutama didorong oleh peningkatan realisasi belanja operasi yang tumbuh sebesar 31,32% (yoy) atau dengan nilai nominal sebesar Rp2,51 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi nominal triwulan III 2016 yang sebesar Rp1,91 triliun. Peningkatan realisasi belanja Provinsi Bali pada triwulan III 2017, didorong oleh beberapa faktor yang meliputi:

1. Telah dilakukannya penyesuaian personil dan badan akun anggaran akibat penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan pada awal tahun 2017
2. Upaya untuk mendorong akselerasi belanja daerah, melalui pelaksanaan kegiatan rapat evaluasi dan monitoring serta pemantauan secara berkala realisasi anggara belanja pada setiap OPD.
3. Meningkatnya realisasi pendapatan daerah,

Tabel 2.9 Pagu dan Realisasi APBD Provinsi Bali Triwulan III (2016-2017)

URAIAN	PAGU APBD P 2016 (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW III 2016 (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI (%)	PAGU APBD P 2017 (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW III 2017*) (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI (%)	GROWTH REALISASI 2016-2017 (yoy, %)
BELANJA DAERAH DAN TRANSFER	**5.816**	**3.251**	**55,89**	**6.745**	**3.794**	**56,26**	**16,73**
BELANJA DAERAH	3.856	2.320	60,18	4.854	2.819	58,08	21,48
BELANJA OPERASI	3.083	1.909	61,92	4.104	2.507	61,08	31,32
- Belanja Pegawai	946	592	62,53	1.693	1.034	61,10	74,83
- Belanja Barang dan Jasa	803	492	61,20	1.216	625	51,35	27,07
- Belanja Hibah	1.166	670	57,50	1.173	840	71,65	25,36
- Belanja Subsidi	10	3	25,28	10	5	46,79	85,09
- Belanja Bantuan Sosial	158	153	96,73	13	3	25,86	-97,87
BELANJA MODAL	768	411	53,55	745	312	41,88	-24,17
BELANJA TAK TERDUGA	4	0	0	5	0	1,68	
TRANSFER	1.961	930	47,44	1.891	976	51,59	4,87

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

khususnya PAD didorong oleh peningkatan penerimaan pajak daerah seiring dengan meningkatnya kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2017

4. Adanya perubahan kewenangan pengelolaan gaji guru SMU dan sederajat dari kabupaten/kota (2016), menjadi kewenangan provinsi (2017), sehingga mendorong peningkatan realisasi pada triwulan laporan

Sementara itu persentase realisasi belanja pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 56,26%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan persentase triwulan III 2016 yang tercatat sebesar 55,89%. Peningkatan realisasi belanja Provinsi Bali, baik secara nominal maupun persentase pada triwulan III 2017 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap meningkatnya komponen konsumsi pemerintah dalam PDRB Bali, yang pada triwulan III 2017 tumbuh sebesar 4,43% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 (3,77%, yoy).

Peningkatan realisasi belanja Provinsi Bali pada triwulan III 2017 secara nominal, didorong oleh peningkatan yang signifikan terhadap realisasi belanja operasi yang tumbuh sebesar 31,32% (yoy). Peningkatan realisasi belanja operasi ini, didorong oleh peningkatan yang signifikan untuk realisasi sub komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja hibah. Pada sisi yang lain, realisasi komponen belanja modal pada triwulan III 2017 menunjukkan penurunan sebesar 24,17% (yoy), dibandingkan triwulan III 2016, disebabkan oleh adanya pembangunan 2 rumah sakit[1]. Sementara itu, realisasi belanja transfer tumbuh sebesar 4,87% (yoy) pada triwulan III 2017 atau denga nominal sebesar Rp 976 miliar, lebih tinggi dibandingkan realisasi nominal triwulan III 2016 yang tercatat Rp 930 miliar.

Apabila ditinjau dari persentase, realisasi belanja daerah pada triwulan III 2017 (58,08%) relatif lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2016 (60,18%), meskipun demikian secara total realisasi belanja dapat tetap lebih tinggi terutama didorong oleh tingginya persentase realisasi belanja transfer yang mencapai 51,59%, lebih tinggi dibandingkan 47,44% pada triwulan III 2017.

Berdasarkan strukturnya (mengacu pada realisasi anggaran triwulan laporan), komponen belanja operasi disusun oleh lima subkomponen pembentuk, dengan pangsa terbesar adalah belanja pegawai sebesar 41,25%, kemudian diikuti oleh belanja hibah (33,52%), belanja barang dan jasa (24,91%), belanja subsidi (0,19%) dan belanja bantuan sosial (0,13%). Struktur belanja operasi ini, cenderung berbeda dibanding triwulan III 2016, dengan *share* terbesar adalah sub komponen belanja hibah (35,11%).

Belanja pegawai sebagai subkomponen dengan pangsa terbesar terhadap realisasi belanja operasi pada triwulan III 2017, realisasi pencapaian subkomponen ini tercatat sebesar Rp1,03 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan III 2016 (Rp592 miliar) atau meningkat sebesar 74,83% (yoy). Sementara itu, persentase realisasi subkomponen ini mengalami sedikit penurunan dengan capaian sebesar 61,10%, lebih rendah dibanding 62,53% pada triwulan III 2016. Komponen belanja hibah (pangsa terbesar kedua untuk belanja operasi), secara nominal mengalami peningkatan sebesar 25,36% (yoy), dengan persentase realisasi telah mencapai 71,65% (TW III 2017), lebih tinggi dibandingkan periode triwulan III 2016 (57,50%).

Realisasi belanja barang dan jasa pada triwulan III 2017 tercatat Rp625 miliar, meningkat sebesar 21,61% (yoy), jika dibandingkan triwulan III 2016. Pertumbuhan realisasi belanja barang dan jasa tersebut, juga ikut mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha pedagangan besar dan eceran yang pada triwulan laporan tumbuh lebih tinggi sebesar

1 Rumah Sakit Provinsi Bali Madara dan Rumah Sakit Mata

9,64% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,12% (yoy) dan triwulan III 2016 (5,22%, yoy). Sementara itu bila dibandingkan persentase realisasinya, komponen belanja barang dan jasa tercatat sebesar 51,35%, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016 yang sebesar 61,20%. Realisasi nominal belanja modal pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp 312 miliar, mengalami penurunan sebesar 24,17% (yoy) bila dibandingkan triwulan III 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pagu anggaran untuk komponen ini pada 2017, sementara itu pagu anggaran belanja modal yang lebih tinggi pada tahun 2016, didorong oleh adanya realisasi pembangunan 2 rumah sakit, yaitu rumah sakit mata dan rumah sakit Provinsi Bali Mandara. Sejalan dengan itu, persentase realisasi belanja modal triwulan III 2017 tercatat sebesar 41,88%, lebih rendah dibandingkan 53,55% pada triwulan III 2016. Perlambatan realisasi belanja modal tersebut juga disebabkan oleh dampak lanjutan dari penyesuaian OPD di triwulan I 2017, berdampak pada diperlukannya waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap personil dan bagan akun anggaran sehingga realisasi belanja modal mengalami pemunduran realisasi. Alokasi anggaran untuk belanja modal pada tahun 2017 dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, drainase, gedung dan pemeliharaan fisik.

2.3 Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali

2.3.1 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/ Kota Provinsi Bali

Perkembangan pagu anggaran pendapatan dalam APBD P pada tahun 2017 di sembilan kabupaten/kota Provinsi Bali menunjukkan peningkatan dibandingkan pagu anggaran pada APBD P tahun 2016. Nilai nominal pagu anggaran pendapatan APBD P 2017 tercatat sebesar Rp17,89 triliun, meningkat 9,11% (yoy) dibandingkan pagu anggaran APBD P tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp16,40 triliun. Bila ditinjau dari sisi jenis komponen pendapatan, peningkatan pagu tertinggi adalah pada komponen PAD yang tumbuh sebesar 28,15% (yoy). Sementara pagu pendapatan transfer justru mengalami penurunan sebesar 1,70% (yoy), sedangkan lain-lain pendapatan yang sah justru mengalami peningkatan sebesar 2,07% (yoy). Bila dibandingkan dengan pagu anggaran pendapatan APBD tahun 2017, pagu anggaran perubahan pendapatan 2017 ini mengalami peningkatan sebesar Rp 861 miliar secara nominal atau sebesar 5,05%. Berdasarkan data yang diterima, masih terdapat pemerintah kabupaten yang belum mendapatkan persetujuan terkait APBD P tahun 2017 yaitu Karangasem, sehingga data yang direkapitulasi masih merupakan pagu APBD tahun 2017.

Tabel 2.10 Pagu APBD Untuk Sembilan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali Tahun 2016-2017

Kabupaten	Pagu APBD P 2016 (Rp Miliar)				Pagu APBD P 2017 (Rp Miliar)				Perubahan 2016-2017 (%)			
	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	740	847	296	1.883	933	901	212	2.046	25,98	6,43	-28,39	8,65
Kabupaten Tabanan	305	1.225	385	1.915	395	1.139	380	1.914	29,41	-7,01	-1,30	-0,06
Kabupaten Klungkung	122	715	231	1.068	124	674	234	1.032	1,67	-5,72	1,35	-3,34
Kabupaten Karangasem	229	930	295	1.455	234	974	345	1.553	1,88	4,72	16,96	6,76
Kabupaten Gianyar	507	968	210	1.684	667	943	199	1.809	31,65	-2,58	-5,05	7,41
Kabupaten Badung	3.195	512	241	3.948	4.258	628	210	5.096	33,27	22,64	-12,89	29,08
Kabupaten Buleleng	316	1.450	451	2.216	352	1.339	482	2.172	11,50	-7,68	6,95	-1,97
Kabupaten Bangli	103	849	193	1.144	118	764	186	1.067	14,08	-10,02	-3,44	-6,74
Kabupaten Jemberana	101	751	232	1.084	120	745	337	1.202	18,86	-0,83	45,27	10,86
Total	5.618	8.246	2.533	16.397	7.199	8.106	2.585	17.891	28,15	-1,70	2,07	9,11

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

Bila ditinjau daerahnya, peningkatan pagu anggaran pendapatan tertinggi pada tahun 2017 dicapai oleh Kabupaten Badung, dengan peningkatan sebesar 29,08% (yoy), dengan nilai nominal tercatat sebesar Rp5,10 triliun. Sedangkan daerah dengan penurunan pagu anggaran pendapatan tertinggi adalah Kabupaten Bangli, dengan penurunan sebesar 6,74% (yoy) atau nilai nominal tercatat sebesar Rp1,07 triliun. Selanjutnya, daerah dengan pagu nominal anggaran pendapatan tertinggi pada APBD P tahun 2017 adalah Kabupaten Badung, dengan pangsa mencapai 28,48% dari total pagu pendapatan APBD Kab/ Kota di Provinsi Bali. Sementara itu, daerah dengan pagu nominal anggaran pendapatan terendah pada APBD P 2017 adalah Kabupaten Klungkung, dengan nominal tercatat sebesar Rp1,03 triliun dan pangsa sebesar 5,77% dari total pagu pendapatan APBD P kabupaten/kota di Bali tahun 2017.

Realisasi pendapatan daerah kabupaten/kota di Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp12,16 triliun atau meningkat sebesar 10,44% (yoy) bila dibandingkan triwulan III 2016 dengan nilai nominal sebesar Rp11,01 triliun. Peningkatan realisasi pendapatan kabupaten/kota pada triwulan laporan, terutama didorong oleh peningkatan realisasi PAD, realisasi lain-lain pendapatan yang sah dan peningkatan realisasi transfer. Peningkatan realisasi PAD yang signifikan tersebut (14,03%, yoy), terutama didorong oleh: 1) meningkatnya kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2017 yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya; 2) semakin berkembangnya kinerja industri pariwisata sejalan dengan terus berkembangnya jumlah kunjungan wisatawan; 3) meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan sehingga memberikan dampak positif pada membaiknya penjualan kendaraan bermotor (khususnya roda dua) pada triwulan III 2017.

Apabila dianalisa lebih lanjut pencapaian realisasi pendapatan di triwulan laporan, pemerintah tingkat II dengan peningkatan realisasi pendapatan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Tabanan (22,95%, yoy), atau dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1,58 triliun. Sementara itu, daerah dengan realisasi penurunan pendapatan tertinggi dialami oleh Kota Denpasar, yang turun sebesar 9,08% (yoy) dengan nilai nominal sebesar Rp1,11 triliun. Penurunan yang tinggi terhadap realisasi pendapatan Kota Denpasar, terutama disebabkan oleh menurunnya secara signifikan seluruh subkomponen pendapatan daerah, baik PAD, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 2.11 Realisasi Pendapatan 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali Triwulan III (2016-2017)

Kabupaten	Realisasi Triwulan III 2016 (Rp Miliar)				Realisasi Triwulan III 2017 (Rp Miliar)				Growth Tahunan (yoy) TW III (2016-2017) (%)			
	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	517	620	82	1.219	417	625	66	1.109	-19,37	0,89	-19,49	-9,08
Kabupaten Tabanan	225	885	177	1.287	307	991	284	1.582	36,51	12,00	60,46	22,95
Kabupaten Klungkung	101	564	85	750	106	524	172	802	4,83	-7,13	103,42	6,98
Kabupaten Karangasem	167	754	122	1.043	153	727	208	1.087	-8,72	-3,53	69,71	4,23
Kabupaten Gianyar	382	711	130	1.224	455	728	126	1.310	19,04	2,39	-3,18	7,00
Kabupaten Badung	2.314	301	220	2.835	2.738	329	103	3.171	18,33	9	-52,94	11,85
Kabupaten Buleleng	187	918	181,68	1.286	253	1.009	318	1.580	35,68	9,87	75	22,84
Kabupaten Bangli	35	514	74	623	63	516	123	701	79,00	0,32	66,99	12,63
Kabupaten Jemberana	86	524	136	746	86	574	160	820	0,01	9,64	17,58	9,97
Total	4.015	5.791	1.207	11.013	4.578	6.024	1.561	12.163	14,03	4,02	29,28	10,44

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

Apabila ditinjau lebih lanjut, pemerintah tingkat II dengan nilai realisasi pendapatan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Badung sebesar Rp3,17 triliun atau meningkat 11,85% (yoy). Peningkatan realisasi pendapatan Kabupaten Badung terutama didorong oleh peningkatan PAD yang tumbuh sebesar 18,33% (yoy). Peningkatan PAD Kab. Badung yang signifikan tersebut didorong oleh beberapa faktor meliputi:

1. Terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman
2. Sejalan dengan peran Badung sebagai pusat industri hotel Bali, maka peningkatan kinerja lapangan usaha akomodasi makan minum yang pada triwulan III 2017 tumbuh sebesar 9,26% (yoy), lebih tinggi dari triwulan II 2017 yang sebesar 7,78% (yoy) dan triwulan III 2016 (7,48%, yoy)

Kedua kondisi ini mendorong peningkatan penerimaan dari pajak hotel dan restoran pada triwulan laporan. Sedangkan daerah dengan realisasi pendapatan terendah adalah Kabupaten Bangli (Rp701 miliar). Rendahnya realisasi pendapatan tersebut, terutama disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan pendapatan transfer.

Bila ditinjau dari realisasi persentase, pemerintah tingkat II dengan persentase realisasi pendapatan tertinggi pada Triwulan III 2017 adalah Kabupaten Klungkung, dengan persentase mencapai 77,73%. Tingginya realisasi tersebut, didorong oleh pencapaian realisasi PAD yang sebesar 86,54% (sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan III 2017) dan tingginya pendapatan transfer yang sebesar 77,72%. Sedangkan daerah dengan persentase realisasi penyerapan pendapatan terendah adalah Kota Denpasar yaitu sebesar 54,19%, yang disebabkan menurunnya realisasi penyerapan untuk seluruh komponen pembentuk pendapatan daerah bila dibandingkan periode yang sama 2016.

2.3.2. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Pagu anggaran belanja APBD Kabupaten/Kota pada anggaran perubahan tahun 2017 menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan APBD P tahun 2016, yaitu dari sebesar Rp18,32 triliun (APBD P 2016) menjadi sebesar Rp19,98 triliun atau meningkat sebesar 9,11% (yoy). Peningkatan pagu anggaran belanja perubahan terjadi untuk seluruh komponen belanja daerah, baik untuk belanja operasi, belanja modal, maupun untuk belanja transfer dan belanja tidak terduga. Terdapat 6 (enam) kab/kota di Provinsi Bali, yang menunjukkan peningkatan pagu nominal anggaran belanja APBD P pada tahun 2017, sedangkan 3 (tiga) daerah mengalami penurunan

Tabel 2.12 Persentase Realisasi Pendapatan 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali Triwulan III (2016-2017)

Kabupaten	Persentase Realisasi TW III 2016 Terhadap Pagu APBD P 2016 (%)				Persentase Realisasi TW III 2017 Terhadap Pagu APBD P 2017 (%)			
	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	69,84	73,18	27,85	64,75	44,70	69,38	31,31	54,19
Kabupaten Tabanan	73,66	72,26	46,01	67,21	77,69	87,04	74,80	82,68
Kabupaten Klungkung	83,06	78,90	36,65	70,23	85,64	77,72	73,57	77,73
Kabupaten Karangasem	72,93	81,02	41,41	71,70	65,35	74,63	60,09	70,00
Kabupaten Gianyar	75,51	73,52	61,89	72,67	68,28	77,27	63,11	72,39
Kabupaten Badung	72,41	58,85	91,21	71,80	64,30	52,45	49,27	62,22
Kabupaten Buleleng	59,14	63,31	40,31	58,04	71,96	75,34	66,04	72,73
Kabupaten Bangli	33,98	60,59	38,28	54,44	53,32	67,55	66,21	65,75
Kabupaten Jemberana	85,71	69,69	58,71	68,83	72,12	77,05	47,52	68,28
Total	71,46	70,22	47,67	67,16	63,59	74,31	60,39	67,98

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

Tabel 2.13 Pagu Anggaran Belanja APBD 9 Kabupten/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Tahun 2016-2017

Kabupaten	Pagu Belanja APBD P 2016 (Rp Miliar)				Pagu Belanja APBD P 2017 (Rp Miliar)				Growth Tahunan 2016-2017 (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Transfer dan Belanja Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Transfer dan Belanja Tak Terduga	Total Belanja	Total Belanja
Kota Denpasar	1.556	295	198	2.048	1.732	324	225	2.280	11,32
Kabupaten Tabanan	1.560	280	223	2.062	1.420	523	242	2.184	5,91
Kabupaten Klungkung	859	247	111	1.217	840	195	112	1.146	-5,81
Kabupaten Karangasem	1.138	258	173	1.569	1.162	235	177	1.574	0,28
Kabupaten Gianyar	1.364	367	243	1.974	1.358	438	251	2.047	3,71
Kabupaten Badung	2.406	1.440	782	4.628	3.721	1.479	973	6.172	33,36
Kabupaten Buleleng	1.733	408	234	2.375	1.602	295	275	2.172	-8,52
Kabupaten Bangli	795	315	119	1.229	683	282	172	1.137	-7,45
Kabupaten Jemberana	748	363	102	1.212	794	350	125	1.269	4,70
Total	12.159	3.972	2.184	18.315	13.310	4.120	2.553	19.983	9,11

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

pagu anggaran belanja di periode yang sama. Bila dianalisis lebih lanjut, pemerintah tingkat II dengan peningkatan pagu anggaran belanja tertinggi (anggaran perubahan tahun 2017) adalah Kabupaten Badung, dengan peningkatan sebesar 33,36% (yoy), sedangkan penurunan pagu anggaran belanja tertinggi dialami oleh kabupaten Buleleng, yang terkontraksi sebesar 8,52% (yoy).

Selanjutnya, daerah dengan nominal pagu anggaran belanja tertinggi pada tahun 2017 adalah Kabupaten Badung sebesar Rp6,17 triliun, meningkat dibandingkan dengan pagu anggaran 2016 yang sebesar Rp4,63 triliun. Anggaran belanja terbesar dialokasikan untuk belanja operasi yang mencapai Rp3,72 triliun (60,28%). Sementara itu, daerah dengan nilai anggaran pagu belanja terendah pada 2017 adalah Kabupaten Bangli dengan nominal sebesar Rp1,14 triliun, turun signifikan sebesar 7,45% (yoy) dibandingkan anggaran tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp1,23 triliun. Pagu anggaran belanja Bangli terutama juga dialokasikan untuk belanja operasi dengan nominal sebesar Rp683 miliar (60,05%).

Tabel 2.14 Realisasi Belanja APBD untuk 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Triwulan III (2016-2017)

Kabupaten	Realisasi Belanja Tw III 2016 (Rp Miliar)				Realisasi Belanja Tw III 2017 (Rp Miliar)				Growth Tahunan TW III 2016-2017 (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Transfer dan Belanja Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Transfer dan Belanja Tak Terduga	Total Belanja	Total Belanja
Kota Denpasar	883	85	94	1.062	588	19	93	700	-34,14
Kabupaten Tabanan	855	88	183	1.127	974	133	214	1.321	17,22
Kabupaten Klungkung	468	75	54	597	506	54	94	654	9,45
Kabupaten Karangasem	691	62	124	877	718	104	146	969	10,47
Kabupaten Gianyar	783	102	149	1.034	789	148	185	1.122	8,56
Kabupaten Badung	1.206	388	399	1.993	1.911	362	510	2.782	39,57
Kabupaten Buleleng	1.007	77	124	1.208	997	87	153	1.237	2,42
Kabupaten Bangli	425	21	86	532	439	40	130	609	14,36
Kabupaten Jemberana	447	101	91	640	442	76	89	607	-5,14
Total	6.765	999	1.306	9.070	7.364	1.022	1.615	10.000	10,25

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

Berdasarkan realisasi belanja triwulan III 2017 untuk 9 kabupaten/kota di Bali, total realisasi belanja pada triwulan III dari 9 kabupaten/kota tercatat sebesar Rp10 triliun atau meningkat sebesar 10,25% (yoy), dibandingkan dengan realisasi belanja triwulan III 2016 yang tercatat mencapai Rp9,07 triliun. Peningkatan realisasi belanja tersebut, mendorong meningkatnya kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan laporan yang tumbuh positif sebesar 6,89% (yoy), setelah 4 (empat) triwulan sebelumnya selalu tumbuh negatif (termasuk triwulan III 2016). Bila dianalisis lebih lanjut terkait pencapaian penyerapan anggaran belanja di masing-masing kabupaten/kota, dikatahui bahwa daerah dengan peningkatan realisasi belanja tertinggi adalah Kabupaten Badung (39,57%, yoy), yaitu dari Rp1,99 triliun pada triwulan III 2016 menjadi sebesar Rp2,78 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya realisasi belanja operasi yang tumbuh sebesar 53,52% (yoy) dan belanja tidak terduga yang tumbuh sebesar 60,58% (yoy).

Upaya akselerasi realisasi belanja daerah dalam rangka meningkatkan stimulus fiskal dalam perekonomian, merupakan salah satu faktor yang mendorong peningkatan realisasi belanja Kabupaten Badung pada triwulan laporan. Sementara itu, pertumbuhan realisasi belanja terendah dialami oleh Kota Denpasar, yang mengalami kontraksi sebesar 34,14%(yoy), terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi belanja operasi sebesar 33,40% (yoy) dan penurunan signifikan realisasi belanja modal yang sebesar 78,08% (yoy).

Bila ditinjau dari persentase serapan realisasi belanja pemerintah kabupaten/kota triwulan III 2017, persentase realisasi belanja tercatat 50,04% lebih tinggi dibandingkan 49,53% pada triwulan III 2016. Peningkatan persentase realisasi belanja tersebut, didorong oleh upaya percepatan realisasi belanja antara lain melalui monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka meningkatkan kontsribusi fiskal dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, telah dilakukannnya penyesuaian personil dan akun anggaran terkait dengan kebijakan OPD pada awal tahun juga menjadi faktor pendorong peningkatan realisasi belanja di triwulan laporan. Kondisi ini ikut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan laporan yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Apabila ditinjau lebih lanjut terkait dengan realisasi belanja daerah, pemerintah tingkat II dengan

Tabel 2.15 Persentase Realisasi Belanja 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali Triwulan III (2016-2017)

Kabupaten	Persentase Realisasi Belanja TW III 2016 Terhadap Pagu APBD P 2016 (%)				Persentase Realisasi Belanja TW III 2017 Terhadap Pagu APBD P 2017 (%)			
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Transfer dan Belanja Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Transfer dan Belanja Tak Terduga	Total Belanja
Kota Denpasar	56,75	28,85	47,70	**51,86**	33,95	5,76	41,32	**30,68**
Kabupaten Tabanan	54,80	31,64	82,36	**54,64**	68,57	25,48	88,61	**60,47**
Kabupaten Klungkung	54,49	30,23	49,21	**49,09**	60,28	27,60	83,82	**57,03**
Kabupaten Karangasem	60,67	24,22	71,51	**55,87**	61,85	44,31	82,39	**61,54**
Kabupaten Gianyar	57,43	27,64	61,41	**52,38**	58,13	33,70	73,80	**54,83**
Kabupaten Badung	50,10	26,97	51,07	**43,07**	51,35	24,47	52,38	**45,07**
Kabupaten Buleleng	58,12	18,87	52,90	**50,87**	62,24	29,58	55,57	**56,95**
Kabupaten Bangli	53,48	6,56	72,63	**43,31**	64,24	14,13	75,55	**53,52**
Kabupaten Jemberana	59,82	27,94	89,49	**52,77**	55,65	21,61	71,40	**47,81**
Total	55,64	25,16	59,79	49,53	55,32	24,80	63,24	50,04

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

persentase penyerapan realisasi belanja tertinggi di triwulan laporan adalah Kabupaten Karangasem dengan capaian 61,54% dari pagu APBD P 2017. Sementara itu Kota Denpasar, merupakan daerah tingkat II dengan persentase penyerapan realisasi belanja terendah yaitu hanya sebesar 30,68%, terutama disebabkan rendahnya persentase realisasi belanja modal yang baru mencapai 5,76% dan realisasi belanja operasi yang baru mencapai 33,95%.

2.4. Realisasi APBN Provinsi Bali

2.4.1. Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali

Perkembangan Realisasi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Bali pada Triwulan III 2017, mengalami peningkatan baik dari sisi persentase maupun nominal. Peningkatan realisasi belanja tersebut sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang terus mendorong percepatan realisasi anggaran belanja dan penyelesaian beberapa proyek infrastruktur strategis. Kebijakan ini untuk meningkatkan kontribusi dan optimalisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga dalam rangka meningkatkan konektivitas antar daerah melalui pembangunan infrastruktur. Peningkatan realisasi belanja juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, khususnya melalui pajak dan cukai.

Pagu anggaran belanja dalam APBN Perubahan 2017 tercatat sebesar Rp 10,524 triliun, atau meningkat sebesar 19,15% (yoy) dibandingkan dengan pagu anggaran perubahan tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp 8,83 triliun. Pagu anggaran tertinggi dalam APBN P 2017, dialokasikan untuk belanja pegawai untuk kementerian/lembaga vertikal yang beroperasi di Provinsi Bali. Porsi anggaran belanja pegawai tercatat Rp 3,79 triliun, atau sebesar 36,04% dari total pagu anggaran perubahan 2017. Sementara itu, persentase pagu belanja barang tercatat sebesar Rp3,42 triliun atau mencapai 32,48% dari total pagu anggaran, sedangkan anggran belanja modal yang sebesar Rp1,74 triliun, dengan porsi mencapai 16,56% terhadap total pagu APBN P 2017.

Perkembangan realisasi belanja APBN untuk wilayah Provinsi Bali pada triwulan III 2017, menunjukkan peningkatan baik dari sisi persentase maupun nominal. Upaya pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga vertikal untuk mempercepat realisasi anggaran dan belanja dalam rangka mendorong peran fiskal untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan upaya pemerintah untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur, merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja realisasi belanja APBN pada triwulan laporan. Persentase realisasi belanja tercatat sebesar 61,49% terhadap pagu

Tabel 2.16 Pagu dan Realisasi APBN Provinsi Bali Triwulan III (2016-2017)

Jenis Belanja	Triwulan III 2016			Triwulan III 2017			Growth yoy (%)	
	Pagu Anggaran Perubahan (Rp Miliar)	Realisasi Anggaran (Rp Miliar)	Persentase Realisasi Terhadap Pagu (%)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp Miliar)	Realisasi Anggaran (Rp Miliar)	Persentase Realisasi Terhadap Pagu (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Pegawai	3.814	2.802	73,48	3.793	2.826	74,49	-0,55	0,83
Barang	3.326	1.825	54,88	3.418	1.913	55,97	2,76	4,80
Modal	1.685	669	39,73	1.743	695	39,90	3,44	3,88
Bantuan Sosial	7	5	72,63	10	7	67,42	46,45	35,94
Bantuan Transfer				1.559	1.029	66,01		
Total	8.832	5.302	60,04	10.524	6.470	61,49	19,15	22,03

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali
Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

anggaran, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 yang sebesar 60,04%. Kondisi ini menjadi faktor pendorong peningkatan peran stimulus fiskal terhadap pertumbuhan konsumsi pemerintah (PDRB) pada triwulan III 2017 yang tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan 4 triwulan sebelumnya yang selalu tumbuh negatif.

Secara nominal, serapan realisasi belanja APBN pada triwulan III 2017 menunjukkan peningkatan. Realisasi belanja tercatat sebesar Rp6,47 triliun, meningkat sebesar 22,03% (yoy), dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp5,30 triliun. Peningkatan serapan belanja yang signifikan tersebut, terutama didorong oleh meningkatnya realisasi barang dan modal, yang masing-masing tumbuh sebesar 4,80% (yoy) dan 3,88% (yoy). Selanjutnya, realisasi nominal komponen belanja pegawai pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp2,83 triliun atau dengan persentase realisasi mencapai 74,49% terhadap pagu anggaran 2017. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi nominal pada triwulan III 2016 yang sebesar Rp2,80 triliun dan persentase 73,48%.

Sementara itu, nominal realisasi belanja barang menunjukkan peningkatan pada triwulan III 2017, dengan nominal tercatat sebesar Rp1,91 triliun atau meningkat sebesar 4,80% (yoy), dibandingkan nominal realisasi triwulan III 2016 yang mencapai Rp1,83 triliun. Persentase realisasi terhadap pagu juga menunjukkan peningkatan untuk komponen ini, yaitu menjadi sebesar 55,97% (TW III 2017) dari sebelumnya sebesar 54,88% (TW III 2016). Sementara itu, belanja modal sebagai stimulus dalam perekonomian dan merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan konektivitas antar daerah, juga menunjukkan peningkatan realisasi nominal dan persentase di triwulan laporan. Realisasi belanja modal APBN pada triwulan III 2017, tercatat sebesar Rp695 miliar, meningkat sebesar 3,88% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2016 yang sebesar Rp669 miliar. Sementara itu, persentase realisasi serapan belanja modal pada triwulan III 2017, juga mengalami penurunan yaitu dari 39,73% pada triwulan III 2016 menjadi 39,90% (triwulan III 2017). Peningkatan realisasi belanja modal pada triwulan laporan juga didorong telah dilakukannya pencairan anggaran beberapa satuan kerja yang sebelumnya diblokir, seiring dengan telah dilengkapinya persyaratan administrasi proyek. Selain itu, upaya percepatan realisasi tahapan pengadaan dan lelang pada tahun 2017 juga menjadi faktor pendorong peningkatan realisasi belanja APBN.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH



Inflasi Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 2,69% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi triwulan sebelumnya yang mencapai 4,02% (yoy).

*Foto oleh: Gunarsa Primetime Bali
(Tari Lembongan - Nusa Penida)



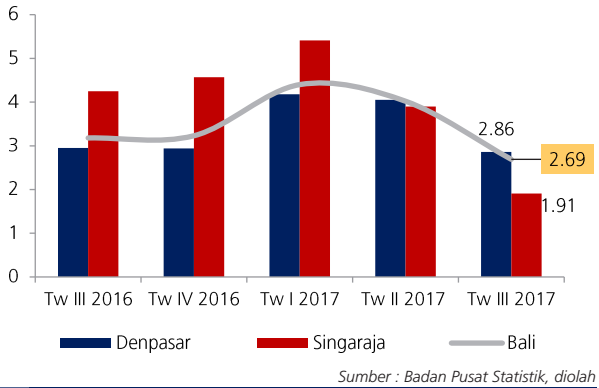


3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI

Perkembangan Inflasi Triwulan III – 2017

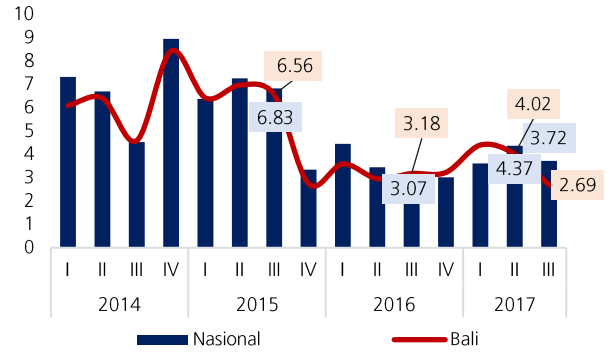
Inflasi Bali pada triwulan III 2017 mencapai 2,69% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 4,02% (yoy). Capaian ini juga lebih rendah dibanding inflasi nasional triwulan III 2017 yang sebesar 3,72% (yoy). Penurunan inflasi pada triwulan III 2017 terjadi di seluruh komponen baik *administered prices*, *volatile food*, dan *core inflation*. Inflasi IHK Bali sampai dengan triwulan III 2017 sedikit berada dibawah kisaran sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar 4±1% (yoy).

Penurunan tekanan inflasi Bali pada periode laporan terjadi pada semua kelompok pengeluaran, terutama kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, serta kelompok transportasi, komunikasi dan keuangan. Berdasarkan kota pembentuknya, penurunan inflasi terutama terjadi di Kota Singaraja yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,91% (yoy), relatif jauh di bawah inflasi nasional dan Kota Denpasar yang sebesar 2,86% (yoy). Secara bulanan, pada September 2017 Bali mencatat deflasi sebesar 0,41% (mtm), dengan rincian kota sampel inflasi Denpasar mengalami deflasi sebesar 0,33% (mtm), dan Singaraja deflasi sebesar 0,78% (mtm).



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.1 Inflasi Kota di Bali (%yoy)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy)

Tracking inflasi triwulan IV 2017

Pada Oktober 2017, Provinsi Bali kembali mengalami deflasi sebesar 0,11% (mtm) atau 2,80% (yoy). Deflasi pada Oktober 2017 dipicu oleh berlanjutnya koreksi harga bawang merah, daging ayam ras, angkutan udara, bawang putih, dan pisang seiring terjaganya pasokan komoditas tersebut. Dengan demikian, secara bulanan, pencapaian ini lebih baik dibandingkan dengan nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,05% (mtm). Secara tahunan pencapaian inflasi Bali juga masih lebih rendah dibanding inflasi nasional yang sebesar 3,58% (yoy).

Secara spasial, menurunnya tekanan inflasi terjadi di seluruh kota sampel penghitungan Inflasi. Kota Denpasar mencatat deflasi sebesar 0,05% (mtm) atau secara tahunan mengalami inflasi 3,00% (yoy). Sementara Kota Singaraja pada Oktober 2017 tercatat deflasi sebesar 0,10% (mtm) atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 1,85% (yoy). Komoditas penyumbang deflasi di Singaraja adalah cabai rawit (dengan andil sebesar -0,18), daging ayam ras (-0,13), bawang merah (-0,10), tempe (-0,03), dan apel (-0,03). Sementara, komoditas yang mengalami peningkatan indeks harga antara lain beras (dengan andil sebesar 0,12), rokok putih (0,05), tauge/kecambah (0,03), sabun mandi (0,02), dan sepatu (0,01). Sementara, komoditas yang menyumbang deflasi di Kota Denpasar pada Oktober 2017 adalah daging ayam ras

(dengan andil sebesar -0,09), angkutan udara (-0,07), bayam (-0,03), pisang (-0,03), dan kacang panjang (-0,03). Di sisi lain, komoditas yang mengalami inflasi adalah beras (dengan andil inflasi sebesar 0,13), rokok kretek *filter* (0,10), akademi/perguruan tinggi (0,08), pasir (0,03), dan pepaya (0,03).

Dengan perkembangan tersebut, inflasi Bali pada triwulan IV 2017 diprakirakan kembali melandai pada kisaran 1,97%-2,37% (yoy). Perkiraan penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh:

I. Tidak adanya kenaikan TTL dan harga BBM bersubsidi dan gas pada triwulan IV 2017;
II. Pasokan komoditas bahan pangan yang tercukupi khususnya ditunjang oleh distribusi yang lancar, meskipun terdapat potensi penurunan produksi padi pada triwulan IV 2017 akibat penurunan luasan panen;
III. Ketiadaan stimulus fiskal seperti pada 2 triwulan sebelumnya yaitu pembayaran gaji ke 13 dan 14 sehingga berpotensi menahan permintaan yang berdampak pada harga yang tertahan akibat *demand* yang terbatas;
IV. Alokasi anggaran konsumsi rumah tangga yang telah dialokasikan sebelumnya untuk pembayaran sekolah (tahun ajaran baru di triwulan lalu) dan perlengkapan sekolah berpotensi menahan permintaan sehingga menahan laju kenaikan harga;
V. Peningkatan aktivitas gunung Agung menyebabkan beberapa negara (AS, Inggris, Singapura, Malaysia, Selandia Baru, dan Korsel) mengeluarkan *travel advisory* kepada warga negaranya untuk berkunjung ke Bali. Akibatnya, jumlah kunjungan wisatawan (wisdom dan wisman) berkurang termasuk kegiatan terkait MICE. Perkembangan ini berpotensi menahan laju permintaan barang dan harga, termasuk harga tiket pesawat. Kondisi ini terlihat dari jumlah kedatangan penumpang di Bandara Ngurah Rai yang selama Oktober 2017 terkontraksi 2,53% (yoy). Perkembangan ini lebih rendah dari rata-rata bulanan Januari – September 2017 yang mencapai 8,23% (yoy), dan Oktober 2016 (7,69%, yoy).
VI. Berakhirnya periode *peak season* pariwisata pada triwulan III 2017 berpotensi menahan laju permintaan dan kenaikan harga.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan pengendalian inflasi periode tersebut antara lain peningkatan curah hujan yang berisiko menghambat kinerja produksi pangan dan hortikultura. Menyikapi adanya risiko dan tantangan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali akan terus berupaya melakukan pengendalian harga baik melalui forum koordinasi dan langkah tindak lanjut dengan OPD terkait. Program kerja TPID akan difokuskan pada aspek produksi, distribusi, serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga.

3.2 ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

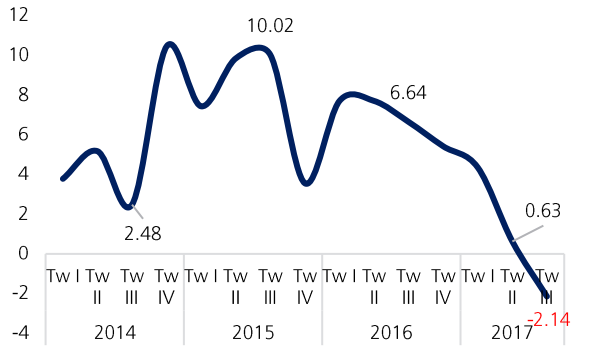
3.2.1 Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Menurunnya tekanan inflasi Bali pada triwulan III 2017 terjadi di seluruh kelompok pengeluaran. Penurunan terbesar terutama terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar serta kelompok transportasi dan komunikasi jasa keuangan.

a) Kelompok Bahan Makanan

Tekanan harga kelompok bahan makanan pada triwulan III 2017 masih melanjutkan tren penurunan dari sebesar 0,63% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi deflasi sebesar 2,14% (yoy). Turunnya tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan terutama disebabkan membaiknya kinerja produksi

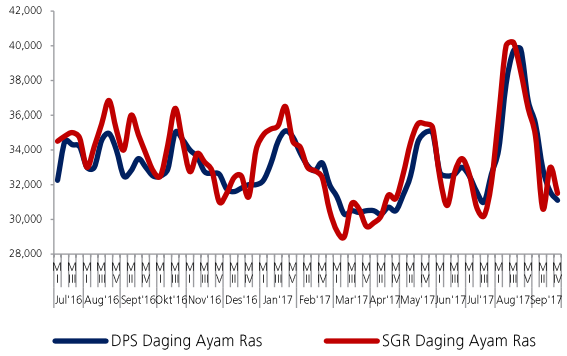
pangan antara lain daging ayam ras, bawang merah, bawang putih dan cabai rawit merah. Penurunan harga daging ayam ras seiring dengan kesepakatan Pinsar *Broiler* (PBB) Bali, Gabungan Rumah Dagang Ayam (GADA) dan Gabungan Rumah Potong Unggas Bali (GARPU) bersama *breeder* yang ada di Bali untuk stabilisasi dan menetapkan standar harga wajar. Sementara itu, penurunan tekanan harga bawang merah dan cabai rawit merah terjadi seiring dengan adanya panen di sentra produksi, salah satunya di Brebes yang juga didukung oleh kondisi cuaca yang membaik. Di sisi lain kenaikan pasokan bawang putih terjadi seiring dengan impor bawang putih dari Tiongkok di tengah harga bawang putih yang rendah. Kesiapan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Bali dalam mengantisipasi kenaikan harga kelompok bahan makanan juga turut berkontribusi kepada terjaganya harga pada kelompok ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

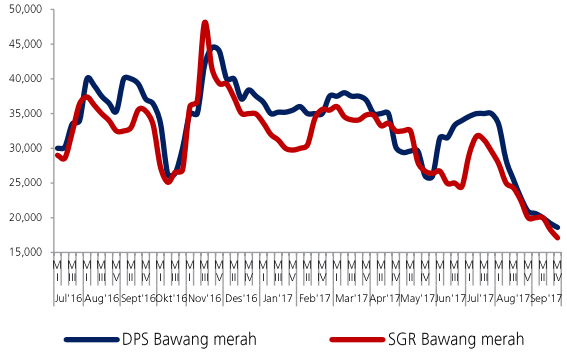
Grafik 3.3 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali (%, yoy)

Berdasarkan pemantauan harga, harga rata-rata daging ayam pada minggu IV Juni 2017 berada pada kisaran Rp33.000/kg di Denpasar dan Rp33.500/kg di Singaraja menjadi sebesar Rp31.100/kg di Denpasar dan Rp31.500/kg di Singaraja pada minggu IV September 2017. Sejalan dengan itu, komoditas bawang merah juga menunjukkan penurunan dari rata-rata sebesar Rp34.000/kg di Denpasar dan Rp24.500/kg di Singaraja pada minggu IV Juni 2017 menjadi rata-rata sebesar Rp18.600/kg di Denpasar dan Rp17.100/kg di Singaraja pada minggu IV September 2017.



Sumber : www.sigapura.org, diolah

Grafik 3.4 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras (Rp/kg) di Provinsi Bali



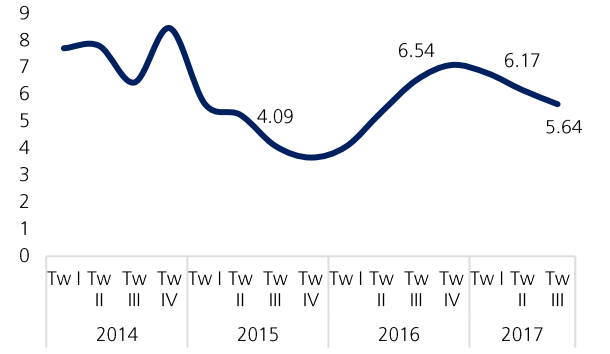
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali, diolah

Grafik 3.5 Perkembangan Harga Bawang Merah (Rp/kg) di Provinsi Bali

b) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Inflasi kelompok makanan jadi, minuman jadi, rokok dan tembakau pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 5,64% (yoy), sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 6,17% (yoy). Penurunan tekanan inflasi kelompok makanan jadi, minuman jadi, rokok dan tembakau terutama disumbangkan oleh komoditas gula pasir seiring dengan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) gula pasir. Di sisi lain,

peningkatan harga komoditas rokok dan tembakau sebagai dampak dari kenaikan cukai rokok melalui Peraturan Menteri Keuangan No 147/PMK.010/2016 masih menahan laju penurunan inflasi kelompok tersebut lebih dalam.

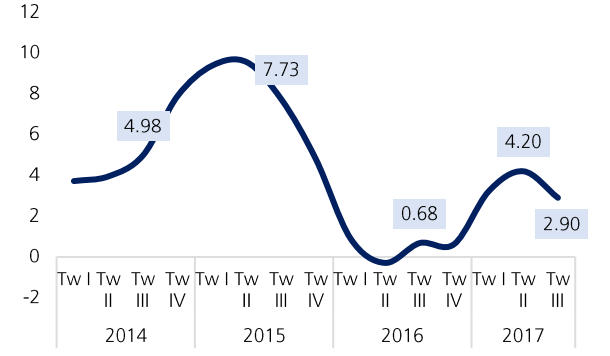


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.6 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali

c) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik dan gas tercatat sebesar 2,90% (yoy) pada triwulan III 2017, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 4,20% (yoy) dan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 0,68% (yoy). Penurunan inflasi kelompok ini seiring dengan telah selesainya tahapan pencabutan subsidi golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah daya 900 VA-RTM (R-1/TR) yang dilakukan secara gradual selama Januari – Juli 2017. Selain itu, stabilnya harga BBM selama periode triwulan III 2017 turut berkontribusi kepada penurunan tekanan inflasi kelompok ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.7 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali

d) Kelompok Sandang

Secara triwulanan, inflasi pada kelompok sandang tercatat mengalami penurunan dari 2,30%(yoy) pada triwulan II 2017 menjadi 1,90% (yoy) pada triwulan III 2017. Angka tersebut juga lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 6,39%(yoy). Melandainya inflasi kelompok dimaksud seiring dengan pendapatan masyarakat yang lebih dialokasikan kepada biaya pendidikan perguruan tinggi.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.8 Inflasi Tahunan Kelompok Sandang di Prov. Bali

e) Kelompok Kesehatan

Inflasi pada kelompok kesehatan pada triwulan III 2017 kembali melanjutkan tren penurunan. Pada triwulan III 2017 kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 2,44% (yoy), sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,86% (yoy). Penurunan tersebut seiring dengan perbaikan kondisi cuaca dari sebelumnya mengalami pancaroba yang dapat meningkatkan risiko penurunan kondisi kesehatan masyarakat.

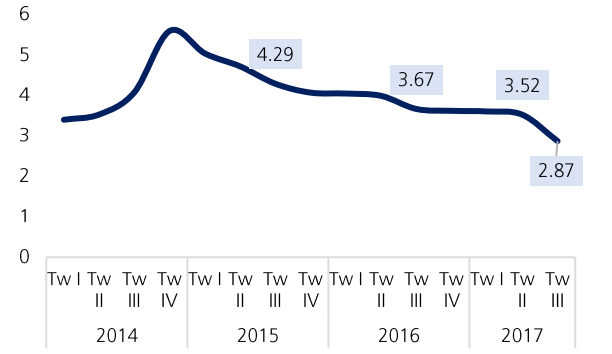


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.9 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali

f) Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga

Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga secara triwulanan tercatat mengalami penurunan dari sebesar 3,52% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi sebesar 2,87% (yoy) pada triwulan III 2017. Penurunan tekanan ini seiring dengan telah berakhirnya kenaikan biaya sekolah pada akhir triwulan.

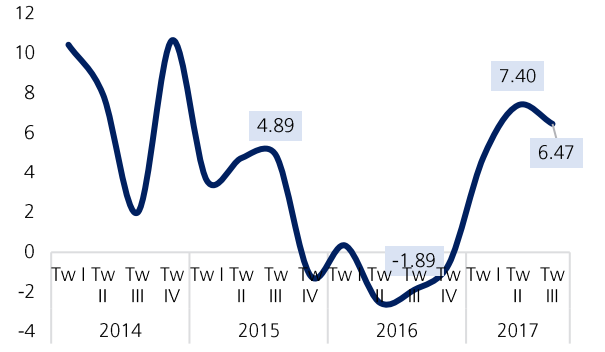


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.10 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali

g) Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami penurunan. Pada triwulan III – 2017 inflasi kelompok ini tercatat sebesar 6,47% (yoy), lebih rendah dibanding periode sebelumnya yang sebesar 7,40% (yoy). Penurunan tekanan inflasi kelompok ini terutama disebabkan oleh berkurangnya frekuensi libur *long weekend* dan hari raya keagamaan di akhir triwulan. Kondisi tersebut menyebabkan adanya koreksi harga tarif angkutan udara ke bawah.

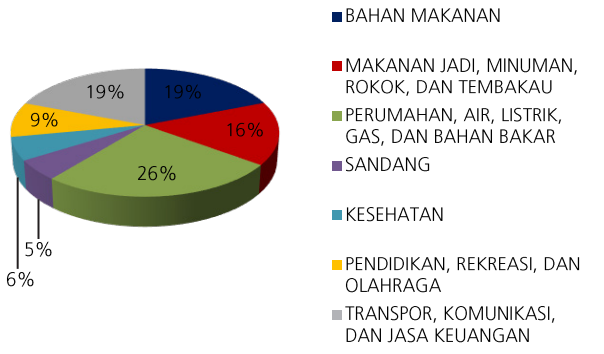


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.11 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

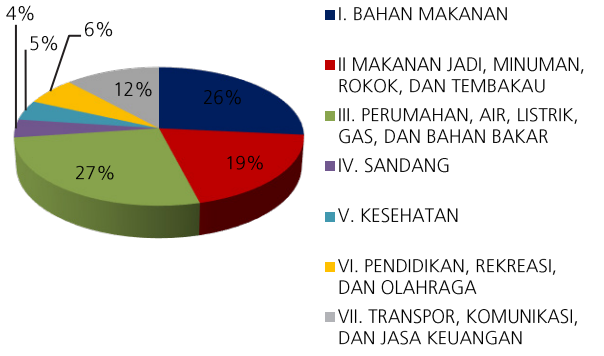
3.2.2. Inflasi Menurut Kota

Mulai 1 Januari 2014 terdapat penambahan cakupan kota perhitungan inflasi di Bali menjadi 2 (dua) kota sampel inflasi, yaitu Denpasar dan Singaraja. Berdasarkan SBH 2012, bobot Kota Denpasar terhadap inflasi nasional adalah sebesar 1,78%, sedangkan bobot Kota Singaraja adalah sebesar 0,58%. Karakteristik inflasi Kota Denpasar maupun Singaraja terutama dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran bahan makanan, makanan jadi dan perumahan sebagaimana tercermin pada dominannya bobot kelompok pengeluaran tersebut dalam keranjang IHK Kota Denpasar maupun Singaraja.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 3.12 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 3.13 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja

a) Kota Denpasar

Berdasarkan perkembangan inflasi Kota Denpasar, pencapaian inflasi pada triwulan III 2017 cenderung melanjutkan penurunan. Inflasi Kota Denpasar mengalami penurunan dari sebesar 4,05% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi 3,00% (yoy) pada triwulan III 2017. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan tekanan inflasi kelompok *volatile food* dan *administered prices*. Dari kelompok *volatile food*, penurunan tekanan inflasi terjadi seiring dengan perbaikan kinerja produksi pangan akibat adanya periode panen di sentra produksi komoditas pangan strategis (cabai rawit merah dan bawang merah). Sementara itu, penurunan tekanan inflasi kelompok *administered prices* disebabkan oleh normalisasi harga tiket pesawat pasca berkurangnya frekuensi *long weekend* serta berakhirnya tahapan kenaikan tarif listrik untuk golongan 900vA di Juli 2017.

Tabel 3.1 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran

No.	Kelompok Barang	2016												2017								
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
		mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy
1	Bahan Makanan	0.10	3.77	6.93	1.02	3.90	7.15	-0.21	4.77	6.18	0.86	4.51	4.51	-0.97	2.93	3.66	-1.23	0.07	0.65	-1.12	-2.46	-1.20
2	Makanan Jadi	0.40	1.25	4.33	0.33	3.81	5.58	0.87	5.18	6.82	0.35	7.70	7.70	0.05	0.84	7.26	0.56	3.01	6.87	0.70	4.58	5.66
3	Perumahan, Air, LGA	-0.29	-1.32	1.07	0.13	-1.48	-0.35	0.22	-0.28	0.54	0.12	0.39	0.39	0.32	1.27	3.02	0.26	1.90	3.84	0.17	2.14	2.42
4	Sandang	0.30	3.51	6.24	0.07	4.88	7.33	1.00	6.43	6.27	-0.41	5.41	5.41	0.71	0.89	2.74	0.56	0.68	1.18	-0.31	1.28	1.18
5	Kesehatan	0.68	1.61	6.24	0.02	2.10	5.40	0.14	2.65	3.70	0.40	3.68	3.68	0.32	0.58	2.64	0.27	0.71	2.27	0.15	1.06	1.80
6	Pendidikan, Rekreasi, & OR	0.18	0.21	4.13	-0.06	0.24	4.07	-0.25	2.91	3.01	0.00	3.10	3.10	0.04	0.37	3.26	0.13	0.30	3.16	0.97	2.87	2.83
7	Transportasi & Komunikasi	-0.12	-1.37	0.34	0.54	-2.34	-2.19	0.37	-1.37	-1.36	2.38	-0.03	-0.03	0.31	3.70	5.11	0.12	5.02	7.50	-0.38	4.53	7.10
	UMUM	0.06	0.62	3.41	0.39	0.92	2.78	0.26	2.15	2.95	0.69	2.94	2.94	0.02	1.83	4.18	-0.01	2.01	4.05	-0.05	2.01	3.00

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 3.2 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Denpasar
Tw III 2017

No	Komoditas	Kontribusi (%, mtm)	(%,mtm)	No	Komoditas	Kontribusi, (%, mtm)	(%,mtm)
Juli							
Inflasi				*Deflasi*			
1	Semangka	0.05	51.74	1	Bawang Putih	-0.06	-11.22
2	Kakap Merah	0.03	17.32	2	Daging Ayam Ras	-0.05	-2.97
3	Rokok Putih	0.03	2.41	3	Jeruk	-0.03	-5.32
4	Bawang Merah	0.03	4.43	4	Buncis	-0.02	-23.48
5	Pepaya	0.02	9.56	5	Sprey	-0.02	-24.44
Agustus							
Inflasi				*Deflasi*			
1	Daging Ayam Ras	0.12	7.13	1	Bawang Merah	-0.06	-10.10
2	Angkutan Udara	0.10	7.17	2	Bawang Putih	-0.05	-11.63
3	Sekolah Menengah Pertama	0.07	6.72	3	Cabai Rawit	-0.05	-22.05
4	Telur Ayam Ras	0.04	6.19	4	Cabai Merah	-0.02	-8.93
5	Pisang	0.03	8.80	5	Jeruk	-0.01	-3.14
September							
Inflasi				*Deflasi*			
1	Emas Perhiasan	0.04	3.93	1	Bawang Merah	-0.11	-19.61
2	Jeruk	0.03	7.52	2	Angkutan Udara	-0.09	-6.19
3	Kayu Lapis	0.03	12.75	3	Daging Ayam Ras	-0.08	-4.70
4	Rokok Kretek Filter	0.03	1.71	4	Bawang Putih	-0.06	-16.11
5	Beras	0.03	0.66	5	Cabai Rawit	-0.05	-28.47

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

b) Kota Singaraja

Laju inflasi Kota Singaraja pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 1,85%(yoy), jauh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,90% (yoy). Realisasi inflasi Kota Singaraja tersebut berada di bawah inflasi nasional maupun inflasi Kota Denpasar seiring dengan berlanjutnya koreksi harga komoditas ke bawah yang cukup tajam pada akhir triwulan III 2017. Penurunan tekanan inflasi terutama disebabkan oleh penurunan tekanan inflasi kelompok *volatile food*. Berdasarkan kelompok pengeluarannya penurunan terutama terjadi pada kelompok bahan makanan dan makanan jadi.

Dari kelompok *volatile food*, penurunan disebabkan oleh penurunan harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah seiring adanya perbaikan cuaca di sentra produksi dan adanya panen komoditas tersebut. Di samping itu, kebijakan impor bawang putih ditengah penurunan harga komoditas bawang putih turut berkontribusi pada penurunan tekanan inflasi kelompok ini. Kesepakatan Pinsar *Broiler* (PBB) Bali, Gabungan Rumah Dagang Ayam (GADA) dan Gabungan Rumah Potong Unggas Bali (GARPU) bersama *breeder* yang ada di Bali untuk stabilisasi dan penentuan standar harga wajar mampu mendorong penurunan tekanan harga daging ayam turut menyebabkan penurunan inflasi kelompok ini. Dari kelompok *administered prices*, penurunan tekanan inflasi bersumber dari berakhirnya penyesuaian tarif listrik untuk golongan 900vA dan terjaganya harga BBM sepanjang triwulan laporan. Meskipun demikian, penurunan lebih dalam masih tertahan oleh kenaikan cukai rokok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 147/PMK.010/2016.

Tabel 3.3 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran

No.	Kelompok Barang	2016												2017								
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
		mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy
1	Bahan Makanan	2.60	5.56	11.56	-0.03	4.63	10.46	-0.29	6.91	8.97	1.98	9.98	9.98	-1.12	3.36	7.69	-3.29	-4.40	0.49	-1.96	-9.20	-5.26
2	Makanan Jadi	0.12	0.66	2.76	0.29	2.93	4.17	-0.33	3.96	5.14	0.03	4.08	4.08	-0.06	1.35	4.80	0.38	1.98	3.12	0.30	2.78	3.01
3	Perumahan, Air, LGA	-0.12	-0.24	0.10	0.05	-0.14	0.00	0.16	1.67	1.38	0.01	1.83	1.83	0.44	2.05	4.17	0.54	3.79	5.84	0.12	4.05	4.06
4	Sandang	1.26	2.41	8.95	1.48	5.12	8.22	0.33	6.01	7.01	0.10	8.47	8.47	0.57	1.32	7.32	0.46	3.91	7.22	0.79	5.93	6.97
5	Kesehatan	0.42	0.77	3.04	0.08	1.10	3.00	0.22	3.99	5.41	0.04	4.65	4.65	0.32	0.90	4.77	0.06	2.57	6.17	0.42	5.02	5.58
6	Pendidikan, Rekreasi, & OR	0.37	0.74	3.64	0.00	0.74	3.59	2.67	6.71	6.96	0.00	6.24	6.24	-0.07	0.00	5.33	0.07	-0.07	5.37	0.00	7.27	7.27
7	Transportasi & Komunikasi	-0.12	-1.89	0.37	0.00	-4.32	-4.23	0.05	-4.58	-4.56	0.52	-3.48	-3.48	0.01	4.89	3.19	0.43	5.96	6.89	0.01	5.80	6.64
	UMUM	0.81	1.56	4.42	0.13	1.65	3.83	0.07	3.44	4.25	0.63	4.57	4.57	-0.20	2.38	5.41	-0.64	1.00	3.90	-0.38	0.42	1.85

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

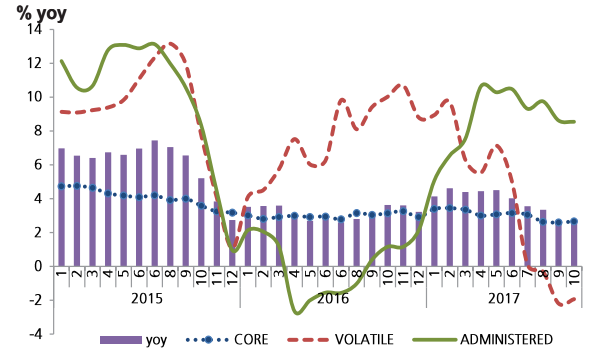
Tabel 3.4 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Singaraja Tw III 2017

No	Komoditas	Kontribusi (%, mtm)	(%,mtm)	No	Komoditas	Kontribusi, (%, mtm)	(%,mtm)
Juli							
Inflasi				*Deflasi*			
1	Bawang Merah	0.14	15.29	1	Daging Ayam Ras	-0.06	-3.02
2	Ketela Pohon	0.10	11.32	2	Cabai Rawit	-0.05	-3.16
3	Rokok Putih	0.04	2.95	3	Buncis	-0.04	-11.87
4	Pisang	0.02	3.43	4	Teri	-0.03	-17.75
5	Bayam	0.02	8.56	5	Bawang Putih	-0.03	-10.74
Agustus							
Inflasi				*Deflasi*			
1	Daging Ayam Ras	0.35	16.93	1	Cabai Rawit	-0.19	-11.64
2	Sekolah Menengah Atas	0.13	9.08	2	Bawang Merah	-0.18	-17.34
3	Sekolah Dasar	0.09	17.19	3	Buncis	-0.04	-15.05
4	Telur Ayam Ras	0.07	7.13	4	Ketimun	-0.02	-8.08
5	Apel	0.05	10.14	5	Jeruk	-0.02	-7.91
September							
Inflasi				*Deflasi*			
1	Rekreasi	0.16	100.00	1	Cabai Rawit	-0.34	-24.43
2	Beras	0.13	1.83	2	Daging Ayam Ras	-0.26	-10.83
3	Dokter Umum	0.05	15.78	3	Bawang Merah	-0.22	-25.44
4	Jeruk	0.02	9.17	4	Telur Ayam Ras	-0.08	-7.24
5	Apel	0.02	2.99	5	Tongkol/Ambu-ambu	-0.05	-14.18

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

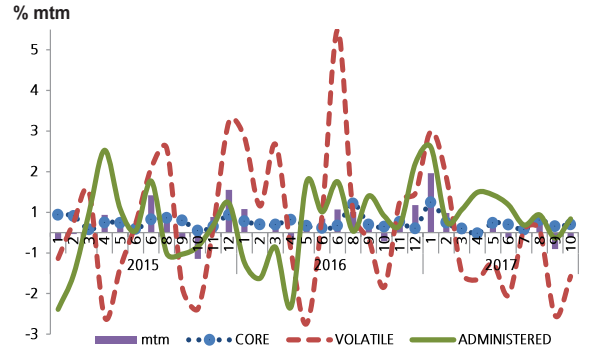
3.3. DISAGREGASI INFLASI

Berdasarkan disagregasi inflasi, penurunan tekanan inflasi pada triwulan III 2017 terutama bersumber pada kelompok *administered prices* dan *volatile food.* Sementara itu, sumbangan inflasi kelompok inti tercatat relatif stabil.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.14 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% yoy)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.15 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% mtm)

a) *Volatile Food*

Tekanan inflasi kelompok *volatile food* pada triwulan III 2017 tercatat mengalami penurunan. Inflasi *volatile food* turun dari 5,01% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi deflasi sebesar 2,19% (yoy) pada triwulan III 2017. Penurunan inflasi bersumber dari koreksi harga komoditas hortikultura (cabai rawit, cabai merah, bawang putih, dan bawang merah) sebagai dampak perbaikan ketersediaan pasokan, perbaikan kondisi cuaca dan adanya panen di sentra produksi komoditas pangan cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah. Di samping itu juga disebabkan oleh adanya impor bawang putih ditengah penurunan harga komoditas bawang putri serta kesepakatan Pinsar *Broiler* (PBB) Bali, Gabungan Rumah Dagang Ayam (GADA) dan Gabungan Rumah Potong Unggas Bali (GARPU) bersama *breeder* yang ada di Bali untuk stabilisasi dan standar harga daging ayam ras pada tingkat wajar turut berkontribusi pada penurunan tekanan inflasi kelompok ini. Potensi peningkatan permintaan di akhir triwulan jelang Hari Raya Galungan berhasil diantisipasi oleh TPID Provinsi Bali dengan mengacu pada *roadmap* pengendalian inflasi Provinsi Bali. Pengendalian inflasi pangan diarahkan pada:

i. menjaga ketersediaan pasokan pangan di pasar dalam jumlah yang memadai,
ii. mengkomunikasikan kepada publik tentang kondisi dan prognosa pangan pokok serta langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok,
iii. memperkuat peran Bulog dalam stabilisasi harga pangan pokok. Meskipun demikian, tendensi kenaikan harga komoditas beras di akhir triwulan menahan penurunan tingkat inflasi yang lebih dalam.

Secara spasial, penurunan inflasi kelompok *volatile food* terjadi di kedua kota sampel inflasi Provinsi Bali. Inflasi kelompok *volatile food* Kota Denpasar mengalami penurunan dari 0,65% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi -1,60% (yoy) pada triwulan III 2017. Sejalan dengan kondisi tersebut, Kota Singaraja mengalami penurunan tekanan inflasi dari 0,49% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi -4,73% (yoy) pada triwulan III 2017. Kondisi tersebut disebabkan oleh terjaganya pasokan komoditas pangan strategis di seluruh wilayah Pulau Bali setelah sebelumnya mengalami kekurangan.

b) *Administered Prices*

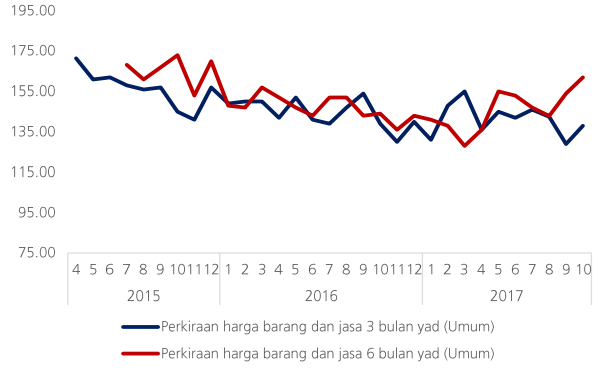
Tekanan inflasi kelompok *administered prices* pada triwulan III 2017 tercatat mengalami penurunan dari sebesar 10,47% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi sebesar 8,62% (yoy). Penurunan tersebut terjadi seiring berakhirnya kebijakan Pemerintah untuk melakukan pencabutan subsidi golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah daya 900 VA-RTM (R-1/TR) sesuai Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016. Selain itu, stabilnya harga BBM dan bahan bakar khusus (BBK) seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina dex turut berkontribusi pada terjaganya inflasi kelompok ini. Di samping itu, normalisasi tarif/harga angkutan udara pasca berkurangnya frekuensi hari libur panjang di akhir triwulan menjadi penyumbang utama penurunan tekanan inflasi kelompok ini.

Sedangkan bagi komoditas rokok, kenaikan batas Harga Jual Eceran (HJE) terendah per batang atau gram dan kenaikan tarif cukai per batang atau gram sesuai Permen Keuangan No.147/PMK.010/2016 menahan penurunan laju inflasi kelompok ini lebih dalam.

Secara spasial, penurunan terjadi di kedua kota sampel inflasi Provinsi Bali. Inflasi kelompok *administered prices* Kota Denpasar mengalami penurunan dari sebesar 9,98% (yoy) pada triwulan II 2017menjadi sebesar 7,92% (yoy) pada triwulan III 2017. Sejalan dengan kondisi tersebut, Kota Singaraja mengalami penurunan tekanan inflasi dari 10,32% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi 9,85% (yoy) pada triwulan III 2017.

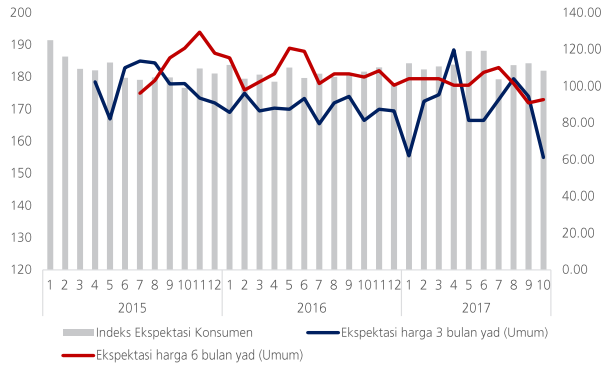
c) *Core Inflation*

Sejalan dengan kelompok *volatile food* dan *administered prices*, tekanan inflasi kelompok inti turut menunjukkan penurunan. Tekanan inflasi kelompok inti pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 2,60%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 3,15% (yoy). Meskipun tingkat konsumsi tercatat meningkat pada triwulan III 2017, namun pergerakan laju inflasi kelompok inti cukup stabil didukung oleh masih memadainya sisi *supply* dan terjaganya ekspektasi inflasi. Terkendalinya inflasi inti tersebut seiring dengan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Selain itu, ekspektasi inflasi masyarakat Bali yang masih terjaga turut menjaga pergerakan inflasi inti dalam tingkat wajar. Berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK) dan Survei Penjualan Eceran (SPE) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, ekspektasi harga pada triwulan laporan cenderung terjaga. Meskipun demikian masih terdapat tendensi peningkatan seiring dengan tendensi peningkatan permintaan pada *peak season* pariwisata di akhir tahun (Hari Raya Natal dan Tahun Baru) yang mendorong perkiraan peningkatan tekanan inflasi pada triwulan IV 2017.



Sumber : Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia

Grafik 3.16 Interaksi Permintaan dan Penawaran



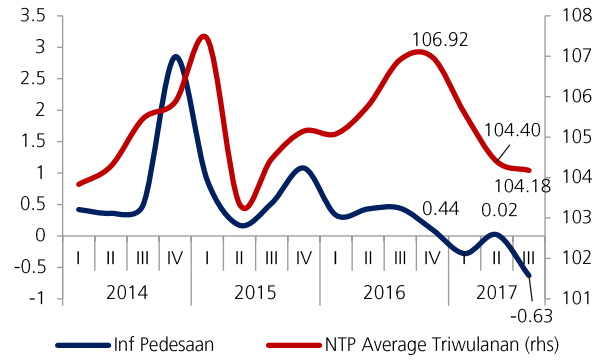
Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia

Grafik 3.17 Ekspektasi Konsumen

Secara spasial, terjaganya tekanan inflasi kelompok inti terjadi di kedua kota sampel inflasi Provinsi Bali. Inflasi kelompok inti Kota Denpasar tercatat sebesar 2,53% (yoy) pada triwulan III 2017, lebih rendah dibanding triwulan II 2017 yang sebesar 3,09% (yoy). Sejalan dengan kondisi tersebut, tekanan inflasi inti Kota Singaraja juga tercatat menurun dari sebesar 3,43% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi sebesar 2,87% (yoy) pada triwulan III 2017.

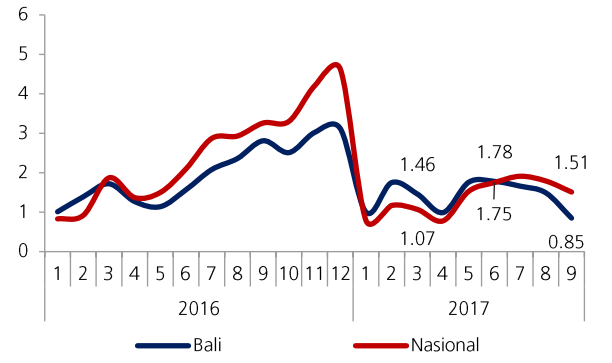
3.4. INFLASI PERDESAAN

Sama halnya dengan IHK sampel inflasi, IHK Perdesaan terdiri dari tujuh kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta kelompok transportasi dan komunikasi. Tekanan inflasi perdesaan Bali di triwulan III 2017 secara bulanan menunjukkan penurunan di bawah inflasi perdesaan Nasional. Tingkat inflasi perdesaan Provinsi Bali secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2017 tercatat sebesar 0,85% (ytd), lebih rendah dibanding inflasi perdesaan nasional yang sebesar 1,51% (ytd). Inflasi perdesaan pada triwulan III 2017 mengalami penurunan dari 0,02% (mtm) pada triwulan II 2017 menjadi deflasi sebesar 0,63% (mtm). Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya rata-rata harga di semua kelompok bahan makanan, dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.



Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.18 Perkembangan Inflasi Perdesaan (mtm) dan Nilai Tukar Petani (NTP)



Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.19 Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd)

3.5. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI

TPID Provinsi Bali dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi secara intensif dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Selama triwulan III 2017, terdapat beberapa kegiatan yang dimaksudkan untuk pemantauan harga, penguatan kerjasama dan koordinasi baik di TPID Provinsi maupun TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

Optimalisasi forum strategis TPID baik pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pemeliharaan ekspektasi inflasi masyarakat perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan untuk dapat menjadi salah satu alternatif solusi. Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dalam rangka pengendalian inflasi di Bali. Forum koordinasi TPID baik tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi terus diperkuat melalui koordinasi rutin. Untuk komoditas beras, upaya stabilisasi harga secara langsung dilakukan oleh Perum Bulog Divre Bali melalui penyerapan gabah/beras serta melalui rangkaian Pasar Murah dan Operasi Pasar bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain beras, stabilisasi harga pangan dan langkah pengendalian juga difokuskan terhadap komoditas pangan strategis lainnya antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, gula, telur ayam ras, dan minyak goreng. Bentuk intervensi secara tidak langsung yang dilakukan oleh TPID Provinsi Bali antara lain melalui pemantauan dan penyampaian harga barang kebutuhan pokok melalui PIHPS Provinsi Bali dengan sebutan SiGapura "Sistem Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis" sebagai salah satu upaya pemantauan harga dan dalam rangka memberikan informasi baik pada tingkat produsen dan konsumen untuk menghindari informasi yang asimetris

Tabel 3.5 Kegiatan TPID Triwulan III 2017

NO	TPID	KEGIATAN / TEMPAT	TANGGAL	KETERANGAN
Rapat Koordinasi				
1	TPID Provinsi Bali	Bank Indonesia	21-Jul-17	Rapat Koordinasi TPID Provinsi Bali dalam rangka Persiapan Rakornas
2	TPID Kab. Gianyar	Gianyar	13-Sep-17	Rapat Koordinasi Upaya Pengendalian Harga di Kabupaten Gianyar
High Level Meeting				
3	TPID Provinsi Bali	Bekas Restoran Ulam Segara	29-Aug-17	High Level Meeting TPID se-Provinsi Bali periode Agustus 2017
4	TPID Provinsi Bali	Bank Indonesia	14-Sep-17	High Level Meeting TPID se-Provinsi Bali periode September 2017
5	TPID Provinsi Bali	Bekas Restoran Ulam Segara	19-Sep-17	Tindak Lanjut High Level Meeting TPID se-Provinsi Bali periode September 2017
Rapat Teknis				
6	TPID Provinsi Bali	Ruang Rapat Wismasaba Madya, Kantor Gubernur	10-Aug-17	Antisipasi Inflasi terkait dengan isu pembatasan kuota gas LPG 3 kg
Pasar Lelang				
7	Provinsi Bali	Gedung Balai Diklat Industri WR Supratman No. 302	30-Aug-17	Kopi, Beras, Jeruk, Kelapa, Sapi, Coklat, Jagung, Sayuran, buah-buahan, dan komoditi hasil pertanian lainnya
8	Provinsi Bali	Gedung Balai Diklat Industri WR Supratman No. 302	28-Sep-17	Kopi, Beras, Jeruk, Kelapa, Sapi, Coklat, Jagung, Sayuran, buah-buahan, dan komoditi hasil pertanian lainnya
Pasar Murah				
9	Karangasem, Klungkung, Tabanan, Denpasar, Badung, Buleleng, Bangli	Karangasem, Klungkung, Tabanan, Denpasar, Badung, Buleleng, Bangli	Juli 2017	22 kali pelaksanaan
10	Klungkung, Tabanan, Denpasar,Bangli	Klungkung, Tabanan, Denpasar,Bangli	Agustus 2017	18 kali pelaksaan
11	Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung	Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung	September 2017	7 kali pelaksanaan

Optimalisasi forum strategis TPID baik pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pemeliharaan ekspektasi inflasi masyarakat perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan untuk dapat menjadi salah satu alternatif solusi. Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dalam rangka pengendalian inflasi di Bali. Forum koordinasi TPID baik tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi terus diperkuat melalui koordinasi rutin. Untuk komoditas beras, upaya stabilisasi harga secara langsung dilakukan oleh Perum Bulog Divre Bali melalui penyerapan gabah/beras serta melalui rangkaian Pasar Murah dan Operasi Pasar bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain beras, stabilisasi harga pangan dan langkah pengendalian juga difokuskan terhadap komoditas pangan strategis lainnya antara lain cabai rawit,

cabai merah, bawang merah, bawang putih, gula, telur ayam ras, dan minyak goreng. Bentuk intervensi secara tidak langsung yang dilakukan oleh TPID Provinsi Bali antara lain melalui pemantauan dan penyampaian harga barang kebutuhan pokok melalui PIHPS Provinsi Bali dengan sebutan SiGapura "Sistem Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis" sebagai salah satu upaya pemantauan harga dan dalam rangka memberikan informasi baik pada tingkat produsen dan konsumen untuk menghindari informasi yang asimetris

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM



Pada triwulan III 2017, stabilitas sistem keuangan Bali masih cukup terjaga, terutama dari ketahanan sektor rumah tangga. Tingkat konsumsi masyarakat yang masih cukup tinggi, perilaku berutang yang masih normal, dan risiko kredit yang masih terjaga, berdampak minimal pada kerentanan sistem keuangan.

*Foto oleh: Nicko Jefta
(Pasih Uug - Nusa Penida)





4.1. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA

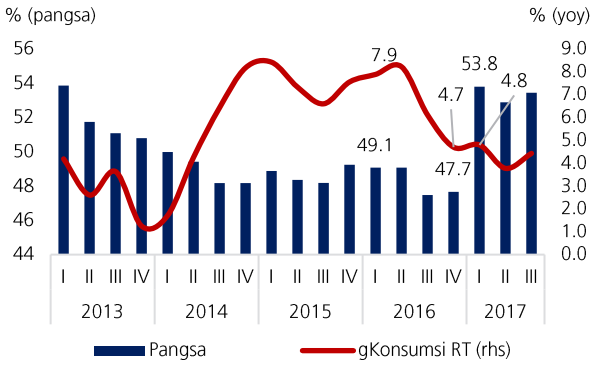
4.1.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Pada triwulan III 2017, kinerja konsumsi rumah tangga di Bali menunjukkan peningkatan kinerja. Dengan pangsa sebesar 53,4% (lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 52,9%), kinerja konsumsi rumah tangga (PDRB) tercatat mengalami peningkatan dari sebesar 3,77% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi sebesar 4,43% (yoy) pada triwulan III 2017. Akselerasi kinerja komponen konsumsi rumah tangga di triwulan laporan, disebabkan oleh 1) *periode peak season* pariwisata; 2) masuknya tahun ajaran baru sekolah; 3) pembayaran gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan 4) perayaan hari keagamaan: Idul Adha, Pagarwesi dan Saraswati.

Meskipun kinerja konsumsi rumah tangga mengalami akselerasi, terdapat indikasi rumah tangga cenderung menahan kegiatan konsumsinya. Hal ini tercermin pada melambatnya beberapa indikator konsumsi rumah tangga berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia. Hal ini terlihat dari rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) selama triwulan III 2017 yang tercatat sebesar 100,5 yang lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2016 yang sebesar 100,1 namun lebih rendah dibandingkan triwulan II 2017 yang tercatat sebesar 106,9. Sejalan dengan kondisi tersebut, dalam rentang periode Juli-September 2017 terjadi penurunan keyakinan konsumen seiring dengan pendapatan masyarakat yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, rumah tangga juga masih melihat adanya potensi penurunan kinerja perekonomian di masa yang akan datang, sehingga indeks ekspektasi konsumen (IEK) mengalami penurunan pada triwulan III 2017.

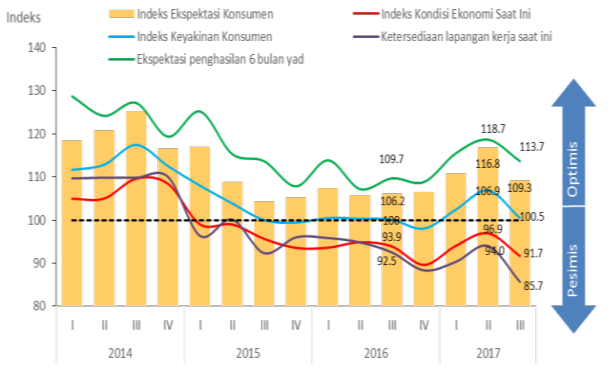
Berdasarkan hasil survei, optimisme rumah tangga di Bali pada triwulan III 2017 terhadap kondisi penghasilan mereka saat ini mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Begitu pula untuk 6 bulan ke depan, rumah tangga melihat adanya penurunan pendapatan/penghasilan, namun masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sejalan dengan hal ini, optimisme rumah tangga terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini juga mengalami penurunan. Sumber kerentanan lainnya adalah terkait dengan adanya potensi tekanan harga. Pada triwulan III 2017, tekanan harga di Bali cenderung menurun, tercermin oleh tingkat inflasi yang mencapai 2,69% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2017 yang sebesar 4,02% (yoy). Demikian juga apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tekanan harga cenderung menurun.

Pada triwulan mendatang, diperkirakan rumah tangga masih akan menghadapi tekanan harga bahan pangan dan makanan jadi, seiring dengan masuknya periode adanya perayaan hari raya keagamaan (Natal) dan tahun baru. Kondisi ini menjadi pendorong melambatnya konsumsi rumah tangga di triwulan IV 2017.



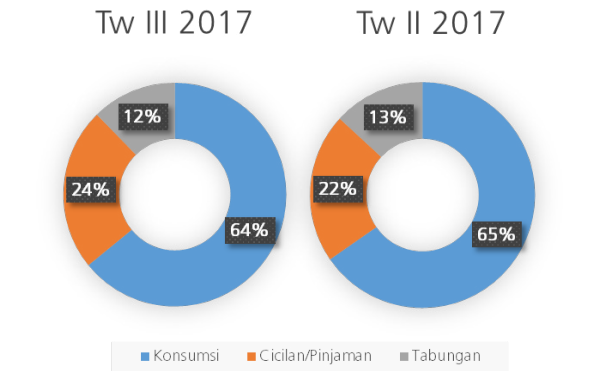
Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Bali



Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.2 Persepsi Rumah Tangga Bali Terhadap Ekonomi Saat Ini



Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.3 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Bali

4.1.2. Kinerja Keuangan Rumah Tangga

Pada triwulan III 2017, penggunaan keuangan rumah tangga masih didominasi oleh konsumsi sebesar 63,22% (Tabel 3.1). Kondisi tersebut sejalan dengan masih kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2017, yang turut menjadi faktor penyebab pendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Demikian juga keyakinan rumah tangga untuk melakukan konsumsi serta dapat menutupi pembayaran cicilan hutang meningkat dari 21,49% pada triwulan II 2017, menjadi sebesar 24,73%. Di sisi lain, proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk tabungan mengalami sedikit penurunan dari 13,15% pada triwulan II 2017 menjadi 12,05% dari total pengeluaran. Apabila dilihat berdasarkan pendapatannya, tingkat pengeluaran konsumsi yang tertinggi mengalami pergeseran dari sebelumnya dilakukan oleh kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi (Rp7,1-8 juta), pada triwulan berjalan dilakukan oleh kelompok rumah tangga sedang (Rp5,1-6juta).

Sementara itu jika dilihat dari perilaku berutang, terdapat peningkatan risiko dari sisi kredit karena secara agregat terjadi peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki *debt service ratio* lebih dari 30% pendapatannya (DSR>30%). Pada triwulan III 2017, jumlah rumah tangga dengan DSR>30% meningkat sebesar 3,7% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan risiko rumah tangga dengan DSR>30% terutama pada kelompok pengeluaran Rp 3,1 - 4 juta yang mencapai 2,5%. Institusi keuangan menilai bahwa rumah tangga dengan DSR>30% memiliki risiko yang tinggi dan dapat menjadi penyebab kredit yang kurang lancar. Secara umum peningkatan DSR rumah tangga masih dalam kondisi yang stabil, yaitu di bawah 5%.

Di sisi lain, untuk kelompok DSR>30%, alokasi dana untuk menabung pada triwulan III 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,3% dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan tabungan kelompok rumah

Tabel 4.1 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Pengeluarannya Per Bulan

Penggunaan	Pengeluaran/bln								
	Rp1 - 2 jt	Rp2,1 - 3 jt	Rp3,1 - 4 jt	Rp4,1 - 5 jt	Rp5,1 - 6 jt	Rp6,1 - 7 jt	Rp7,1 - 8 jt	>Rp8 jt	Rata-rata
Konsumsi	59.79	66.10	63.71	60.94	67.69	61.94	63.00	62.58	63.22
Cicilan/Pinjaman	27.00	20.85	23.87	27.18	21.82	28.74	24.82	23.58	24.73
Tabungan	13.21	13.04	12.41	11.88	10.49	9.31	12.18	13.84	12.05
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 4.2 Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan Pengeluaran

Pengeluaran/ bln	Triwulan III 2017			
	Debt Service Ratio (DSR)			
	0%-10%	10%-20%	20%-30%	>30%
Rp1 - 2 jt	1.0%	0.5%	0.5%	1.2%
Rp2,1 - 3 jt	9.8%	6.8%	6.3%	6.8%
Rp3,1 - 4 jt	9.2%	5.7%	8.8%	9.0%
Rp4,1 - 5 jt	2.8%	1.5%	3.0%	3.8%
>Rp5 jt	6.3%	4.3%	5.8%	6.7%
Total	29.2%	18.8%	24.5%	27.5%

Pengeluaran/ bln	Perubahan Debt Service Ratio (DSR)*			
	0%-10%	10%-20%	20%-30%	>30%
Rp1 - 2 jt	-2.0%	0.3%	0.2%	0.2%
Rp2,1 - 3 jt	3.0%	0.0%	0.8%	0.8%
Rp3,1 - 4 jt	2.0%	-2.7%	1.5%	2.5%
Rp4,1 - 5 jt	-2.2%	-2.8%	-2.8%	-2.0%
>Rp5 jt	-0.2%	1.2%	0.0%	2.2%
Total	0.7%	-4.0%	-0.3%	3.7%

TMP = Tidak Memiliki Pinjaman/Cicilan
** Perubahan triwulan III 2017 dibandingkan triwulan II 2017*
Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Tabel 4.3 Dana Rumah Tangga Untuk Menabung dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan

Pengeluaran/ bln	Triwulan III 2017					
	Total	Tabungan				
		0%-10%	10%-20%	20%-30%	>30%	TMB
Rp1 - 2 jt	3.2%	2.0%	0.5%	0.3%	0.3%	0.0%
Rp2,1 - 3 jt	29.8%	18.3%	4.8%	4.5%	2.2%	0.0%
Rp3,1 - 4 jt	32.7%	19.2%	8.8%	3.2%	1.5%	0.0%
Rp4,1 - 5 jt	11.2%	6.5%	3.0%	1.0%	0.7%	0.0%
>Rp5 jt	23.2%	15.0%	4.3%	3.0%	0.8%	0.0%
Total	100.0%	61.0%	21.5%	12.0%	5.5%	0.0%

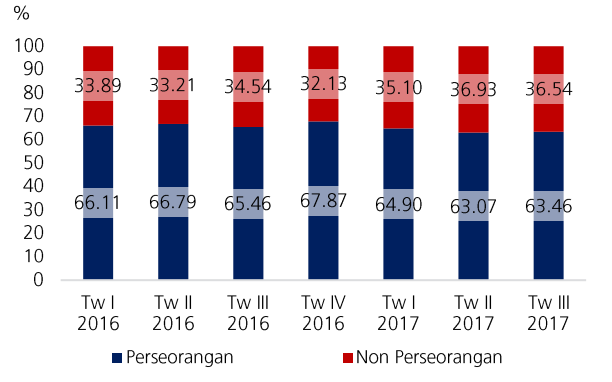
Pengeluaran/ bln	Perubahan Tabungan*					
	Total	0%-10%	10%-20%	20%-30%	>30%	TMB
Rp1 - 2 jt	-1.3%	-0.5%	-0.2%	0.0%	-0.7%	0.0%
Rp2,1 - 3 jt	4.7%	3.3%	-0.2%	0.3%	1.2%	0.0%
Rp3,1 - 4 jt	3.3%	-0.3%	3.2%	-0.2%	0.7%	0.0%
Rp4,1 - 5 jt	-9.8%	-6.8%	-1.8%	-1.0%	-0.2%	0.0%
>Rp5 jt	3.2%	3.3%	-0.7%	1.2%	-0.7%	0.0%
Total	0.0%	-1.0%	0.3%	0.3%	0.3%	0.0%

TMB = Tidak Menabung
** Perubahan triwulan III 2017 dibandingkan triwulan II 2017*
Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

tangga dengan pendapatan Rp2,1 - 3juta. Selain itu, semua rumah tangga pada triwulan III 2017 mampu menyisihkan pendapatannya untuk menabung. Hal ini terjadi seiring dengan adanya pembayaran gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kecenderungan masyarakat untuk mempersiapan biaya memasuki tahun ajaran baru sekolah.

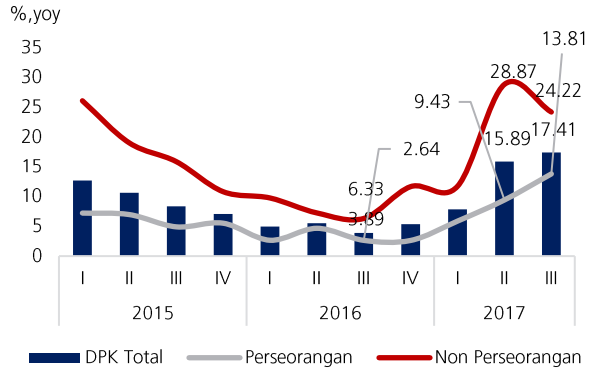
4.1.3. Dana Pihak Ketiga Perseorangan (Di Perbankan)

Kecenderungan rumah tangga untuk menabung yang sedikit menurun tidak mampu menahan peningkatan DPK perseorangan pada triwulan yang sama. Pada triwulan III 2017, proporsi DPK sektor RT tercatat sebesar 63,46% atau sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 63,07%, namun lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 65,46%. Peningkatan proporsi DPK perseorangan ini terutama didorong oleh peningkatan simpanan perseorangan dalam bentuk tabungan (naik menjadi 38,34% dari 37,97% pada triwulan sebelumnya) dan dalam bentuk giro (naik menjadi 3,35% dari 3,22% pada triwulan sebelumnya). Sementara itu, proporsi simpanan RT dalam bentuk deposito mengalami penurunan dari 21,88% pada triwulan sebelumnya menjadi 21,77%.



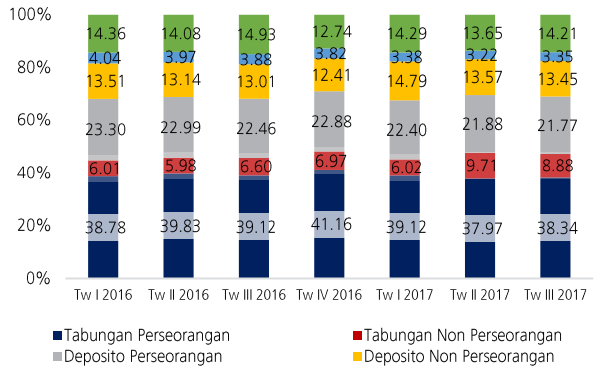
Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah

Grafik 4.4 Komposisi DPK Perbankan Bali (% total DPK Bali)



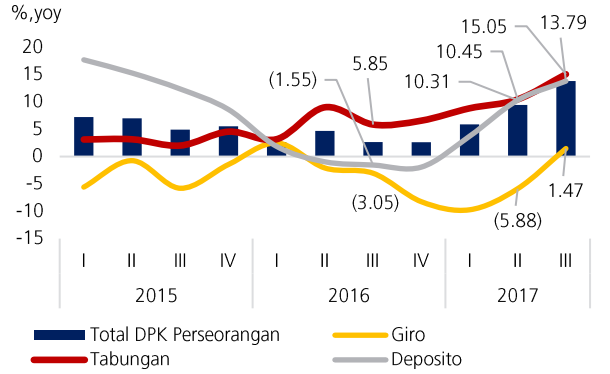
Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah

Grafik 4.6 Pertumbuhan DPK Perbankan Bali (%)



Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah

Grafik 4.5 Komposisi Perbankan DPK Bali berdasarkan Jenis Simpanan (% total DPK Bali)



Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah

Grafik 4.7 Pertumbuhan DPK Perseorangan (%)

Sejalan dengan proporsi DPK sektor RT yang mengalami peningkatan, pertumbuhan DPK sektor RT pada triwulan III 2017 (13,81%, yoy) meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (9,43%, yoy) dan periode yang sama tahun sebelumnya (2,64%, yoy). Peningkatan pertumbuhan DPK perseorangan didorong oleh peningkatan pertumbuhan tabungan, deposito dan giro. Tabungan perseorangan tumbuh 15,05% (yoy) pada triwulan III 2017, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (10,45%, yoy) dan triwulan III 2016 (5,85%, yoy). Sejalan dengan tabungan, deposito perseorangan pada triwulan III 2017 (13,79%, yoy) juga tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (10,31%, yoy) dan triwulan III 2016 (-1,55%). Demikian juga dengan giro perseorangan yang pada triwulan III 2017 (1,47%, yoy) tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (-5,88%, yoy) dan triwulan III 2016 (-3,05%).

Dilihat dari jumlah rekening DPK perseorangan, di Provinsi Bali pada triwulan III 2017 terdapat penambahan jumlah rekening sebesar 3,60% dibandingkan triwulan sebelumnya. Penambahan rekening tersebut terjadi di hampir semua kategori simpanan, kecuali pada kategori simpanan bernilai >2M – 5M dan >10M – 15M yang terkontraksi. Secara spasial, seluruh daerah mengalami pertumbuhan jumlah rekening simpanan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Bangli (tumbuh 5,93%, qtq).

Tabel 4.4 Komposisi Jumlah Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali

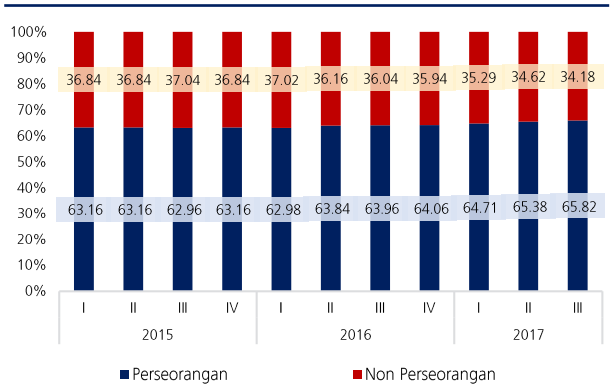
DAERAH		Jumlah	<10 JT	>10 JT - 100 JT	>100JT - 500JT	>500JT - 1 M	>1 M - 2 M	>2 M - 5M	>5M - 10M	>10M - 15M	>15M - 20M	>20M
Kab. Buleleng	Rek	401,736	360,187	35,943	4,540	269	111	51	8	2	1	3
	Δ%	5.40	6.44	-3.71	2.95	16.96	0.91	-13.56	14.29	-	-	-
Kab. Jembrana	Rek	497,471	458,017	27,301	11,185	370	312	66	4	2	1	-
	Δ%	4.02	4.71	-2.53	-5.89	4.52	22.83	-39.45	-20.00	-	-	
Kab. Tabanan	Rek	290,650	250,078	34,594	4,940	238	143	79	4	-	1	-
	Δ%	3.90	4.35	0.71	4.99	2.59	4.38	27.42	-20.00		-	
Kab. Badung	Rek	628,828	520,701	84,758	18,448	1,676	876	483	55	14	4	5
	Δ%	2.96	2.36	5.50	7.26	9.61	2.46	18.67	-1.79	-6.67	33.33	-
Kab. Gianyar	Rek	295,161	247,460	38,880	7,471	495	277	118	10	-	1	-
	Δ%	4.17	4.26	3.24	7.82	7.38	7.78	7.27	-	-100.00	100.00	
Kab. Klungkung	Rek	124,456	106,929	14,912	2,226	145	78	15	-	-	-	-
	Δ%	3.45	3.81	0.48	6.87	-4.61	32.20	-11.76				
Kab. Bangli	Rek	103,880	91,532	10,813	1,451	25	20	5	-	-	-	-
	Δ%	5.93	6.42	0.81	18.16	-63.24	11.11	-				
Kab.Karangasem	Rek	198,443	173,295	21,828	2,881	91	53	27	-	-	-	-
	Δ%	4.57	4.65	3.28	9.67	5.81	17.78	-12.90				
Kota Denpasar	Rek	1,842,303	1,546,636	231,370	49,254	4,669	2,224	1,274	212	20	10	10
	Δ%	2.97	2.76	5.45	6.13	6.77	7.70	-4.64	11.58	-20.00	-16.67	-
PROVINSI BALI	Rek	4,382,928	3,754,835	500,399	102,396	7,978	4,094	2,118	293	38	18	18
	Δ%	3.60	3.69	3.43	5.05	6.59	7.74	-0.84	7.33	-17.39	-	-

Rek = Jumlah rekening; % = Perubahan jumlah rekening pada triwulan III 2017 dibandingkan dengan triwulan II 2017

Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah

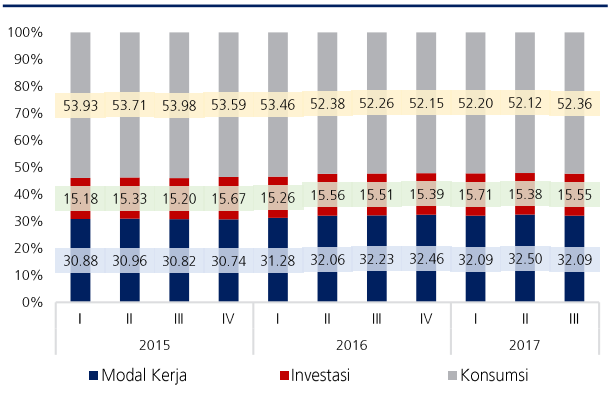
4.1.4. Kredit Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga

Dari sisi penyaluran kredit perbankan, proporsi kredit rumah tangga di Bali masih mendominasi dan cenderung menunjukkan tren peningkatan sejak triwulan I 2016. Pada triwulan III 2017, pangsa kredit untuk perseorangan mencapai 65,82% dibandingkan keseluruhan kredit yang direalisasikan pada triwulan berjalan. Sebagian besar kredit perseorangan tersebut digunakan untuk konsumsi yaitu sebesar 52,36%, sedangkan sisanya digunakan untuk kegiatan produktif seperti untuk modal kerja dan investasi sebesar masing-masing 32,09% dan 15,55%.



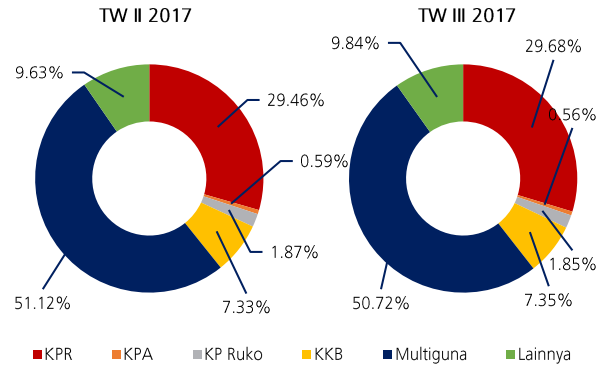
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8 Komposisi Penyaluran Kredit Perbankan



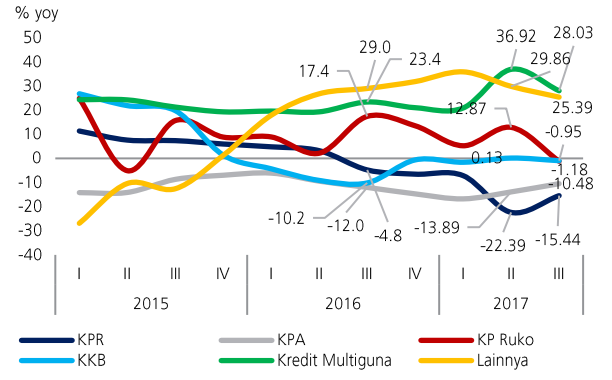
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.9 Komposisi Kredit Perseorangan



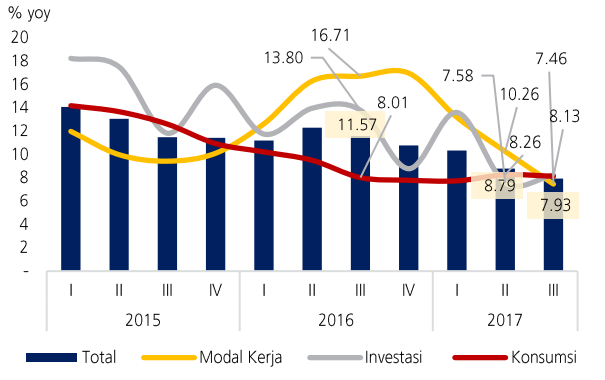
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.10 Komposisi Kredit Konsumsi Perseorangan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

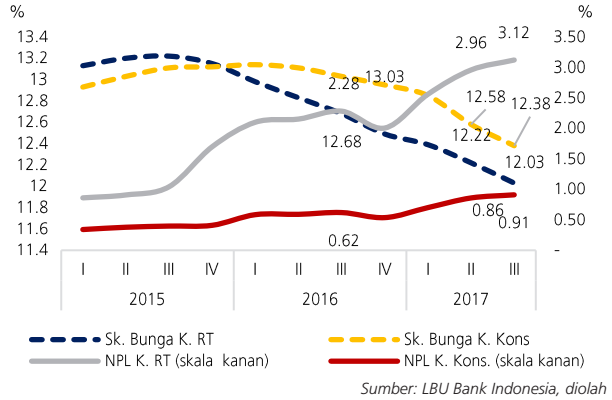
Grafik 4.11 Pertumbuhan kredit Konsumsi Perseorangan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13 Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga (%)

Dari sisi pertumbuhan kreditnya, kredit perseorangan tumbuh sebesar 7,93% (yoy) pada triwulan III 2017, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (8,79%, yoy) maupun triwulan III 2016 (11,57%, yoy). Penurunan kredit perseorangan di triwulan III 2017 terutama didorong oleh penurunan kontribusi modal kerja dan konsumsi masing-masing dari 10,26% (yoy) dan 8,26% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi 7,46% (yoy) dan 8,13% (yoy).



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12 NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga & Kredit Konsumsi di Bali

Seperti beberapa periode sebelumnya, kredit perseorangan didominasi oleh kredit konsumsi yang digunakan untuk membeli berbagai keperluan seperti rumah, apartemen, kendaraan dan konsumsi lainnya. Berdasarkan besar proporsinya, kredit konsumsi paling besar adalah kredit multiguna yang mencapai pangsa 50,72% (turun dari 51,12% pada triwulan II 2017), lalu diikuti kredit kepemilikan rumah (KPR) yang mencapai pangsa sebesar 29,68% (naik dari 29,46% pada triwulan II 2017). Sementara itu, proporsi kredit kepemilikan kendaraan bermotor (KKB) masih relatif kecil yaitu sebesar 7,45% (naik dari 7,33% pada triwulan II 2017).

Dilihat dari sisi suku bunganya, suku bunga kredit perseorangan menunjukkan arah yang relatif stabil dan mulai mengarah ke suku bunga yang lebih rendah. Pada triwulan III 2017, suku bunga tertimbang kredit perseorangan di Bali mencapai 12,03% per tahun, lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang mencapai 12,22% per tahun. Dari sisi risiko, risiko kredit rumah tangga di triwulan III 2017 tercatat mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari NPL kredit perseorangan yang berada pada level 3,12%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,96%. Sejalan dengan peningkatan NPL kredit perseorangan, NPL pada kredit konsumsi perseorangan juga mengalami peningkatan dan

Tabel 4.5 Penyaluran Kredit Perseorangan Secara Spasial Posisi Triwulan III 2017

Daerah	Kredit (Rp Miliar)	Pangsa %	JUMLAH REKENING					
			KPR	KPA	Ruko	KKB	Multiguna	Lainnya
Kab. Buleleng	6,645	11.11	4,240	31	12	3,570	20,082	6,497
Kab. Jembrana	2,766	4.62	955	6	3	1,770	10,296	2,033
Kab. Tabanan	5,763	9.63	4,542	18	43	2,894	18,011	4,988
Kab. Badung	10,265	17.16	4,772	174	83	4,903	23,630	41,203
Kab. Gianyar	5,053	8.45	1,128	6	10	4,052	13,626	6,526
Kab. Klungkung	1,946	3.25	259	2	5	753	7,117	753
Kab. Bangli	1,958	3.27	738	8	2	819	6,342	373
Kab. Karangasem	3,077	5.14	1,411	3	6	1,294	10,300	1,035
Kota Denpasar	22,357	37.37	12,253	139	331	22,028	50,520	87,371
PROVINSI BALI	59,831	100	30,298	387	495	42,083	159,924	150,779

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

berada pada level 0,91% dari 0,86% pada triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, nilai NPL kredit rumah tangga dan konsumsi rumah tangga masih di bawah *threshold* 5%. Secara spasial, kredit perseorangan masih terkonsentrasi di daerah Bali Selatan, yaitu Kota Denpasar, dengan pangsa sebesar 37,37%, diikuti oleh penyaluran di Kabupaten Badung dengan pangsa sebesar 17,16%. Sejalan dengan konsentrasi jumlah kredit, jumlah rekening di dua daerah tersebut juga cukup besar dibandingkan daerah lainnya.

Kredit Kepemilikan Rumah dan Apartemen

Kinerja perkembangan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) di triwulan laporan masih mengalami kontraksi seperti pada triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, telah mulai terlihat tanda-tanda perbaikan, tercermin oleh peningkatan pertumbuhan KPR dan KPA di semua tipe. Kondisi ini mendorong perbaikan kinerja pelaku usaha di bidang konstruksi perumahan dan penjualan *real estate*. Perbaikan penjualan rumah baru dan apartemen, dapat mendorong membaiknya kondisi keuangan pelaku usaha konstruksi dan *real estate*. Hal ini tercermin dari meningkatnya kinerja lapangan usaha *real estate* (PDRB) pada triwulan II 2017 yang tumbuh lebih tinggi sebesar 3,42% (yoy) dari sebelumnya 2,69% (yoy). Dari jenis kreditnya, perbaikan pertumbuhan KPR pada triwulan III 2017 terutama terjadi pada jenis KPR tipe menengah (s.d. 70) dari 1,91% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 11,59%(yoy). Sedangkan perbaikan pertumbuhan KPA pada triwulan III 2017 terutama terjadi pada tipe kecil (s.d. 21) yang mengalami perbaikan dari sebelumnya terkontraksi sebesar 19,35% (yoy) menjadi terkontraksi sebesar 14,36% (yoy). Di sisi lain, permintaan untuk kredit pemilikan (KP) ruko masih tetap tumbuh meskipun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tercatat pertumbuhan kredit ruko pada triwulan III 2017 sebesar 4,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (12,87%, yoy). Perbaikan pertumbuhan KPR dan KPA ini sejalan dengan peningkatan optimisme terkait perkembangan kegiatan usaha sektor bangunan pada triwulan III 2017. Hal ini tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KPw BI Provinsi Bali. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sektor bangunan mengalami peningkatan dari 0,00% pada triwulan II 2017 menjadi 2,45% di triwulan III 2017.

Dari sisi risiko kredit KPR, perilaku rumah tangga dalam melakukan pembayaran cicilan pembayaran rumah masih terjaga meskipun terdapat potensi peningkatan tekanan. Pada triwulan III 2017, NPL gross KPR mencapai 2,93%, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,68%. Sejalan

Tabel 4.6 Pertumbuhan dan NPL KPR di Bali

Jenis KPR, KPA, Ruko	Pangsa %	Growth (%,yoy)					NPL(%)				
		TW III-16	TW IV-16	TW I-17	TW II-17	TW III-17	TW III-16	TW IV-16	TW I-17	TW II-17	TW III-17
KPR	29.68	-4.79	-6.56	-7.12	-22.39	-15.40	1.56	1.32	1.98	2.68	2.93
RT. KPR sd 21	6.50	-17.41	-21.87	-26.90	-80.46	-76.95	0.37	0.25	0.44	2.19	1.51
RT. KPR sd 70	45.55	-0.10	-1.22	-0.13	1.91	11.59	1.30	1.35	1.70	1.90	2.04
RT. KPR 70+	47.96	0.09	-0.80	-0.02	-5.77	-2.51	2.45	1.86	2.97	3.47	3.97
KPA	0.56	-12.02	-14.71	-16.78	-13.89	-10.48	10.39	12.45	18.93	26.10	27.60
RT. KPA sd 21	19.74	-5.92	-12.39	-23.14	-19.35	-14.36	0.00	0.00	2.91	33.93	37.70
RT. KPA sd 70	56.97	-5.43	-9.64	-10.74	-11.04	-7.27	16.73	20.53	26.01	28.71	29.72
RT. KPA 70+	23.28	-27.44	-26.13	-24.52	-15.67	-14.45	4.86	4.07	14.84	13.49	13.83
Ruko	1.85	19.88	14.11	13.16	12.87	4.69	0.82	1.12	1.12	1.02	1.24

*Lokasi Proyek

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.7 Pertumbuhan dan NPL KKB di Bali

Jenis KKB	Pangsa %	Growth (%,yoy)					NPL(%)				
		TW III-16	TW IV-16	TW I-17	TW II-17	TW III-17	TW III-16	TW IV-16	TW I-17	TW II-17	TW III-17
KKB	7.35	-10.07	-0.81	-0.42	0.13	0.17	0.57	0.51	0.41	0.51	0.51
Mobil	94.23	-10.21	0.52	0.55	1.62	2.65	0.47	0.44	0.35	0.46	0.46
Sepeda Motor	3.90	-15.51	-9.13	9.95	-21.78	-21.35	2.34	1.73	1.29	1.36	1.46
Truk	0.93	5.52	-33.72	-58.29	-1.35	-53.47	1.13	1.35	1.51	1.44	1.51
Lainnya	0.94	6.04	-1.11	-4.38	-16.59	-12.88	0.14	0.04	0.54	0.81	0.71

*Lokasi Proyek

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

dengan KPR, NPL KPA di triwulan III 2017 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 27,60% dari 26,10% pada triwulan sebelumnya. Peningkatan NPL KPA terutama disebabkan oleh penurunan kemampuan bayar konsumen KPA tipe s.d 21 yang didominasi oleh karyawan hotel seiring dengan semakin ketatnya margin di bidang perhotelan. Risiko kredit pada KPA ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari institusi keuangan mengingat NPL pada semua tipe telah jauh melampaui *threshold* 5%, terutama pada tipe s.d. 21 yang mengalami peningkatan NPL yang besar dari 2,91% pada triwulan I 2017 menjadi 37,70% pada triwulan III 2017.

Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Pertumbuhan kredit kendaraan bermotor (KKB) di Bali pada triwulan III 2017 semakin menguat menjadi 0,17% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,13% (yoy). Peningkatan pertumbuhan KKB ini didorong oleh pertumbuhan kredit kendaraan jenis roda empat (mobil) yang meningkat dari 1,62% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 2,65% (yoy). Selain itu, pembiayaan pembelian kendaraan lainnya juga mengalami perbaikan walaupun masih terkontraksi sebesar 12,88% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 16,59% (yoy). Demikian halnya dengan penjualan kendaraan jenis roda dua (sepeda motor) yang mengalami perbaikan dari sebelumnya terkontraksi sebesar 21,78% (yoy) menjadi kontraksi 21,35% (yoy) pada triwulan berjalan. Namun demikian, kendaraan roda enam (truk) kembali mengalami kontraksi yang sangat dalam yaitu sebesar 53,47% (yoy), dari triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 1,35% (yoy).

Dari sisi risiko, meskipun pertumbuhan KKB mengalami perbaikan namun NPL *gross* kredit ini tercatat masih sama dengan triwulan sebelumnya. KKB mobil masih mencatat NPL yang paling rendah dibanding kendaraan lain, dengan tingkat NPL yang masih terjaga sebesar 0,46% (yoy). Sementara itu, KKB kendaraan roda enam (truk) yang merupakan NPL tertinggi dan KKB kendaraan roda dua (sepeda motor) mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu masing-masing

dari 1,44 (yoy) menjadi 1,51% (yoy) dan dari 1,36% (yoy) menjadi 1,46% (yoy). Namun demikian, NPL KKB kendaraan lainnya mengalami penurunan dari sebelumnya 1,81% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi 1,71% (yoy). Secara umum, NPL KKB di semua jenis kendaraan masih berada di bawah *threshold* 5%.

Kredit Multiguna

Besarnya penggunaan kredit konsumsi perseorangan secara multiguna menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan rumah tangga masih cukup besar, di luar kebutuhan untuk memiliki rumah dan kendaraan bermotor maupun peralatan rumah tangga. Hal ini terjadi karena pengajuan kredit multiguna relatif mudah dengan menggunakan jaminan/ agunan yang dimiliki oleh rumah tangga. Selain itu penggunaan dana yang diterima dapat secara leluasa digunakan oleh rumah tangga dalam melakukan aktivitas konsumsi seperti merenovasi rumah, biaya pernikahan, biaya pendidikan, biaya pengobatan, maupun pembelian barang berharga/elektronik, dan bahkan dapat digunakan untuk modal usaha.

Pada triwulan III 2017, kredit multiguna tumbuh sebesar 28,41% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 36,92% (yoy), namun lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu (23,49%). Jika dilihat dari pangsa berdasarkan kelompok besar pinjamannya dan jangka waktu kreditnya, kredit multiguna masih didominasi oleh kredit kelompok pinjaman >Rp100 juta s.d. Rp500 juta dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun yang mencapai 70,33% dari keseluruhan nominal kredit multiguna. Namun demikian, berdasarkan jumlah rekening, pangsa terbesar berada pada kelompok pinjaman >10 juta s.d. 50 juta dengan jangka waktu >3 s.d. 4 tahun yaitu 60,64%.

Dari sisi risiko kredit, kredit rumah tangga untuk fasilitas multiguna berada dalam kondisi dengan risiko yang relatif minimal. Pada triwulan III 2017, NPL kredit multiguna hanya sebesar 0,71% dan NPL pada konsentrasi kelompok terbesar (>Rp100 juta s.d. Rp500 juta) hanya sebesar 0,37%. Adapun kredit multiguna dengan risiko kredit terbesar berada pada pembiayaan dengan nominal di bawah Rp10 juta dengan NPL tercatat sebesar 11,75%, lebih rendah dibandingkan triwulan lalu (13,11%). Meskipun demikian, karena dari sisi nominal pangsanya hanya sekitar 0,52% dari total keseluruhan kredit multiguna, risiko kredit dari kelompok ini masih berdampak minor pada institusi keuangan maupun pada sistem keuangan di Bali.

Tabel 4.8 Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan III 2017

Besar Pinjaman	Berdasarkan Nominal (% pangsa)						Berdasarkan Jumlah Rekening (%)					
	Jangka Waktu						Jangka Waktu					
	<1 tahun	1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-5 tahun	>5 tahun	Jumlah	<1 tahun	1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-5 tahun	>5 tahun	Jumlah
<10 JT	12.73	4.97	1.82	0.80	0.22	0.52	53.06	30.32	12.79	10.77	2.27	9.04
>10 JT - 50 JT	42.52	38.51	31.54	14.36	2.31	6.67	39.33	56.47	60.64	45.43	11.43	30.91
>50 JT - 100 JT	30.70	30.91	36.07	56.68	22.59	26.54	5.96	9.28	19.52	30.70	27.34	22.84
>100JT - 500JT	13.24	19.39	28.05	24.34	70.33	61.87	1.63	3.66	6.94	12.66	57.99	36.54
>500JT - 1 M	0.81	6.23	2.52	3.82	4.55	4.40	0.02	0.27	0.11	0.44	0.97	0.67
>1 M	10.10	11.79	1.79	31.67	9.06	11.30	0.02	0.15	0.03	0.82	0.61	0.49
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.9 NPL Kredit Multiguna

Besar Pinjaman	Jangka Waktu					
	<1 tahun	1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-5 tahun	>5 tahun	Jumlah
<10 JT	0.64	5.78	5.36	12.55	22.48	11.75
>10 JT - 50 JT	0.14	0.90	0.91	0.87	0.24	0.54
>50 JT - 100 JT	0.00	0.69	0.33	0.60	1.22	1.02
>100JT - 500JT	0.00	1.01	0.23	0.46	0.37	0.37
>500JT - 1 M	0.00	1.71	0.00	0.00	2.79	2.44
>1 M	0.00	0.00	0.00	0.84	2.84	2.13
Jumlah	0.14	1.15	0.57	0.68	0.71	0.71

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

4.2. ASESMEN SEKTOR KORPORASI

4.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Korporasi

Secara keseluruhan, ekonomi Bali triwulan III 2017 mampu tumbuh lebih tinggi (6,22%, yoy) dari triwulan sebelumnya (6,01%, yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan kinerja ekonomi tersebut didorong oleh membaiknya kinerja komponen investasi dan masih kuatnya pertumbuhan ekspor. Sementara itu dari sisi penawaran, meningkatnya kinerja ekonomi didorong oleh meningkatnya kinerja beberapa lapangan usaha utama, yaitu akomodasi makan minum, transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, jasa keuangan, informasi dan komunikasi.

Kinerja ekonomi Bali yang tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, mendorong membaiknya kinerja korporasi pada triwulan laporan. Beberapa lapangan usaha yang memiliki pangsa pembiayaan perbankan yang tinggi di triwulan laporan tumbuh lebih baik, yaitu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, akomodasi makan minum dan konstruksi. Namun risiko perlambatan ekonomi yang bersumber dari menurunnya kinerja korporasi masih berpotensi terjadi di periode mendatang. Salah satu sumber kerentanan pada kinerja korporasi antara lain adalah dampak melambatnya kinerja investasi bangunan, khususnya yang bersumber dari investasi pemerintah sebagai dampak lanjutan dari penyesuaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penurunan pagu anggaran belanja modal. Kondisi ini menyebabkan penyerapan realisasi belanja pemerintah (APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota) di Provinsi Bali pada triwulan II 2017, tercatat baru mencapai 31,39% dari pagu anggaran 2017. Capaian ini, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja di periode yang sama tahun 2016 yang tercatat sebesar 32,43%. Selain itu, kinerja korporasi juga berpotensi melambat, didorong oleh potensi belanjutnya perlambatan kinerja ekspor barang. Isu implementasi kebijakan proteksionisme oleh presiden terpilih AS (Trump), berpotensi membawa dampak negatif terhadap kinerja ekspor Provinsi Bali, terutama karena AS merupakan salah satu mitra dagang utama Bali. Berdasarkan hasil liaison, diketahui bahwa salah satu perusahaan mengkonfirmasi adanya penurunan permintaan dari buyer Amerika Serikat akibat sikap wait and see menanti kebijakan presiden terpilih Amerika Serikat yang akan menerapkan proteksionisme perdagangan.

4.2.2. Kinerja Korporasi

Peningkatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2017 juga tercermin pada hasil *liaison* Bank Indonesia Provinsi Bali yang ditunjukkan pada skala *likert* penjualan domestik dan ekspor yang mengalami peningkatan. Pada triwulan III 2017, skala *likert* penjualan ekspor tercatat sebesar 1,23 (naik dari 0,78) dan *likert scale* penjualan domestik sebesar 1,06 (naik dari 1,00). Meskipun demikian, secara umum masih terdapat beberapa sektor ekonomi yang diprakirakan akan mengalami peningkatan seperti sektor PHR (hotel), sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi.

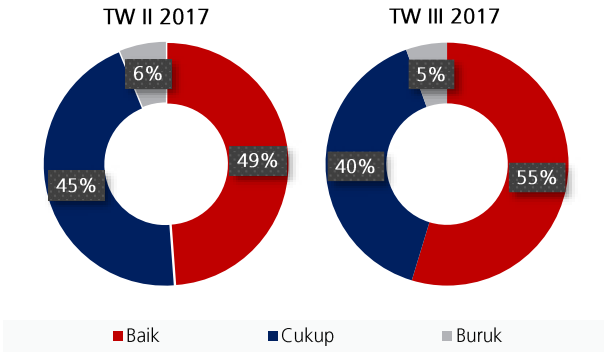
Biaya

Seiring dengan membaiknya penjualan domestik dan ekspor pada triwulan ini, biaya-biaya perusahaan secara umum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Biaya bahan baku pada triwulan III 2017 (dengan nilai *likert* sebesar 1,41) tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (0,57) dan triwulan yang sama tahun sebelumnya (1,24). Semua sektor mencatatkan nilai *likert* positif, yang menandakan harga bahan baku naik dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan biaya produksi pada triwulan ini (secara umum) terjadi karena perusahaan turut meningkatkan stok barang, terkonfirmasi dari naiknya *likert* persediaan dari 0,77 pada triwulan lalu menjadi 0,82 pada triwulan berjalan. Kenaikan persediaan ini terjadi sebagai langkah antisipasi perusahaan, mengingat penjualan domestik maupun ekspor yang mulai pulih pada triwulan ini. Peningkatan penjualan

ini tercermin pada hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan III 2017 dengan nilai SBT sebesar 24,59 dibandingkan dengan triwulan II 2017 yang hanya sebesar 19,74. Biaya bahan baku pada sektor perdagangan besar dan eceran tercatat mengalami kenaikan pada level normal, seiring dengan naiknya harga barang yang dibeli dari pemasok. Sub-sektor perhotelan juga mencatatkan kenaikan biaya yang timbul dari bahan baku makanan dan minuman, seiring dengan meningkatnya tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang dari 62,39% pada triwulan II 2017 menjadi 73,27% pada triwulan berjalan. Selain kedua sub-sektor tersebut, sub-sektor perikanan juga mengkonfirmasi laju kenaikan biaya bahan baku pada triwulan berjalan, akibat naiknya biaya produksi dan budidaya kerang dan kenaikan harga ikan kerapu yang dibeli dari nelayan. Kenaikan yang sama juga terjadi pada sub-sektor pengolahan makanan dan minuman.

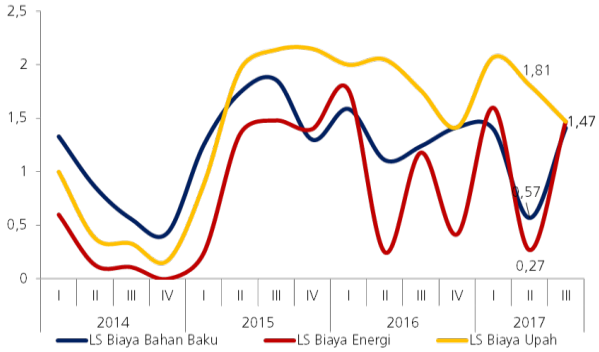
Sementara itu, beberapa sektor lain juga turut mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terlihat pada sektor pengangkutan & komunikasi, sub-sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa. Perusahaan pada sektor pengangkutan & komunikasi mengalami kenaikan biaya untuk mendukung *replacement* kabel tembaga. Biaya pada sub-sektor pertanian pun relatif stabil, didukung oleh adanya pupuk organik bersubsidi dari pemerintah. Sedangkan sektor jasa-jasa ada yang mengalami kenaikan seiring peningkatan penjualan, maupun perusahaan jasa pendidikan yang mengalami penurunan biaya layanan administrasi pendidikan.

Sejalan dengan peningkatan biaya bahan baku, biaya energi juga mengalami peningkatan, yang tercermin dari nilai *likert* sebesar 1,47 poin pada triwulan berjalan. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (0,27) maupun triwulan III-2016 yang sebesar 1,18 poin. Peningkatan ini terjadi seiring dengan peningkatan kegiatan produksi untuk memenuhi *demand* di pasar (terlihat dari kenaikan penjualan pada triwulan ini). Demikian juga dengan perusahaan telekomunikasi yang menggunakan daya listrik lebih besar untuk operasional yang terus meningkat, seiring meningkatnya kebutuhan layanan jaringan internet rumah tangga.



Sumber: SKDU KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.14 Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi di Bali



Sumber: SKDU KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.15 Perkembangan *Likert* Biaya

Tren peningkatan biaya juga terjadi pada komponen biaya tenaga kerja, yang tercermin dari nilai *likert* sebesar 1,47 poin pada triwulan berjalan (nilai *likert* ini sama dengan biaya energi triwulan laporan). Meskipun demikian, angka ini masih lebih rendah dibanding triwulan II-2017 (sebesar 1,81 poin) maupun triwulan III-2016 yang sebesar 1,76 poin. Perlambatan pertumbuhan biaya tenaga kerja ini terjadi seiring dengan upaya efisiensi perusahaan di tengah kenaikan UMK (Upah Minimum Kabupaten/ Kota). Perusahaan pada subsektor perdagangan

besar dan eceran mengalami kenaikan biaya upah, dengan berpedoman pada *margin* sebesar 5% dari penjualan atau mengikuti kenaikan UMK. Perusahaan perhotelan juga menaikkan upah yang dibayarkan. Untuk menjaga *margin* biaya gaji terhadap *revenue*, perusahaan melakukan bebrapa upaya efisiensi, salah satunya dengan tidak melakukan penggantian atas pegawai yang telah pensiun. Peningkatan upah yang cukup signifikan terjadi di sub-sektor pertanian, yaitu hingga 20% (yoy) per hektar sawah. Sama halnya dengan perusahaan di sub-sektor jasa kesehatan, yang menaikkan porsi *profit sharing* dokter untuk mencegah berpindahnya dokter tersebut ke RS pesaing.

Biaya tenaga kerja pada tahun 2018 diprakirakan turut mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahunan pada triwulan berjalan. Hal ini tercermin pada nilai *likert* sebesar 1,06 poin pada tahun 2018, yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III-2017 yang sebesar 1,47 poin. Adapun nilai *likert* untuk proyeksi jumlah tenaga kerja pada tahun berikutnya hanya sebesar 0,12. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak akan menambah jumlah tenaga kerja pada 2018, namun akan meningkatkan upah pegawai sebagai kompensasi atas meningkatnya *workload* (dengan asumsi penjualan meningkat pada tahun mendatang).

Sementara itu, penurunan biaya tenaga kerja terjadi seiring dengan upaya efisiensi di tengah kenaikan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Kewajiban untuk ikut serta dalam program BPJS dan pensiunan (Jamsostek) turut mendorong kenaikan pada biaya tenaga kerja. Mengingat korporasi telah memberikan fasilitas kesehatan, korporasi merasa ketentuan terkait dengan penggunaan BPJS kesehatan dan dana pensiun tersebut cukup membebani. Untuk menyiasati kenaikan biaya tenaga kerja, terdapat korporasi yang menerapkan strategi *clustering office*, yaitu menggabungkan beberapa area perusahaan untuk mengefisiensikan jumlah karyawan yang berwenang dan kebijakan *switching*, yaitu mengalihkan pegawai administrasi menjadi tenaga *marketing*. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu merekrut pegawai baru apabila terdapat kebutuhan karyawan.

Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi

Secara umum, dari hasil SKDU, kondisi keuangan korporasi dari sisi likuiditas menunjukkan posisi yang cukup likuid. Pada triwulan III 2017, pangsa korporasi yang memiliki kondisi likuiditas baik mencapai 55%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya 49% dari total responden korporasi di Bali. Selain itu, pangsa korporasi dengan kondisi likuiditas yang buruk mengalami penurunan dari sebesar dari 6% menjadi 5%.

4.2.3. Eksposur Perbankan Pada Korporasi

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, kerentanan yang terjadi pada sektor korporasi tetap perlu diwaspadai meskipun eksposur kredit perbankan pada sektor ini hanya sebesar 30,87% dari total kredit di Bali. Hal tersebut mengingat, kondisi keuangan sektor rumah tangga yang menjadi eksposur dominan kredit perbankan di Bali juga dipengaruhi oleh kinerja sektor korporasi, terutama dari sisi penghasilan dan penyerapan tenaga kerja.

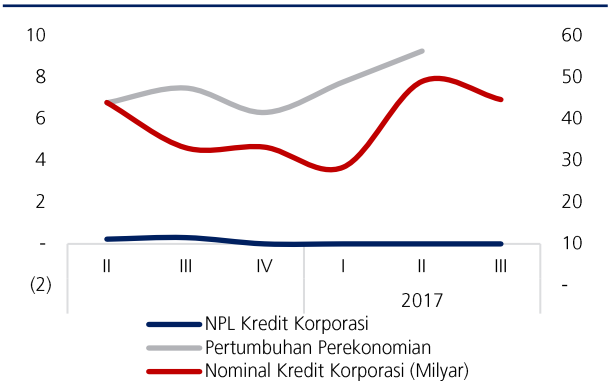
Kredit perbankan pada sektor korporasi di Bali pada triwulan III 2017 mencapai Rp28,06 triliun, tumbuh sebesar 0,04% (yoy), lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,32% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan oleh melambatnya kredit di semua jenis penggunaan (kredit konsumsi, modal kerja dan investasi). Kredit konsumsi mengalami kontraksi sebesar 20,61% (yoy) jauh lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,41% (yoy). Sejalan dengan kondisi tersebut, kredit modal kerja korporasi turut mengalami kontraksi sebesar 9,68% (yoy), sedikit lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang sebesar 9,04% (yoy). Demikian

halnya dengan kredit investasi korporasi yang tumbuh melambat dari 10,63% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi 6,86% pada triwulan III 2017.

Sementara itu, dari sisi kualitas kredit terjadi perbaikan seiring dengan NPL yang mengalami penurunan dari sebesar 5,27% pada triwulan II 2017 menjadi sebesar 4,88% pada triwulan III 2017. Penurunan tersebut terutama didorong oleh penurunan NPL di kredit investasi dari 4,33% pada triwulan II 2017 menjadi 3,7%. Namun demikian, kredit konsumsi yang pertumbuhan kreditnya mengalami kontraksi paling dalam, disertai dengan memburuknya kualitas kredit dari sebelumnya 0,0% pada triwulan II 2017 menjadi 1,34%. Selain itu, nilai NPL kredit modal kerja yang juga mengalami peningkatan dan telah melampaui *threshold* 5% perlu untuk diwaspadai.

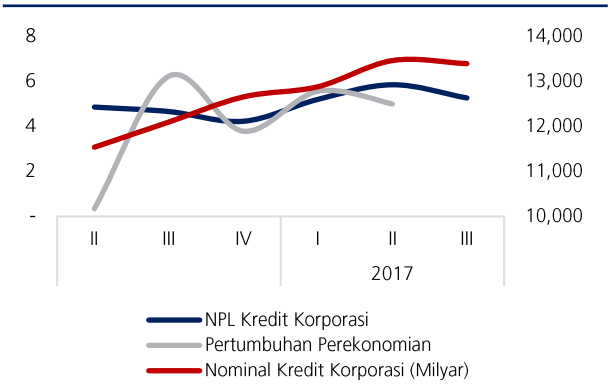
Dilihat dari sisi sektoralnya, meskipun kinerja lapangan usaha akomodasi makan dan minum (akmamin) pada triwulan III 2017 mengalami akselerasi, namun penyaluran kredit korporasi mengalami sedikit perlambatan. Penyaluran kredit korporasi lapangan usaha akmamin pada triwulan laporan mengalami perlambatan menjadi 10,72% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,69% (yoy). Upaya peningkatan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit masih dapat tetap menjaga tingkat kualitas kredit pada sektor ini yang tercermin pada penurunan NPL dari 5,85% pada triwulan sebelumnya menjadi 5,26% di triwulan laporan.

Sebagaimana kondisi pada lapangan usaha akmamin, akselerasi pertumbuhan lapangan usaha konstruksi juga diiringi oleh perlambatan penyaluran kredit korporasi. Pada triwulan III 2017, penyaluran kredit korporasi pada triwulan III 2017 mengalami kontraksi yang semakin dalam dari sebelumnya -3,41% (yoy) menjadi -3,56% (yoy). Perlambatan penyaluran kredit konstruksi ini diiringi dengan penurunan kualitas kredit yang tercermin pada meningkatnya NPL dari sebesar 2,02% pada triwulan II 2017 menjadi 2,11%.



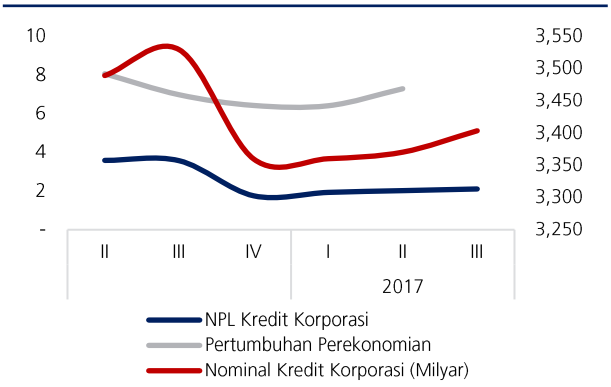
Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.16 Kredit Korporasi Akomodasi Makan dan Minum



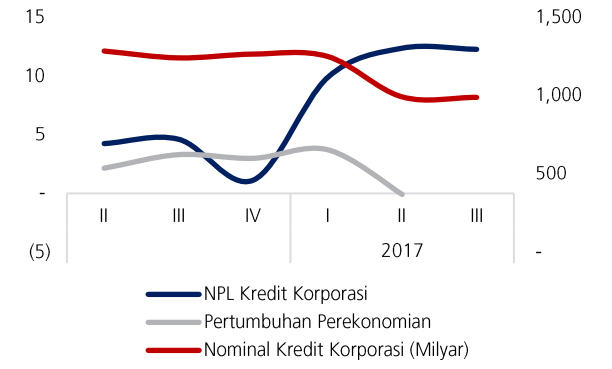
Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.17 Kredit Korporasi Pada Sektor Pertanian



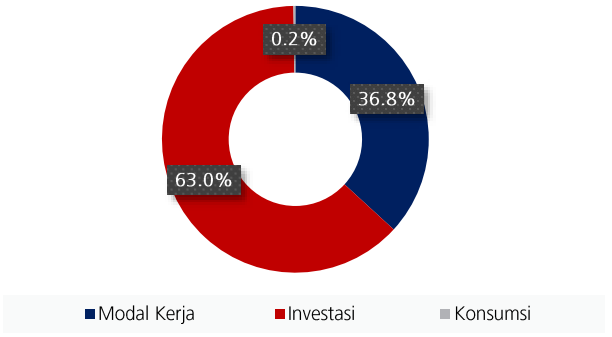
Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.18 Kredit Korporasi Sektor Konstruksi



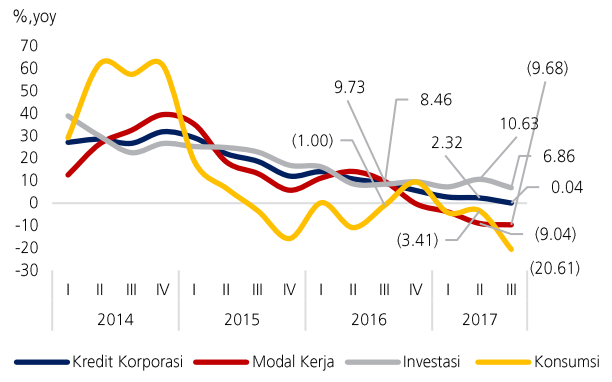
Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.19 Kredit Korporasi Pada Sektor Industri Pengolahan



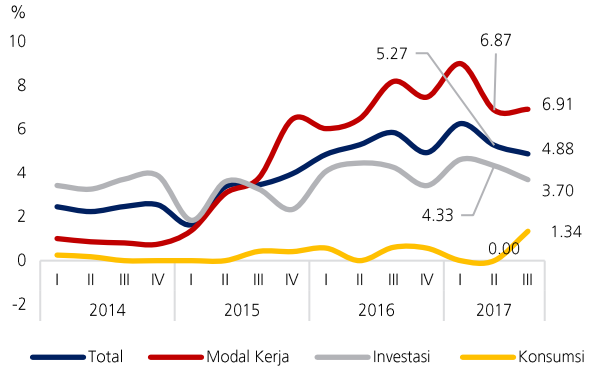
Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.20 Komposisi Penggunaan Kredit Korporasi



Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.21 Pertumbuhan Kredit Korporasi



Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.22 NPL Kredit Korporasi

Sementara itu, walaupun kinerja lapangan usaha pertanian mengalami perlambatan, penyaluran kredit korporasi lapangan usaha pertanian mengalami peningkatan yang disertai dengan kualitas kredit yang stabil. Penyaluran kredit korporasi pada triwulan III 2017 mengalami peningkatan dari sebelumnya 11,51% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi sebesar 34,95% (yoy) pada triwulan II 2017 dengan NPL yang sama yaitu sebesar 0%.

Di sisi lain, lapangan usaha industri pengolahan mengalami perbaikan yang dapat dilihat dari peningkatan kinerja yang diiringi dengan perbaikan penyaluran kredit korporasi dan NPL. Meskipun penyaluran kredit korporasi lapangan usaha industri pengolahan masih terkontraksi, namun pada triwulan III 2017 telah mengalami perbaikan menjadi -20,32% (yoy) dari triwulan sebelumnya -22,80% (yoy). Perbaikan penyaluran kredit tersebut juga diiringi oleh perbaikan kualitas kredit yang tercermin pada penurunan NPL dari 12,37% pada triwulan sebelumnya menjadi 12,27%.

Kredit Modal Kerja dan Investasi Korporasi

Posisi kredit modal kerja korporasi pada triwulan

III 2017 sebesar Rp10,3 triliun, sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp10,5 triliun. Secara tahunan, kredit modal kerja korporasi ini berada dalam kondisi yang terkontraksi, yaitu sebesar -9,68% (yoy) pada triwulan III 2017 atau lebih dalam dibanding triwulan II 2017 yang sebesar -9,04% (yoy). Seiring dengan penurunan penyaluran kreditnya, risiko kredit modal kerja korporasi juga mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari NPL yang meningkat dari 6,87% pada triwulan II 2017 dari menjadi 6,91% pada triwulan III 2017. Kondisi ini perlu mendapat perhatian mengingat tingkat NPL yang sudah di atas 5%.

Sejalan dengan kredit modal kerja, kredit investasi korporasi juga mengalami perlambatan dari sebelumnya 10,63% (yoy) dengan posisi Rp17,5 triliun pada triwulan II 2017 menjadi tumbuh sebesar 6,86% (yoy) dengan posisi Rp17,7 triliun pada triwulan III 2017. Sementara itu dari sisi risiko kredit, meskipun kredit investasi mengalami perlambatan, kualitas kredit yang tercermin pada NPL kredit investasi korporasi pada triwulan III 2017 mengalami perbaikan menjadi 3,70% dari 4,33% pada triwulan II 2017.

4.3. ASESMEN INSTITUSI KEUANGAN (PERBANKAN)

4.3.1. Jaringan Kantor dan Aset

Pada triwulan II 2017, jumlah bank umum di Bali mengalami pertambahan 1 bank menjadi sebanyak 54 bank sementara jumlah BPR masih tetap sama yaitu sebanyak 137 BPR.

Total aset perbankan di Bali pada triwulan II 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp. 111,28 triliun dari Rp. 108,86 triliun pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, dilihat dari laju pertumbuhannya aset perbankan mengalami perlambatan dari 4,62% (yoy) menjadi 5,63% (yoy) pada triwulan II 2017.

4.3.2. Kondisi Umum Perbankan Bali

Secara umum, perkembangan kinerja bank umum di Bali pada triwulan III 2017 masih tumbuh kuat yang ditunjukkan oleh akselerasi dana pihak ketiga (10,34%, yoy) serta aset (5,43%, yoy) dibanding dengan triwulan sebelumnya. Namun demikian, posisi kredit (7,22%, yoy) mengalami perlambatan yang diiringi dengan peningkatan risiko kredit (rasio NPL) dari 2,96% menjadi 3,16% pada triwulan III 2017.

Tabel 4.10 Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Bank di Bali

KATEGORI	2012	2013	2014	2015	2016	TW I-2017	TW II-2017	TW III-2017
Bank Umum				42	53	53	54	52
Jumlah Kantor	656	652	657	704	697	698	700	701
BPR	137	137	138	137	137	137	137	137
Jumlah Kantor	170	286	286	286	321	321	321	321
Total Bank Umum & BPR	137	137	138	179	190	190	191	189
Total Jumlah Kantor	826	938	943	990	1018	1019	1021	1022

Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.11 Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Bank Umum di Bali

Indikator Bank Umum	2015				2016				2017				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	Agu	TW III	TW IV	TW I	TW II	Agu	Sep
Aset (Rp milyar)	85,393	88,520	92,288	92,842	91,469	94,376	97,454	98,107	100,131	95,915	98,062	102,473	103,434
g Asset (%, yoy)	13.78	11.34	10.09	8.23	7.12	6.62	8.03	6.31	7.85	4.86	3.91	5.15	5.43
Kredit Umum (Rp milyar)	57,967	59,777	60,972	62,855	63,074	65,603	66,301	67,039	68,918	69,597	71,266	71,651	71,880
g Kredit Umum (%, yoy)	15.18	13.16	10.68	9.87	8.81	9.75	10.01	9.95	9.65	10.34	8.63	8.07	7.22
NPL (%)	1.34	1.91	1.89	2.06	2.38	2.35	2.61	2.67	2.09	2.73	2.96	3.07	
Modal Kerja (Rp milyar)	22,941	23,765	24,012	24,504	24,416	25,852	25,913	26,288	26,861	26,850	27,734	27,484	27,523
g Modal Kerja (%, yoy)	14.77	11.62	7.89	7.72	6.43	8.78	8.79	9.48	9.62	9.97	7.28	6.06	4.70
NPL (%)	1.49	1.99	2.34	1.63	1.95	1.92	2.29	2.41	1.76	2.56	2.94	3.22	
Investasi (Rp milyar)	13,626	13,876	14,141	14,588	14,446	15,042	15,403	15,539	16,181	16,321	16,247	16,490	16,524
g Investasi (%, yoy)	20.04	16.62	12.66	8.83	6.01	8.41	10.44	9.89	10.92	12.98	8.01	7.06	6.34
NPL (%)	2.31	3.95	3.19	5.12	5.55	5.27	5.63	5.58	4.52	5.51	5.60	5.57	
Konsumsi (Rp milyar)	21,400	22,137	22,819	23,764	24,213	24,709	24,985	25,212	25,877	26,427	27,285	27,677	27,833
g Konsumsi (%, yoy)	12.70	12.73	12.53	12.86	13.14	11.62	11.04	10.49	8.89	9.14	10.43	10.78	10.39
NPL (%)	0.56	0.55	0.60	0.62	0.92	1.02	1.08	1.13	0.91	1.19	1.41	1.43	
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	72,015	73,580	76,545	75,507	75,567	77,610	79,833	79,393	79,530	81,568	83,209	86,346	87,605
g DPK (%, yoy)	12.71	10.65	8.52	7.09	4.93	5.48	7.10	3.72	5.33	7.94	7.21	8.16	10.34
Deposito (Rp milyar)	26,690	27,514	27,445	26,544	27,819	28,044	29,064	28,167	28,072	30,329	29,923	30,809	30,652
g Deposito (%, yoy)	30.24	26.73	16.63	7.36	4.23	1.93	6.82	2.63	5.76	9.02	6.70	6.00	8.82
Giro (Rp milyar)	12,862	13,709	15,002	13,065	13,898	13,999	14,889	14,923	13,163	14,406	15,178	16,150	16,376
g Giro%, yoy)	5.17	-0.87	6.32	9.19	8.06	2.12	3.49	-0.52	0.75	3.65	8.42	8.47	9.73
Tabungan (Rp milyar)	32,463	32,357	34,098	35,898	33,850	35,567	35,879	36,303	38,295	36,833	38,108	39,387	40,577
g Tabungan(%, yoy)	4.14	4.51	3.66	6.14	4.27	9.92	8.90	6.46	6.68	8.81	7.15	9.78	11.78
NPL (%)	1.34	1.91	1.89	2.06	2.38	2.35	2.61	2.67	2.09	2.73	2.96	3.07	3.16
LDR	80.49	81.24	79.66	83.24	83.47	84.53	83.05	84.44	86.66	85.32	85.65	82.98	82.05

Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

Intermediasi Perbankan Bali

Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank umum pada triwulan III 2017 mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu dari 7,21% (yoy) di triwulan II 2017 menjadi 10,34% (yoy) di triwulan III 2017. Peningkatan kinerja tersebut terutama dikontribusi oleh peningkatan pertumbuhan tabungan yang disusul oleh peningkatan pertumbuhan deposito dan giro.

Pada periode laporan pertumbuhan tabungan sebesar 11,78% (yoy), deposito tumbuh sebesar 8,82% (yoy) dan giro tumbuh sebesar 9,73% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, secara nominal jumlah dana yang berhasil dihimpun tersebut mengalami peningkatan dari Rp83,2 triliun pada triwulan II 2017 menjadi Rp87,6 triliun di triwulan III 2017.

Kredit

Di sisi lain, walaupun kinerja penghimpunan dana mengalami peningkatan, namun fungsi penyaluran kredit perbankan oleh bank umum secara keseluruhan mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding kinerja di periode triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2017, kredit perbankan tumbuh sebesar 7,22% (yoy) dari 8,63% (yoy) pada periode sebelumnya. Secara nominal, kredit perbankan yang disalurkan sampai dengan triwulan III 2017 mencapai Rp71,88 triliun.

Penurunan penyaluran kredit tersebut terutama didorong oleh penurunan kredit modal kerja yang juga didorong oleh penurunan pertumbuhan kredit investasi dan konsumsi. Pada periode laporan, kredit modal kerja mengalami pertumbuhan sebesar 4,70% (yoy) setelah pada periode sebelumnya tumbuh sebesar 7,28% (yoy). Sedangkan untuk kredit investasi pada periode laporan tercatat sebesar Rp16,5 triliun

Tabel 4.12 Perkembangan Indikator BPR di Bali

Indikator BPR	2015				2016					2017			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	Agu	TW III	TW IV	TW I	TW II	Agu	Sep
Aset (Rp milyar)	9,604	10,001	10,534	11,313	11,595	11,994	12,453	12,442	13,074	12,948	13,222	13,622	13,844
g Asset (%, yoy)	20.31	21.22	20.82	20.61	20.74	19.93	19.53	18.11	15.56	11.66	10.24	9.39	11.27
Kredit Umum (Rp milyar)	7,328	7,744	7,952	8,279	8,367	8,566	8,717	8,725	9,032	9,210	9,408	9,407	9,485
g Kredit Umum (%, yoy)	17.11	18.77	16.81	16.28	14.18	10.61	10.15	9.72	9.09	10.07	9.83	7.91	8.72
Modal Kerja (Rp milyar)	3,710	3,919	4,058	4,263	4,299	4,330	4,394	4,363	4,489	4,553	4,607	4,599	4,618
g Modal Kerja (%, yoy)	15.05	17.70	17.07	18.17	15.88	10.49	7.92	7.53	5.31	5.92	6.39	4.66	5.83
Investasi (Rp milyar)	908	968	985	1,034	1,068	1,088	1,121	1,107	1,183	1,290	1,338	1,349	1,386
g Investasi (%, yoy)	29.95	30.16	20.51	18.97	17.59	12.45	17.83	12.38	14.41	20.82	22.95	20.34	25.16
Konsumsi (Rp milyar)	2,710	2,857	2,909	2,983	3,001	3,147	3,203	3,254	3,360	3,367	3,463	3,460	3,482
g Konsumsi (%, yoy)	16.11	16.75	15.26	12.86	10.72	10.15	10.76	11.87	12.65	12.18	10.04	8.02	7.00
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	6,053	6,248	6,478	7,007	7,256	7,571	8,000	7,938	8,354	8,465	8,724	9,041	3,129
g DPK (%, yoy)	16.53	18.67	17.76	18.66	19.87	21.17	24.83	22.54	19.23	16.66	15.23	13.02	-60.58
Deposito (Rp milyar)	4,039	4,444	4,644	5,054	5,354	5,628	6,002	5,931	6,192	6,331	6,514	6,696	678
g Deposito (%, yoy)	14.74	26.58	32.11	33.92	32.58	26.66	31.05	27.71	22.53	18.23	15.74	11.57	-88.57
Tabungan (Rp milyar)	2,015	1,805	1,834	1,953	1,902	1,943	1,998	2,007	2,162	2,135	2,210	2,345	2,451
g Tabungan(%, yoy)	20.30	2.83	-7.64	-8.37	-5.61	7.67	9.26	9.47	10.72	12.25	13.75	17.36	22.11
NPL (%)	3.31	3.10	3.03	2.69	4.27	4.75	5.49	5.75	4.92	6.71	7.26	7.56	7.83
LDR	80.11	81.67	80.54	76.33	76.98	76.24	74.57	74.94	72.19	74.58	74.86	73.10	72.83

Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

atau tumbuh sebesar 6,34% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 8,01% (yoy). Sedangkan kredit konsumsi pada periode laporan tercatat sebesar Rp27,8 triliun atau tumbuh sebesar 10,39% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 10,43% (yoy).

LDR dan NPL

Kondisi intermediasi perbankan yang diindikasikan dengan indikator *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan penurunan bila dibandingkan kinerja di periode sebelumnya. Pada triwulan III 2017 LDR bank umum di Bali mencapai 82,05%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 85,65%. Namun demikian, kualitas kredit perbankan menunjukkan peningkatan, tercermin dari indikator *Non Performance Loans* (NPLs) *Gross* yang meningkat dari 2,96% pada triwulan II 2017 menjadi 3,16% pada triwulan III 2017.

4.3.4. Bank Perkreditan Rakyat

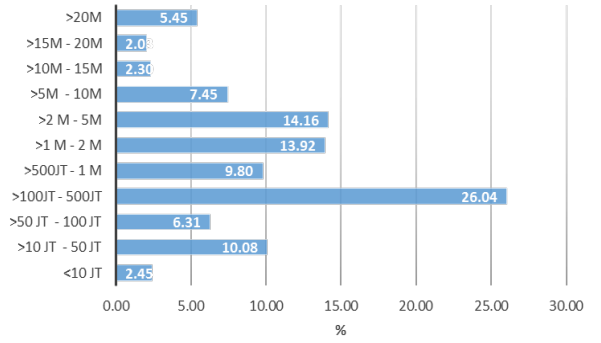
Di triwulan III 2017, kinerja BPR tetap tumbuh tinggi namun mengalami tren yang melambat. Aset BPR tumbuh sebesar 11,27% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 10,24% (yoy) sehingga secara nominal asetnya mencapai Rp13,8 triliun. Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan DPK BPR juga mengalami peningkatan dari sebelumnya 15,23% (yoy) menjadi 16,29% (yoy) pada triwulan III 2017. Namun demikian, penyaluran kredit BPR pada triwulan berjalan tumbuh sebesar 8,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2017 yang sebesar 9,83% (yoy). Melambatnya penyaluran kredit ini mempengaruhi penurunan kualitas kredit pada periode laporan. Hal ini tercermin dari nilai NPL yang melebihi *threshold* 5% dan semakin menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 7,83% dari sebelumnya 7,26% pada triwulan II 2017.

4.4. AKSES KEUANGAN

4.4.1. Akses Keuangan Kepada UMKM

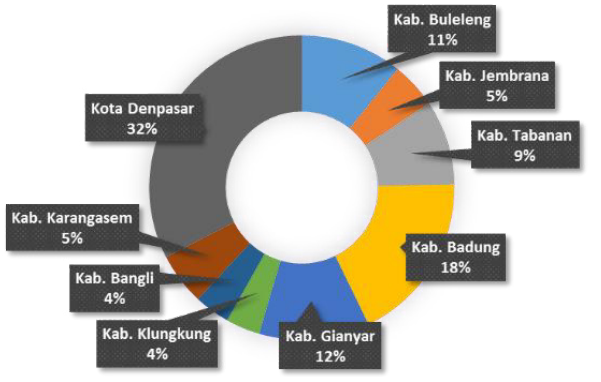
Sejalan dengan kondisi kredit perbankan secara umum, laju pertumbuhan kredit UMKM tercatat mengalami penurunan, dari yang semula tumbuh sebesar 11,18% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 8,43% (yoy) di periode laporan. Penurunan laju penyaluran kredit UMKM terjadi di semua sektor, terutama di sektor keuangan dan

jasa perusahaan yang semula sebesar -0,8% (yoy) menjadi -6,4% (yoy) pada triwulan III 2017. Sektor PHR yang merupakan sektor dengan pangsa kredit terbesar (69,63%) turut mengalami perlambatan pertumbuhan. Kredit UMKM pada sektor PHR tumbuh sebesar 7,6% (yoy) dari sebelumnya 11,6% (yoy) pada triwulan II 2017. Sementara itu, kredit UMKM pada sektor pertambangan mengalami kenaikan yang signifikan pada triwulan berjalan yaitu dari 2,7% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi 51,5% (yoy) atau kembali normal pada basisnya setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat permasalahan ijin usaha. Namun demikian, penurunan pertumbuhan kredit UMKM pada periode laporan diiringi dengan peningkatan kualitas kredit. Hal ini terlihat dari rasio NPL kredit UMKM yang menurun dari 4,01% menjadi sebesar 3,03% pada triwulan III 2017.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23 Pangsa Nominal Kredit UMKM



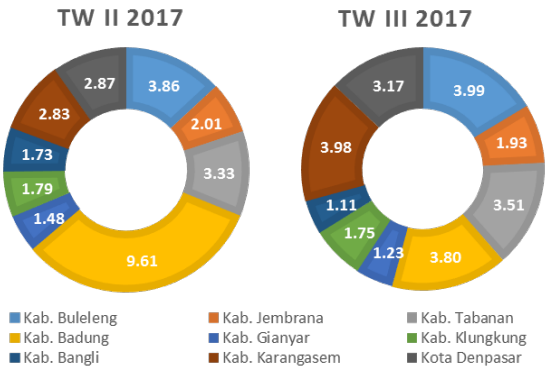
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24 Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Kota/Kabupaten

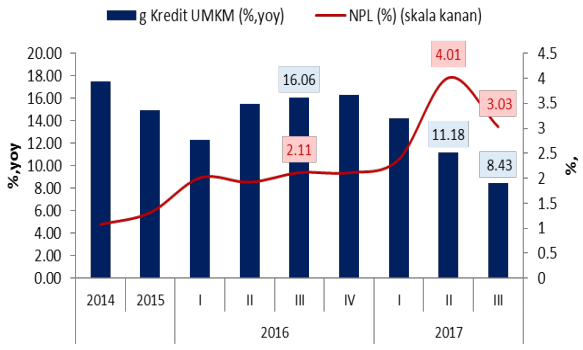
Dari data yang ada, pangsa kredit UMKM dari total kredit di periode laporan tercatat mengalami sedikit penurunan yakni dari 36,7% pada triwulan sebelumnya menjadi 36,6%. Sementara itu, berdasarkan nominal kreditnya, pangsa realisasi kredit UMKM terbesar berada pada rentang nominal >Rp100 juta s.d. Rp500 juta, yakni sebesar 26,04% dari total kredit UMKM yang ada di Bali.

Di sisi lain, berdasarkan sebaran wilayahnya, konsentrasi realisasi kredit UMKM terbesar berada di Kota Denpasar yakni dengan pangsa sebesar 32%, diikuti oleh Kabupaten Badung sebesar 18% dan Kabupaten Gianyar sebesar 12%. Meskipun demikian, perkembangan kredit di kota Denpasar tidak didukung dengan peningkatan kualitas kredit. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai NPL dari sebesar 2,87% pada triwulan II 2017 menjadi 3,17%. Sementara itu, NPL kredit di kabupaten Badung kembali normal setelah pada triwulan II 2017 mengalami peningkatan yang tajam. Pada triwulan III 2017, NPL kredit UMKM di Kab. Badung sebesar 3,8%, lebih rendah dibanding triwulan II 2017 sebesar 9,61%.

Berdasarkan sektor ekonominya, realisasi kredit UMKM masih terkonsentrasi di sektor PHR dengan pangsa sebesar 69,63%, diikuti oleh sektor jasa-jasa, keuangan, pertanian dan industri dengan pangsa sebesar 8,62%; 7,45%; 5,73% dan 4,25%. Sementara itu, sektor ekonomi lainnya memiliki pangsa relatif rendah yaitu dibawah 3%. Lebih lanjut, tendensi peningkatan tingkat NPL UMKM di periode laporan secara sektoral terutama disebabkan oleh peningkatan tingkat NPL pada sektor pertanian, keuangan dan jasa-jasa. Sektor utama konstruksi walaupun mengalami penurunan NPL, namun perlu diperhatikan karena mendekati *threshold* 5%. Selain itu, sektor LGA (listrik, gas dan air) juga patut diwaspadai karena walaupun mengalami penurunan NPL tetapi masih di atas *threshold* 5%.

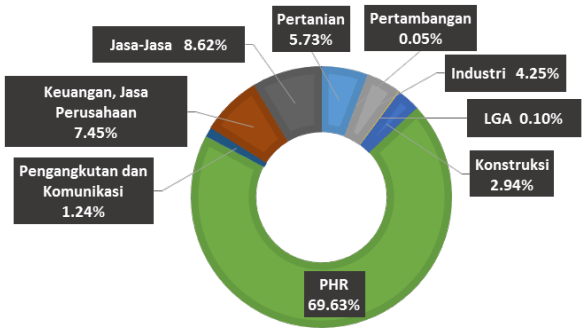


Grafik 4.25 NPL Kredit UMKM Berdasar Kab/Kota

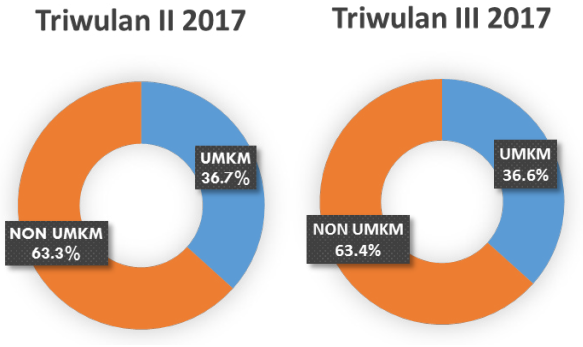


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.27 Pertumbuhan Kredit UMKM



Grafik 4.26 Realisasi Kredit UMKM Berdasar Sektor Ekonomi



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.28 Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit

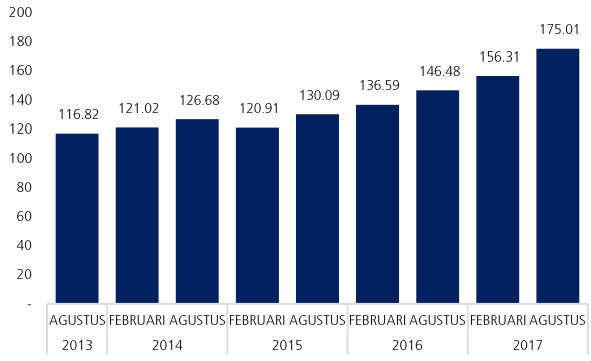
Tabel 4.13 NPL kredit UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi

NPL UMKM Sektoral (%)	2014	2015	2016				2017		
	IV	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1. Pertanian	0.40	0.79	1.12	1.25	1.21	1.10	1.79	2.21	2.64
2. Pertambangan	0.00	1.11	8.79	6.87	8.20	8.00	10.52	7.18	4.60
3. Industri	1.53	0.73	0.97	1.77	2.45	1.84	3.03	3.79	3.53
4. LGA	0.00	0.37	0.29	2.94	2.68	2.27	6.59	7.85	7.55
5. Konstruksi	1.92	1.40	2.83	1.14	3.02	1.99	4.93	4.88	4.80
6. PHR	0.73	1.37	1.92	1.89	2.10	2.24	3.86	4.77	3.39
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0.23	0.75	0.80	0.98	1.12	11.19	2.44	2.26	1.46
8. Keuangan, Jasa Perusahaan	0.78	1.08	0.82	0.77	0.61	0.50	0.85	1.01	1.11
9. Jasa-Jasa	0.55	1.63	1.89	1.57	1.58	1.48	1.37	1.27	1.38
10. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	0.81	1.29	1.74	1.70	1.92	1.94	3.29	4.01	3.03

Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

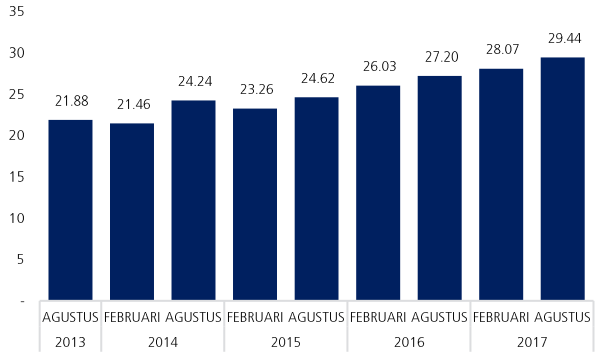
4.4.2. Akses Keuangan Kepada Penduduk

Indikator akses keuangan di Bali terutama dari sisi penghimpunan dana mengalami peningkatan, begitu juga dari sisi kredit. Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk angkatan kerja di Bali tetap menunjukkan tren peningkatan, di mana pada bulan Agustus 2017 rasio tersebut tercatat sebesar 175,01%. Rasio yang lebih besar dari 100% menunjukkan bahwa terdapat penduduk angkatan kerja di Bali yang memiliki rekening simpanan lebih dari satu. Selain itu rasio lebih dari 100% juga mengindikasikan adanya penduduk bukan angkatan kerja yang juga memiliki rekening seperti siswa sekolah maupun mahasiswa. Sementara itu, rasio jumlah rekening kredit terhadap penduduk angkatan kerja di Bali menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 29,44% di bulan Agustus 2017. Masih rendahnya rasio rekening kredit menunjukkan terbatasnya penggunaan fasilitas pembiayaan oleh masyarakat di Bali dan masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit di masa yang akan datang.



Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah

Grafik 4.29 Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja



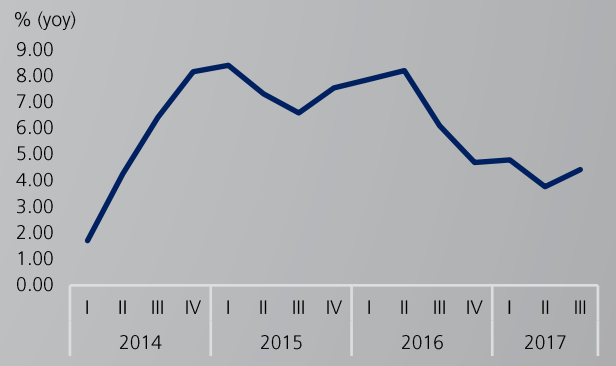
Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah

Grafik 4.30 Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja

BOKS B

KONSUMEN RUMAH TANGGA BALI MASIH MENUNJUKKAN DAYA BELI YANG KUAT

Perkembangan daya beli konsumen Bali masih tetap kuat. Kondisi ini terkonfirmasi dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam PDRB pada triwulan III 2017 yang tumbuh sebesar 4,43% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,77% (yoy). Masih tetap terjaganya konsumsi rumah tangga, juga terkonfirmasi oleh hasil hasil survei khusus terkait dengan daya beli pada konsumen rumah tangga terhadap konsumsi non pangan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia di Bali pada periode Oktober 2017.



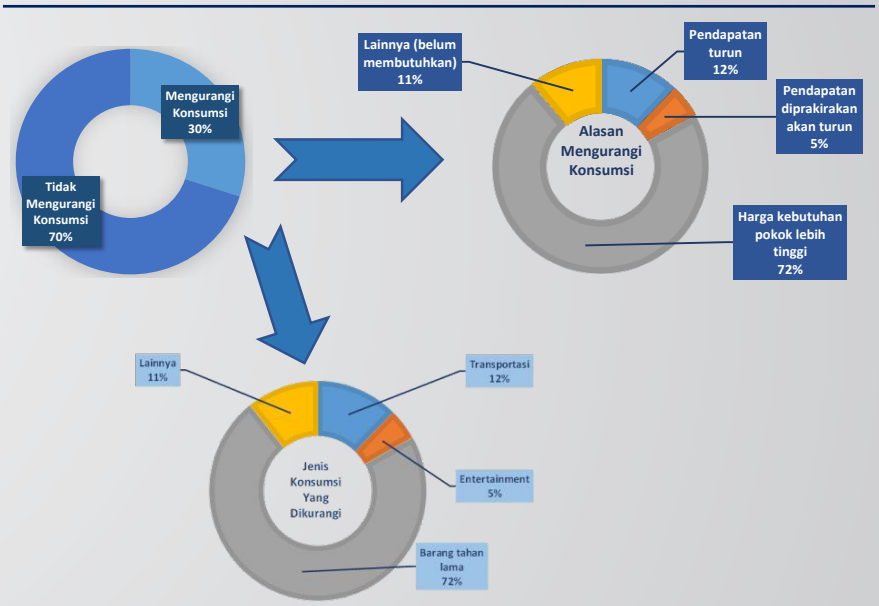
Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah

Grafik 1 Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga

Berdasarkan hasil survei pada Oktober 2017, tingkat konsumsi non pangan rumah tangga dalam 6 bulan terakhir tidak menurun. Pada periode Oktober 2017, telah dilakukan survei terhadap 204 responden (konsumen rumah tangga) di Bali, dalam rangka melakukan asesmen terhadap perkembangan tingkat konsumsi non pangan konsumen rumah tangga (RT). Dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa secara umum, tingkat konsumsi non pangan konsumen rumah tangga tidak mengalami penurunan dalam 6 bulan terakhir. Meskipun demikian, terdapat responden yang mengkonfirmasi terjadinya penurunan konsumsi non pangan dengan alasan utama adalah harga kebutuhan pokok yang lebih tinggi.

Konsumen RT yang melakukan pengurangan konsumsi non pangan, memprioritaskan pada jenis konsumsi *entertainment* dan konsumsi barang tahan lama. Adapun *range* penurunan juga yang paling besar untuk kedua kelompok komoditas tersebut, masing-masing sebesar 11%-20% dan 20%-40%. Kedua jenis konsumsi non pangan ini juga menjadi prioritas utama responden yang akan dikurangi bila terdapat kepastian pengurangan pendapatan ke depan, dengan *range* pengurangan yang juga cukup besar.

Konsumen RT akan melakukan penurunan konsumsi bila pendapatan pasti turun dan bila pendapatan meningkat, konsumsi tidak secara langsung meningkat. Konsumen RT mengkonfirmasi memprioritaskan akan melakukan penurunan konsumsi non pangan bila terjadi kepastian penurunan pendapatan dalam 6 bulan kedepan. Sementara itu, bila terjadi peningkatan pendapatan, konsumen RT ternyata tidak secara langsung akan meningkatkan tingkat konsumsi non pangan. Peningkatan konsumsi non pangan baru akan dilakukan pada beberapa periode ke depan (3-5 bulan ke depan).



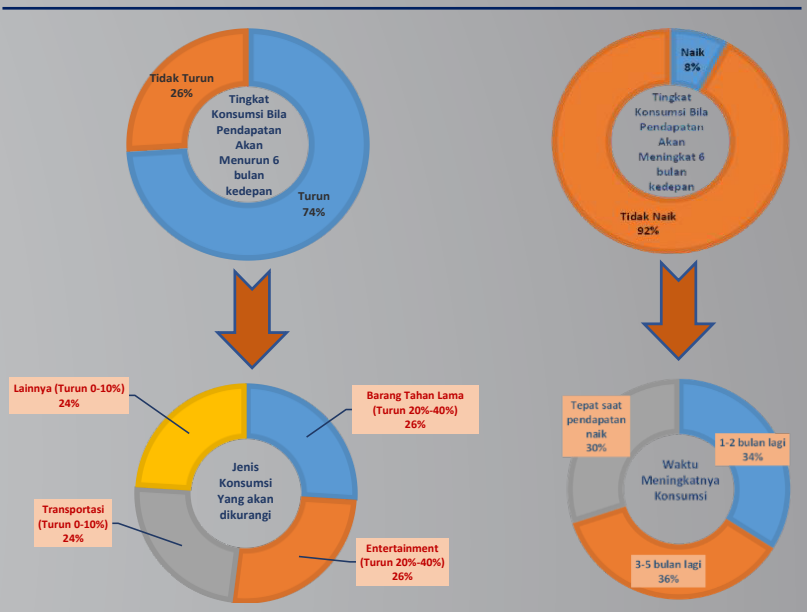
Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah

Grafik 2 Proporsi Responden (Konsumen RT) Yang Mengurangi dan Tidak Mengurangi Konsumsi Non Pangan

Berdasarkan hasil survei tersebut, juga diketahui bahwa konsumen RT cenderung tidak melakukan penurunan konsumsi non pangan. Kondisi ini terkonfirmasi oleh 70% responden (konsumen rumah tangga) yang menyatakan bahwa mereka tidak melakukan pengurangan konsumsi non pangan dalam 6 bulan terakhir, sementara sisanya (30%) konsumen RT melakukan pengurangan konsumsi non pangan. Adapun penyebab konsumen RT yang melakukan pengurangan konsumsi non pangan meliputi:

- 72% dari responden melakukan pengurangan konsumsi non pangan disebabkan oleh harga kebutuhan pokok yang lebih tinggi
- 12% dari responden menyatakan melakukan pengurangan konsumsi non pangan disebabkan oleh pendapatan yang menurun dalam 6 bulan terakhir
- 11% dari responden mengkonfirmasi melakukan pengurangan konsumsi non pangan disebabkan oleh adanya faktor lain yaitu belum membutuhkan
- 5% dari responden menyatakan melakukan pengurangan konsumsi non pangan disebabkan oleh pendapatan yang akan menurun pada bulan-bulan berikutnya.

Adapun jenis konsumsi yang akan dikurangi oleh konsumen RT terutama adalah konsumsi *entertainment* (49%) dan konsumsi barang tahan lama (47%) serta konsumsi transportasi (4%). Bila di review lebih lanjut, sejumlah 23% responden yang memilih melakukan penurunan konsumsi transportasi, dengan *range* penurunan terutama sebesar 0-10% (83%), sementara itu 30% responden memillih untuk menurunkan konsumsi barang tahan lama, dengan *range* penurunan terutama 20%-40% (42%), sedangkan 32% responden yang memilih menurunkan konsumsi *entertainment* dengan *range* penurunan terutama 11%-20%, sedangkan 14% responden yang memilih mengurangi konsumsi lainnya dengan *range* penurunan terbanyak dipilih adalah 0-10%.



Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah

Grafik 3 Proporsi Responden (Konsumen RT) Yang Mengurangi dan Tidak Mengurangi Konsumsi Non Pangan Karena Peningkatan/ Penurunan Pendapatan

Selanjutnya bila terjadi kepastian penurunan pendapatan 6 bulan ke depan, konsumen akan melakukan penurunan konsumsi non pangan. Penurunan pendapatan dalam 6 bulan kedepan, akan menyebabkan konsumen akan menjadikan penurunan konsumsi non pangan sebagai pilihan utama yang dipilih responden (74%), hanya 26% yang akan tetap mempertahankan tingkat konsumsi non pangan dengan pertimbangan penurunan konsumsi akan dilakukan pada saat pendapatan menurun. Hampir semua jenis konsumsi akan dilakukan pengurangan, bila diprakirakan akan terjadi penurunan pendapatan, dengan pengurangan utama dan terbesar adalah konsumsi barang tahan lama (26%) dengan *range* penurunan terbesar yaitu 20-40% dan konsumsi *entertainment* (26%) dengan *range* penurunan mencapai 11%-20%. Sementara itu, pengurangan konsumsi transportasi dan konsumsi lainnya dipilih masing-masing sebesar 24% oleh konsumen rumah tangga, dengan *range* penurunan konsumsi relatif kecil yaitu 0-10%. Konsumsi konsumen rumah tangga juga ternyata tidak terlalu sensitif terhadap adanya penurunan pendapatan. Kondisi ini terkonfirmasi dari 69% responden yang mengkonfirmasi baru akan melakukan penurunan konsumsi non pangan bila terjadi penurunan pendapatan lebih dari 20%.

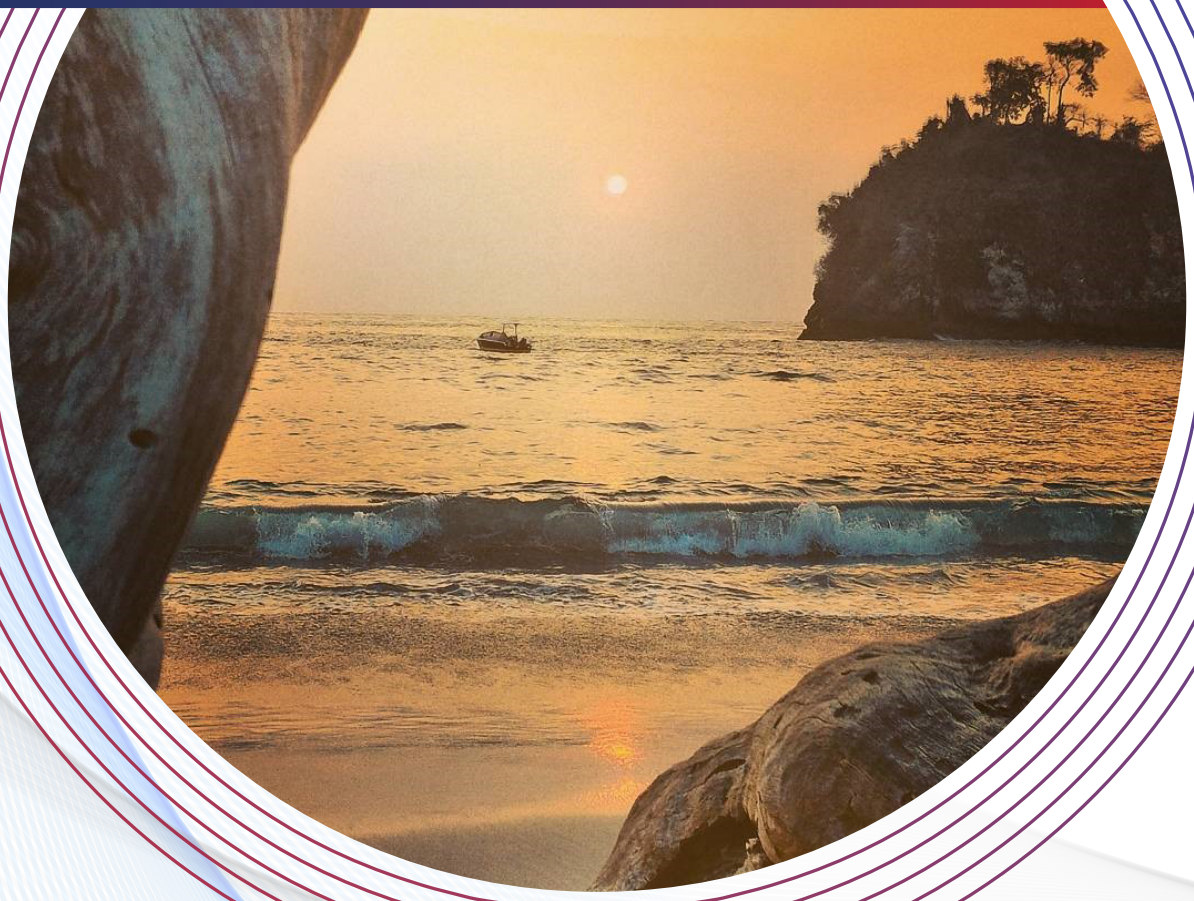
Apabila terjadi peningkatan pendapatan, konsumen RT ternyata tidak secara langsung menaikkan pendapatan. Bila terjadi peningkatan pendapatan dalam 6 bulan kedepan, konsumen rumah tangga ternyata tidak secara langsung merespon dengan meningkatkan konsumsi non pangan, terkonfirmasi dari hanya 8% responden yang menjawab akan menaikkan konsumsi non pangan, sementara sisanya sebesar 92% mengkonfirmasi tidak akan menaikkan konsumsi non pangan meskipun ada peningkatan pendapatan, dengan alasan antara lain:

- Karena belum membutuhkan
- Untuk memenuhi kebutuhan lain, antara lain pembayaran utang
- Untuk ditabung dan berjaga-jaga

Meksipun demikian, responden yang menjawab tidak akan menaikkan konsumsi non pangan, mengkonfirmasi masih terdapat peluang untuk meningkatkan konsumsi pangan, terutama pada 3-5 bulan ke depan (36%), 1-2 bulan ke depan (34%) maupun tepat pada saat terjadinya pendapatan naik (30%).

BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM KEUANGAN & PENGELOLAAN UANG RUPIAH



Transaksai tunai pada triwulan III 2017 tercatat mengalami net inflow sejalan dengan pola historisnya. Sementara itu di periode yang sama, transaksi SKNBI meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, baik secara nominal maupun volume. Sejalan dengan itu, perputaran kliring juga menunjukkan peningkatan.

*Foto oleh: Agus Mulyawan Dana
(Crystal Bay - Nusa Penida)





5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI BALI

Sistem pembayaran di Indonesia terdiri dari sistem pembayaran tunai dan non tunai. Pelaksanaan kegiatan sistem pembayaran tunai ditujukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan uang Rupiah yang layak edar kepada masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan tepat waktu. Sedangkan sistem pembayaran non tunai ditujukan untuk menyediakan sistem dan infrastruktur yang handal dan aman dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian.

5.1.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai

Transaksi pembayaran tunai di Bank Indonesia dapat diketahui melalui beberapa indikator, yang terdiri dari jumlah aliran uang keluar dari Bank Indonesia Bali ke perbankan (*outflow*), jumlah aliran uang masuk dari perbankan ke Bank Indonesia Bali (*inflow*), serta kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dan uang yang tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah.

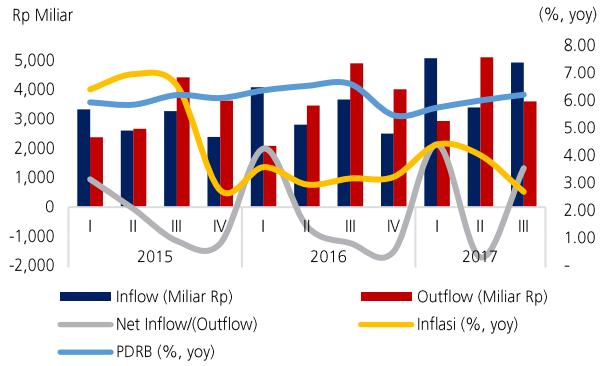
5.1.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (*Inflow/Outflow*)

Perkembangan kinerja transaksi tunai di Bali pada triwulan III 2017 tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi yang terjadi sepanjang triwulan III 2017. Seiring dengan telah selesainya periode perayaan keagamaan pada triwulan II 2017 yaitu momentum Ramadhan dan Idul Fitri serta awal liburan sekolah, menyebabkan terjadinya pembalikan aliran dana tunai dari masyarakat melalui perbankan kembali masuk ke Bank Indonesia. Kondisi ini terkonfirmasi dari perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan III 2017 yang menunjukkan terjadinya *net inflow* sebesar Rp 1,3 triliun. Hal ini mengindikasikan uang yang masuk ke Bank Indonesia dari perbankan lebih besar dibanding uang yang keluar. Nilai nominal *inflow* pada triwulan III 2017 mencapai Rp4,9 triliun atau meningkat sebesar 27,2% (qtq) dibandingkan dengan triwulan II 2017 yang tercatat sebesar Rp3,9 triliun (-15,28% qtq). Sementara itu, perkembangan nominal *outflow* pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp3,6 triliun atau turun sebesar 38,2% (qtq) dibandingkan triwulan II 2017 yang sebesar Rp Rp 5,8 triliun (46,51% qtq). Terjadinya *net inflow* pada periode triwulan III 2017 sejalan dengan pola historisnya dan seiring dengan kecenderungan masyarakat untuk mengurangi pengeluaran setelah periode sebelumnya mengalami peningkatan konsumsi, yang didorong oleh momentum Ramadhan, perayaan Idul Fitri dan periode awal liburan sekolah.

Peningkatan kinerja ekonomi Bali dari 6,01% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi 6,22% (yoy) pada triwulan laporan yang didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang tumbuh dari 3,77% (yoy) pada triwulan II 2017 menjadi 4,43% (yoy), belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan arus uang tunai ke luar dari Bank Indonesia ke masyarakat melalui perbankan. Selain itu, inflasi pada triwulan III 2017 yang juga menunjukkan penurunan signifikan dari 4,02% (yoy) menjadi 2,69% (yoy) semakin menahan kebutuhan masyarakat akan terhadap uang tunai.

Tabel 5.1 Perkembangan *Inflow – Outflow* Provinsi Bali (Miliar Rupiah)

INDIKATOR	2014				2015				2016				2017		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Inflow	3.331	2.607	3.269	2.392	4.086	2.810	3.669	2.507	5.076	3.395	5.287	4.157	4.575	3.876	4.929
Outflow	2.382	2.669	4.422	3.630	2.089	3.464	4.899	4.018	2.937	5.107	5.127	4.969	3.974	5.822	3.601
Net Inflow/(Outflow)	949	(62)	(1.153)	(1.238)	1.996	(654)	(1.230)	(1.512)	2.138	(1.712)	160	(812)	601	(1.946)	1.328
Penukaran	84	81	93,7	93	64,29	16	17	18	21	21	19	30	20	18	15
Temuan Uang Palsu (lembar)	1.155	1.001	986	1591	1.477	882	1.013	1.372	1.934	1.409	1.029	1.222	1.055	1.509	1.406
Frekuensi Kas Keliling	9	9	15	14	17	27	20	22	18	26	22	34	24	21	15



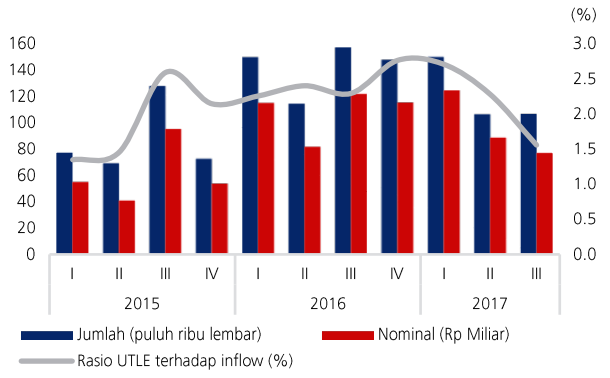
Grafik 5.1 Pergerakan *Inflow, Outflow, Netflow,* Inflasi dan PDRB

Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, nominal *outflow* triwulan III 2017 tercatat mengalami penurunan sebesar 29,76% (yoy). Nominal *outflow* yang lebih rendah disebabkan oleh perayaan Idul Fitri yang berlangsung pada triwulan II 2017, tidak seperti tahun sebelumnya, Idul Fitri berlangsung pada awal triwulan III 2016. Sementara itu, nominal *inflow* pada triwulan III 2017 tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,77% (yoy) bila dibandingkan dengan triwulan II 2017 (14,18%, yoy).

5.1.1.2. Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Sebagaimana diketahui, selain pengelolaan aliran uang kartal yang masuk dan keluar (*inflow* dan *outflow*), Bank Indonesia juga memiliki tugas dalam sistem pembayaran tunai yaitu memelihara kualitas uang kartal yang diedarkan kepada masyarakat yang dikenal dengan *Clean Money Policy*, diantaranya melalui pemusanahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) secara rutin.

Nominal UTLE yang diterima Bank Indonesia pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 107 ribu lembar atau mencapai Rp77 miliar. Nilai nominal tersebut mengalami penurunan sebesar 13,1% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, bila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya nilai nominal tersebut turun sebesar 36,7% (yoy). Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kualitas uang kartal yang beredar di masyarakat adalah rasio perbandingan UTLE terhadap *inflow*. Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas uang layak edar di masyarakat termasuk melaui kerjasama dengan perbankan, rasio UTLE terhadap *inflow* di Provinsi Bali juga terus menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini tergambar dari rasio UTLE terhadap *inflow* sebesar 2,7% pada triwulan I 2017 selanjutnya turun menjadi 2,3% pada triwulan II 2017 dan pada triwulan laporan mencapai level 1,6%. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016, rasio ini juga mengalami penurunan yang tercatat sebesar 2,3%. Hal ini mencerminkan semakin membaiknya kualitas fisik uang di masyarakat. Karena meskipun terjadi peningkatan *inflow* yang signifikan pada triwulan III 2017, namun jumlah nominal UTLE yang diterima tetap mengalami penurunan.



Grafik 5.2 Rasio UTLE terhadap Inflow di Provinsi Bali

5.1.2. Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai

5.1.2.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

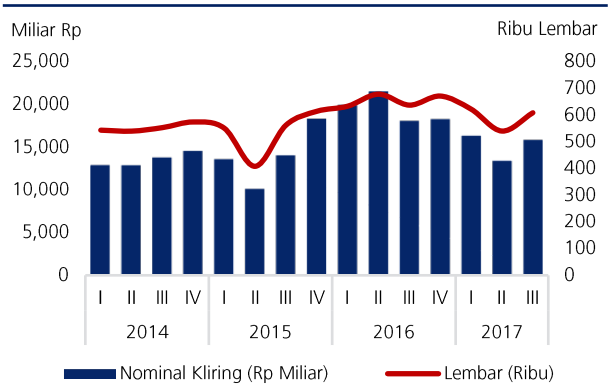
SKNBI merupakan sarana transfer dana non tunai secara ritel selain RTGS dengan nominal transaksi yang lebih kecil, yakni dengan nilai di bawah Rp100 juta. Di Provinsi Bali, penyelenggaraan kegiatan kliring dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

Tabel 5.2 Perkembangan Indikator SKNBI di Bali

INDIKATOR	2014				2015				2016				2017		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
PERPUTARAN KLIRING															
Lembar (ribu)	543	540	553	574	551	408	562	614	633	678	637	671	622	540	609
- Rata-rata lembar per hari (ribu)	8,91	9,47	9,06	9,11	8,89	6,69	9,37	9,75	10,74	10,78	10,80	10,65	10,20	10,19	9,82
Nominal Kliring (Rp Miliar)	12.853	12.833	13.753	14.507	13.548	10.096	14.002	18.258	19.865	21.429	18.005	18.223	16.270	13.370	15.804
- Rata-rata nominal per hari (Rp Miliar)	211	225	225	230	219	166	233	290	337	335	305	289	267	252	255
TOLAKAN CEK/BG KOSONG															
Lembar (ribu)	8,06	9,09	8,56	7,60	8,05	7,95	8,37	7,57	8,25	7,86	7,32	7,43	7,91	7,45	6,06
- Rata-rata lembar per hari (ribu)	0,13	0,16	0,14	0,12	0,13	0,13	0,14	0,12	0,14	0,13	0,12	0,12	0,13	0,14	0,10
Nominal Cek/BG Kosong (Rp Miliar)	321	314	522	640	356	354	343	310	430	422	268	269	423	202	187
- Rata-rata nominal per hari (Rp Miliar)	5,26	5,51	8,56	10,15	5,74	5,80	5,72	4,92	7,33	6,73	4,54	4,27	6,93	3,81	3,02
PERTUMBUHAN PERPUTARAN KLIRING															
- Lembar (yoy, %)	2,61	-0,23	5,30	3,76	1,39	-24,41	1,64	6,97	14,91	66,18	13,35	9,28	-1,74	-20,35	-4,47
- Nominal Kliring (yoy, %)	9,08	2,94	5,73	6,54	5,41	-21,33	1,81	25,86	46,62	112,25	28,59	-0,19	-18,10	-37,61	-12,22
PERTUMBUHAN TOLAKAN CEK/BG KOSONG															
- Lembar (yoy, %)	-1,3	8,07	10,44	-9,37	-0,08	-12,58	-2,29	-0,41	2,47	-1,13	-12,52	-1,88	-4,15	-5,22	-17,28
- Nominal Kliring (yoy, %)	-0,5	-8,77	59,99	56,13	10,80	12,81	-34,33	-51,53	20,88	19,21	-21,87	-13,23	-1,63	-52,13	-30,24

Untuk meningkatkan pelayanan transaksi kliring kepada nasabah, Bank Indonesia juga membuka kesempatan bagi institusi yang ingin menjadi Penyelenggara Pertukaran Warkat. Saat ini, di Bali telah terdapat 2 (dua) tempat perturakaran warkat yaitu Bank Indonesia di Denpasar dan Bank Mandiri di Singaraja.

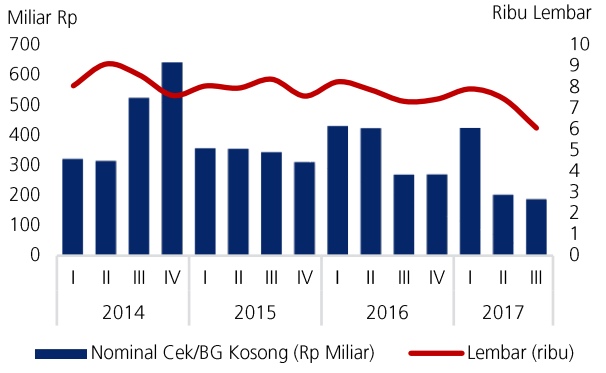
Di tengah tren transaksi tunai yang cenderung menurun, transaksi non tunai yang antara lain tercermin melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Pada triwulan III 2017, transaksi SKNBI meningkat dibandingkan triwulan sebelummnya, baik secara nominal maupun volume. Perputaran kliring secara nominal pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp15,8 triliun atau meningkat sebesar 18,2% (qtq) dibandingkan dengan triwulan II 2017 yang tercatat sejumlah Rp13,37 triliun (-17,82%, qtq). Sejalan dengan itu, volume transaksi kliring juga menunjukkan peningkatan pada triwulan III 2017 yang tercatat sebesar 608.542 lembar atau meningkat sebesar 12,79% (qtq) dibanding triwulan II 2017 yang sebesar 539.503 lembar (-13,18%, qtq). Apabila dibandingkan kondisi tahun 2016, nilai nominal perputaran kliring dan volumenya mengalami penurunan. Secara tahunan, nilai nominal kliring turun sebesar 13,27% (yoy) dari Rp18 triliun, sejalan dengan itu volume kliring juga mengalami penurunan sebesar 9,23% (yoy) dari 637 ribu lembar. Ditengarai penurunan tersebut merupakan dampak lanjutan dari kebijakan penurunan batas minimal nilai transaksi melalui BI-RTGS dari Rp500 juta kembali menjadi Rp100 juta sejak Juli 2016. Selain itu, dikeluarkannya PBI 18/43/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong pada Desember 2016, diprakirakan ikut mempengaruhi kegiatan transaksi kliring debet (Cek dan/atau Bilyet Giro), di mana transaksi kliring debet menjadi lebih ketat.



Grafik 5.3 Perkembangan Nominal dan Volume Kliring di Bali

5.1.2.2. Perkembangan Transaksi Cek/BG Kosong

Di tengah tren peningkatan transaksi kliring pada triwulan III 2017, jumlah tolakan cek/bilyet giro kosong mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan II 2017, baik nominal maupun volume. Pada triwulan III 2017, nominal tolakan cek/bilyet giro kosong tercatat sebesar Rp 187 miliar atau turun sebesar -7,4% (qtq) dibanding nominal tolakan triwulan sebelumnya (Rp 202 miliar). Sejalan dengan itu, volume tolakan cek/bilyet giro kosong juga mengalami penurunan sebesar turun 18,65% (qtq) yaitu dari 7.450 lembar pada triwulan II 2017 menjadi sebanyak 6.055 lembar. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, perkembangan nominal dan volume cek/bilyet giro kosong juga mengalami penurunan. Dari sisi nominal tercatat turun sebesar 30,22% (yoy), sementara itu volume tercatat turun sebesar 17,21% (yoy).



Grafik 5.4 Perkembangan Cek dan Bilyet Giro Kosong di Bali

5.2. Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

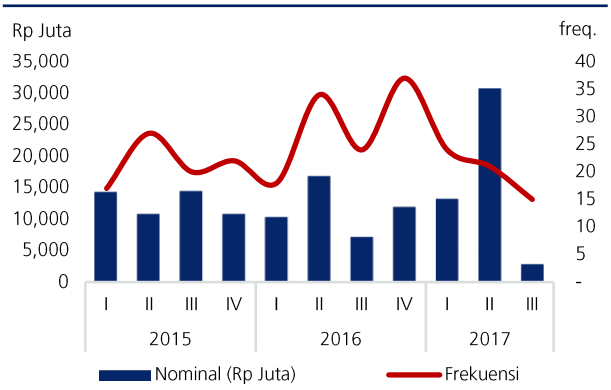
5.2.1. Penyediaan Uang Layak Edar dan Penanganan Uang Tidak Asli

Bank Indonesia selalu melakukan berbagai upaya bersama *stakeholders* lainnya dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas uang Rupiah (disebut dengan *soil level*) ditengah masyarakat. Secara umum, ada dua jenis layanan kas yang dilakukan Bank Indonesia untuk mencapai *Clean Money Policy*, yaitu melalui layanan kas di dalam kantor dan layanan kas di luar kantor. Kedua layanan kas ini dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia dan 43 Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Layanan kas di dalam kantor BI melayani penyetoran dan pembayaran oleh bank umum, maupun penukaran uang langsung dengan masyarakat pada jadwal tertentu. Selain menukarkan uang langsung ke Kantor Perwakilan BI di Denpasar, masyarakat juga dapat menukar di bank umum. Layanan kas ini dilakukan BI untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar. Sepanjang bank memiliki persediaan uang Rupiah yang layak edar yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka bank tidak boleh menolak permintaan penukaran dari masyarakat. Namun kondisi geografis yang cukup luas di Bali menyebabkan masyarakat di daerah terpencil tetap kesulitan memperoleh uang dalam kualitas baik dan pecahan yang sesuai. Sebagai salah satu solusi, BI juga berupaya membuka layanan kas di luar kantor, yang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kas Titipan. BI bekerjasama dengan beberapa bank umum dengan cara menitipkan Uang Layak Edar (ULE) kepada Bank Pengelola, agar masyarakat dapat menukarkan UTLE pada bank tersebut. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2016 di wilayah Singaraja, untuk meningkatkan kualitas uang layak edar di wilayah Singaraja dan sekitarnya. Pelaksanaan kas titipan diikuti oleh 8 anggota bank peserta dan 1 bank pengelola yang juga merangkap anggota di Wilayah Singaraja.
2. Kas Keliling. Layanan kas ini dilaksanakan oleh BI secara langsung, dimana BI secara rutin mengunjungi beberapa tempat yang menjadi

pusat keramaian masyarakat (seperti pasar dan pusat perbelanjaan) untuk melayani penukaran uang. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang hidup di *remote areas* yang sulit dijangkau oleh kas titipan, tetap dapat dilayani dengan baik. Tidak hanya melayani penukaran untuk masyarakat, BI Denpasar juga mengoptimalkan peran kas keliling melalui layanan penukaran uang kepada KUPVA, *retailer*, hingga menyasar para pedagang/pelaku usaha di pasar tradisional, termasuk bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro (LPD, Koperasi dan BUMDes). BI juga melayani kas keliling ke daerah terpencil yaitu di Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Adapun kegiatan kas keliling pada triwulan III 2017 di Bali, telah dilaksanakan sejumlah 15 kali. Frekuensi kegiatan ini mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 21 kali. Frekuensi kas keliling yang menunjukkan tren penurunan selama 2017 terutama disumbang oleh keberadaan kas titipan di Singaraja yang dilaksanakan oleh bank umum. Bank umum pengelola kas titipan pun melaksanakan kas keliling untuk wilayah Buleleng dan Jembrana. Selain itu, jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, kegiatan kas keliling juga mengalami penurunan yang tercatat 22 kali. Sejalan dengan penurunan frekuensi, nilai nominal kas keliling pada triwulan laporan juga mengalami penurunan, dari sebesar Rp 30,7 miliar pada sebelumnya menjadi Rp 2,9 miliar pada triwulan III 2017. Sementara itu, pada triwulan III 2016 nilai nominal kas keliling tercatat sebesar Rp 7,2 miliar. Selain sebagai sarana penukaran uang, kas keliling senantiasa dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah.

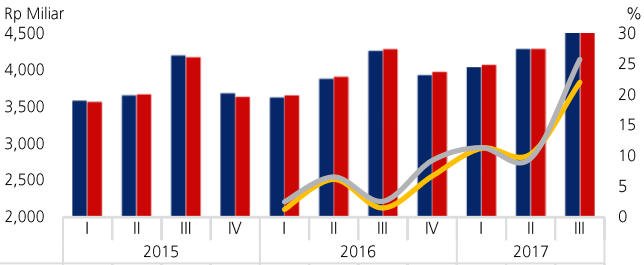


Grafik 5.5 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling di Bali

Selain layanan kas, BI juga berupaya mempermudah operasional antar bank untuk mendapatkan akses Uang Layak Edar (ULE), yang dilakukan melalui program Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) khususnya di wilayah Denpasar. Sejak tahun 2012, perbankan yang membutuhkan uang layak edar tidak harus mengambil ULE ke Bank Indonesia karena telah difasilitasi melalui sistem TUKAB. Melalui sistem ini, bank dapat bertransaksi dengan bank lain yang memiliki ketersediaan ULE yang cukup. Dalam upaya untuk menjamin pengedaran uang Rupiah yang berkualitas, BI juga mengoptimalkan peran perbankan dalam rangka menjaga kualitas pengelolaan uang Rupiah termasuk dengan memastikan bahwa uang yang diberikan kepada nasabah dalam kondisi layak edar. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan tersebut, diberikan standar tata cara sortasi uang kertas kepada teller perbankan dan melakukan koordinasi serta evaluasi layanan kas perbankan secara kontinu.

5.2.2. Perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran

Nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali pada triwulan III 2017 menunjukkan peningkatan 23,92% (yoy) atau 23,51% (qtq). Nominal transaksi jual-beli valas pada triwulan laporan mencapai Rp10,58 triliun yang terdiri dari transaksi pembelian



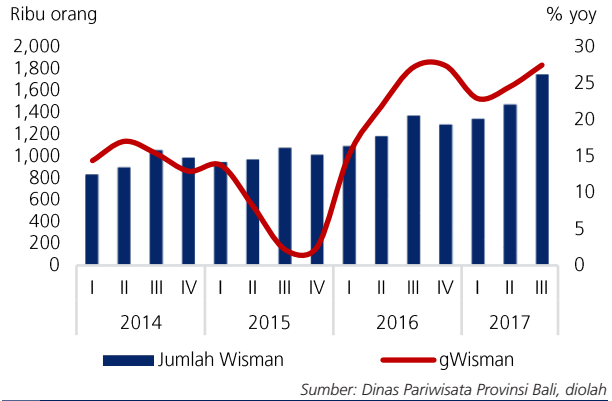
	2015				2016				2017		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Pembelian UKA & TC	3,585	3,657	4,196	3,685	3,630	3,883	4,259	3,932	4,039	4,283	5,198
Penjualan UKA & TC	3,568	3,669	4,174	3,639	3,657	3,910	4,282	3,976	4,073	4,286	5,386
Growth Pembelian (%, yoy)					1.26	6.18	1.50	6.70	11.26	10.30	22.04
Growth Penjualan (%, yoy)					2.50	6.57	2.59	9.26	11.37	9.61	25.79

Sumber: LKPBUv2, diolah

Grafik 5.6 Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali

sebesar Rp 5,20 triliun dan transaksi penjualan sebesar Rp 5,39 triliun.

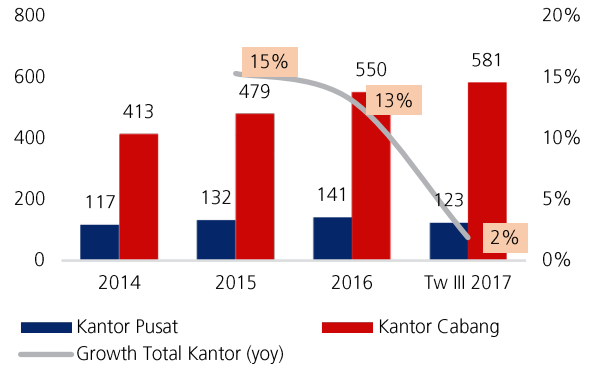
Peningkatan transaksi KUPVA pada triwulan III 2017 sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali yang pada triwulan laporan merupakan periode *peak season* pariwisata di Bali. Jumlah kunjungan wisman ke Bali pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 27,51% (yoy) dengan 1.744.450 orang, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 24,54% (yoy). Sementara itu bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah kunjungan wisman ke Bali juga lebih tinggi, dimana pada triwulan II 2016 jumlah wisman tercatat sebesar 1.368.082.



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

Grafik 5.7 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman di Provinsi Bali

Selain didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisman, peningkatan jumlah transaksi jual-beli valas juga didorong oleh bertambahnya jumlah jaringan kantor KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali. Berdasarkan data jumlah kantor yang berhasil dihimpun sampai dengan periode September 2017, jumlah jaringan kantor KUPVA BB berizin tercatat 704 kantor, yang terdiri dari 123 Kantor Pusat (KP) dan 581 Kantor Cabang (KC). Jika dibandingkan dengan periode akhir tahun 2016, perkembangan jumlah jaringan tersebut bertambah sebanyak 13 kantor, yang merupakan penambahan 31 KC dan pengurangan 18 KP.



Sumber: BISKOMVA, diolah

Grafik 5.8 Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali

Bertambahnya jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali juga didorong oleh berbagai upaya yang dilakukan KPwBI Provinsi Bali untuk meningkatkan akses kemudahan dalam melakukan penukaran valuta asing di Bali dan dalam rangka mendukung implementasi aturan terkait dengan penggunaan uang Rupiah di Wilayah NKRI:

1. Sosialisasi dan edukasi kepada asosiasi, pelaku usaha, aparat penegak hukum, dan pihak media terkait kewajiban bagi seluruh KUPVA BB untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia, sebagai salah satu bentuk pengembangan KUPVA berizin di Bali. Sosialisasi ini telah dilakukan antaranya ke Desa Adat Sanur, Legian, Seminyak, Kerobokan, Tanjung Benoa, dan Bualu.
2. Penandatanganan pernyataan bersama antara KPwBI Provinsi Bali dengan Desa Adat terkait KUPVA BB untuk bekerjasama memberantas KUPVA BB yang tidak berizin
3. Pemasangan iklan di media cetak lokal di Provinsi Bali terkait proses perizinan KUPVA BB
4. Penyampaian surat teguran kepada KUPVA BB Tidak Berizin agar mengajukan izin kepada Bank Indonesia.
5. Pembuatan Website *www.balimoneychangerbali.com* untuk memberikan informasi mengenai lokasi KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali
6. Menyebarkan brosur himbauan penukaran valas pada KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali yang disertai dengan daftar alamat KUPVA Berizin dan modus Kejahatan KUPVA (dalam 3 bahasa Inggris, Mandarin, dan Indonesia)
7. Selain upaya untuk mengembangkan KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali, BI juga melakukan upaya untuk menertibkan usaha KUPVA BB Tidak Berizin. Sejak 2016, BI telah melakukan sidak KUPVA BB Tidak Berizin bersama dengan POLDA Bali. Pada periode April hingga Juni 2017, telah dilakukan penertiban KUPVA BB dengan total jumlah yang terjaring sebanyak 60 KUPVA BB.

Kantor Perwakilan Bank Indoensia Provinsi Bali juga senantiasa berinovasi, agar upaya penertiban KUPVA ridak berizin Bali bersifat pencegahan dan bukan penindakan, yang dilakukan antara lain melalui peluncuran aplikasi SIKUPVA versi 2.0. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu wisatawan mengenai lokasi dan kurs yang ditawarkan KUPVA BB Berizin di Bali, serta terhindar dari penipuan yang kerap dilakukan oleh KUPVA BB Tidak Berizin. SIKUPVA versi 2.0 dilengkapi dengan informasi nilai tukar valas, daftar Penyelenggara KUPVA dalam bentuk tabel dibawah peta, menu *search* atau *filter* berdasarkan nama KUPVA, Kabupaten, Kecamatan atau Kelurahan.

5.2.3. Perkembangan Inklusi Keuangan Provinsi Bali

Keuangan inklusif merupakan salah satu upaya dari Bank Indonesia dalam rangka mendukung efektivitas fungsi dan tugas Bank Indonesia baik dari sisi moneter, sistem pembayaran dan maupun makroprudensial. Dari sisi stabilitas sistem keuangan, keuangan Inklusif membantu menurunkan tekanan dari sisi likuiditas (*liquidity risk*) dan risiko kredit (*credit risk*) di sektor perbankan. Dari sisi likuiditas, perbankan berupaya untuk meningkatkan porsi penghimpunan dananya dari segmen retail karena sifatnya yang relatif lebih stabil meskipun dalam kondisi *shock*. Sementara itu pada sisi kredit, terbukanya segmen retail baru yaitu kredit mikro dan kecil merupakan salah satu strategi diversifikasi portfolio dan risiko kredit. Guna mendukung hal tersebut, dilaksanakan program-program pengembangan keuangan inklusif berupa kegiatan edukasi keuangan dan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat. Pada akhirnya, *responsible finance* bagi masyarakat diharapkan dapat muncul.

Dari sisi kebijakan moneter, program pengembangan keuangan inklusif diharapkan meningkatkan efektivitas transmisi *policy rate*. Hal ini mengingat transmisi *policy rate* terutama dilakukan melalui

perbankan. Sehingga, bila tingkat keuangan inklusif di masyarakat berkembang akan membantu efektivitas kebijakan moneter dan tidak ada lagi masyarakat yang terkena *second round effect*[1] dari kebijakan tersebut.

Sementara itu, bila ditinjau dari sisi sistem pembayaran, pengembangan keuangan inklusif akan dapat mendukung semakin luas dan lancarnya jangkauan sistem pembayaran ke seluruh pelosok daerah sehingga dapat digunakan oleh seluruh penduduk dimanapun berada. Di samping itu, program keuangan inklusif juga akan membantu terwujudnya program *less cash society* sehingga pada gilirannya akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian.

Bank Indonesia memiliki sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat inklusifitas keuangan pada suatu daerah atau wilayah, yaitu Indeks Keuangan Inklusif (IKI)[2]. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator yang tersedia di sektor perbankan. Pada akhirnya IKI akan dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif. Adapun ketiga dimensi yang menjadi pendekatan untuk mengukur IKI meliputi: akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*) dari layanan perbankan.

Dimensi Akses[3]

Beberapa indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses untuk IKI meliputi:

1. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa
2. Jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) per 100.000 penduduk dewasa[4]
3. Jumlah kantor bank[5] per 1.000 km^2
4. Jumlah ATM per 1.000 km^2

Pada triwulan III 2017, rasio jumlah kantor layanan bank per 100.000 penduduk di Provinsi Bali tercatat sebesar 32, dengan rasio jumlah ATM sebesar 96. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 32 kantor layanan bank dan 96 jaringan ATM yang siap untuk melayani 100.000 penduduk dewasa di Bali. Bila dianalisis lebih lanjut secara spasial, Kabupaten Bangli yang merupakan daerah dengan penduduk dewasa terendah, juga memiliki rasio jumlah kantor layanan dan ATM terendah. Selain Bangli, dua wilayah terendah lainnya untuk dimensi akses adalah Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng. Selain itu berdasarkan akses dimensi tersebut, diketahui bahwa daerah yang menjadi pusat sentra bisnis maupun wisata seperti Badung, Denpasar dan Gianyar memiliki nilai dimensi akses yang lebih tinggi untuk pelayanan perbankan dibandingkan daerah lainnya di Bali. Dengan kondisi tersebut, perbankan dan pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian khusus dalam rangka peningkatan layanan finansial bagi penduduk pada ketiga wilayah dengan nilai yang rendah untuk akses dimensi layanan bank. Keterbatasan kantor layanan bank dan ATM menyebabkan tingginya rasio masyarakat *unbanked* di ketiga wilayah tersebut. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat

1 second round effect adalah dampak lanjutan dari kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia

2 IKI adalah salah satu alternatif cara dalam pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multi-dimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan

3 Dimensi Akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM, dan lain-lain)

4 Penduduk dewasa adalah semua penduduk di suatu negara atau provinsi atau kabupaten/kota yang berusia di atas 15 tahun

5 Kantor Bank adalah sebagai seluruh jaringan/unit kantor bank umum dan BPR yang tercatat dapat memberikan layanan keuangan kepada nasabah secara fisik dengan kantor utamanya, antara lain meliputi: Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, Unit Usaha Syariah, Kas Mobil, Payment Point, Agency, dan Deposit Taking Company (DTC).

Tabel 5.3 Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 100.000 Penduduk

Provinsi/Kota/ Kabupaten	Jumlah Layanan Bank	Jumlah ATM	Rasio Jumlah Kantor	Rasio Jumlah ATM
Provinsi Bali	1022	3061	32	96
Kota Denpasar	298	1199	44	176
Kab. Badung	259	1083	54	227
Kab. Bangli	26	27	15	16
Kab. Buleleng	83	144	17	29
Kab. Gianyar	128	288	34	76
Kab. Jembrana	41	63	20	30
Kab. Karangasem	49	76	16	24
Kab. Klungkung	34	41	25	31
Kab. Tabanan	104	140	31	42

menjadi unbanked, baik dari sisi *supply* (penyedia jasa) maupun *demand* (masyarakat), yaitu: 1). *Price barrier* (mahal), 2). *Information barrier* (tidak mengetahui), 3). *Design product barrier* (produk yang kurang cocok) dan 4). *Channel barrier* (sarana dan prasarana yang kurang sesuai atau memadai).

Sementara itu bila ditinjau dari cakupan luas wilayahnya, rasio jumlah kantor layanan bank per 1.000 km² di Bali pada triwulan III 2017 mencapai 181 layanan kantor dan rasio jumlah ATM mencapai 543. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap 1.000 km² wilayah di Bali dilayani sejumlah 181 kantor layanan bank dan 543 ATM. Apabila ditinjau secara spasial, rasio jumlah kantor layanan dan ATM perbankan per 1.000 km² terendah berada di Kabupaten Tabanan. Dua kabupaten lainnya dengan nilai dimensi akses yang rendah adalah Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli. Sementara itu, daerah tingkat II dengan nilai dimensi akses yang tinggi khususnya yang terkait luasan wilayah adalah Kota Denpasar (814 kantor layanan dan 1.096 ATM) dan Kabupaten Jembrana (308 kantor layanan dan 1.287 jaringan ATM).

Tabel 5.4 Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 1000 KM²

Provinsi/Kota/ Kabupaten	Jumlah Layanan Bank	Jumlah ATM	Rasio Jumlah Kantor	Rasio Jumlah ATM
Provinsi Bali	1022	3061	181	543
Kab. Buleleng	298	1199	218	878
Kab. Jembrana	259	1083	308	1287
Kab. Tabanan	26	27	31	32
Kab. Badung	83	144	198	344
Kab. Gianyar	128	288	348	783
Kab. Klungkung	41	63	130	200
Kab. Bangli	49	76	94	146
Kab. Karangasem	34	41	40	49
Kota Denpasar	104	140	814	1096

Dimensi Penggunaan[6]

Beberapa indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi penggunaan meliputi:

1. Jumlah rekening dana pihak ketiga (deposito, giro, tabungan) per 1.000 penduduk dewasa
2. Jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa

Berdasarkan data yang dihimpun pada triwulan III 2017, rasio jumlah rekening simpanan (tabungan, deposito dan giro) per 1.000 penduduk dewasa di Provinsi Bali tercatat sebesar 1.392, meningkat dibandingkan dengan rasio pada triwulan II 2017 (1.345) dan rasio triwulan III 2016 (1.374). Kondisi ini menunjukkan terjadinya peningkatan/penambahan jumlah rekening simpanan yang dimiliki oleh penduduk dewasa di bank sepanjang triwulan III 2017 dan juga mencerminkan peningkatan inklusifitas keuangan di Provinsi Bali. Nilai rasio lebih dari 1.000 menandakan keberadaan penduduk dewasa yang memiliki lebih dari satu rekening simpanan. Secara spasial, peningkatan rasio jumlah rekening simpanan ini terjadi di seluruh wilayah Bali pada triwulan III 2017, dengan peningkatan tertinggi terjadi di Kabupaten Buleleng. Namun demikian, masih terdapat wilayah di Bali dengan nilai rasio kurang dari 1.000, yaitu Kabupaten Tabanan, Klungkung, Bangli, dan Karangasem. Terjadinya peningkatan rasio jumlah rekening simpanan di Bali pada triwulan laporan, juga terkonfirmasi oleh hasil survei konsumen Bank Indonesia pada triwulan yang sama, yang menunjukkan terjadinya peningkatan alokasi pendapatan yang digunakan untuk menabung. Hal tersebut sejalan dengan pembayaran gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kecenderungan masyarakat untuk menahan laju konsumsinya dengan meningkatkan tabungan dalam rangka mempersiapan dana memasuki tahun ajaran baru sekolah maupun untuk berjaga-jaga.

Sejalan dengan peningkatan rasio jumlah rekening simpanan, rasio jumlah rekening kredit pada triwulan III 2017 juga mengalami peningkatan, yaitu dari sebelumnya 170 pada triwulan II 2017 dan 161 pada triwulan III 2016 menjadi 173. Namun demikian, masih terdapat daerah tingkat II yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan dan Gianyar yang mengalami penurunan rasio jumlah rekening kredit dan penurunan nominal kredit yang disalurkan seiring dengan telah selesainya beberapa proyek.

Tabel 5.5 Indikator *Banking Penetration*

Provinsi/Kota/ Kabupaten	Rasio Jumlah Rekening Kredit per Penduduk Dewasa			Rasio Jumlah Rekening Suimpanan per Penduduk Dewasa		
	TW-III 2016	TW-II 2017	TW-III 2017	TW-III 2016	TW-II 2017	TW-III 2017
Provinsi Bali	**161**	**170**	**173**	**1374**	**1345**	**1392**
Kab. Buleleng	106	264	291	795	1867	1968
Kab. Jembrana	178	118	113	2339	1441	1499
Kab. Tabanan	152	105	102	888	593	615
Kab. Badung	87	121	123	1345	1668	1717
Kab. Gianyar	111	325	306	782	2192	2279
Kab. Klungkung	155	128	131	938	733	758
Kab. Bangli	118	65	66	610	329	348
Kab. Karangasem	133	87	91	639	399	416
Kota Denpasar	306	324	335	2702	2605	2681

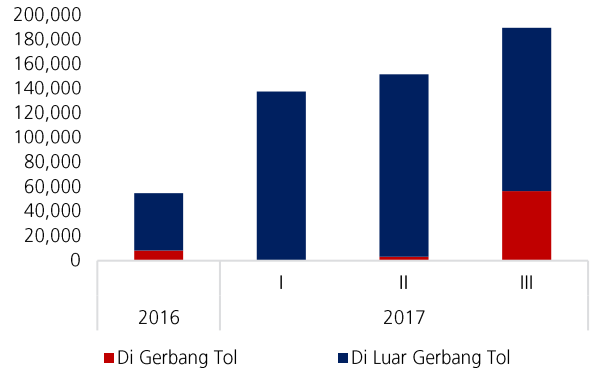
6 Dimensi penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan

5.2.4. Pengembangan Layanan Keuangan Non Tunai dan Elektronifikasi

Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan elektronifikasi transaksi pembayaran dan peningkatan infrastruktur sistem pembayaran di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan elektronifikasi jalan tol 100% pada bulan Oktober 2017. Upaya ini sesuai dengan amanat Presiden RI yang dituangkan dalam regulasi Peraturan Menteri PUPR No.16/PRT/M/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.

Mulai tanggal 1 Oktober 2017, pembayaran di Tol Bali Mandara sudah sepenuhnya menerapkan non-tunai (100% non-tunai). Jalan Tol Bali Mandara memiliki 3 (tiga) pintu gerbang, yakni Gerbang Tol Benoa, Gerbang Tol Nusa Dua dan Gerbang Tol Ngurah Rai. Jumlah Gardu Tol yang beroperasi di Jalan Tol Bali Mandara sebanyak 20 (dua puluh) unit Gardu Tol.

Pada triwulan III 2017, perkembangan transaksi uang elektronik mengalami peningkatan seiring dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri PUPR No.16/PRT/M/2017 dan persiapan masyarakat menyambut *Grand Launching (Kick Off)* 100% Non Tunai pada tanggal 1 Oktober 2017. Secara keseluruhan, pada triwulan III 2017 telah terjual 189.890 unit uang elektronik, lebih tinggi dibanding periode triwulan sebelumnya yang sebesar 151.927 unit. Berdasarkan lokasi penjualannya, sebanyak 70% uang elektronik terjual di luar gerbang tol. Namun demikian, penjualan uang elektronik di luar gerbang tol tersebut mengalami penurunan dalam perkembangannya.



Sumber: BISKOMVA, diolah

Grafik 5.9 Jumlah Kartu Elektronik yang Terjual di Bali

Kondisi ini didorong oleh pembelian uang elektronik di gerbang tol menyusul penerapan 100% non tunai jalan tol.

Selain penerapan 100% non-tunai di jalan tol, upaya mendorong perluasan elektronifikasi juga dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa *stakeholder* dalam menjajaki beberapa program elektronifikasi. Bank Indonesia bekerja sama dengan PT Angkasa Pura dalam mewujudkan program elektronikasi pada pembayaran parkir kendaraan bermotor di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Program elektronifikasi ini dikemas dalam "*Bali Card*" yakni kartu uang elektronik bagi wisatawan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembayaran transportasi dan tiket masuk lokasi wisata, serta keperluan lainnya. Dengan desain kartu bernuansa Bali diharapkan wisatawan dapat menggunakan kartu tersebut sebagai souvenir. Selain itu, program elektronifikasi juga telah dilakukan pada pembayaran tiket penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Benoa *(e-Port Card)*. *E-Port*

Tabel 5.6 Jumlah Gardu Tol Bali Mandara

No.	Nama Gerbang Tol	Jumlah Gardu Tol		
		Mobil	Sepeda Motor	Total
1	Gerbang Tol Benoa	4	3	7
2	Gerbang Tol Nusa Dua	4	2	6
3	Gerbang Tol Ngurah Rai	4	3	7
	TOTAL	12	8	20

Card ini juga dapat digunakan untuk berbelanja di *tenant/merchant* yang ada di Pelabuhan Benoa selain untuk pembayaran saat masuk pelabuhan. Dalam bidang transportasi, program elektronifikasi dilakukan dengan menyasar salah satu penyedia jasa transportasi, yaitu Blue Bird Group Bali. Masyarakat pengguna jasa transportasi publik khususnya taksi Blue Bird dapat menikmati pembayaran secara non tunai dengan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) dan Uang Elektronik.

Dengan terjalinnya kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*, implementasi non-tunai di pemerintahan juga telah diimplementasikan, baik untuk bagian penerimaan maupun pengeluaran daerah Provinsi Bali. Untuk penerimaan daerah, penerapan non-tunai telah dilaksanakan untuk penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak/Retribusi Daerah, PBB, BPHTB, dan industri perhotelan, hiburan dan restoran (PHR). Penerimaan secara nontunai ini menggunakan model *billing system* yang dapat dibayarkan via ATM ataupun *payment point* (dengan Bank BPD Bali sebagai *aggregator*). Sementara itu, pengeluaran daerah Provinsi Bali juga telah menerapkan elektronifikasi, yaitu menggunakan transfer atau pemindahbukuan pada rekening bank untuk pembayaran dan transaksi daerah. Pemprov Bali juga telah menerapkan komputerisasi yang tersambung secara *online* untuk pengelolaan APBD, sehingga pembuatan laporan keuangan seperti neraca dapat dilakukan seketika.

Sesuai dengan arahan Presiden mengenai transformasi penyaluran bansos secara non tunai, Bank Indonesia telah menerjemahkan hal tersebut ke dalam suatu model bisnis, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kebijakan penyaluran bansos non tunai baik dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan, pupuk, dan dana desa dinilai lebih efisien dibandingkan dengan bansos tunai. Oleh karena itu, Bank Indonesia sangat mendukung kebijakan tersebut karena dapat diterima tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi (6T). Melalui kebijakan ini, sedikitnya terdapat percepatan manfaat yang diterima oleh setiap penerima bansos sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif yang telah dicanangkan oleh Pemerintah melalui Nawa Cita, yaitu mewujudkan kedaulatan keuangan melalui kebijakan inklusif keuangan mencapai 50% penduduk sampai tahun 2019.

Dalam menyalurkan bansos non tunai tersebut, Bank Indonesia mendukung Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menyediakan LKD sebagai agen bank dan menggunakan instrumen kartu kombo atau dikenal sebagai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh Himbara. Kartu kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bansos baik PKH, PIP, bantuan pangan, dan lain-lain.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, penyaluran bantuan sosial dalam bentuk non tunai/ elektronik dapat dilakukan melalui mekanisme LKD, agen bank, atau e-warong (elektronik warung gotong royong). LKD merupakan pembayaran dan jasa keuangan yang bekerja sama dengan pihak ketiga (agen) dan menggunakan teknologi *mobile* dan berbasis daring (dalam jaringan *online*). Sedangkan e-warong merupakan agen bank, pedangang, dan/ atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/ pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantua Sosial bersama Bank Penyalur. Layanan-layanan ini mendukung perkembangan keuangan inklusif dan distribusi yang efektif dari dana bantuan pemerintah ke masyarakat (G2P).

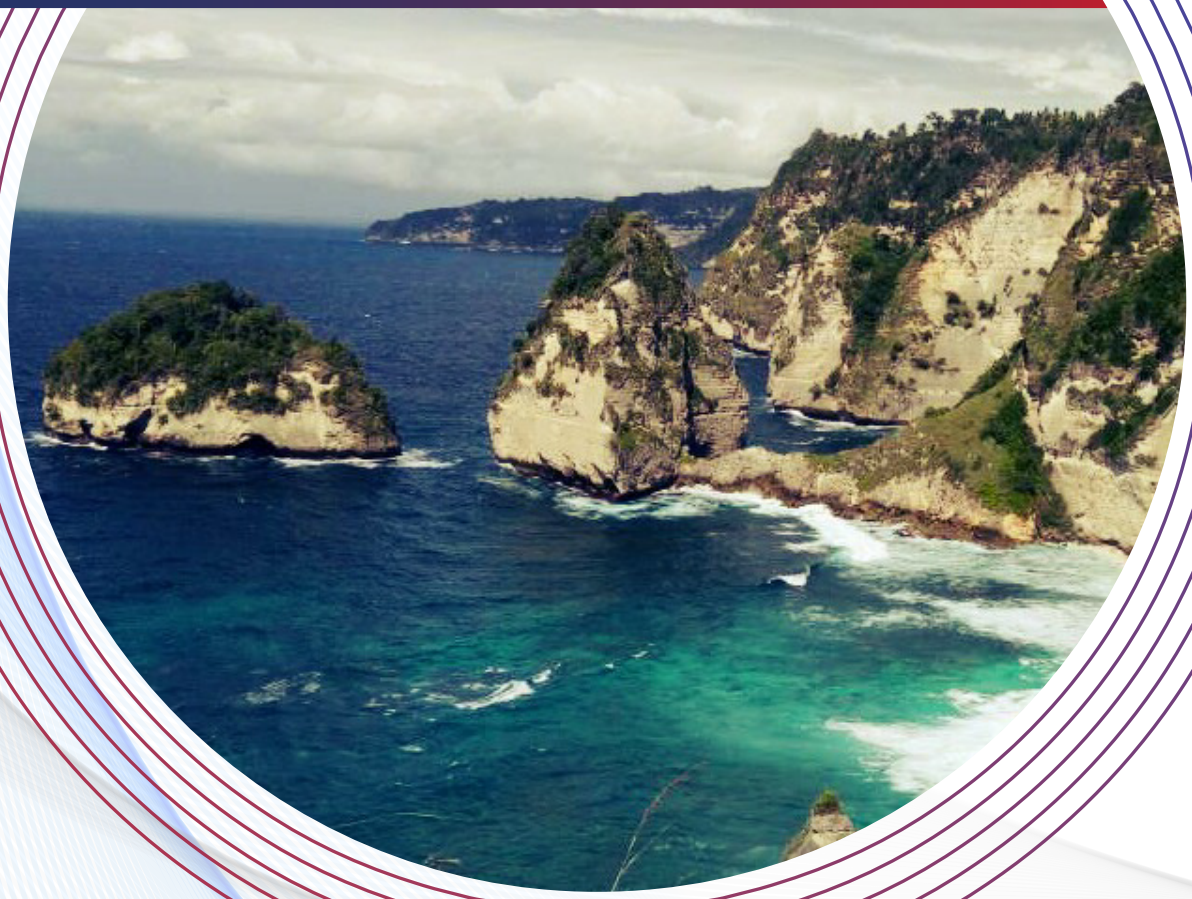
Mulai pertengahan 2016, atau tepatnya pada penyaluran PKH tahap III, LKD digunakan sebagai salah satu sistem distribusi bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada KPM. Hal ini juga ditujukan sebagai bagian dari usaha untuk mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan juga untuk mendorong efisiensi distribusi bantuan dan juga meminimalisir kebocoran atau kecurangan. Elektronik warung gotong royong (e-warong) adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.

Menindaklanjuti hal tersebut dan sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan layanan keuangan non tunai dan elektronifikasi di Provinsi Bali, pada tahun 2017 telah dilakukan sosialisasi dan edukasi penyaluran bantuan sosial non tunai, *training of trainers* (ToT) penyaluran program bantuan sosial secara non tunai kepada pendamping program keluarga harapan (PKH) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) serta pejabat Dinas Sosial Kota Denpasar. Selain itu juga telah dilakukan edukasi penyaluran bantuan sosial non-tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM), pendamping PKH, pendamping TKSK, Dinas Sosial dan agen bank di seluruh wilayah Denpasar.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VI

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN



Secara umum sektor ketenagakerjaan Provinsi Bali pada Agustus 2017 menunjukkan kinerja yang masih kuat.

Tingkat kemiskinan Bali pada Maret 2017 tercatat sebesar 4,25% atau terdapat 180,13 ribu, meningkat dibandingkan dengan September 2016

*Foto oleh: Umran Usman
(Atuh Beach - Nusa Penida)





6.1. KETENAGAKERJAAN

6.1.1. Kondisi Ketenagakerjaan Bali

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali pada periode Agustus 2017 menunjukkan kinerja yang masih tetap kuat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, potensi pasokan tenaga kerja di Bali mengalami peningkatan. Penduduk usia kerja di Bali tercatat sebanyak 3,23 juta orang di Agustus 2017, atau meningkat 1,46% (yoy) dibanding dengan Agustus 2016. Namun demikian, jumlah angkatan kerja di Bali pada periode Agustus 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode Agustus 2016. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2017 tercatat sebanyak 2,43 juta orang, menurun 1,16% (yoy) dari Agustus 2016.

Penurunan angkatan kerja pada periode Agustus 2017, diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja, yang tercermin dari penurunan angkatan kerja yang bekerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Jumlah angkatan kerja yang bekerja di Agustus 2017 tercatat sebesar 2,39 juta orang, atau menurun sebesar 0,76% (yoy), dibandingkan dengan Agustus 2016. Sementara itu, TPT Bali pada Agustus 2017 tercatat sebesar 1,48% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode Agustus 2016, yang tercatat sebesar 1,89%. Nilai TPT Provinsi Bali di Agustus 2017 (1,48%) tersebut, mengindikasikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, sekitar 1 orang diantaranya tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha.

Berdasarkan jenjang pendidikannya, TPT tertinggi, terjadi pada penduduk yang berpendidikan setingkat SMK. Sementara itu, TPT dengan nilai terendah adalah kategori penduduk yang berpendidikan SD ke bawah. Jika dilihat berdasarkan polanya, secara umum TPT jenjang pendidikan menengah dan tinggi (SMA, SMK, Diploma) cenderung lebih tinggi pada periode Agustus dibandingkan dengan Februari untuk setiap tahun. Hal tersebut terjadi karena di periode Agustus, umumnya berdekatan dengan periode kelulusan, sehingga banyak penduduk dengan jenjang pendidikan menengah dan tinggi yang baru memasuki periode pencarian pekerjaan di pertengahan tahun.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Provinsi Bali di Agustus 2017 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. TPAK Agustus 2017 tercatat sebesar 75,24%, lebih rendah dibanding dengan Agustus 2016 yang sebesar 77,24%. TPAK merupakan indikator yang menggambarkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi.

Tabel 6.1 TPT menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

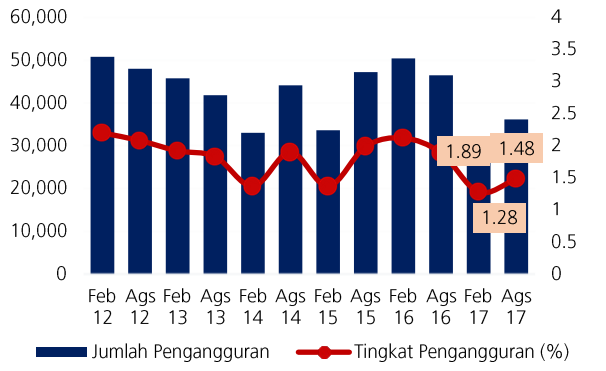
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2014		2015		2016		2017	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
< SD KE BAWAH	0.18	0.56	0.89	0.83	1.64	0.3	0.43	0.54
SMP	0.28	1.78	1.39	0.79	2.15	0.65	2.47	1.34
SMA	2.85	2.29	3.18	2.87	2.65	2.17	1.28	1.78
SMK	3.92	4.51	0.24	3.62	3.01	3.96	1.06	2.69
Diploma I / II / III	3.86	3.26	2.51	5.25	2.06	4.44	1.34	1.76
UNIVERSITAS	0.89	2.71	0.93	3.05	1.81	4.35	2.78	2.51
TOTAL	**1.37**	**1.9**	**1.37**	**1.99**	**2.12**	**1.89**	**1.28**	**1.48**

Sumber: BPS Provinsi Bali

Tabel 6.2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribu Orang)

KEGIATAN UTAMA	2014		2015		2016		2017	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
PENDUDUK USIA 15+	3,066.50	3,092.88	3,118.04	3,141.29	3,164.65	3,189.02	3,212.21	3,235.56
ANGKATAN KERJA	2,410.42	2,316.76	2,458.78	2,372.02	2,382.47	2,463.04	2,469.10	2,434.45
BEKERJA	2,377.39	2,272.63	2,425.17	2,324.81	2,332.06	2,416.56	2,437.49	2,398.31
PENGANGGURAN	33.03	44.13	33.61	47.21	50.40	46.48	31.61	36.14
BUKAN ANGKATAN KERJA	656.08	776.12	659.25	769.27	782.19	725.98	743.10	801.11
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (	78,61	74,91	78,86	75,51	75.28	77.24	76.87	75.24
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)	1,37	1,90	1,37	1,99	2.12	1.89	1.28	1.48
PEKERJA TIDAK PENUH	545.76	513.33	560.33	479.04	970.35	512.82	635.29	550.54

Sumber: BPS Provinsi Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik 6.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali

Secara umum, mayoritas penduduk usia kerja yang bekerja di Bali merupakan pekerja yang berpendidikan SD ke bawah, sama seperti beberapa periode sebelumnya. Namun pangsanya menurun tipis dari 35,5% pada Agustus 2016, menjadi 35,2% pada periode Agustus 2017. Seiring dengan itu, pangsa pekerja lulusan SMK meneruskan tren penurunan dari Agustus 2016 (13,7%), menjadi 13,4% pada Agustus 2017. Di sisi lain, pangsa pekerja lulusan SMA naik dari 20,5% pada Agustus 2016 menjadi 21,2% pada Agustus 2017. Demikian juga pangsa pekerja tamatan universitas juga mengalami peningkatan dari Agustus 2016 (11%) menjadi 11,1% di Agustus 2017. Selain itu, lulusan diploma juga naik dari 4,3% pada Agustus 2016 menjadi 4,6% pada Agustus 2017.

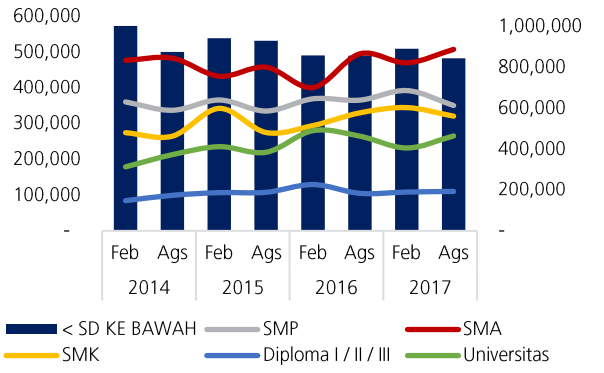
Apabila ditinjau dari jumlahnya, ada 3 kategori tamatan pendidikan yang jumlahnya meningkat dan 3 kategori pendidikan yang menurun. Jika dibandingkan dengan Agustus 2016, jumlah pekerja tamatan SMA meningkat 2,51% (yoy) dari 494.948 menjadi 507.370, tamatan Diploma meningkat 5,19% (yoy) dari 104.804 menjadi 110.239 dan lulusan universitas meningkat 0,23% (yoy) dari 264.676 menjadi 265.296. Di sisi lain, jumlah pekerja tamatan SD menurun sebesar 1,44% (yoy) dari 856.765 menjadi 844.455, lulusan SMP meurun 4,13% (yoy) dari 365.427 menjadi 350.330 dan lulusan SMK menurun sebesar 2,82% (yoy) dari 329.935 menjadi 320.617. Diharapkan Pemerintah

Tabel 6.3 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2014		2015		2016		2017	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
< SD KE BAWAH	1,002,707	875,729	942,764	930,013	858,390	856,765	890,927	844,455
SMP	360,432	337,080	365,809	334,988	369,220	365,427	392,097	350,330
SMA	476,634	482,680	432,128	457,522	400,619	494,948	469,762	507,370
SMK	274,374	264,750	342,283	274,841	294,369	329,935	344,514	320,617
Diploma I / II / III	84,420	99,321	106,837	107,783	129,394	104,804	108,491	110,239
Universitas	178,827	213,072	235,352	219,658	280,072	264,676	231,703	265,296
TOTAL	**2,377,394**	**2,272,632**	**2,425,173**	**2,324,805**	**2,332,064**	**2,416,555**	**2,437,494**	**2,398,307**

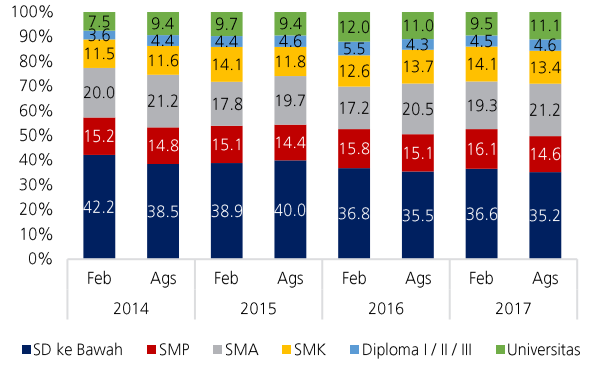
Sumber: BPS Provinsi Bali

lebih memperhatikan kelanjutan para siswa yang akan lulus dari bangku SMA dan SMK di Bali, agar tamatan SMA dan SMK tersebut dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebelum memutuskan terjun ke dunia kerja.



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik 6.2 Jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik 6.3 Komposisi tenaga kerja berdasarkan tingkat Pendidikan

Berdasarkan jumlah jam kerja per minggu, jumlah pekerja penuh waktu (35 jam atau lebih per minggu) di Bali pada Agustus 2017 tercatat sebanyak 1,85 juta orang, tumbuh sebesar 4,2% (yoy) dibandingkan dengan Februari 2017, namun mengalami kontraksi sebesar 2,94% jika dibandingkan dengan periode Agustus 2016. Dari keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, tercatat 77% merupakan pekerja penuh waktu, sementara sisanya 23% merupakan pekerja tidak penuh (antara 1-34 jam per minggu).

Struktur lapangan pekerjaan secara umum tidak mengalami perubahan. Sektor perdagangan, rumah makan, dan akomodasi (PHR) yang terkait secara langsung dengan industri pariwisata, masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Bali. Pada Agustus 2017, lapangan usaha tersebut menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu sebesar 760ribu orang, atau 31,7% dari total penduduk yang bekerja di Bali. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan periode Agustus 2016, yang tercatat sebesar 728ribu orang (pangsa 30,2%). Lapangan usaha pertanian, menempati posisi kedua dengan menyerap tenaga kerja sebesar 466ribu orang atau sebesar 19,4% dari total penduduk yang bekerja di Bali. Di sisi lain, sektor ini terus melanjutkan tren penurunan secara jumlah dan persentase, setelah sempat mencapai rekor tertinggi di Februari 2015 (569ribu pekerja dengan pangsa 23,5%). Sementara

Tabel 6.4 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja

PENDUDUK YANG BEKERJA	2014		2015		2016		2017	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
PEKERJA TIDAK PENUH								
JUMLAH	545,757	513,334	560,330	479,037	970,346	512,816	635,294	550,541
%	23	23	23	21	42	21	26	23
PEKERJA PENUH								
JUMLAH	1,831,637	1,759,298	1,864,843	1,845,768	1,361,718	1,903,739	1,802,200	1,847,766
%	77	77	77	79	58	79	74	77
TOTAL	2,377,394	2,272,632	2,425,173	2,324,805	2,332,064	2,416,555	2,437,494	2,398,307

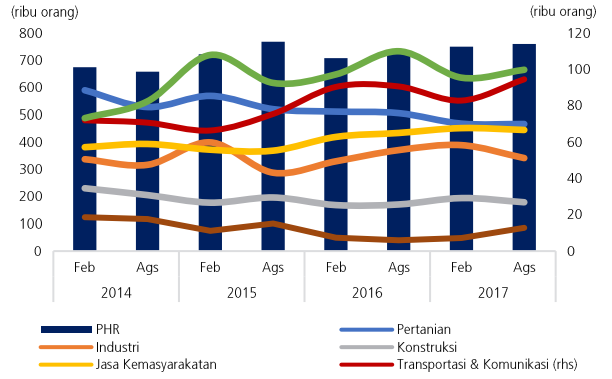
Sumber: BPS Provinsi Bali

Tabel 6.5 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	2014		2015		2016		2017	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Pertanian	590.169	528.506	569.493	520.775	511.861	506.251	467.696	466.307
Industri	337.08	316.598	398.873	287.534	329.478	370.531	388.633	341.221
Konstruksi	230.524	205.47	177.619	196.696	168.845	171.097	194.535	179.134
PHR	674.595	658.312	721.776	768.075	708.012	728.757	749.959	760.093
Transportasi & Komunikasi	71.982	70.658	66.368	75.472	90.36	90.611	82.829	94.562
Keuangan	73.168	82.431	107.945	92.546	97.228	109.977	95.434	99.784
Jasa Kemasyarakatan	381.219	393.056	371.973	368.535	418.862	433.377	451.223	444.422
Lainnya	18.657	17.601	11.126	15.172	7.418	5.954	7.185	12.784

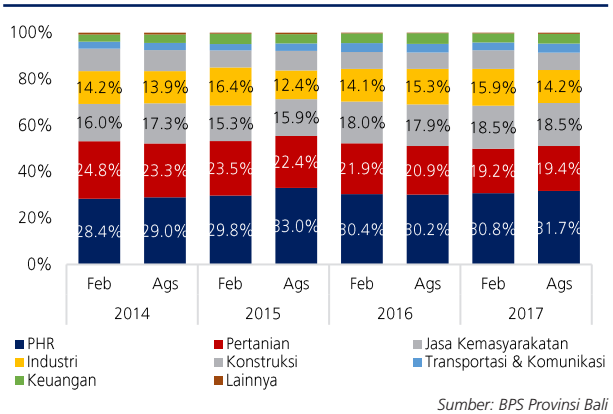
Sumber: BPS Provinsi Bali

itu, lapangan usaha jasa kemasyarakatan menempati posisi ketiga, dengan menyerap 444ribu orang atau 18,5% dari penduduk yang bekerja di Bali. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan periode Agustus 2016, yang tercatat sebesar 433ribu orang (pangsa 17,9%).



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik 6.4 Jumlah tenaga kerja sektor utama



Sumber: BPS Provinsi Bali

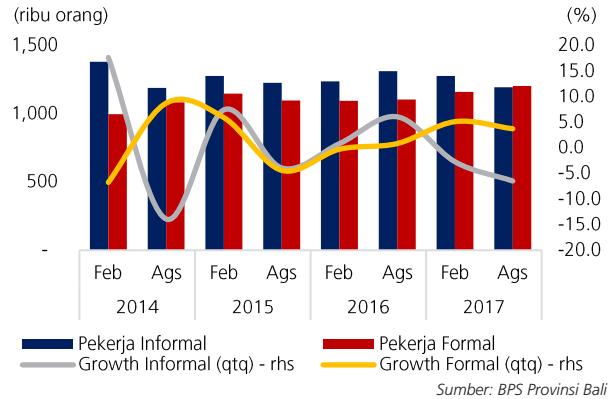
Grafik 6.5 Komposisi tenaga kerja sektor utama

Struktur distribusi angkatan kerja menurut sektornya diatas, sejalan dengan distribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha. Berdasarkan data PDRB triwulan III 2017, lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum dan perdagangan besar dan eceran, masih menjadi kontributor utama dalam struktur ekonomi Bali. Adapun pangsa kedua lapangan usaha tersebut sebesar 31,86% terhadap total PDRB triwulan III 2017. Selain itu, lapangan usaha pertanian memiliki pangsa sebesar 14,25% terhadap PDRB Bali. Sementara itu, struktur pendidikan pekerja yang bekerja di lapangan usaha pertanian didominasi oleh lulusan SD dan kebawah. Sedangkan penduduk dengan pendidikan menengah lebih banyak terserap oleh sektor PHR (lapangan usaha akomodasi makan dan minum serta lapangan usaha perdagangan).

Kecenderungan semakin menurunnya pangsa dan kontribusi lapangan usaha pertanian pada ekonomi Bali, menyebabkan penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha tersebut juga cenderung menunjukkan tren penurunan. Di lain sisi, tren peningkatan pangsa dan kontribusi sektor PHR terhadap ekonomi Bali, sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja oleh sektor PHR. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran tenaga kerja, dari sektor pertanian ke sektor PHR. Dengan kondisi tersebut, untuk mengurangi kesenjangan antara jenis pendidikan dan lapangan pekerjaan yang tersedia maka program pengembangan peningkatan

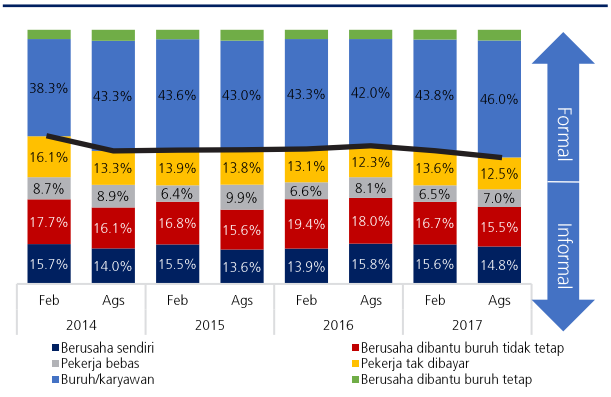
kompetensi pekerja difokuskan pada peningkatan kemampuan yang terkait dengan sektor usaha PHR (khususnya yang terkait dengan pariwisata).

Jenis pekerjaan yang dominan pada Agustus 2017 adalah kelompok orang yang bekerja pada kegiatan formal. Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal tercatat sebanyak 1,2juta jiwa atau sebesar 50,2% dari total penduduk yang bekerja. Jumlah tersebut naik sebesar 9,06% (yoy) dibandingkan dengan periode Agustus 2016 (1,1juta orang). Sedangkan orang yang bekerja pada kegiatan informal tercatat sebanyak 1,19juta jiwa atau sebesar 49,8% dari total penduduk yang bekerja. Jumlah tersebut turun sebesar 9,01% (yoy) dibandingkan dengan periode Agustus 2016 (1,3juta orang). Pergesaran komposisi tenaga kerja cenderung bergerak ke arah formal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan semakin membaik karena terjadi peningkatan pekerja pada sektor formal yang cenderung memiliki jaminan kelangsungan pekerjaan.



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik 6.6 Penyerapan tenaga kerja formal & informal



Sumber: BPS Provinsi Bali

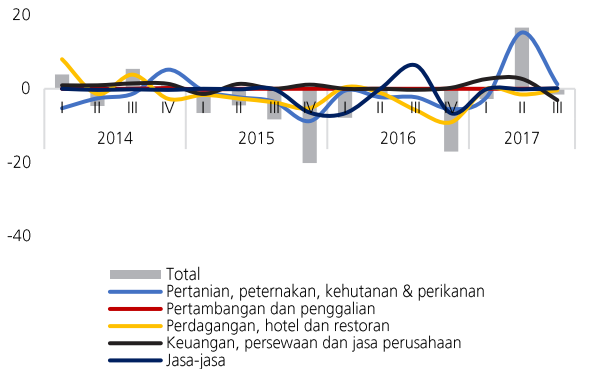
Grafik 6.7 Komposisi tenaga kerja formal & informal

Kondisi ketenagakerjaan di Bali pada semester II 2017 (Agustus) yang melambat, juga terkonfirmasi oleh hasil survei SKDU dan SK. Berdasarkan hasil SKDU pada triwulan III 2017, penggunaan tenaga kerja secara umum menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan II 2017 maupun triwulan III 2016. Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penggunaan tenaga kerja pada triwulan III 2017 yang tercatat sebesar -1,54%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2017 dan triwulan III 2016 yang masing-masing sebesar 16,58% dan -0,33%. Peningkatan penggunaan tenaga kerja paling besar terjadi di sektor bangunan, yang pada triwulan III 2017 tercatat dengan SBT sebesar 2,45%, meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2017 yang tercatat 0%. Perbaikan peningkatan kinerja lapangan usaha bangunan ini, terutama didorong oleh tetap tingginya pertumbuhan kinerja lapangan usaha konstruksi yang pada triwulan III 2017 (berdasarkan PDRB Bali), tercatat tumbuh sebesar 8,02% (yoy).

Tabel 6.6 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

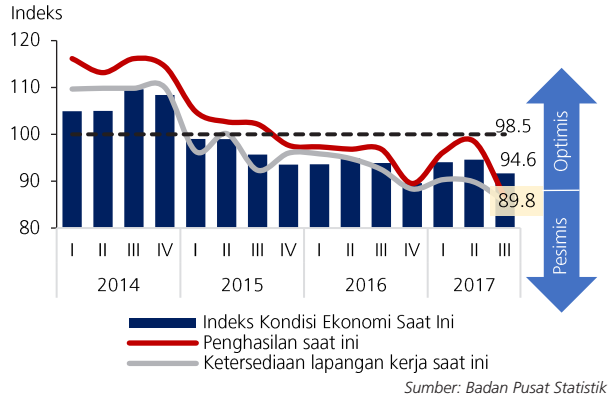
STATUS PEKERJAAN UTAMA	2014		2015		2016		2017	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
PEKERJA INFORMAL	1,380,917	1,189,010	1,277,450	1,227,424	1,237,564	1,312,701	1,277,039	1,194,441
PEKERJA FORMAL	996,477	1,083,622	1,147,723	1,097,381	1,094,500	1,103,854	1,160,455	1,203,866
TOTAL	2,377,394	2,272,632	2,425,173	2,324,805	2,332,064	2,416,555	2,437,494	2,398,307

Sumber: BPS Provinsi Bali



Grafik 6.8 Hasil SKDU Triwulan III 2017

Meskipun pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga pada triwulan III tahun 2017 tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, namun berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK) pada triwulan III 2017, terdapat indikasi melambatnya kondisi ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil SK, tercermin bahwa Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini menunjukkan penurunan dari 94,6 pada triwulan II 2017, menjadi 91,7 pada triwulan III 2017. Indeks penghasilan saat ini juga turut menunjukkan perlambatan dari sebesar 98,5 pada triwulan II 2017 menjadi 86,5 pada triwulan III 2017. Demikian juga dengan indeks ketersediaan lapangan kerja yang turut mengalami penurunan dari 89,8 pada triwulan II 2017 menjadi 85,7 pada triwulan III 2017.



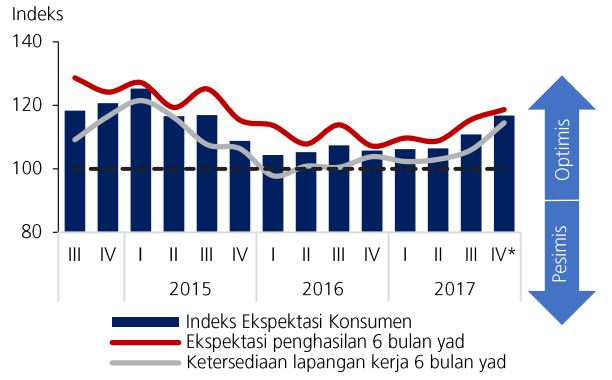
Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 6.9 Hasil SK Triwulan III 2017

6.1.2. Prospek Ketenagakerjaan Triwulan Mendatang

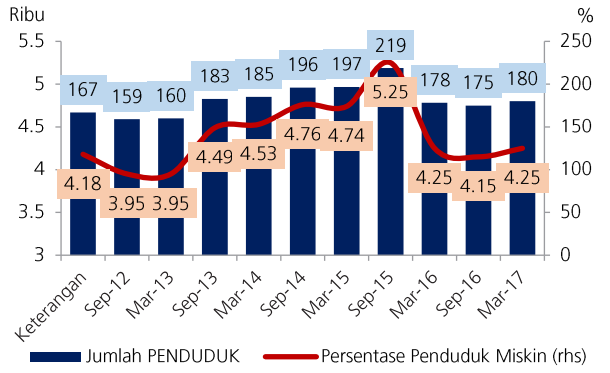
Kondisi ketenagakerjaan pada triwulan IV 2017 diprakirakan melanjutkan tren peningkatan. Hal ini terkonfirmasi oleh Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan Survei Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali. SKDU mengindikasikan prospek penggunaan tenaga kerja pada triwulan III 2017 mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari nilai SBT prakiraan triwulan IV 2017 sebesar -0,84%, lebih tinggi dibanding triwulan III yang sebesar -1,54. Adapun sektor yang diprakirakan menjadi pendorong peningkatan serapan tenaga kerja adalah industri pengolahan yang kembali menunjukkan nilai positif setelah sebelumnya terkontraksi pada triwulan III 2017. Selain itu, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan juga mengkonfirmasi prakiraan peningkatan penggunaan tenaga kerja yang lebih tinggi pada triwulan mendatang seiring dengan masuknya periode panen. Adapun sektor lain yang menunjukkan peningkatan penggunaan tenaga kerja adalah listrik, gas dan air bersih; pengangkutan dan komunikasi; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Seiring dengan hasil SKDU, konsumen rumah tangga melalui Survei Konsumen mengkonfirmasi peningkatan ekspektasi kondisi ekonomi pada triwulan IV 2017. Berdasarkan hasil SK, Indeks Ekspektasi Konsumen pada triwulan IV 2017 sebesar 116,8 atau lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2017 yang sebesar 110,8. Indeks ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja pada triwulan IV 2017 juga mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi seiring dengan adanya perayaan hari keagamaan (Natal) dan tahun baru.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 6.10 Indikator Ekspektasi Survei Konsumen



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik 6.11 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali

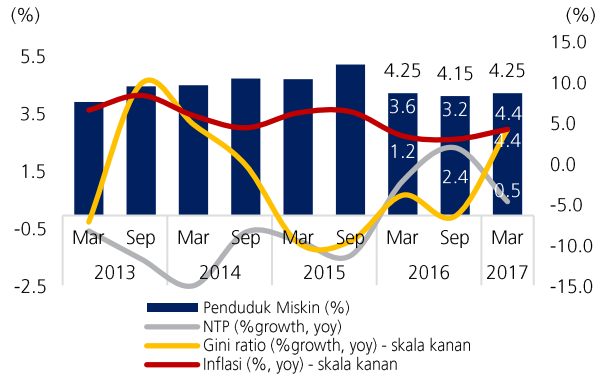
Dengan demikian, kondisi ini mengkonfirmasi membaiknya perkembangan ketenagakerjaan pada triwulan IV 2017 mendatang, sehingga akan mendorong peningkatan angkatan kerja dan diprakirakan berpotensi menurunkan tingkat pengangguran dibandingkan triwulan sebelumnya.

6.2. KESEJAHTERAAN

6.2.1. Perkembangan Kesejahteraan Bali

Tingkat kemiskinan Bali pada Maret 2017 tercatat sebesar 4,25% atau terdapat 180,13 ribu orang di Bali yang masuk dalam kategori penduduk miskin. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu maupun dibandingkan dengan periode September 2016 yang masing-masing tercatat sebesar 4,25% (terdapat 178,18 ribu penduduk miskin) dan 4,15% (terdapat 174,94 ribu penduduk miskin). Pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin pada wilayah perkotaan tercatat sebesar 96,89 ribu orang (3,58%), sementara itu di wilayah pedesaan jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 83,23 ribu orang (5,45%). Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan September 2016 yang tercatat masing-masing sebesar 93,74 ribu orang (3,53%) dan 81,2 ribu orang (5,21%). Penurunan tingkat kesejahteraan petani dan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar di Maret 2017 (dibandingkan dengan September 2016) menjadi penyebab terjadinya peningkatan kemiskinan di Provinsi Bali.

Perkembangan tingkat kemiskinan dapat didekati oleh beberapa indikator, yaitu: inflasi, nilai tukar petani, dan rasio gini. Pada Maret 2017, terjadi inflasi sebesar 4,4%, cukup tinggi dibandingkan dengan September 2016 (3,18%) maupun Maret 2016 (3,59%). Inflasi yang meningkat ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat pedesaan. Akibatnya adalah NTP Maret 2017 hanya tumbuh sebesar 0,5% (yoy), setelah pada September 2016 naik sebesar 2,4% dan Maret 2016 sebesar 1,2%. Kondisi ini menyebabkan persentase penduduk miskin di Bali yang sempat turun dari 4,25% pada Maret 2016 menjadi 4,15% pada 2016, kembali naik ke level 4,25% pada September 2017. Peningkatan angka kemiskinan ini juga berdampak pada rasio gini pada Maret 2017 yang meningkat sebesar 4,4% (yoy). Dengan demikian, pemerintah perlu lebih memperhatikan hal tersebut, karena perkembangan kemiskinan di Bali tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat di perkotaan, namun juga masyarakat pedesaan (terutama petani).



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik 6.12 Indikator dan Keterkaitan Kemiskinan di Provinsi Bali

6.2.2. Kedalaman & Keparahan Kemiskinan

Memahami persoalan kemiskinan tidak bisa dilihat hanya dari berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, karena angka itu tidak menggambarkan seberapa miskin penduduk tersebut dan tidak dapat menggambarkan pergerakan daya beli masing-masing penduduk di bawah garis kemiskinan. Diperlukan dua indeks untuk mendukung analisa kemiskinan, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2). Indeks P1 mengukur kesenjangan kemiskinan, yaitu sejauh mana individu berada di bawah garis kemiskinan (dihitung dari jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan). Indeks P1 terus melanjutkan tren kenaikan, dari 0,51 (Maret 2016) ke level 0,53 (September 2016), kemudian selanjutnya menjadi 0,68 (Maret 2017). Nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata total pengeluaran penduduk di Bali (miskin dan non-miskin) masih berada 0,68% di bawah dari garis kemiskinan (Rp 361.387 per kapita per bulan) di periode Maret 2017.

Namun P1 tidak dapat menggambarkan kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Maka, diperlukan Indeks Keparahan kemiskinan (P2), yang merupakan P1 namun perhitungan indeksnya memberikan bobot berbeda pada setiap penduduk miskin, tergantung dari jarak pengeluaran masing-masing terhadap garis kemiskinan. Makin jauh pengeluaran seorang penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, maka bobotnya dalam indeks P2 akan semakin besar, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, indeks P2 dapat menggambarkan kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin satu dengan lainnya. Karena tren P2 terus meningkat dari 0,09 (Maret 2016) ke level 0,11 (September 2016) menjadi 0,16 (Maret 2017), maka dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin di makin meningkat. Nilai P2 sebesar 0,16 menunjukkan besarnya deviasi total pengeluaran diantara penduduk miskin di Bali.

Dari sisi pemerataan pendapatan, disparitas pendapatan di Provinsi Bali turut mengikuti tren kenaikan seperti yang terlihat pada indeks P1 dan P2. Gini ratio terus naik dari level 0,366 (Maret 2016), menjadi 0,374 (September 2016) dan menuju level 0,384 (Maret 2017). Kondisi ini menunjukkan makin besarnya kesenjangan ekonomi yang terjadi di

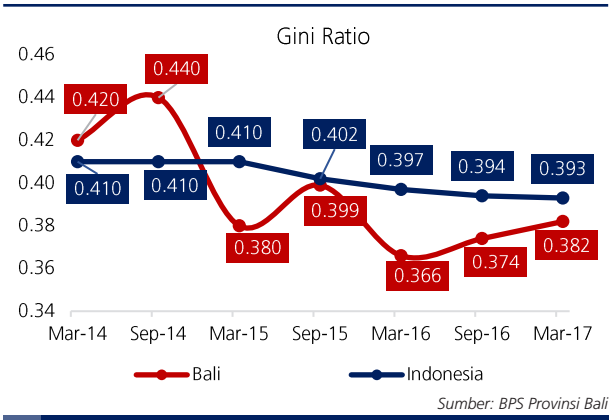
Tabel 6.7 Jumlah Penduduk Miskin

	2013		2014		2015		2016		2017
	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar
Jumlah Penduduk Miskin	182.77	186.53	185.20	195.95	196.71	218.79	178.18	174.94	180.13
Persentase Penduduk Miskin (rhs)	3.95	4.49	4.53	4.76	4.74	5.25	4.25	4.15	4.25
- Kota	3.90	4.17	4.01	4.35	4.31	4.52	3.68	3.53	3.58
- Desa	4,04	5.00	5,34	5.39	5.44	6.42	5.23	5.21	5.45
Garis Kemiskinan (Rp)	284,009	284,009	295,210	301,747	321,834	331,028	338,967	346,398	361,387
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.70	0.71	0.42	0.87	0.66	1.13	0.51	0.53	0.68
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.16	0.17	0.06	0.26	0.14	0.35	0.09	0.11	0.16

**) angka periode Maret*

Sumber : Badan Pusat Statistik

Provinsi Bali, sehingga memerlukan penanganan dan perhatian secaran komprehensif dan berkelanjutan. Tren peningkatan rasio gini ini, berlawanan dengan rasio gini nasional, yang justru mengalami tren penurunan dari 0,397 di Maret 2016 menuju 0,393 pada Maret 2017.



Sumber: BPS Provinsi Bali

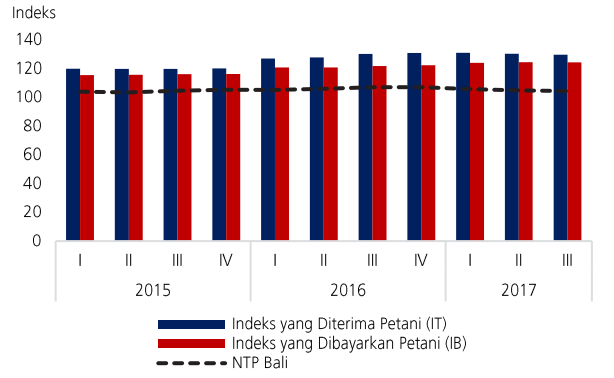
Grafik 6.13 Perkembangan *Gini Ratio* di Provinsi Bali

6.2.3. Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

Tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan dapat tergambar antara lain melalui indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Perkembangan NTP Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 104,18 atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2017 yang sebesar 104,68 dan triwulan III 2016 sebesar 106,92. Penurunan NTP ini disebabkan oleh menurunnya Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) sebesar 0,46% (qtq), walaupun dengan diiringi oleh peningkatan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (IB) sebesar 0,02% (qtq) bila dibandingkan dengan triwulan II 2017. Terdapat dua subsektor pertanian yang mengalami penurunan NTP pada triwulan laporan, yaitu hortikultura dan perkebunan rakyat. Sementara itu, terdapat tiga subsektor pertanian yang mengalami kenaikan NTP yaitu tanaman pangan, peternakan dan perikanan. Meskipun demikian, NTP Bali pada triwulan III 2017 tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan NTP Nasional.

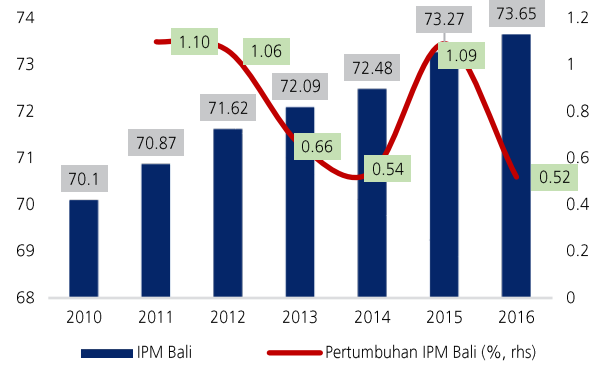
Penurunan NTP terbesar pada triwulan III 2017 terjadi pada subsektor hortikultura yang terkontraksi sebesar 3,09% (qtq), yaitu dari 102,86 menjadi 99,68. Penurunan NTP pada subsektor ini terjadi karena penurunan IT hortikultura sebesar 3,04% (qtq) yang mencerminkan harga jual komoditas petani mengalami penurunan. Penurunan indeks harga yang diterima petani terutama disebabkan oleh turunnya harga pada kelompok sayur-sayuran dan tanaman obat. Beberapa harga komoditas hortikultura yang tercatat menurun, antara lain tomat, cabai merah, ketimun, cabai rawit, bawang merah, jahe, kencur. Penurunan NTP ini ditahan oleh peningkatan indeks yang dibayar petani (IB) sebesar 0,05. Namun demikian, secara keseluruhan penurunan IB tidak mampu menahan besarnya penurunan IT hortikultura.

Di sisi lain, peningkatan NTP terbesar pada triwulan III 2017 terjadi pada subsektor tanaman pangan yang didorong oleh peningkatan IT sebesar 1,63% (qtq). Peningkatan IT subsektor tanaman pangan ini terutama disebabkan oleh peningkatan harga gabah dan ubi kayu. Sementara itu, peningkatan NTP di subsektor perikanan dari 104,71 pada triwulan II 2017 menjadi 106,45 didorong oleh kenaikan IT pada kelompok perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Sedangkan peningkatan NTP di subsektor peternakan dari 114,05 menjadi 114,56 didorong oleh peningkatan pada kelompok unggas dan hasil ternak.



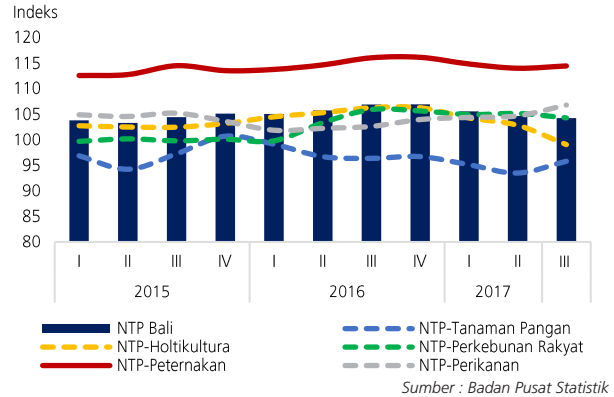
Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 6.14 NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB)



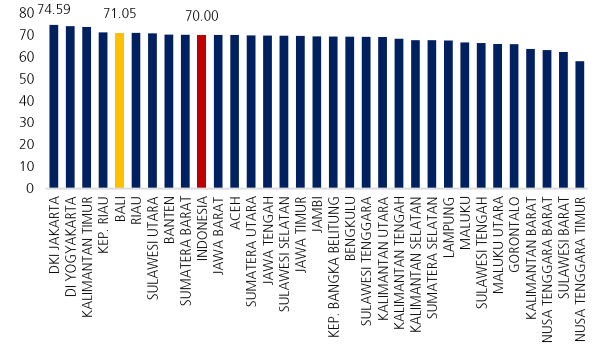
Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 6.16 Perkembangan IPM Provinsi Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 6.15 Perbandingan NTP Bali dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 6.17 Perbandingan IPM Bali dan Nasional

6.3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Perkembangan indikator pembangunan manusia di Bali kembali mengalami perbaikan, yang ditandai dengan nilai IPM yang tinggi dan menunjukkan tren peningkatan serta berada di atas IPM nasional. Data terakhir menyebutkan IPM Provinsi Bali pada tahun 2016 tercatat sebesar 73,65, meningkat dibanding dengan IPM Bali tahun 2015 yang tercatat sebesar 73,27, dan lebih tinggi dibanding dengan IPM nasional tahun 2016 yang sebesar 70,18. IPM Bali juga tercatat sebagai IPM tertinggi ke 5 di Indonesia di antara 34 Provinsi di Indonesia. Meskipun demikian, pertumbuhan IPM Bali pada tahun 2016 ini merupakan pertumbuhan terendah dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Meningkatnya IPM Bali pada tahun 2016, dipengaruhi oleh peningkatan komponen pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (EYS), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), dan Pengeluaran Per Kapita/tahun disesuaikan. Pada tahun 2016 AHH Provinsi Bali tercatat mencapai 71,41 tahun atau dengan kata lain bayi yang lahir pada tahun 2016 memiliki peluang untuk hidup hingga 71,41 tahun. Nilai ini meningkat 0,06 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 71,35 tahun. Sementara itu, dimensi pengetahuan EYS dan MYS pada tahun 2016 mencapai 13,04 tahun dan 8,36 tahun atau dengan kata lain anak-anak usia tujuh tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,04 tahun dan penduduk

usia 25 tahun ke atas secara rata-rata menempuh pendidikan selama 8,36 tahun. Nilai EYS dan MYS ini meningkat masing-masing sebesar 0,07 tahun dan 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2015. Komponen pembentuk IPM lain yang mengalami peningkatan adalah Pengeluaran Per Kapita/tahun yang menggambarkan kelayakan standar hidup. Pada tahun 2016, pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Bali mencapai Rp 13,28 juta per tahun atau meningkat Rp 201 ribu dibandingkan dengan tahun 2015.

BOKS C

BALI BERKONTRIBUSI DALAM MENDORONG SURPLUS TRANSAKSI BERJALAN NASIONAL

Perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah, dapat dilihat baik dari sisi internal maupun eksternal. Kondisi internal antara lain tercermin pada perkembangan sektor riil, seperti produksi, konsumsi, dan investasi, dan perkembangan sektor moneter seperti tercermin dari tingkat inflasi. Sementara itu, kondisi eksternal tercermin pada perkembangan neraca pembayaran. Perkembangan neraca pembayaran memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan sektor riil, fiskal, dan moneter. Terkait dengan neraca pembayaran, terdapat 2 jenis transaksi yaitu pertama, transaksi yang terkait dengan perdagangan, seperti ekspor-impor barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan penghasilan, seperti pembayaran, bunga dan pembagian dividen, serta transaksi yang terkait dengan transfer, seperti hibah. Kedua, transaksi yang terkait dengan barang modal dan investasi, seperti penanaman modal langsung dan investasi portofolio. Dalam neraca pembayaran, transaksi pada kelompok pertama disebut Transaksi Berjalan atau *Current Account*, sedangkan transaksi pada kelompok kedua disebut Transaksi Modal dan Keuangan atau *Capital and Financial Account*. Kondisi *current account* yang surplus akan mendorong peningkatan cadangan devisa suatu negara.

Dalam konteks Bali, pengukuran transaksi berjalan di Bali dapat dihitung dari sisi transaksi berjalan atau *current account*. Perkembangan transaksi berjalan di Bali dapat dihitung berdasarkan perkembangan nilai ekspor dan impor barang maupun jasa. Bali sebagai destinasi wisata dunia, merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai ekspor jasa yang tinggi dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Besarnya eskpor jasa sejalan dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman, antara lain didorong oleh:

Tabel 1 Perkembangan *Current Account* Bali (Ekspor & Impor) PDRB Rp Miliar Harga Berlaku

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (TWI-III)
Ekspor LN	**30.918**	**33.500**	**36.587**	**43.810**	**55.102**	**63.633**	**78.539**	**69.003**
Barang	7.007	6.657	6.863	6.858	6.952	7.287	7.539	5.797
Jasa	23.911	26.843	29.724	36.953	48.150	56.346	71.000	63.206
Impor LN	**13.334**	**13.833**	**6.625**	**9.897**	**13.891**	**13.612**	**17.949**	**15,320**
Barang	8.703	9.409	1.696	3.627	4.846	2.089	2.309	1.300
Jasa	4.632	4.424	4.928	6.270	9.045	11.523	15.640	14.020
Net Ekspor	**17.584**	**19.667**	**29.962**	**33.913**	**41.211**	**50.021**	**60.590**	**53.683**
Net Ekspor Barang	(1.696)	(2.752)	5.167	3.230	2.106	5.198	5.230	4.497
Net Ekspor Jasa	19.280	22.419	24.796	30.683	39.105	44.822	55.360	49.186

Sumber: BPS, diolah

- Kebiajakan bebas visa
- Penambahan *direct flight* dan *charter flight* dari dan ke beberapa negara asal wisman, untuk 2017 : Tiongkok (Chengdu; Shenzen; Kunming; Chongqing dan Xiamen); Jepang (Narita); Timor Timur (Dili); India (Chennai dan Kalkota)
- Meningkatnya upaya promosi yang dilakukan pelaku industri pariwisata
- Pengembangan pasar alternatif wisman (India dan Timur Tengah)
- Semakin berkembangnya dan beragamnya destinasi wisata serta paket wisata (*Bali and Beyond*)

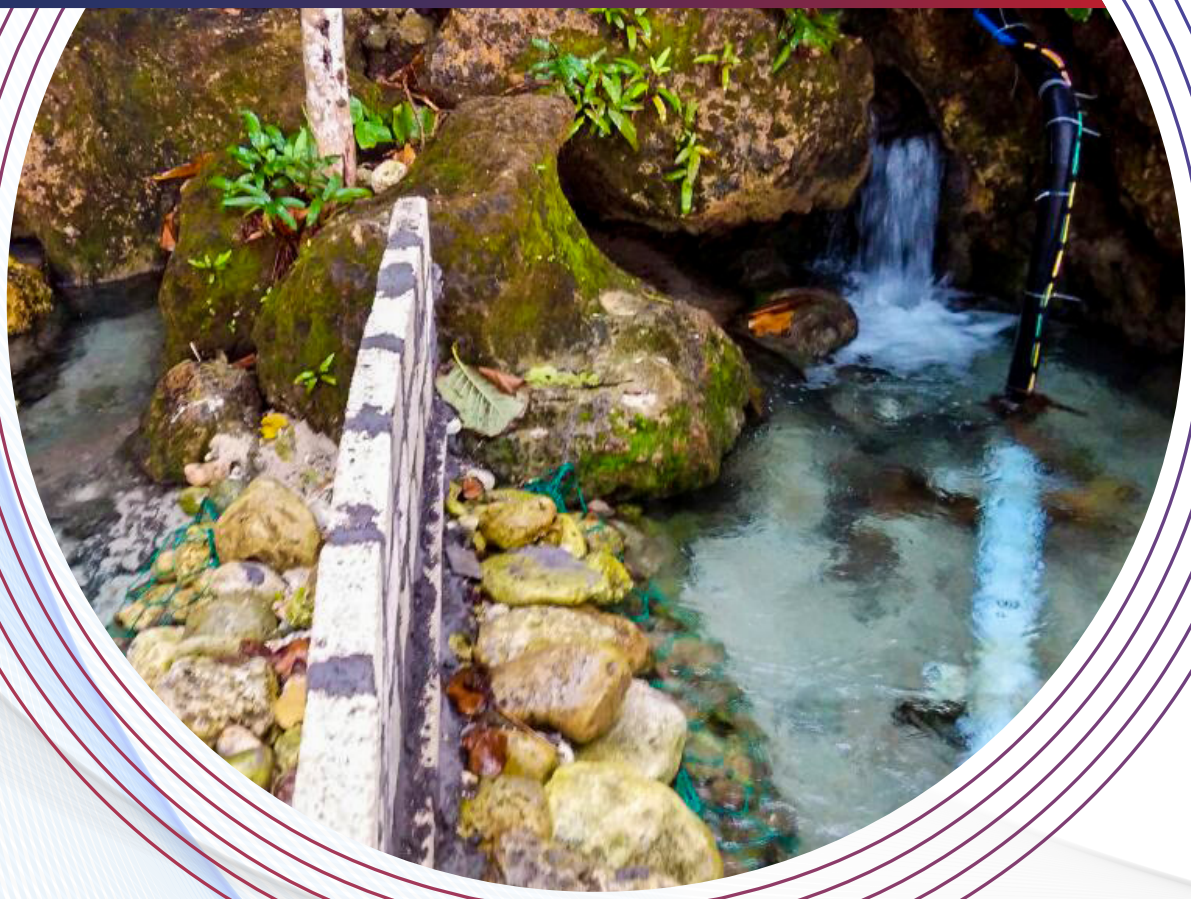
Sejalan besarnya kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali, transaksi berjalan di Bali pada periode 2010-tahun 2017 (Triwulan I-III) selalu menunjukkan nilai yang surplus, baik pada PDRB harga konstan maupun harga berlaku. Nilai transaksi berjalan dalam kurun waktu tersebut menunjukkan trend yang terus meningkat, terutama didorong oleh terus meningkatnya net ekspor jasa. Pangsa Berdasarkan PDRB Harga berlaku, nilai ekspor jasa Bali pada tahun 2017 (triwulan I-III) tercatat sebesar Rp 63 triliun aatau mencapai 23,23% dari ekspor jasa nasional pada periode yang sama. Kondisi ini sejalan dengan jumlah kunjungan wisman Bali yang sepanjang tahun 2017 (triwulan I-III) tercatat sebesar 4,5 juta orang wisman atau mencapai 43,56% dari total wisman yang berkunjung ke Indonesia. Dengan kondisi tersebut, transaksi berjalan Bali yang tercatat surplus Rp 53,68 triliun, yang dikontribusikan oleh 95% bersumber dari ekspor jasa, sementara hanya 5% yang dikontribusikan oleh ekspor barang. Dengan besarnya nilai surplus transaksi berjalan Bali tersebut, menjadikan Bali memiliki konstribusi yang cukup signifikan terhadap capaian surplus transaksi berjalan secara Nasional.

Pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki potensi besar dalam rangka mendorong peningkatan ekspor khususnya jasa dan mendorong peningkatan surplus transaksi berjalan. Kondisi ini telah dibuktikan oleh Provinsi Bali, yang selalu mendapatkan surplus transaksi berjalan. Sehubungan dengan itu, kebijakan pemerintah pusat saat ini yang sangat fokus untuk mengembangkan bidang pariwisata antara lain melalui kebijakan pengembangan 10 destinasi wisata baru disertai dengan berbagai program promosi wisata serta kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan secara terintegrasi diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai ekspor Indonesia yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan surplus transaksi berjalan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH



Pertumbuhan ekonomi Bali Tw1 2018 diprakirakan berada dalam kisaran 5,80%-6,20% (yoy), sedangkan untuk keseluruhan tahun 2018 tumbuh dalam kisaran 6,00%-6,40% (yoy).
Inflasi Bali triwulan I 2018 diperkirakan melandai pada kisaran 0,60%-1,00% (yoy). Secara keseluruhan inflasi Bali tahun 2018 diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam kisaran 2,60%-3,00% (yoy)

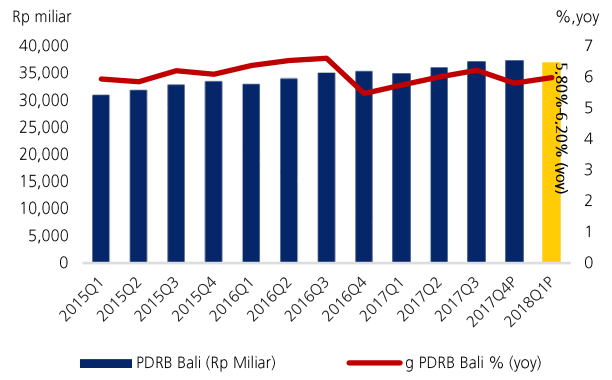
*Foto oleh: I Gede Agustin Premana
(Mata Air Temeling - Desa Batu Madeg - Nusa Penida)





7.1. MAKRO EKONOMI REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2018, diprakirakan akan mengalami peningkatan dalam kisaran 5,80%-6,20% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan kinerja tersebut terutama didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga sejalan dengan adanya peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2018 dan peningkatan kinerja ekspor khususnya jasa, didorong oleh adanya perayaan imlek. Sejalan dengan itu, Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT) diprakirakan juga akan meningkat dikontribusikan oleh persiapan penyelenggaran PILKADA pada tahun 2018. Sementara komponen lainnya diprakirakan akan tetap tumbuh positif namun melambat. Dari sisi penawaran, peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan I 2018 didorong oleh peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, penyediaan akomodasi makan dan minum, industri pengolahan, perdagangan dan transportasi.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
Keterangan : p) Angka Proyeksi Bank Indonesia

Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulanan

Sisi permintaan

Bila dianalisis dari sisi permintaan, peningkatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2018, didorong oleh prakiraan peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT dan ekspor. Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh adanya peningkatan UMP yang pada tahun 2018 diprakirakan akan meningkat sebesar 8,71% (yoy), lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP 2017 yang sebesar 8,25% (yoy). Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga pada periode triwulan I 2018, juga didorong oleh terkendalinya laju inflasi, sehingga mendorong akselerasi peningkatan daya beli masyarakat. Sejalan dengan itu, kinerja konsumsi LNPRT juga diprakirakan akan meningkat didorong oleh peningkatan aktivitas partai politik dan organisasi masyarakat dalam persiapan penyelenggaran PILKADA[1] tahun 2018 yang akan digelar pada bulan Juni. Adanya perayaan hari raya Imlek pada periode triwulan I 2018, mendorong meningkatnya penawaran dan paket wisata yang ditawarkan oleh pelaku industri pariwisata Bali kepada wisatawan asal Tiongkok. Strategi ini biasanya akan disinergikan dengan paket penerbangan oleh maskapai, termasuk melalui penyediaan *charter flight*.

Potensi peningkatan kinerja ekspor jasa juga didorong oleh upaya peningkatan promosi yang dilakukan oleh pelaku industri pariwisata, pengembangan produk (*Bali and Beyond*), pengembangan destinasi wisata serta meningkatkan kualitas pelayanan dan produk wisata. Peningkatan kinerja ekspor jasa diprakirakan juga akan tetap kuat, didorong oleh beberapa upaya promosi dan penjualan melalui *online booking, sales call*, dan program diskon, berpotensi mendorong kinerja ekspor jasa pada triwulan laporan. Keikutsertaan pelaku usaha dalam kegiatan pameran internasional dan pengembangan pasar alternatif yaitu India, Timur Tengah dan Rusia, juga merupakan faktor pendorong meningkatnya kinerja ekspor jasa pada triwulan I 2018.

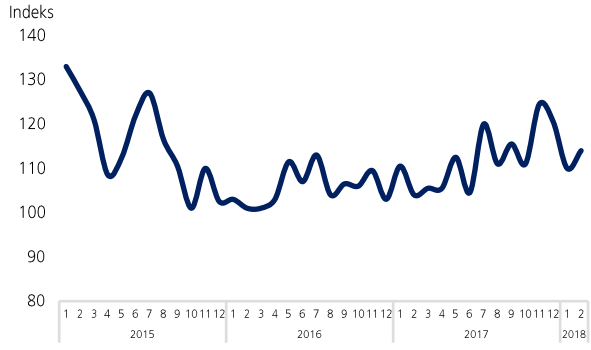
1 Penyelenggaraan PILKADA di Bali pada tahun 2018 akan dilaksanakan pada periode Juni 2018. Adapun PILKADA yang berlangsung adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar, Bupati dan Wakil Bupati Klungkung.

Sejalan dengan itu, potensi peningkatan kinerja ekspor juga didorong oleh prakiraan meningkatnya kinerja ekspor barang, sejalan dengan membaiknya kinerja ekonomi beberapa negara yang menjadi mitra dagang utama Bali, yaitu Amerika Serikat dan Australia. Upaya pengembangan pasar alternatif (diversifikasi) untuk negara tujuan produk ekspor Bali, antara lain Timur Tengah, akan mendorong peningkatan kinerja komponen ekspor pada triwulan I 2018. Sejalan dengan itu, upaya ek*sport*ir untuk terus melakukan diversifikasi produk ekspor dan peningkatan kualitas produk agar dapat bersaing di tengah semakin ketatnya persaingan, juga diprakirakan menjadi pendorong peningkatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2018.

Meskipun demikian, masih terdapat potensi terjadinya perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga, yang antara lain disebabkan oleh penurunan produksi komoditas perkebunan apda tahun 2017, sehingga akan berdampak pada tertahannya laju konsumsi khususnya di daerah sentra perkebunan yaitu Buleleng dan Bangli pada triwulan I 2018. Sejalan dengan itu, adanya kecenderungan masyarakat untuk menahan laju belanjanya karena lebih memprioritaskan untuk menabung dalam rangka untuk berjaga-jaga, juga berpotensi menahan kinerja komponen konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, meningkatnya aktivitas vulkanis Gunung Agung pada akhir triwulan III 2017, yang berlanjut pada triwulan IV 2017 berpotensi akan terus belanjut di triwulan I 2018. Peningkatan aktivitas vulkanis tersebut telah menyebabkan dikeluarkannya *travel advisory* oleh beberapa negara untuk berkunjung ke Bali yaitu Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Malaysia, Australia, Selandia Baru dan Korea Selatan, sehingga berdampak pada terjadinya pembatalan kunjungan wisman ke Bali. Kondisi ini dapat terus berlanjut pada triwulan I 2018, apalagi dengan perkembangan terbaru diketahui bahwa pada tanggal 21 Nopember 2017, telah mulai terjadi erupsi Gunung Agung, sehingga akan berpotensi menahan kinerja ekspor khususnya jasa pada periode tersebut.

Selain ketiga komponen permintaan tersebut, komponen lainnya tetap tumbuh positif, namun mengalami perlambatan. Kinerja komponen investasi diprakirakan akan mengalami perlambatan sejalan pola musimannya, dimana pelaksanaan pengerjaan proyek pemerintah dan swasta baru dalam persiapan pengerjaan, sehingga laju konsumsi masih cenderung tertahan. Meskipun demikian, pengerjaan beberapa proyek dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan *IMF-World Bank Annual Meeting 2018* berpotensi dapat mendorong akselerasi kinerja komponen ini. Sejalan dengan hal tersebut, semakin tingginya optimisme pelaku usaha ke depan terhadap perkembangan kondisi ekonomi makroregional dan global, serta juga didorong oleh tendensi tetap melandainya tingkat suku bunga kredit perbankan (investasi dan modal kerja) di Provinsi Bali, sebagai respon terhadap penurunan suku bunga *Policy Rate BI* (*BI Rate/BI 7 day Repo Rate*) berpotensi meningkatkan kinerja laju investasi.



Sumber : Survei Konsumen

Grafik 7.2 Indeks Ekspektasi Penghasilan

Sisi Penawaran

Dari sisi penawaran, peningkatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2018, didorong oleh prakiraan peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha utama, yang meliputi antara lain lapangan usaha

pertanian dan lapangan usaha penyediaan akomodasi makan minum, industri pengolahan, perdagangan dan transportasi. Prakiraan peningkatan kinerja pertanian didorong oleh upaya peningkatan produk tanaman pangan dan peternakan serta peningkatan produksi perikanan di tengah perlambatan produksi perkebunan. Sementara itu, meningkatnya kinerja lapangan usaha akomodasi makan minum dan transportasi, didorong oleh adanya perayaan imlek sehingga mendorong peningkatan kunjungan wisman Tiongkok berkunjungan ke Bali pada periode tersebut yang akan diikuti oleh peningkatan frekuensi penerbangan dari dan ke Tiongkok, termasuk *charter flight*. Prakiraan terus meningkatnya aktivitas MICE, seiring dengan persiapan kegiatan *IMF-WB Annual Meeting 2018* dan MICE dari pihak swasta, juga berpotensi menahan laju perlambatan kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi makan minum dan mendorong peningkatan kinerja perdagangan. Sementara itu, kinerja lapangan usaha perdagangan diprakirakan meningkat didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat seiring dengan adanya peningkatan UMP dan tetap terjaganya daya beli konsumen, seiring dengan inflasi yang terjaga dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam level rendah yang stabil, mendorong masih kuatnya permintaan konsumsi pada triwulan I 2018. Potensi peningkatan penghasilan konsumen pada periode triwulan I 2018 (berdasarkan hasil survei konsumen), juga menjadi salah satu pendorong peningkatan kinerja perdagangan. Prakiraan terus meningkatnya aktivitas MICE, seiring dengan persiapan kegiatan *IMF-WB Annual Meeting 2018* dan MICE dari pihak swasta, juga berpotensi menahan laju perlambatan kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi makan minum.

Peningkatan kinerja industri pengolahan, sejalan dengan terus meningkatnya kinerja ekonomi negara mitra dagang Bali yaitu AS dan Australia serta upaya pengembangan pasar alternatif untuk ekspor juga menjadi faktor pendorong peningkatan kinerja lapangan usaha ini. Sejalan dengan itu, potensi terus meningkatnya kunjungan wisman, juga akan mendorong peningkatan permintaan yang pada gilirannya juga akan berdampak pada peningkatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan.

Perkembangan ekonomi Bali ke depan, masih menghadapi tantangan dan risiko perlambatan pada triwulan I 2018, yaitu potensi terjadinya instabilitas geopolitik di Semenanjung Korea berpotensi mempengaruhi kinerja kunjungan wisman dan belanjutnya erupsi Gunung Agung dalam kurun waktu yang lama termasuk pada tahun 2018, akan memberikan dampak pada menurunnya kinerja industri pariwisata akibat potensi dikeluarkannya peringatan larangan berkunjung ke Bali oleh negara-negara asal wisman, sehingga akan mempengaruhi kinerja lapangan usaha yang terkait yaitu akomodasi makan dan minum, transportasi dan perdagangan.

Prakiraan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2018

Dengan mencermati perkembangan ekonomi, prompt indikator dan hasil suvei serta *liaison* terakhir, perekonomian Provinsi Bali untuk keseluruhan tahun 2018, diprakirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2017, yang akan berada dalam kisaran 6,0%-6,40% (yoy), mendekati batas tengah. Dari sisi permintaan, prakiraan peningkatan kinerja didorong oleh meningkatnya kinerja sebagian besar komponen permintaan yaitu konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah serta ekspor.

Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2018, terutama didorong oleh rencana kebijakan tidak akan adanya kenaikan tarif tenaga listrik maupun BBM bersubsidi sepanjang tahun 2018, , berpotensi menahan daya beli masyarakat. Kondisi ini akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat, sehingga berpotensi mendorong peningkatan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2018. Selain itu, seiring dengan peningkatan UMP yang lebih tinggi pada tahun

2018 dan terkendalinya tingkat inflasi mendorong konsumen untuk meningkatkan laju konsumsinya.

Akselerasi kinerja investasi pada tahun 2018, terutama didorong oleh meningkatnya kinerja investasi bangunan yang bersumber investasi pemerintah dan swasta sejalan dengan pembangunan beberapa proyek dalam rangka persiapan IMF-WB AM 2018. Selain itu, terus berlanjutnya penurunan tingkat suku bunga kredit perbankan, akan mendorong peningkatan akselerasi investasi. Upaya pelaku usaha perhotelan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan peningkatan kualitas pelayaanan melalui peningkatan investasi untuk bangunan dalam rangka persiapan IMF-WB AM 2018, juga mendorong akselerasi kinerja komponen inevstasi pada tahun 2018.

Telah selesainya penyesuaian personil terkait penataan OPD pada tahun 2017 dan upaya akselerasi percepatan belanja daerah dan penyelesaian beberapa proyek infrastruktur termasuk dalam rangka menghadapi IMF-WB AM 2018, akan mendorong akselerasi peningkatan kinerja konsumsi pemerintah. Sejalan dengan itu, potensi peningkatan kinerja pendapatan sejalan dengan membaiknya kinerja ekonomi dan meningkatnya kinerja konsumsi masyakarakat termasuk dalam membeli kendaraan baru sehingga akan mendorong peningkatan pajak daerah (PAD), berpotensi mendorong peningkatan kinerja konsumsi pemerintah pada tahun 2018.

Potensi terus meningkatnya kunjungan wisman, sejalan dengan peningkatan upaya promosi, pengembangan produk dan destinasi wisata termasuk *Bali and Beyond*, dan pengembangan pasar alternatif yang dibarengi dengan peningkatan pelayanan, akan mendorong peningkatan kinerja eskpor khususnya jasa. Sejalan dengan itu, pelaksanaan kegiatan IMF-WB AM 2018, juga berpotensi akan mendorong peningkatan kinerja komponen ekspor, seiring dengan rencana peserta yang akan hadir mencapai 15.000 orang. Membaiknya kinerja ekonomi Amerika Serikat dan Australia, sebagai mitra dagang utama untuk ekspor barang Bali menjadi faktor stimulus yang juga akan menjadi pendorong peningkatan ekspor Bali pada tahun 2018.

Dari sisi penawaran, prakiraan peningkatan kinerja ekonomi Bali bersumber oleh peningkatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, akomodasi makan dan minum, perdagangan serta informasi dan komunikasi. Peningkatan kinerja industri pengolahan sejalan dengan peningkatan kinerja ekspor, didorong oleh membaiknya kinerja ekonomi mitra dagang utama Bali (AS dan Australia), upaya pengembangan pasar alternatif ekspor dan pelaksanaan kegiatan IMF-WB AM 2018.

Peningkatan kinerja transportasi dan pergudangan serta akomodasi makan dan minum pada tahun 2018, didorong oleh potensi terus meningkat

Tabel 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali

Negara	Pangsa Ekspor Bali TW III 2017 (%)	Pertumbuhan Ekonomi			
		2015	2016	2017**	2018**
USA	28	2.9	1.5	2.2	2.0
Japan	6	1.1	1.0	1.5	0.7
Australia	13	2.4	2.5	2.2	2.9
Singapore	10	1.9	2	2.9	2.6
Hongkong	5	2.4	2.0	3.5	2.7
Tiongkok	5	6.9	6.7	6.8	6.5
World Output		3.4	3.2	3.6	3.7

Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF) Oktober 2017

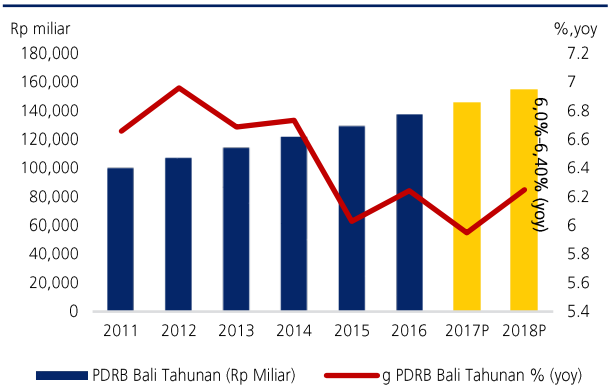
Keterangan :

***) angka proyeksi IMF*

jumlah kunjungan wisman sejalan dengan peningkatan upaya promosi, pengembangan pasar alternatif wisman (India, Inggris dan Jerman) dan pengembangan *Bali and Beyond*. Peningkatan kinerja kedua lapangan usaha ini, juga akan didorong oleh adanya pelaksanaan kegiatan IMF-WB AM 2018 yang akan dihadiri oleh 15.000 peserta dari 189 negara, sehingga akan mendorong akselerasi kinerja kedua lapangan usaha tersebut pada tahun 2018. Kondisi ini juga akan mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha informasi dan komunikasi, karena banyak aktivitas dan kegiatan yang membutuhkan sarana dan jaringan komunikasi yang melibatkan banyak peserta.

Peningkatan kinerja perdagangan, didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat sejalan dengan kondisi inflasi yang terkendali dan meningkatnya UMP serta tidak adanya rencana kenaikan TTL dan BBM bersubsidi oleh pemerintah. Selain itu, potensi terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman dan pelaksanaan kegiatan IMF-WB AM 2018, juga akan menjadi faktor pendorong peningkatan kinerja lapangan usaha ini pada tahun 2018.

Meskipun demikian, masih terdapat potensi terjadinya perlambatan ekonomi, terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung, bahkan dengan perkembangan terkini telah mulai terjadi erupsi yang dikhawatirkan akan terus berlanjut pada tahun 2018. Kondisi ini dapat berdampak pada dikeluarkannya larangan untuk berkunjung ke Bali, oleh beberapa negara asal wisman sehingga akan menahan laju kinerja ekonomi Bali. Selain itu, bila erupsi berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, akan berpotensi menyebabkan ditundanya pelaksanaan kegiatan IMF-WB AM 2018 di Bali, menjadi tahun 2019. Hal ini tentunya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ekonomi Bali secara keseluruhan pada tahun 2018, karena besarnya potensi nilai ekonomi yang tidak jadi memberikan kontribusi pada tahun 2018.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
Keterangan : p) Angka Proyeksi Bank Indonesia

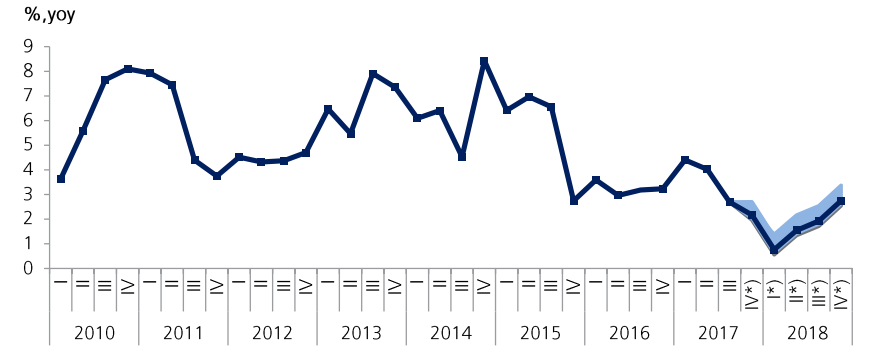
Grafik 7.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahunan

7.2. INFLASI BALI TRIWULAN I 2018 DAN TAHUN 2018

Inflasi Bali triwulan I 2018 diperkirakan melandai pada kisaran 0,56%-0,96% (yoy). Optimisme terjaganya inflasi pada periode tersebut didukung oleh terjaganya pasokan komoditas pangan yang telah diantisipasi oleh TPID se-Provinsi Bali. Selain itu, sesuai dengan pola musimannya, konsumsi di awal tahun cenderung menurun terutama konsumsi pemerintah sehingga tekanan inflasi cenderung minim. Meskipun demikian, masih terdapat potensi tekanan inflasi antara lain tendensi kenaikan curah hujan yang menghambat kinerja produksi komoditas pangan hortikultura serta rencana kenaikan beberapa kelompok *administered prices* salah satunya cukai rokok.

Secara keseluruhan inflasi Bali tahun 2018 diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam kisaran 2,55%-2.95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan perkiraan inflasi Bali tahun 2017 yang sebesar 1,97%-2,37 (yoy). Perkiraan tersebut mendukung tercapainya target inflasi nasional yang sebesar 3,5%±1% (yoy) sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/ PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi.

Berdasarkan disagregasinya, secara tahunan, peningkatan tekanan inflasi pada tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
*Keterangan : *) Angka Proyeksi BI*

Grafik 7.4 Proyeksi Inflasi Bali

terutama bersumber dari kelompok *volatile food* dan kelompok *administered prices* cenderung mengalami peningkatan. Di sisi lain, tekanan kelompok *core inflation* diperkirakan masih stabil. Tendensi peningkatan tekanan inflasi kelompok *volatile food* tersebut seiring dengan perkiraan peningkatan kinerja industri pariwisata yang berpotensi mendorong peningkatan permintaan terhadap komoditas pangan. Dari sisi produksi, anomali cuaca masih membayangi kinerja produksi pangan di tahun 2018. Sementara, dari kelompok *administered prices*, risiko peningkatan inflasi bersumber dari kenaikan harga BBM dan tarif listrik mengikuti pengerakan harga minyak dunia serta rencana kenaikan cukai rokok di 2018. Meskipun demikian, tendensi peningkatan tekanan inflasi telah diantisipasi oleh TPID se-Provinsi Bali mengacu pada *roadmap* pengendalian inflasi serta didukung komitmen & koordinasi TPID dalam menjaga ketersediaan pangan yang antara lain:

1. Peningkatan produksi tabama dengan upaya intensifikasi produk pangan;
2. Upaya TPID menjaga ketersediaan komoditi pangan di seluruh wilayah Provinsi Bali melalui operasi pasar (beras) dan pasar murah; dan
3. Penyediaan data harga di tingkat produsen sebagai *early warning system*, diharapkan dapat menahan volatilitas harga kelompok *volatile food*.

Di sisi lain, perkiraan stabilnya tekanan inflasi kelompok inti didorong oleh mulai membaiknya nilai tukar Rupiah serta ekspektasi inflasi yang terjaga. Terkendalinya tekanan inflasi inti didukung oleh terjaganya ekspektasi masyarakat dan masih kuatnya sisi penawaran dalam merespon permintaan.

Daftar Singkatan

Administered price (AP)	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/ kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)
Cash Inflows	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu
Cash Outflows	Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
Ekspor	Keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
Faktor Non Fundamental	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (*volatile foods*), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (*administered price*)
Feronikel	Hasil olahan nikel mentah (*ore nickel*) dengan kadar antara 20-30% Ni dan digunakan sebagai bahan baku pembuatan baja dan *stainless steel*
Financing to Deposit Ratio (FDR)	Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank konvensional

Impor	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil
Imported inflation	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal)
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*)
Inflasi IHK	Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Inflasi inti	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental (merupakan Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *administered price*s dan *volatile food*)
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Kliring	Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
Kualitas kredit	Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
Loan to Deposit Ratio (LDR)	Ratio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.

Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
mtm (*month to month*)	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Net Cashflows	Selisih bersih antara jumlah *cash inflows* dan *cash outflows* pada periode yang sama yang terdiri dari: *net cash outflows* bila *cash outflows* lebih tinggi dibandingkan dengan cash *inflow*s, dan *net inflow*s bila terjadi sebaliknya
NPI	*Nickel Pig Iron*. Hasil olahan *ore nickel* dengan kandungan 5-10% Ni.
Non Performing Loan (NPL)	Besarnya jumlah kredit bermasalah (kualitas kurang lancar, diragukan dan macet) pada suatu Bank dibandingkan dengan total keseluruhan kreditnya
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. 1. PDRB atas dasar harga berlaku Penjumlahan nilai tambah bruto yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian 2. PDRB atas dasar harga konstan Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perceived risk	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara.
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.
qtq (*quarter to quarter*)	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".
Saldo Bersih Tertimbang (SBT)	Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.

Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (*real time*) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran
Volatile food	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
West Texas Intermediate	Jenis minyak bumi yang menjadi acuan untuk transaksi perdagangan minyak dunia.
yoy (*year on year*)	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab
Causa Iman Karana

Koordinator Penyusun
Azka Subhan A.

Editor
Teguh Setiadi

Tim Penulis
Umran Usman
Wilda Tri Farizqi
Putriana Nurman
Michael Christian
Ni Luh Sukesi

Kontributor
Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan
Tim Pemberdayaan Ekonomi
Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Produksi dan Distribusi
Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveillance

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi
Jl. Letda Tantular No. 4
Denpasar – Bali, 80234
Tel. (0361) 248982
Fax. (0361) 222988



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI
Jl. Letda Tantular No. 4, Denpasar - 80234
Telp : 62-361-248982, Fax : 62-361-248993 - 222988,
Website : http://www.bi.go.id